



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT



Ir. ASRI ARMAN, M.T
BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

SELFINUS KAINAMA, S.Pd
WAKIL BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

RPJMD

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT



<<<<

2025-2029

>>>>



<https://sbbkab.go.id>



Ir. ASRI ARMAN, M.T
BUPATI SERAM BAGIAN BARAT



SELFINUS KAINAMA, S.Pd
WAKIL BUPATI SERAM BAGIAN



**BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
PROVINSI MALUKU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2025**

**TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025 Nomor 196).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAR DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

dan

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat yang selanjutnya disingkat dengan Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025-2045, yang selanjutnya disebut RPJPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan RPJMN terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

12. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
13. Rancana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat, yang selanjutnya disingkat RTRW, adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2010-2030.
14. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program.
15. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemertaan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
16. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
17. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
18. Misi Daerah adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
19. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
20. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
21. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
22. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
23. Program Pembangunan Daerah adalah Program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
24. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.
25. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien dan efektif.

26. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah antara lain unsur DPRD kabupaten, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas tokoh masyarakat kabupaten/desa, dunia usaha/investor, dan pemerintah kabupaten.

BAB II RPJMD

Pasal 2

- (1) Bupati melalui Bappeda menyusun RPJMD.
- (2) RPJMD merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah terpilih hasil pemilihan Bupati Tahun 2024.
- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, strategi, Arah Kebijakan, Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, serta Program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
- (4) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. bab I pendahuluan;
 - b. bab II gambaran umum daerah;
 - c. bab III visi, misi, dan program prioritas pembangunan daerah;
 - d. bab IV program perangkat daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah;
 - e. bab V penutup.
- (5) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai:

- a. landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029;
- b. pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah sesuai periode RPJMD;
- c. pedoman dalam penyusunan RKPD sesuai periode RPJMD;
- d. acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai periode RPJMD; dan
- e. instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai periode RPJMD.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Bupati melalui Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD.
- (2) Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pengendalian dan Evaluasi terhadap perumusan kebijakan RPJMD;
 - b. Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD mencakup pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil RPJMD.
- (3) Tata cara Pengendalian dan Evaluasi RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PERUBAHAN RPJMD

Pasal 5

- (1) Bupati melalui Bappeda melakukan Perubahan RPJMD.
- (2) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil Pengendalian dan Evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil Pengendalian dan Evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (3) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (4) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, mencakup terjadinya:
 - a. bencana alam;
 - b. goncangan politik;
 - c. krisis ekonomi;
 - d. konflik sosial budaya;
 - e. gangguan keamanan;
 - f. pemekaran Daerah; atau
 - g. perubahan kebijakan nasional.
- (5) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan RKPD dan penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Bupati Nomor 3.a Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2022 Nomor 0263.a), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Ditetapkan di Piru
pada tanggal 4 Desember 2025

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

ttd

ASRI ARMAN

diundangkan di Piru
pada tanggal 4 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT,

ttd

LEVERNE ALVIN TUASUUN

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT



DANIEL J. SOUKOTTA, SH
Pembina / IV.a
NIP. 196912102003121006

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2025
NOMOR 199.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025–2029.

RPJMD ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu lima tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program prioritas, serta indikator kinerja utama pembangunan daerah. Penyusunan RPJMD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025–2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2025–2029.

Penyusunan dokumen ini dilakukan secara partisipatif melalui proses konsultasi, koordinasi, dan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, baik dari unsur pemerintah, dunia usaha, akademisi, maupun masyarakat. Dengan demikian, RPJMD ini tidak hanya mencerminkan aspirasi pemerintah daerah, tetapi juga merupakan wujud komitmen bersama untuk mewujudkan pembangunan Kabupaten Seram Bagian Barat yang lebih maju, mandiri, sejahtera, dan berkelanjutan.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, pemikiran, dan kontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga RPJMD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025–2029 dapat menjadi pedoman bersama dalam pelaksanaan pembangunan daerah, serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Seram Bagian Barat.

Piru, 4 Desember 2025

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT



Dr. ASRI ARMAN, MT

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	3
1.3 Hubungan Antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya	7
1.4 Maksud dan Tujuan	12
1.5 Sistematika Penulisan	13
BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH	
2.1 Gambaran Umum Kondisi Seram Bagian Barat	16
2.2 Gambaran Keuangan Daerah	174
2.3 Permasalahan dan Isu Strategis	204
BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	
3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	238
3.2 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah	256
BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	
4.1 Program Perangkat Daerah	314
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	351
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan Substansial	385
5.2 Kaidah Pelaksanaan	385
5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi	385
5.4 Penutup	386

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1 Ibu Kota Kecamatan, Jumlah Desa dan Dusun di Kabupaten Seram Bagian Barat	17
Tabel 2.2 Luas Wilayah menurut Topografi Wilayah di Kabupaten Seram Bagian Barat.....	19
Tabel 2.3 Luas Wilayah dan Karakteristik Morfologi Wilayah Kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Barat.....	20
Tabel 2.4 Rata-Rata Komponen Iklim Tahun 2024 Kabupaten Seram Bagian Barat.....	25
Tabel 2.5 Sebaran Curah Hujan Kabupaten Seram Bagian Barat.....	26
Tabel 2.6 Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan (JTB) dan Tingkat Pemanfaatan (TP).....	28
Tabel 2.7 Hasil Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020-2024.....	29
Tabel 2.8 Luas Tanam dan Total Produksi Tanaman Perkebunan di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020-2024.....	32
Tabel 2.9 Luas Tanam dan Total Produksi Tanaman Pangan di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020-2024.....	34
Tabel 2.10 Data Objek Pariwisata di Kabupaten Seram Bagian Barat.....	35
Tabel 2.11 Energi listrik yang bersumber dari PT. PLN di Kabupaten Seram Bagian Barat.....	44
Tabel 2.12 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020-2024.....	50
Tabel 2.13 Timbulan Sampah di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2023-2024.....	52
Tabel 2.14 Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim di Kabupaten Seram Bagian Barat.....	54
Tabel 2.15 Indeks Kerentanan Perubahan Iklim Kabupaten Seram Bagian Barat.....	55
Tabel 2.16 Potensi Emisi Karbon dan Cadangan Karbon Berdasarkan Tutupan Lahan di Kabupaten Seram Bagian Barat.....	56
Tabel 2.17 Indeks SPBE Kabupaten Seram Bagian Barat, 2019-2024.....	126
Tabel 2.18 Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Seram Bagian Barat, Tahun 2023-2024.....	128
Tabel 2.19 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Seram Bagian Barat, Tahun 2023-2024.....	129
Tabel 2.20 Indikator Proxi Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban di Kabupaten Seram Bagian Barat, 2019-2024.....	132
Tabel 2.21 Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020-2024.....	137
Tabel 2.22 Rincian Kerjasama Daerah yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dengan Pihak Lain Diluar Pemerintah Daerah.....	165

Tabel 2.23	Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020 – 2024 (Rp.).....	177
Tabel 2.24	Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020 – 2024.....	186
Tabel 2.25	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat 5 Tahun Terakhir (2020– 2024).....	190
Tabel 2.26	Neraca Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020-2024.....	191
Tabel 2.27	Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Seram Bagian Barat, Tahun 2020 – 2024.....	200
Tabel 2.28	Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Seram Bagian Barat, Tahun 2025 – 2029.....	201
Tabel 2.29	Defisit Riil Anggaran Kabupaten Seram Bagian Barat, 2020 – 2024.....	201
Tabel 2.30	Komposisi Penerimaan Pembiayaan Sebagai Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Seram Bagian Barat, Tahun 2020 – 2024.....	202
Tabel 2.31	Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, 2025 – 2029.....	203
Tabel 2.32	Isu Global dan Tantangannya.....	220
Tabel 2.33	Rumusan Isi Strategis Daerah.....	231
Tabel 3.1	Rumusan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025-2029	248
Tabel 3.2	Sasaran Utama Pembangunan Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025-2029	263
Tabel 3.3	Strategi Pembangunan Daerah yang Disinkronkan dengan Isu Strategis yang Ditetapkan	265
Tabel 3.4	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029	269
Tabel 3.5	Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025-2029	291
Tabel 3.6	Program Prioritas dan Indikasi Kegiatan Prioritas RPJMD Kabupaten Seram Bagian Barat 2025-2029	299
Tabel 3.7	Pentahapan RPJMD Kabupaten Seram Bagian Barat 2025-2029	312
Tabel 4.1	Klasifikasi Urusan Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah Pelaksana dan Jumlah Program yang Dilaksanakan	314
Tabel 4.2	Program Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025-2029	318
Tabel 4.3	Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025-2030	351
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Daerah (IKD) Tahun 2025-2030	353

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1.1 Keterkaitan Antara Dokumen Perencanaan Pusat dan Daerah	7
Gambar 1.2 Alur Dokumen RPJMD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025-2029 dan RTRW Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2022-2024	9
Gambar 1.3 Alur Dokumen RPJMD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025-2029 dan Rencana Strtegis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	11
Gambar 1.4 Alur Dokumen RPJMD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	12
Gambar 2.1 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Seram Bagian Barat...	17
Gambar 2.2 D3TLH Penyedia Bahan Pangan di Kabupaten Seram Bagian Barat	41
Gambar 2.3 D3TLH Penyedia Air Bersih di Kabupaten Seram Bagian Barat.....	42
Gambar 2.4 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Barat 2019-2024.....	46
Gambar 2.5 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kabupaten SBB, 2019-2024.....	47
Gambar 2.6 Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum di Kabupaten Seram Bagian Barat, 2019-2023.....	48
Gambar 2.7 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak di Kabupaten Seram Bagian Barat, 2020-2024.....	51
Gambar 2.8 Grafik Persentase Potensi Emisi Karbon Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Barat.....	57
Gambar 2.9 Peta Bahaya Bencana di Kabupaten Seram Bagian Barat.....	59
Gambar 2.10 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Seram Bagian Barat.....	62
Gambar 2.11 Perkembangan Penduduk Kabupaten Seram Bagian Barat, 2019-2024.....	64
Gambar 2.12 Proyeksi Penduduk Kabupaten Seram Bagian Barat, 2025-2029.....	65
Gambar 2.13 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Seram Bagian Barat, 2019-2024.....	68
Gambar 2.14 Persentase Tingkat Kemiskinan dan Garis Kemiskinan di Kabupaten Seram Bagian Barat, 2019-2024.....	69
Gambar 2.15 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Seram Bagian Barat, 2019-2024.....	70
Gambar 2.16 PDRB per Kapita Kabupaten Seram Bagian Barat, 2019-2024	71
Gambar 2.17 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten SBB, 2019-2024.....	73
Gambar 2.18 Rasio Gini Kabupaten Seram Bagian Barat, 2019-2024.....	74
Gambar 2.19 Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten SBB, 2019-	

	Hal
2024.....	76
Gambar 2.20 Usia Harapan Hidup di Kabupaten Seram Bagian Barat, 2019-2024.....	77
Gambar 2.21 Prevalensi Stunting di Kabupaten Seram Bagian Barat, 2019-2024.....	79
Gambar 2.22 RLS dan HLS di Kabupaten Seram Bagian Barat, 2019-2024	80
Gambar 2.23 Capaian Literasi Siswa di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2024.....	82
Gambar 2.24 Capaian Numerasi Siswa di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2024.....	83
Gambar 2.25 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat di Kabupaten SBB, 2023-2024.....	84
Gambar 2.26 Indeks Literasi Digital Provinsi Maluku, Tahun 2019-2024.....	86
Gambar 2.27 Indeks Masyarakat Digital Kabupaten Seram Bagian Barat, 2022-2024.....	84
Gambar 2.28 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.....	87
Gambar 2.29 Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Maluku, 2021-2024.....	89
Gambar 2.30 Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Maluku, 2019-2023.....	90
Gambar 2.31 Indeks Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Barat, 2022-2023.....	91
Gambar 2.32 Indeks Kualitas Keluarga Provinsi Maluku, 2020-2023.....	92
Gambar 2.33 IBANGGA Kabupaten Seram Bagian Barat, 2021-2024.....	94
Gambar 2.34 Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Seram Bagian Barat, 2019-2024.....	95
Gambar 2.35 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Seram Bagian Barat, 2019-2024.....	96
Gambar 2.36 Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten SBB, 2019-2024...	97
Gambar 2.37 Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi Maluku, 2019-2023...	98
Gambar 2.38 Angka Ketergantungan di Kabupaten Seram Bagian Barat, 2019-2024.....	100
Gambar 2.39 Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten SBB, 2019-2024	101
Gambar 2.40 Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum Kabupaten SBB, 2019-2024.....	102
Gambar 2.41 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten SBB, 2019-2024.....	104
Gambar 2.42 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, 2021-2024.....	106
Gambar 2.43 Indeks Ekonomi Hijau Provinsi Maluku, 2019-2023.....	107
Gambar 2.44 Indeks Pembangunan TIK Provinsi Maluku Tahun 2019-2023..	110
Gambar 2.45 Pembentukan Modal Tetap Bruto di Kabupaten SBB, 2019-2024.....	111
Gambar 2.46 Net Ekspor Barang dan Jasa di Kabupaten SBB, 2019-2024...	112
Gambar 2.47 Pilar Infrastruktur (IDSD) Kabupaten Seram Bagian Barat,	

	Hal
2022-2024.....	114
Gambar 2.48 Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak di Kabupaten SBB, 2020-2023.....	116
Gambar 2.49 Persentase Desa Mandiri di Kabupaten SBB, 2022-2024.....	117
Gambar 2.50 Rata-rata Capaian IDM di Kabupaten SBB, 2022-2024.....	119
Gambar 2.51 Capaian IDM dan Dimensi Penyusunnya pada setiap Wilayah Kecamatan di Kabupaten SBB, 2024.....	119
Gambar 2.52 Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Kabupaten SBB, 2019-2023.....	121
Gambar 2.53 Pilar Stabilitas Ekonomi Makro (IDSD) Kabupaten SBB, 2022-2024.....	123
Gambar 2.54 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten SBB, 2020-2024.....	124
Gambar 2.55 Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Maluku, 2019-2023.....	132
Gambar 2.56 Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, 2024.....	136
Gambar 2.57 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2021-2024.....	163
Gambar 2.58 Lokasi Prioritas Pembangunan RPJMN 2025-2029 di Provinsi Maluku.....	170
Gambar 2.59 Proyek Strategis Nasional (PSN) yang Dilaksanakan di Provinsi Maluku.....	172
Gambar 2.60 Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat 2020 – 2024.....	175
Gambar 2.61 Perkembangan Masing-masing Unsur Pendapatan Daerah di Kabupaten Seram Bagian Barat, Tahun 2020 – 2024.....	176
Gambar 2.62 Perkembangan Kontribusi Sumber PAD Terhadap PAD Kabupaten Seram Bagian Barat, 2020 – 2024.....	179
Gambar 2.63 Perkembangan Kontribusi Sumber Pendapatan Transfer Terhadap Total Pendapatan Transfer.....	180
Gambar 2.64 Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, 2020 - 2024 (Rp.)	181
Gambar 2.65 Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, 2020 – 2024.....	182
Gambar 2.66 Perkembangan Belanja Operasi Kabupaten Seram Bagian Barat, 2020 – 2024.....	183
Gambar 2.67 Perkembangan Belanja Modal Kabupaten Seram Bagian Barat, 2020 – 2024.....	184
Gambar 2.68 Perkembangan Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Seram Bagian Barat, Tahun 2020-2024.....	187
Gambar 2.69 Perkembangan SiLPA Tahun Berjalan Kabupaten Seram Bagian Barat, 2020 – 2024 (Rp.)	188
Gambar 2.70 Perkembangan Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Pegawai) Kabupaten Seram Bagian Barat, 2020 – 2024.....	198
Gambar 2.71 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	

		Hal
	Kabupaten Seram Bagian Barat, Tahun 2020 – 2024.....	199
Gambar 2.72	Permasalahan Unsur Kewilayahan Kabupaten Seram Bagian Barat.....	219
Gambar 3.1	Penyelarasan Misi RPJMD Kabupaten Seram Bagian Barat dengan Misi RPJMD Provinsi Maluku	245

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilaksanakan secara terencana, menyeluruh, dan berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, dokumen perencanaan pembangunan memegang peran penting sebagai instrumen yang mengarahkan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan agar terukur, terintegrasi, serta sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah. Oleh karena itu, setiap daerah wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah secara sistematis, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menegaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Ketentuan ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta berbagai regulasi turunan, termasuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menjadi pedoman teknis penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Lebih lanjut, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 menggarisbawahi pentingnya sinkronisasi perencanaan antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Dalam kerangka pembangunan jangka panjang, penyelarasan antara dokumen daerah dan nasional merupakan hal yang mutlak. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Bersama Nomor 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 yang menekankan perlunya harmonisasi RPJPD dengan RPJPN 2025–2045. Visi Indonesia Emas 2045, yaitu *"Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan"*, menjadi pijakan nasional. Pada level provinsi, Visi Maluku Emas 2045 dirumuskan sebagai *"Maluku Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan Berbasis Sumber Daya Kepulauan"*. Selaras dengan itu, Kabupaten Seram Bagian Barat menetapkan Visi RPJPD: *"Seram Bagian*

Barat Berbudaya, Maju, dan Berkelanjutan". Dengan demikian, posisi strategis Kabupaten Seram Bagian Barat dalam mendukung pembangunan Maluku dan Indonesia menuntut adanya RPJMD yang mampu menjawab tantangan masa depan sekaligus memanfaatkan peluang pembangunan secara optimal.

Capaian pembangunan dalam dua dekade terakhir menunjukkan berbagai kemajuan, namun masih diperlukan penguatan yang lebih signifikan. Perubahan dinamika global, nasional, dan regional, seperti perubahan iklim, transformasi digital, ketahanan pangan, serta persaingan ekonomi global, menuntut langkah pembangunan yang progresif, adaptif, dan berorientasi pada keberlanjutan. Oleh karena itu, RPJMD 2025–2029 harus disusun dengan pendekatan yang berbasis data, indikator yang valid, serta prinsip pembangunan berkelanjutan.

Selain pendekatan teknokratis, penyusunan RPJMD juga mengedepankan pendekatan partisipatif, politis, serta gabungan atas-bawah dan bawah-atas (*top-down dan bottom-up*). Prinsip *holistik, integratif, tematik, dan spasial* (HITS) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional juga menjadi dasar utama. Hal ini memastikan bahwa pembangunan dilaksanakan secara menyeluruh, melibatkan pemangku kepentingan, serta terintegrasi dalam satu kesatuan wilayah.

Dalam aspek lingkungan hidup, penyusunan RPJMD Kabupaten Seram Bagian Barat 2025–2029 wajib memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai amanat Permendagri Nomor 7 Tahun 2018. KLHS berfungsi memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan terintegrasi ke dalam kebijakan, rencana, dan program, serta meminimalisasi dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Lebih jauh, RPJMD Kabupaten Seram Bagian Barat 2025–2029 juga menjadi tindak lanjut atas berakhirnya RPJMD periode sebelumnya (2018–2022) serta transisi dari RPJMD 2020–2024 yang menjadi bagian penting dari siklus perencanaan daerah. Sesuai dengan hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, pasangan Ir. Asri Arman, MT, dan Selfinus Kainama, S.Pd telah terpilih dan resmi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat masa jabatan 2025–2029. Dokumen RPJMD ini sekaligus menjadi penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih, serta pedoman strategis bagi seluruh perangkat daerah dalam merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan untuk lima tahun ke depan.

Selain itu, penyusunan RPJMD juga berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas publik. Dokumen ini merupakan wujud kontrak sosial antara pemerintah daerah dan masyarakat, yang mencerminkan janji politik kepala daerah terpilih serta harapan masyarakat terhadap arah pembangunan ke depan. Dengan demikian, RPJMD tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga mengandung legitimasi moral dan politik yang harus diwujudkan dalam capaian nyata.

Secara substantif, RPJMD Kabupaten Seram Bagian Barat 2025–2029 harus mengakomodasi isu-isu strategis jangka menengah yang dihadapi daerah, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ketahanan pangan, optimalisasi potensi sumber daya alam, pengembangan pariwisata berbasis budaya dan kepulauan, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Di sisi lain, tantangan struktural berupa keterbatasan infrastruktur, kesenjangan wilayah, dan kerentanan terhadap bencana alam juga perlu direspons dengan strategi yang tepat dan berbasis data.

Dengan adanya dokumen ini, arah pembangunan Kabupaten Seram Bagian Barat ke depan akan semakin jelas dan terukur. RPJMD 2025–2029 diharapkan dapat menjadi roadmap pembangunan daerah yang mampu menjembatani kepentingan jangka panjang sebagaimana dituangkan dalam RPJPD dengan kebutuhan jangka menengah yang realistis dan kontekstual. Hal ini menjadi modal penting dalam mewujudkan masyarakat Seram Bagian Barat yang maju, mandiri, sejahtera, serta berdaya saing di tingkat regional maupun nasional.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum yang dipergunakan dalam penyusunan Rancangan RPJMD Kabupaten Seram Bagian Barat 2025-2029 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan

- dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2025-2045;
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 th 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4816);

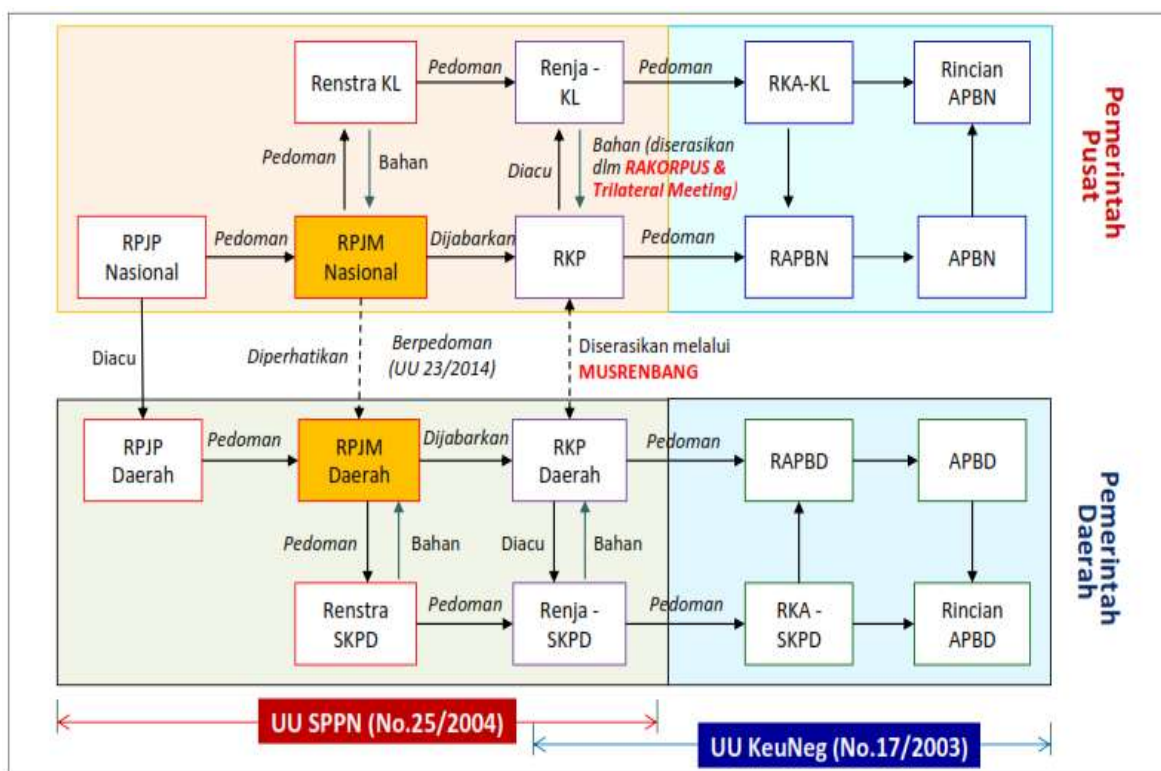
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
19. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

- Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 -5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan infentarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.
 28. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045;
 29. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 30. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Maluku Tahun 2025-2045;
 31. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2022 Sampai Dengan Tahun 2042;
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 2 Tahun 2025 Tentang RPJPD Kabupaten Seram Bagian Barat 2025-2045.

1.3. Hubungan Antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya

Merujuk pada amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan yang bersifat makro dan strategis. RPJMD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025–2029 memuat visi, misi, arah kebijakan, serta sasaran pokok pembangunan daerah, yang penyusunannya dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Untuk menjamin konsistensi dan keterpaduan pembangunan, RPJMD ini disusun dengan mengacu pada RPJMN 2025–2029, RPJMD Provinsi Maluku 2025–2029, serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten. Dengan demikian, RPJMD Kabupaten Seram Bagian Barat menjadi instrumen penting dalam memastikan keterkaitan dan sinkronisasi antara dokumen perencanaan pusat dan daerah.

Gambar 1.1. Keterkaitan Antara Dokumen Perencanaan Pusat dan Daerah



Sumber: Bapenas 2017

1.3.1. RPJMD dengan RPJPD

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025–2045 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 20 tahun yang memuat visi pembangunan daerah jangka panjang serta arah kebijakan strategis yang berkesinambungan. Dokumen ini menjadi landasan utama bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan lintas periode pemerintahan, sehingga setiap rencana pembangunan jangka menengah yang disusun harus senantiasa mengacu pada visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang tersebut.

RPJMD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025–2029 sebagai dokumen perencanaan lima tahunan disusun berdasarkan tahapan pelaksanaan RPJPD. Dengan demikian, RPJMD berfungsi sebagai penjabaran lebih operasional dari RPJPD pada tahap tertentu, yang berisi sasaran pembangunan menengah daerah, arah kebijakan, dan program prioritas yang harus dicapai dalam periode lima tahun. Hal ini memastikan bahwa visi pembangunan jangka panjang dapat secara bertahap diwujudkan melalui perencanaan menengah yang terukur.

Keterkaitan antara RPJMD dan RPJPD dapat dilihat dalam konsistensi visi pembangunan. Visi RPJMD 2025–2029 haruslah merupakan turunan dan penjabaran dari visi RPJPD 2025–2045, sehingga tidak menimbulkan arah kebijakan yang berbeda maupun kontradiktif. Oleh karena itu, proses penyusunan RPJMD dilakukan dengan memperhatikan tahapan pembangunan dalam RPJPD, baik dalam hal pencapaian sasaran strategis maupun dalam penyusunan indikator kinerja pembangunan daerah.

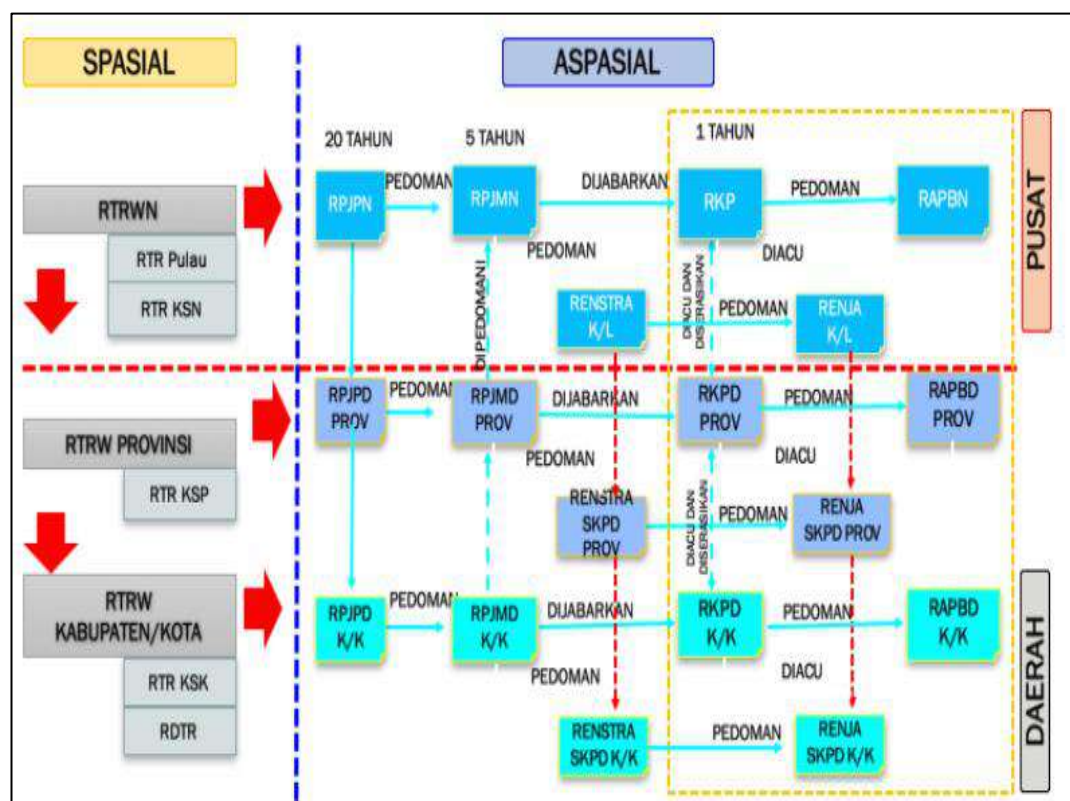
Dengan hubungan yang erat tersebut, RPJMD menjadi instrumen penting dalam mengawal pencapaian target jangka panjang yang ditetapkan dalam RPJPD. Kesesuaian arah kebijakan dalam RPJMD dengan tahapan RPJPD akan memperkuat kesinambungan pembangunan daerah, mencegah terjadinya tumpang tindih kebijakan, serta memastikan setiap kebijakan lima tahunan benar-benar menjadi bagian integral dari pembangunan jangka panjang Kabupaten Seram Bagian Barat.

1.3.2. RPJMD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah

Penyusunan RPJMD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025-2029 memperhatikan dan mempertimbangkan pola ruang dan struktur ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Nasional, RTRW Maluku dan RTRW Kabupaten Seram Bagian Barat.

Tujuan penataan ruang Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2022-2042 adalah untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan, sebagai bagian dari gugusan kepulauan, dengan pembangunan berbagai sektor dalam masyarakat berbudaya Maluku yang luhur. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka RPJMD Kabupaten Seram Bagian Barat memuat strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan dan pusat kegiatan sebagaimana tujuan dari RTRW Kabupaten Seram Bagian Barat.

Gambar 1.2. Alur Dokumen RPJMD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025-2029 dan RTRW Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2022-2042



Sumber: Kemendagri, 2017

1.3.3. RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah

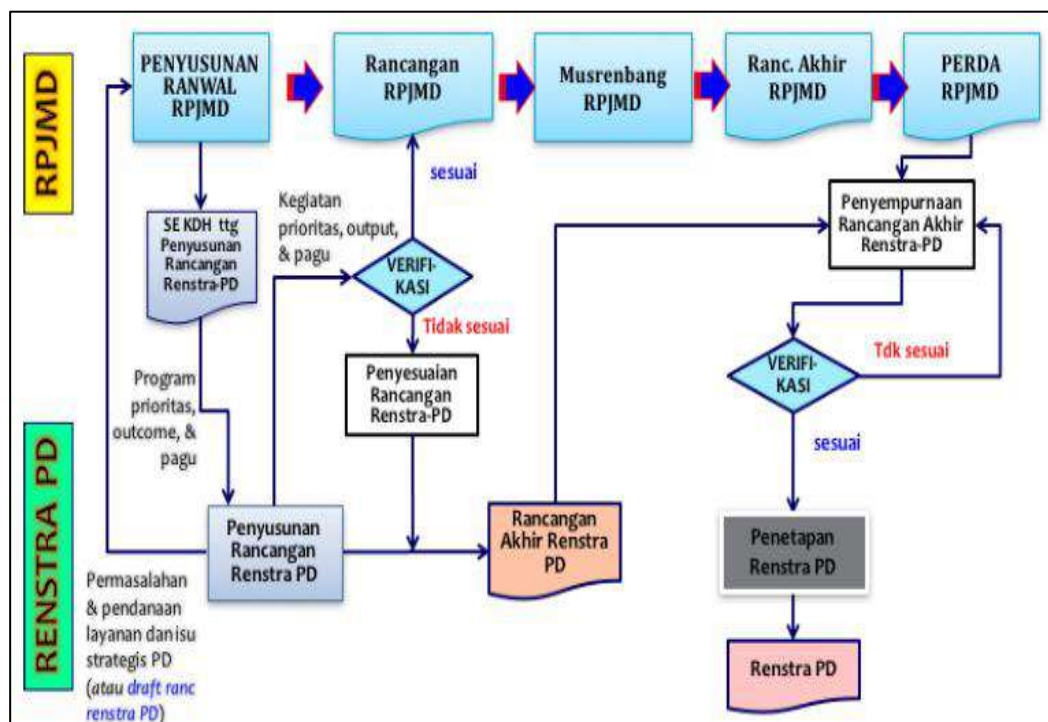
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang bersifat makro, yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas pembangunan daerah. Dokumen ini menjadi pedoman utama dalam penyelenggaraan pembangunan daerah selama lima tahun. Dalam pelaksanaannya, RPJMD perlu dijabarkan lebih lanjut ke dalam dokumen perencanaan sektoral yang lebih rinci, yaitu Rencana Strategis (Renstra) masing-masing perangkat daerah.

Renstra perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang disusun oleh setiap perangkat daerah dengan mengacu pada RPJMD. Hubungan antara keduanya bersifat hierarkis, di mana RPJMD memberikan arah kebijakan pembangunan secara makro, sementara Renstra perangkat daerah menguraikannya ke dalam tujuan, sasaran, indikator, program, dan kegiatan yang menjadi kewenangan masing-masing perangkat daerah. Dengan demikian, Renstra berfungsi sebagai instrumen operasional untuk mewujudkan target-target pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Keterkaitan ini menegaskan bahwa keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan daerah sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan pada level perangkat daerah. Konsistensi antara RPJMD dengan Renstra perangkat daerah juga akan memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah berada dalam koridor visi dan misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, Renstra merupakan turunan langsung dari RPJMD yang harus dijalankan secara sinergis dan terukur.

Selain itu, hubungan RPJMD dengan Renstra perangkat daerah juga mencakup mekanisme pengendalian dan evaluasi pembangunan. Capaian program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra akan diukur melalui indikator kinerja perangkat daerah, yang selanjutnya akan memberikan kontribusi terhadap pencapaian indikator kinerja utama (IKU) dalam RPJMD. Dengan sistematis ini, terdapat kesinambungan antara perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan daerah, sehingga arah pembangunan Kabupaten Seram Bagian Barat dapat lebih terukur, transparan, dan akuntabel.

Gambar 1.3. Alur Dokumen RPJMD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029



Sumber: Kemendagri, 2017

1.3.4. Hubungan RPJMD dan RKPD

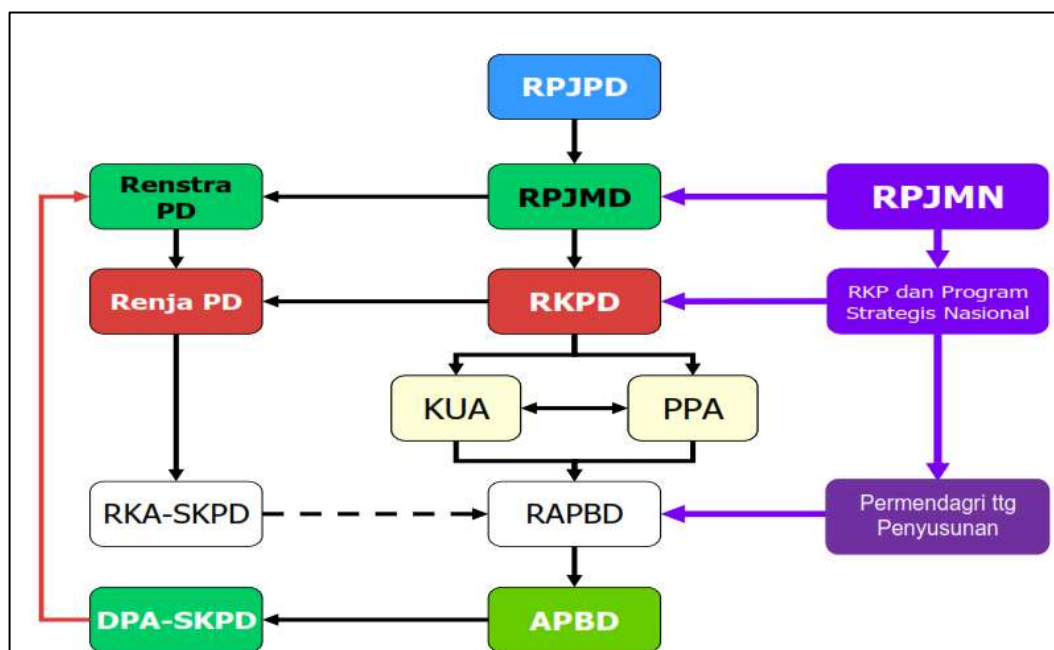
Substansi RPJMD merupakan instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Karena itu RPJMD harus dijabarkan lebih teknis dalam perencanaan tahunan, yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sebagai penjabaran RPJMD, RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan, RKPD juga memuat prioritas program dan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) Kabupaten Seram Bagian Barat secara berjenjang mulai dari tingkat Negeri/Desa hingga Kabupaten.

Selanjutnya hasil konsultasi publik dijadikan sebagai input untuk penajaman RKPD dan menjadi pedoman kepala daerah dalam menyusun KUA (Kebijakan Umum Anggaran) serta PPAS (Prioritas dan

Plafon Anggaran Sementara) dalam proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Gambar 1.4. Alur Dokumen RPJMD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah



Sumber: Kemendagri, 2017

1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.1. Maksud

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025–2029 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode lima tahun yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah secara terarah, terukur, dan berkesinambungan. RPJMD ini berfungsi sebagai acuan utama dalam perumusan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah, serta menjadi instrumen penting dalam menyinergikan perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan nasional maupun provinsi.

Selain itu, penyusunan RPJMD dimaksudkan untuk memastikan adanya konsistensi antara visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih dengan kerangka pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), sehingga pembangunan yang dilaksanakan tidak hanya berorientasi

pada pencapaian jangka pendek, tetapi juga mendukung tercapainya tujuan pembangunan jangka panjang Kabupaten Seram Bagian Barat.

1.4.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025-2029 adalah:

1. Menjabarkan visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program pembangunan daerah yang lebih terukur dan terencana.
2. Menyusun kerangka kebijakan pembangunan daerah yang menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) serta dokumen perencanaan tahunan, sehingga tercipta keterpaduan dalam pelaksanaan pembangunan.
3. Mengintegrasikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional dan provinsi, serta memperhatikan dokumen tata ruang dan dokumen perencanaan lainnya, guna memastikan sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan lintas sektor serta lintas wilayah.
4. Menetapkan target kinerja pembangunan daerah melalui indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja daerah (IKD), sehingga pencapaian pembangunan dapat diukur, dievaluasi, dan dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat.
5. Mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan, dengan mengutamakan peningkatan kualitas hidup masyarakat, pemerataan pembangunan antar wilayah, serta pelestarian lingkungan hidup sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

1.5. Sistematika Penulisan

Dokumen RPJMD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan sistematika yang tercantum dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1. Latar belakang;
2. Dasar hukum penyusunan;
3. Hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya;
4. Maksud dan tujuan; dan
5. Sistematika penulisan.

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

1. Gambaran Umum Kondisi Daerah
 - a. Aspek geografi dan demografi;
 - b. Aspek Kesejahteraan Masyarakat;
 - c. Aspek Daya Saing Daerah;
 - d. Aspek Pelayanan Umum.
 - e. Standar Pelayanan Minimal;
 - f. Kerjasama daerah;
 - g. Rencana pembangunan infrastruktur oleh APBN dan/atau APBD provinsi di kabupaten/kota; dan
 - h. BUMD yang mendukung kinerja pelayanan Pemda.
2. Gambaran Keuangan Daerah
 - a. Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024 (dari tahun 2020 hingga tahun 2024)
 - b. Proyeksi keuangan daerah Tahun Anggaran 2025-2029.
3. Permasalahan Dan Isu Strategis
 - a. Permasalahan pembangunan daerah; dan
 - b. Isu strategis daerah.

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
 - a. Visi dan Misi; dan
 - b. Tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.
2. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

- a. Strategi dan arah kebijakan daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029; dan
- b. Program-program prioritas daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

1. Program Perangkat Daerah paling sedikit memuat:
 - a. Daftar program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dalam mencapai kinerja pembangunan daerah;
 - b. Indikator program, target dan pagu indikatif program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 - a. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU); dan
 - b. Target penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (IKD).

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1. Gambaran Umum Kondisi Seram Bagian Barat

A. Aspek Geografi dan Demografi

1) Posisi dan Peran Strategis Daerah

a. Letak, Luas dan Batas Wilayah

Kabupaten Seram Bagian Barat secara geografis terletak di bagian barat Pulau Seram, Provinsi Maluku, dengan koordinat antara 02° 50' 00" hingga 03° 29' 38" Lintang Selatan (LS) dan 127° 28' 12" hingga 128° 50' 40" Bujur Timur (BT). Wilayah ini didominasi oleh ekosistem daratan utama Pulau Seram yang memiliki karakteristik geografi beragam, mulai dari kawasan pesisir hingga wilayah perbukitan dan pegunungan. Adapun batas-batas administratif Kabupaten Seram Bagian Barat sebagaimana Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku, dalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Laut Seram;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kecamatan Seram Utara Barat dan Kecamatan Teluk Elpaputih Kabupaten Maluku Tengah serta Selat Seram;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Laut Banda;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Laut Buru.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau, Kabupaten Seram Bagian Barat memiliki luas wilayah sebesar 5.014,238 km², yang mencakup sekitar 10,87% dari total luas wilayah Provinsi Maluku yang mencapai 46.133,832 km².

Struktur pembagian wilayah administrasi Kabupaten Seram Bagian Barat secara lebih rinci dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

NO	KECAMATAN	IBU KOTA KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH DUSUN
1	Kairatu	Kairatu	7	15
2	Kairatu Barat	Kamal	6	-
3	Amalatu	Latu	7	2
4	Inamosol	Honitetu	5	6
5	Elpaputih	Elpaputih	7	2
6	Seram Barat	Piru	7	23
7	Huamual	Luhu	5	36
8	Huamual Belakang	Waesala	7	28
9	Kepulauan Manipa	Masawoy	7	13
10	Taniwel	Taniwel	19	3
11	Taniwel Timur	Uwen Pantai	15	-
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT			92	128

17

Secara administratif Kabupaten Seram Bagian Barat terdiri atas 11 Kecamatan, 92 Desa dan 128 Dusun. Dengan jumlah Desa terbanyak berada di wilayah Kecamatan Taniwel dengan total 19 Desa, sedangkan Kecamatan dengan total Desa terkecil ada di wilayah Kecamatan Huamual dan Kecamatan Inamosol. Namun jika dilihat dari jumlah Dusun, Kecamatan Huamual memiliki jumlah Dusun terbanyak yaitu sebanyak 36 Dusun.

b. Topografi

Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat secara umum didominasi oleh bentang lahan dengan ketinggian antara 0 hingga 1.000 meter di atas permukaan laut (mdpl). Berdasarkan data topografi, sekitar 67,58% dari total luas wilayah berada pada kisaran ketinggian tersebut. Sementara itu, wilayah dengan ketinggian di atas 1.000 mdpl hanya mencakup sekitar 32,42% dari luas wilayah, menunjukkan bahwa kawasan dengan elevasi tinggi relatif lebih sedikit ditemukan di kabupaten ini.

Berdasarkan klasifikasi ketinggian, proporsi lahan di Kabupaten Seram Bagian Barat sebagian besar berada pada wilayah dataran rendah dengan selang topografi 0 – 250 meter di atas permukaan laut (mdpl), yaitu sebesar 24,26% atau seluas 120.519,20 ha. Wilayah dataran rendah ini tersebar di seluruh kecamatan, dimana Kecamatan Seram Bagian Barat, Huamual Belakang, dan Taniwel memiliki luasan terbesar di atas 10.000 ha. Sementara itu, wilayah dataran tinggi dengan ketinggian lebih dari 1.000 mdpl didominasi oleh Kecamatan Elaputih, Taniwel, Inamosol, dan Taniwel Timur, dimana luasan pada masing-masing wilayah tersebut lebih dari 20.000 ha. Informasi lebih rinci mengenai sebaran topografi berdasarkan selang ketinggian di masing-masing kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Luas Wilayah menurut Topografi Wilayah di Kabupaten Seram Bagian Barat

No	Kecamatan	Luas Wilayah Berdasarkan Peta (ha)												Total
		Topografi berdasarkan Selang Ketinggian (mdpl)												
		0-250	250-500	500-750	750-1000	1000-1250	1250-1500	1500-1750	1750-2000	2000-2250	2250-2500	2500-2750	2750-3000	
1	Kairatu	8.522,21	2.294,50	1.870,05	1.386,08	1.182,50	931,09	734,01	274,19	81,20	-	-	-	17.275,84
2	Kairatu Barat	4.913,05	4.840,25	3.733,99	1.967,63	1.383,18	694,39	67,81	-	-	-	-	-	17.600,31
3	Amalatu	8.919,71	5.917,02	5.299,72	3.828,04	2.332,92	1.808,55	1.699,92	1.225,12	483,80	242,71	12,94	-	31.770,47
4	Inamosol	3.921,07	8.291,35	9.491,91	9.014,06	10.350,09	7.698,92	5.394,89	2.355,25	503,42	108,35			57.129,31
5	Elpaputih	8.740,07	9.768,44	9.809,32	12.356,24	12.650,68	8.880,59	6.732,52	4.065,59	2.422,53	1.236,93	387,49	42,98	77.093,38
6	Seram Barat	30.347,70	16.192,58	8.223,27	5.654,18	5.233,96	4.244,31	3.398,16	901,04	15,11	-	-	-	74.210,31
7	Huamual	8.196,55	8.001,55	7.706,52	5.979,98	4.616,86	3.543,21	1.821,77	495,67	20,43	-	-	-	40.382,54
8	Huamual Belakang	25.116,81	9.539,45	6.384,76	4.186,65	2.506,94	1.111,98	235,58	69,63	-	-	-	-	49.151,80
9	Kepulauan Manipa	6.179,23	3.264,56	1.682,81	625,40	43,41	-	-	-	-	-	-	-	11.795,40
10	Taniwel	10.190,85	9.665,46	13.676,29	11.849,92	9.043,14	8.350,90	7.580,16	5.703,59	2.203,38	253,03	0,49	-	78.517,20
11	Taniwel Timur	5.471,95	3.973,72	4.317,55	4.407,22	3.692,56	4.230,83	3.921,87	4.460,92	4.540,45	2.582,69	246,87	-	41.846,62
Seram Bagian Barat		120.519,20	81.748,89	72.196,16	61.255,41	53.036,23	41.494,78	31.586,70	19.551,01	10.270,32	4.423,70	647,79	42,98	496.773,18

Sumber: RTRW Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2010-2030

Tabel 2.3. Luas Wilayah dan Karakteristik Morfologi Wilayah Kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Barat

No	Kecamatan	Luas Wilayah Berdasarkan Peta (ha)					Total
		Kemiringan Lahan (%)					
		0 – 2	2 – 15	15 – 25	25 – 40	> 40	
1	Kairatu	2.987,48	5.058,86	2.824,98	4.016,64	2.387,90	17.275,84
2	Kairatu Barat	1.018,62	6.366,27	5.002,94	4.557,53	654,94	17.600,30
3	Amalatu	928,50	7.316,22	7.548,18	10.000,62	5.976,95	31.770,47
4	Inamosol	245,71	14.326,24	18.056,03	20.230,21	4.271,13	57.129,31
5	Elpaputih	1.232,33	12.916,04	18.019,12	35.178,04	9.747,86	77.093,38
6	Seram Barat	6.185,74	28.801,22	19.854,74	16.834,93	2.533,68	74.210,31
7	Huamual	844,77	6.060,96	9.519,97	18.137,90	5.818,95	40.382,54
8	Huamual Belakang	4.151,80	16.631,00	12.230,87	12.194,31	3.943,82	49.151,80
9	Kepulauan Manipa	775,94	3.789,44	4.050,26	2.950,43	229,33	11.795,40
10	Taniwel	2.198,21	18.178,18	21.090,51	27.155,05	9.895,25	78.517,19
11	Taniwel Timur	1.271,12	5.779,98	7.675,00	17.155,32	9.965,21	41.846,62
Seram Bagian Barat		21.840,20	125.224,42	125.872,58	168.410,97	55.425,01	496.773,18
Persentase (%)		4,40	25,21	25,34	33,90	11,16	100,00
Morfologi		Datar	Berombak	Bergelombang	Berbukit	Bergunung	Datar

Sumber: RTRW Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2010-2030

c. Kemiringan Lahan

Kabupaten Seram Bagian Barat didominasi oleh lahan dengan kelas kemiringan 25–40%, yang mencakup area seluas 168.410,97 ha atau sekitar 33,90% dari total wilayah. Kelas kemiringan ini sebagian besar tersebar di Kecamatan Elpaputih, Taniwel, Inamosol, Huamual, dan Seram Barat. Kelas kemiringan terbesar berikutnya adalah 15–25%, dengan luas 125.872,58 ha atau 25,24%, yang sebagian besar terdapat pada wilayah Kecamatan Taniwel, Seram Barat, Inamosol, dan Elpaputih. Berdasarkan klasifikasi kemiringan lahan tersebut, morfologi wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat secara umum tergolong berombak hingga berbukit, terutama pada bagian timur, barat, dan selatan wilayah. Lebih rinci terkait informasi kemiringan lahan diperlihatkan pada Tabel 2.3.

d. Hidrologi

Kabupaten Seram Bagian Barat memiliki sumber daya air yang cukup melimpah, baik berupa air permukaan maupun air bawah tanah. Hal ini didukung oleh tingginya curah hujan tahunan yang mencapai lebih dari 2.000 mm per tahun. Dengan kondisi tersebut, seluruh sungai yang mengalir di wilayah ini bersifat permanen, artinya tetap mengalir sepanjang tahun.

Secara umum, pola aliran sungai di Kabupaten Seram Bagian Barat membentuk pola dendritik (seperti cabang daun), dengan arah aliran menuju utara, selatan, dan barat. Sementara itu, sungai-sungai di Pulau Buano, Pulau Kelang, dan Pulau Manipa menunjukkan pola aliran radial, yakni mengalir ke segala arah dari bagian tengah pulau. Khusus di wilayah Semenanjung Huamual, aliran sungai mengarah dari timur ke barat, menyesuaikan dengan bentuk semenanjung yang memanjang dari utara ke selatan.

Wilayah tangkapan hujan atau *watershed* di daerah ini dibagi berdasarkan garis pemisah air (*morphological water divide*). Di wilayah utama Kabupaten Seram Bagian Barat, garis pemisah ini umumnya berarah timur–barat, sedangkan di Semenanjung Huamual, arahnya utara–selatan. Untuk pulau-pulau kecil seperti

Buano, Kelang, dan Manipa, garis pemisah air cenderung berkumpul di bagian tengah pulau.

Sumber daya air di kabupaten ini tidak hanya penting untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat, tetapi juga menjadi penunjang berbagai sektor pembangunan, seperti pertanian, perikanan, industri, hingga pembangkit tenaga listrik. Kondisi hidrologi wilayah ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk curah hujan, tipe iklim, dan karakteristik sungai.

Potensi sumber daya air Kabupaten Seram Bagian Barat mencakup air tanah dan air sungai. Potensi air tanah dinilai cukup baik. Selain itu, terdapat 46 Daerah Aliran Sungai (DAS) yang tersebar di seluruh wilayah. DAS terbesar adalah DAS Tala yang mencakup luas 77.296,69 ha atau 15,56% dari total wilayah kabupaten, meliputi Kecamatan Elpaputih, Inamosol, Seram Barat, Taniwel, dan Taniwel Timur. Secara keseluruhan, total luas DAS di kabupaten ini mencapai 496.774,24 ha.

Dengan jumlah dan sebaran sungai yang merata di seluruh wilayah, Kabupaten Seram Bagian Barat memiliki potensi air permukaan yang sangat besar. Potensi ini dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan domestik (air bersih dan air baku), serta mendukung kegiatan pertanian, khususnya irigasi untuk lahan basah tanaman pangan.

e. Batimetri

Kondisi batimetri perairan di sekitar Kabupaten Seram Bagian Barat—termasuk laut lepas, selat, dan teluk yang mengitari wilayah ini serta tiga pulau terbesarnya—menunjukkan karakteristik kelautan yang khas. Berdasarkan kontur batimetri, pantai-pantai di Kabupaten Seram Bagian Barat umumnya bertipe curam. Hal ini ditunjukkan oleh kedalaman laut yang relatif dekat dengan garis pantai, yaitu mencapai 50–100 meter, sebagaimana tergambar melalui warna biru tua pada peta batimetri.

Kedalaman yang signifikan ini juga ditemukan di sejumlah teluk dan selat, seperti Teluk Piru, Teluk Latira, Teluk Elpaputih (yang berbatasan dengan Kabupaten Maluku Tengah), Teluk Hatuputih, serta di Selat Buano, Selat Seram, Selat Kelang, dan

Selat Manipa (yang berbatasan dengan Kabupaten Buru). Perairan tersebut umumnya memiliki kedalaman lebih dari 100 meter.

Dengan kondisi pantai yang curam dan perairan yang dalam, wilayah pesisir Kabupaten Seram Bagian Barat, termasuk desa-desa dan dusun-dusun yang berada di sekitarnya, memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai kawasan pelabuhan alami. Kondisi ini mendukung aktivitas ekspor komoditas unggulan daerah tanpa terkendala oleh masalah kedangkalan laut.

Selain itu, luasnya wilayah laut yang mengelilingi Kabupaten Seram Bagian Barat dari utara, barat, selatan, hingga ke timur, menyimpan potensi sumber daya hayati kelautan yang sangat besar. Sumber daya ini dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor perikanan dan kelautan secara berkelanjutan.

f. Penggunaan Lahan

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Seram Bagian Barat, pola penggunaan lahan di wilayah ini dikelompokkan ke dalam lima jenis kawasan, yaitu:

1. Kawasan Pertanian
 - Pertanian Lahan Basah: Terpusat di Kecamatan Kairatu (Desa Waimital dan Waihatu) serta Kecamatan Seram Barat (Desa Kawa).
 - Pertanian Lahan Kering: Meliputi hampir seluruh wilayah Kecamatan Seram Barat, Taniwel, dan Kairatu.
2. Kawasan Perikanan
 - Terdapat di seluruh wilayah Kecamatan Waesala, Kecamatan Seram Barat (Desa Eti, Kaibobo, dan Ariate), serta Kecamatan Huamual. Kawasan ini memiliki potensi besar untuk budidaya perikanan tangkap dan budidaya laut.
3. Kawasan Permukiman
 - Kawasan permukiman tersebar dari dataran Piru-Eti (Kecamatan Seram Barat) hingga Dataran Waeruapa (Kecamatan Kairatu), yang berfungsi sebagai penghubung antara Pulau Seram dengan Kota Provinsi dan pulau-pulau sekitarnya.

4. Kawasan Pegunungan

- o Berada di Kecamatan Kairatu dan Kecamatan Hunitetu, mencakup desa-desa seperti Hunitetu, Rambatu, Rumberu, Manusa, Hukuanakota, Huku Kecil, Watui, Abio, Buria, Riring, Ahilolo, Ohiasapalewa, Neniari, Rumahsoal, dan Laturake. Kawasan ini memiliki potensi pengembangan komoditas pertanian dataran tinggi, seperti sayuran dan buah-buahan.

5. Kawasan Pesisir dan Pantai

- o Meliputi hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Barat, dengan potensi pengembangan budidaya perikanan, wisata bahari, dan konservasi lingkungan pantai.

Penggunaan lahan paling dominan di Kabupaten Seram Bagian Barat adalah Hutan Lahan Kering Sekunder, yang mencakup lebih dari 50% dari total luas wilayah. Jenis penutup lahan berikutnya adalah Pertanian Lahan Kering Bercampur Semak, yang menempati sekitar 23,87% dari luas wilayah. Sementara itu, kawasan permukiman hanya mencakup 0,63% dari luas kabupaten, yang terdiri atas permukiman pedesaan, permukiman transmigrasi, dan permukiman perkotaan.

g. Klimatologi

Parameter klimatologi utama di Kabupaten Seram Bagian Barat mencakup tipe iklim, curah hujan, dan suhu udara. Secara umum, wilayah ini memiliki iklim yang ditandai dengan frekuensi hari hujan dan intensitas curah hujan yang relatif tinggi. Kondisi tersebut sangat dipengaruhi oleh pola angin musiman (monsun) yang berlaku di wilayah Indonesia.

Musim barat, yang membawa angin lembab dari Asia dan Samudera Pasifik, berlangsung pada bulan Desember hingga Maret. Selanjutnya, bulan April merupakan masa transisi (pancaroba) dari musim barat menuju musim timur. Musim timur berlangsung dari bulan Mei hingga Oktober, ditandai dengan angin kering dari Australia. Kemudian, bulan November menjadi masa transisi kembali dari musim timur menuju musim barat.

Tabel 2.4. Rata-Rata Komponen Iklim Tahun 2024
Kabupaten Seram Bagian Barat

Bulan	Suhu (°C)	Kelembaban (%)	Kecepatan Angin (knot)	Tekanan Udara (mbar)	Jumlah Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan (hari)	Penyinaran Matahari (jam)
Januari	28,4	82	7	1013,2	64,4	16	64
Februari	28,6	81	6	1013,0	60,4	10	76
Maret	28,0	86	4	1013,7	323,0	19	51
April	27,8	88	4	1011,5	185,4	26	59
Mei	27,3	91	4	1011,8	445,3	28	31
Juni	26,1	92	4	1013,3	588,5	28	15
Juli	25,7	89	4	1013,8	550,1	24	24
Agustus	25,7	90	6	1013,6	647,7	28	23
September	26,8	88	6	1013,9	173,9	19	54
Oktober	27,5	88	7	1012,7	182,3	26	61
November	28,0	86	6	1012,6	160,7	22	69
Desember	28,0	85	6	1011,8	176,1	21	55

Sumber: BPS Kabupaten Seram Bagian Barat, Tahun 2023

Kondisi iklim sepanjang tahun 2024 menunjukkan variabilitas yang signifikan baik dari segi suhu, kelembaban, curah hujan, maupun penyinaran matahari, yang secara langsung mempengaruhi aktivitas masyarakat di Seram Bagian Barat baik dari sektor pertanian, energi, dan kesehatan. Suhu rata-rata bulanan berkisar antara 25,7°C hingga 28,6°C, dengan suhu terendah tercatat pada bulan Juli dan Agustus. Tingkat kelembaban relatif tinggi sepanjang tahun, berkisar antara 81% hingga 92%, menunjukkan lingkungan dengan tingkat kelembaban tropis yang tinggi, terutama selama bulan-bulan puncak musim hujan (Mei–Agustus). Tekanan udara cenderung stabil dalam kisaran 1011,5 hingga 1013,9 mbar, dan kecepatan angin berkisar antara 4 hingga 7 knot, tanpa adanya anomali yang signifikan.

Curah hujan tahunan sangat bervariasi, dengan puncak curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Agustus (647,7 mm) dan bulan Juni (588,5 mm), yang juga menunjukkan jumlah hari hujan maksimal (28 hari). Sebaliknya, bulan-bulan awal tahun seperti Januari dan Februari mencatat curah hujan terendah dengan jumlah hari hujan dan volume yang relatif kecil. Berdasarkan wilayah,

sebaran curah hujan di Seram bagian Barat diperlihatkan pada Gambar 2.7. Penyinaran matahari paling rendah terjadi pada bulan Juni (15 jam) dan paling tinggi pada bulan Februari (76 jam), yang berimplikasi pada potensi produksi energi surya dan proses fotosintesis tanaman.

**Tabel 2.5. Sebaran Curah Hujan
Kabupaten Seram Bagian Barat**

No	Kecamatan	Curah Hujan (mm/tahun)		Luas (ha)
		2000 – 2500 mm	2500 – 3000 mm	
1	Elpaputih	24.746,39	52.346,86	77.093,25
2	Huamual	-	44.301,80	44.301,80
3	Huamual Belakang	13.142,13	36.009,68	49.151,81
4	Inamosol	36.578,25	20.551,07	57.129,32
5	Kairatu	-	17.275,84	17.275,84
6	Kairatu Barat	14.802,91	2.797,39	17.600,31
7	Kairatu Timur	-	31.770,46	31.770,46
8	Pulau Manipa	8.894,45	2.900,95	11.795,40
9	Seram Barat	73.455,62	754,67	74.210,30
10	Taniwel	78.517,21	-	78.517,21
11	Taniwel Timur	38.239,34	3.607,32	41.846,65
Luas (ha)		288.376,30	212.316,05	212.316,05
Proporsi (%)		57,60	42,40	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Seram Bagian Barat, Tahun 2023

Secara keseluruhan, data iklim ini penting sebagai dasar perencanaan adaptasi perubahan iklim, terutama dalam menentukan kalender tanam, pengelolaan sumber daya air, strategi ketahanan pangan, dan efisiensi energi berbasis iklim lokal.

2) Potensi Sumber Daya Alam

Potensi sumber daya alam Kabupaten Seram Bagian Barat meliputi mineral logam, non logam dan batuan, panas bumi, air permukaan, dan air tanah. Berdasarkan dari berbagai sumber penelitian, maka gambaran umum terhadap potensi sumber daya alam di Kabupaten Seram Bagian Barat adalah sebagai berikut:

a. Perikanan

Kabupaten Seram Bagian Barat memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat besar dan strategis, mengingat sebagian besar wilayahnya terdiri dari kawasan pesisir dan laut. Letak geografis yang berada di bagian barat Pulau Seram menjadikan daerah ini kaya akan biodiversitas laut, yang memiliki nilai ekologis dan ekonomis tinggi. Perairan Kabupaten Seram Bagian Barat termasuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 714 dan WPP 715, yang memiliki potensi perikanan tangkap yang melimpah dan produktivitas ekosistem laut yang tinggi. Potensi ini merupakan asset penting dalam mendukung ketahanan pangan, pengembangan ekonomi biru, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya alam hayati secara berkelanjutan.

Di samping perikanan tangkap, Kabupaten Seram Bagian Barat juga memiliki potensi perikanan budidaya yang tersebar di berbagai perairan pesisir, teluk, dan tambak-tambak rakyat, yang dapat dikembangkan untuk komoditas unggulan seperti ikan kerapu, kakap, bandeng, dan udang. Pengembangan subsektor perikanan secara optimal dapat menjadi pendorong utama peningkatan kesejahteraan nelayan, penciptaan lapangan kerja, serta kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di masa mendatang.

Tabel 2.6. Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan (JTB) dan Tingkat Pemanfaatan (TP)

Wilayah Pengelolaan Negara Republik Indonesia		Ikan Pelagis Kecil	Ikan Pelagis Besar	Ikan Demersal	Ikan Karang	Udang Paneied	Lobster	Kepiting	Rajungan	Cumi-Cumi
WPP 714 Perairan Teluk Tolo dan Laut Banda	Estimasi Potensi (Ton per Tahun)	222.881	370.853	292.000	121.326	6.472	724	1.758	4.705	13.460
	JTB (Ton)	156.019	256.457	204.400	50.663	3.236	362	879	3.294	9.422
	TP (Ton)	0,7	0,7	0,7	1,1	1,0	1,7	1,4	0,6	0,5
WPP 715 Perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram dan Laut Berau	Estimasi Potensi (Ton per Tahun)	443.944	74.908	80.226	105.336	5.295	1.217	336	157	3.874
	JTB (Ton)	310.761	52.436	56.158	52.668	3.707	609	235	110	2.712
	TP (Ton)	0,7	0,5	0,4	1,6	0,5	0,9	0,8	0,5	0,9

Sumber: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2022

**Tabel 2.7. Hasil Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya
Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020-2024**

No	Komoditi	Total Produksi (Ton per tahun)				
		2020	2021	2022	2023	2024
Perikanan Tangkap						
1	Ikan Pelagis Besar	11.222,17	14.344,20	31.959,70	32.443,87	21.315,18
2	Ikan Pelagis Kecil	14.197,59	8.083,57	20.543,70	20.089,12	21.813,17
3	Ikan Karang		6.334,40	10.340,60	10.342,61	10.959,20
4	Ikan Demersal	4.875,78	2.930,70	4.227,90	4.341,23	5.612,80
5	Lainnya	13,47	211,33	559,20	511,24	300,91
Total Perikanan Tangkap		30.309,01	31.904,20	67.631,10	67.728,07	60.001,26
Perikanan Budidaya						
1	Rumput Laut	37,258	46,930	36,600	72,129	-
2	Kuwe/Bubara	101,146	100,986	1,386	8,464	11,456
3	Kerapu			0,245	0,920	3,495
4	Nila	71,694	71,645	28,760	26,380	4,555
5	Lele	1,251	1,140	10,200	6,320	1,390
6	Ikan Mas	0,549	4,990		1,541	0
7	Ikan Baronang	0,191	9,888	0	0	0
8	Ikan Gurame	46,544	0	0	0	0
9	Ikan Kakap Putih	0	22,286	0,414	0,958	0
10	Kerapu Bebek	0	57,770	0	0	0
Total Perikanan Budidaya		258,633	315,635	77,605	116,712	20,896

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Seram Bagian Barat, Tahun 2025

Produksi perikanan tangkap menunjukkan peningkatan yang cukup drastis pada tahun 2022 dan 2023. Pada tahun 2020, total produksi tercatat sebesar 30.309,01 ton, kemudian naik menjadi 31.904,20 ton di tahun 2021. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2022 dan 2023, dengan produksi mencapai 67.631,10 ton dan 67.728,07 ton secara berturut-turut. Namun, terjadi sedikit penurunan pada tahun 2024 menjadi 60.001,26 ton.

Komoditas utama yang mendominasi hasil tangkapan adalah ikan pelagis besar dan ikan pelagis kecil. Ikan pelagis besar mencatat produksi tertinggi pada tahun 2023 sebesar 32.443,87 ton, sementara ikan pelagis kecil menunjukkan tren stabil di kisaran 20 ribuan ton pada tiga tahun terakhir. Jenis ikan lainnya seperti ikan karang dan ikan demersal juga menyumbang volume signifikan, menunjukkan kekayaan spesies laut di wilayah Seram Bagian Barat.

Berbeda dengan perikanan tangkap, produksi perikanan budidaya mengalami fluktuasi yang cukup besar. Pada tahun 2020 dan 2021, produksi tercatat tinggi masing-masing sebesar 258,63 ton dan 315,64 ton. Namun, pada tahun 2022 terjadi penurunan tajam menjadi 77,61 ton, lalu naik kembali pada 2023 menjadi 116,71 ton, sebelum kembali turun drastis menjadi 20,90 ton pada tahun 2024.

Komoditas utama perikanan budidaya yang dikembangkan meliputi rumput laut, kuwe/bubara, kerapu, nila, dan lele. Produksi rumput laut sempat mencapai puncaknya pada tahun 2023 sebesar 72,13 ton, sementara produksi kuwe/bubara tertinggi terjadi pada tahun 2020–2021 di atas 100 ton sebelum menurun drastis. Beberapa komoditas unggulan lainnya seperti ikan kerapu, kakap putih, dan kerapu bebek menunjukkan potensi namun masih dalam skala terbatas.

b. Pertanian

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor strategis dalam struktur perekonomian Kabupaten Seram Bagian Barat yang memiliki kontribusi besar terhadap ketahanan pangan, pendapatan masyarakat pedesaan, serta pembangunan wilayah secara berkelanjutan. Kondisi geografis dan iklim yang mendukung

memungkinkan wilayah ini untuk mengembangkan berbagai jenis komoditas pertanian, baik dari subsektor tanaman pangan, tanaman hortikultura, maupun tanaman perkebunan. Ketiganya tersebar hampir di seluruh kecamatan dan menjadi tulang punggung aktivitas ekonomi masyarakat, terutama di wilayah perdesaan.

Komoditas unggulan di sektor pertanian mencakup tanaman perkebunan seperti kelapa, cengkeh, dan pala; tanaman pangan seperti padi, jagung, dan ubi kayu; serta hortikultura seperti cabai, tomat, dan sayur-sayuran lainnya. Setiap komoditas memiliki karakteristik wilayah budidaya tersendiri yang sangat dipengaruhi oleh kondisi topografi dan jenis tanah.

Komoditas kelapa menjadi yang paling dominan dari segi luas tanam maupun produksi. Selama periode 2020–2024, luas tanam kelapa relatif stabil dengan angka tertinggi pada tahun 2024 sebesar 8.479,6 hektar, dan produksi mencapai 8.449,7 ton. Tren serupa juga terlihat pada komoditas cengkeh, dengan produksi berkisar antara 3.233 hingga 3.364 ton per tahun, dan luas tanam antara 7.376 hingga 7.659 hektar.

Untuk pala, produksi meningkat dari 208 ton di tahun 2020 menjadi 332,6 ton pada tahun 2024, seiring dengan perluasan lahan dari 3.520 hektar menjadi hampir 3.478,7 hektar. Komoditas kakao menunjukkan penurunan signifikan dalam luas tanam dan produksi pada tahun 2024, dari angka stabil di atas 1.300 ton, menurun drastis menjadi 478,1 ton, yang mengindikasikan perlunya revitalisasi budidaya kakao. Komoditas lainnya seperti kopi, jambu mete, dan sagu meskipun dengan skala lebih kecil, tetap menunjukkan kesinambungan produksi, yang penting dalam keragaman usaha tani masyarakat.

Secara umum, potensi perkebunan di Kabupaten Seram Bagian Barat masih sangat terbuka untuk ditingkatkan, baik dari aspek produktivitas maupun pengembangan hilirisasi produk. Dukungan terhadap sarana produksi, peningkatan kapasitas petani, dan perluasan pasar menjadi strategi penting dalam penguatan subsektor ini ke depan.

**Tabel 2.8. Luas Tanam dan Total Produksi Tanaman Perkebunan
di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020-2024**

No	Komoditi Perkebunan	2020		2021		2022		2023		2024	
		Luas Tanam (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Tanam (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Tanam (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Tanam (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Tanam (Ha)	Produksi (Ton)
1	Kelapa	8811	7778	6997,2	6868,2	8326,1	7390,5	8270,1	8422,8	8479,6	8449,7
2	Cengkeh	7916	3327	7376	3233	7520,55	3364,85	7513,5	3364,9	7659,4	3354,4
3	Pala	3520	208	3295	311	7520,55	322,85	3350,2	322,9	3478,7	332,6
4	Kakao	4434	1236	7376	1361	4066	1321	4057,2	1363,9	3027,5	478,1
5	Kopi	11,86	2,15	10,86	3	11,88	3	11,88	2,95	11,88	4,09
6	Jambu Mete	81	6	35	7,91	35,55	7,78	35,6	7,8	35,6	8,1
7	Sagu	231	54	233	111,38	232,4	122,99	164,6	90,2	164,6	120,9

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Seram Bagian Barat, Tahun 2025

Tanaman pangan merupakan bagian penting dari ketahanan pangan dan ekonomi rumah tangga masyarakat di Kabupaten Seram Bagian Barat. Komoditas utama yang dibudidayakan antara lain ubi kayu, ubi jalar, padi, jagung, talas, kacang tanah, dan dalam skala terbatas kacang hijau serta padi ladang. Komoditas-komoditas ini tersebar di berbagai kecamatan, dan dibudidayakan secara tradisional maupun semi-intensif oleh petani lokal.

Komoditas dengan kontribusi produksi tertinggi selama lima tahun terakhir adalah ubi kayu, dengan rata-rata produktivitas yang cukup tinggi dan stabil di atas 24 ton/ha, bahkan meningkat hingga 31,7 ton/ha pada tahun 2023. Produksi tertinggi tercatat pada tahun 2023 sebesar 19.764,95 ton, sebelum sedikit menurun menjadi 16.343,05 ton di tahun 2024. Diikuti oleh ubi jalar, yang juga menunjukkan peningkatan produktivitas dari 14,2 ton/ha menjadi 17,8 ton/ha dalam dua tahun terakhir, dengan produksi mencapai 2.269,5 ton pada tahun 2024.

Komoditas padi sawah juga menunjukkan konsistensi dalam produksi. Meskipun luas tanam sempat mengalami fluktuasi, total produksi padi sempat mencapai 6.854,1 ton pada tahun 2023, dengan produktivitas stabil di angka 3,3 ton/ha. Sementara itu, jagung mengalami lonjakan produktivitas dari 3,6 ton/ha menjadi 6,1 ton/ha pada tahun 2023 dan 2024, meskipun luas tanam dan panennya tidak konsisten dari tahun ke tahun. Komoditas talas mencatat produksi tertinggi pada tahun 2021 sebesar 1.966,8 ton, tetapi kemudian mengalami penurunan produktivitas signifikan dalam dua tahun terakhir.

Tanaman seperti kacang tanah dan kacang hijau masih dibudidayakan dalam skala kecil, namun memberikan kontribusi yang penting bagi diversifikasi pangan lokal. Kacang tanah menunjukkan peningkatan produktivitas dari 1,2 ton/ha menjadi 1,4 ton/ha, sementara kacang hijau mengalami penurunan produksi hingga tidak tercatat lagi pada tahun 2024.

**Tabel 2.9. Luas Tanam dan Total Produksi Tanaman Pangan
di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020-2024**

No	Komoditi Tanaman Pangan	2020		2021		2022		2023		2024	
		Luas Tanam (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Tanam (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Tanam (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Tanam (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Tanam (Ha)	Produksi (Ton)
1	Ubi Kayu	1069	23180	752,2	22623,68	696,5	18911,75	600,5	19764,95	376	16343,05
2	Ubi Jalar	225	3024,6	159,3	2531,86	123	1500,8	146	2607,7	132,5	2269,5
3	Padi	2043,3	5148,33	1611,1	4900,83	1418	6472,2	2137	6854,1	1564	4999,5
4	Padi Ladang	0	0	21	27	1	1,5	1	1,5	0	0
5	Kacang Tanah	167	195,6	167	114,96	118	74	109	165,9	122	172,9
6	Kacang Hijau	6	28	2	3,6	2	1,8	10	5	0	0
7	Jagung	1197,5	932,4	835,6	1818,36	118,5	1894,58	282	484,95	323	1686,65
8	Talas	177	1661	129,8	1966,8	152	1353	156	1655,5	108,5	1551

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Seram Bagian Barat, Tahun 2025

c. Pariwisata

Kabupaten Seram Bagian Barat memiliki kekayaan potensi pariwisata yang sangat menjanjikan untuk dikembangkan sebagai sektor unggulan daerah. Keindahan alam yang masih asri, kekayaan budaya, serta kearifan lokal yang terjaga menjadi modal penting dalam pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Letak geografis yang strategis di bagian barat Pulau Seram juga memberikan nilai tambah tersendiri, terutama untuk pengembangan wisata berbasis laut dan pesisir.

Berdasarkan data yang tersedia, terdapat 56 objek wisata yang tersebar di berbagai kecamatan. Jumlah tersebut mencakup 19 objek wisata alam bahari, 8 objek wisata alam pegunungan, 3 objek wisata alam agrowisata, 7 objek wisata alam cagar alam/ ekowisata, 4 objek wisata alam petualangan, 9 objek wisata Sejarah/ budaya, dan 6 objek wisata buatan. Potensi wisata bahari mencakup pantai, pulau-pulau kecil, dan spot menyelam yang eksotis dan belum banyak tersentuh wisata massal. Sementara itu, wisata alam meliputi air terjun, hutan tropis, dan kawasan perbukitan yang menawarkan keindahan lanskap serta pengalaman ekowisata. Potensi wisata budaya dan sejarah juga cukup kuat, tercermin dalam situs-situs bersejarah, peninggalan tradisional, serta upacara adat yang masih hidup di tengah masyarakat. Sedangkan wisata buatan, meskipun masih terbatas, membuka peluang pengembangan sarana rekreasi modern dan wahana edukatif.

**Tabel 2.10. Data Objek Pariwisata
Di Kabupaten Seram Bagian Barat**

No	Nama Destinasi	Lokasi	Jenis Wisata	Keterangan
1	Pulau Namputy	Desa Kaibobu	Wisata Alam Bahari	Dikelola Desa
2	Pantai Patinia	Desa Kawa	Wisata Alam Bahari	Dikelola Masyarakat
3	Pantai Hatuhuran	Desa Hatusua	Wisata Alam Bahari	Dikelola Pihak Ketiga

No	Nama Destinasi	Lokasi	Jenis Wisata	Keterangan
4	Hatusua Beach	Desa Hatusua	Wisata Alam Bahari	Dikelola Pribadi
5	Lahan Pasir Putih	Desa Elpaputih	Wisata Alam Bahari	Belum dikelola
6	Pulau Nusasari	Desa Luhutuban	Wisata Alam Bahari	Belum dikelola
7	Pulau Suanggi	Kepulauan Manipa	Wisata Alam Bahari	Belum dikelola
8	Tanjung Gora (Pulau Karang)	Kepulauan Manipa	Wisata Alam Bahari	Belum dikelola
9	Pulau Hokman	Desa Waesala	Wisata Alam Bahari	Dikelola Desa
10	Pulau Kasumba	Desa Waesala	Wisata Alam Bahari	Dikelola Desa
11	Pulau Air	Desa Waesala	Wisata Alam Bahari	Dikelola Desa
12	Pulau Latunae	Desa Waesala	Wisata Alam Bahari	Dikelola Desa
13	Pulau Batu	Desa Waesala	Wisata Alam Bahari	Dikelola Desa
14	Pulau Pasir	Desa Waesala	Wisata Alam Bahari	Dikelola Desa
15	Teluk Hanunu	Desa Waesala	Wisata Alam Bahari	Dikelola Desa
16	Selat Valentine	Pulau Buano	Wisata Alam Bahari	Dikelola Desa
17	Pulau Tikus	Dusun Masika Jaya, Desa Waesala	Wisata Alam Bahari	Dikelola Masyarakat
18	Danau Halong	Desa Allang Asaude	Wisata Alam Bahari	Dikelola Desa
19	Pantai Lantauni	Desa Allang Asaude	Wisata Alam Bahari	Dikelola Desa
20	Air Terjun Telpipi	Desa Lumoly	Wisata Alam Pegunungan	Belum dikelola
21	Puncak Pelistalait	Desa Kaibobu	Wisata Alam Pegunungan	Dikelola Masyarakat
22	Air Terjun Tona	Desa Nuniali	Wisata Alam Pegunungan	Dikelola Desa
23	Tapak Kaki Papua	Desa Pasinalu	Wisata Alam Pegunungan	Belum dikelola

No	Nama Destinasi	Lokasi	Jenis Wisata	Keterangan
24	Air Terjun Wairera	Desa Nuniali	Wisata Alam Pegunungan	Belum dikelola
25	Air Terjun Waisia	Desa Rumahkay	Wisata Alam Pegunungan	Dikelola Desa
26	Air Terjun Waihetu	Desa Rumahkay	Wisata Alam Pegunungan	Dikelola Desa
27	Gunung Belanda	Desa Allang Asaude	Wisata Alam Pegunungan	Dikelola Desa
28	Agro Wisata Buah	Desa Waihatu	Wisata Alam Agrowisata	Dikelola Desa/Masyarakat
29	Agro Wisata Buah	Desa Waimital	Wisata Alam Agrowisata	Dikelola Desa/Masyarakat
30	Agro Wisata Buah	Desa Rumahkay	Wisata Alam Agrowisata	Dikelola Desa/Masyarakat
31	Pulau Osi	Dusun Pulau Osi, Desa Eti	Wisata Alam Cagar Alam/ Ekowisata	Dikelola Masyarakat
32	Air Putri	Dusun Waehoyo, Desa Kawa	Wisata Alam Cagar Alam/ Ekowisata	Dinas Pariwisata
33	Pulau Kassa	Desa Kaibobu	Wisata Alam Cagar Alam/ Ekowisata	Dikelola BKSDA Prov.Maluku
34	Pulau Marsegu	Dusun Pulau Osi, Desa Eti	Wisata Alam Cagar Alam/ Ekowisata	Dikelola BKSDA Prov.Maluku
35	Danau Tapala	Desa Hatunuru	Wisata Alam Cagar Alam/ Ekowisata	Dikelola Masyarakat
36	Air Panas Waikocua	Desa Sanahu	Wisata Alam Cagar Alam/ Ekowisata	Belum Dikelola
37	Danau Tapi	Dusun Tirta Mandiri, Desa Waisala	Wisata Alam Cagar Alam/ Ekowisata	Belum Dikelola
38	Goa Luhu	Desa Luhu	Wisata Alam Petualangan	Belum Dikelola
39	Goa Tengkorak	Desa Nuniali	Wisata Alam Petualangan	Belum Dikelola

No	Nama Destinasi	Lokasi	Jenis Wisata	Keterangan
40	Surfing Pantai Latu	Desa Latu	Wisata Alam Petualangan	Dikelola Desa
41	Kali Nui	Desa Sumith	Wisata Alam Petualangan	Dikelola Desa
42	Benteng Portugis Luh	Desa Luh	Wisata Sejarah/ Budaya	Belum dikelola
43	Masjid Tua Jami Luh	Desa Luh	Wisata Sejarah/ Budaya	Dimanfaatkan Masyarakat
44	Masjid Tua Almunawarah	Desa Kulur	Wisata Sejarah/ Budaya	Dimanfaatkan Masyarakat
45	Mesjid Tua Lawataka	Desa Hualoy	Wisata Sejarah/ Budaya	Dimanfaatkan Masyarakat
46	Tapak Kaki Papua	Desa Pasinalu	Wisata Sejarah/ Budaya	Belum dikelola
47	Benteng Wanthrow	Desa Tomalehu Timur	Wisata Sejarah/ Budaya	Dikelola Desa
48	Makam Jari	Desa Tomalehu Timur	Wisata Sejarah/ Budaya	Dikelola Desa
49	Makam Penyiar Islam	Desa Tomalehu Barat	Wisata Sejarah/ Budaya	Dikelola Desa
50	Air Kapitan yonger	Desa Tomalehu Barat	Wisata Sejarah/ Budaya	Dikelola Desa
51	Pantai Redi	Desa Piru	Wisata Buatan	Dikelola Dinas Pariwisata
52	Kolam Pemancingan	Desa Lohiatata	Wisata Buatan	Dikelola Pribadi/ swasta
53	Kairatu Beach	Desa Kairatu	Wisata Buatan	Dikelola Pribadi/ swasta
54	Puncak Kelapa Dua	Dusun Kelapa Dua, Desa Kairatu	Wisata Buatan	Dikelola Pribadi/ swasta
55	De Luku	Desa Waimital	Wisata Buatan	Dikelola pribadi/ swasta

No	Nama Destinasi	Lokasi	Jenis Wisata	Keterangan
56	Dam Siji	Desa Waimital	Wisata Buatan	Dikelola Bumdes

d. Mineral Logam

- Potensi Nikel pada zona anomali untuk nikel baik itu yang berasal dari pelapukan (lateritik) ataupun yang bersifat sulfida terletak di daerah Piru dan umumnya di zona tektonit dengan kandungan nikelnya Ni: 1,68%. Kandungan nikel sulfida yang dianalisis menunjukkan kadar yang cukup signifikan Ni(S): 3.02, dengan demikian nikel sulfida ini menjadi alternatif untuk menggantikan nikel laterit;
- Potensi Nikel di Desa Hualoy dan Seriholo (Kecamatan Kairatu) dengan kualitas Ni 0,21% - 0,94%;
- Potensi pasir besi berlokasi di Pantai Hunipopu, Desa Ariate Kecamatan Huamuaal dengan luas sebaran ± 1.401 Ha;
- Potensi Nikel di Kaibobu dan Supe dengan luas areal 40.000 Ha;
- Emas dan tembaga di Desa Neniari, Hukuanakota dengan luas areal 50.000 Ha.

e. Mineral Non Logam dan Batuan

- Berdasarkan Hasil Inventarisasi Dan Evaluasi Mineral Non Logam di daerah Kabupaten Buru dan Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku Utara, Desember 2006 yang dilaksanakan oleh Pusat Sumber Daya Geologi diperoleh potensi bahan galian batuan ultrabasa, serpentinit, batugamping, lempung dan sirtu sungai;
- Berdasarkan Profil Pertambangan DPMPTSP, Prov. Maluku, 2012 terdapat potensi Marmer yang berlokasi di Gunung Nakele dan Gunung Kasieh, Kec. Taniwel; Gunung Anuena dan Gunung Keki, Pulau Buano. Memiliki cadangan masing-masing sebesar 3.733.000.000 ton, 1.047.600.000 ton, 412.799.999 ton, dan 11.200.000 ton;

- Potensi Marmer di W. Sapalewa dengan luas 25.000 Ha;
- Potensi Garnet di Pulau Kelang dengan luas 7.000 Ha.

f. Panas Bumi

- Desa Elpaputih, P. Seram dengan potensi 25 Mwe;
- Panas Bumi Pohon Batu Desa Kawa Kecamatan Seram Barat dengan potensi panas bumi 15 Mwe.

g. Air Tanah

Berdasarkan peta Cekungan Airtanah yang dikeluarkan oleh Direktorat Tata Lingkungan Geologi dan Kawasan Pertambangan (DTLGKP) di Wilayah Kabupaten Seram Barat terdapat 4 (empat) cekungan airtanah yaitu Boano, Kawa, Laela dan Waesamu dengan jumlah air tanah 301 juta m³/tahun.

h. Air Permukaan

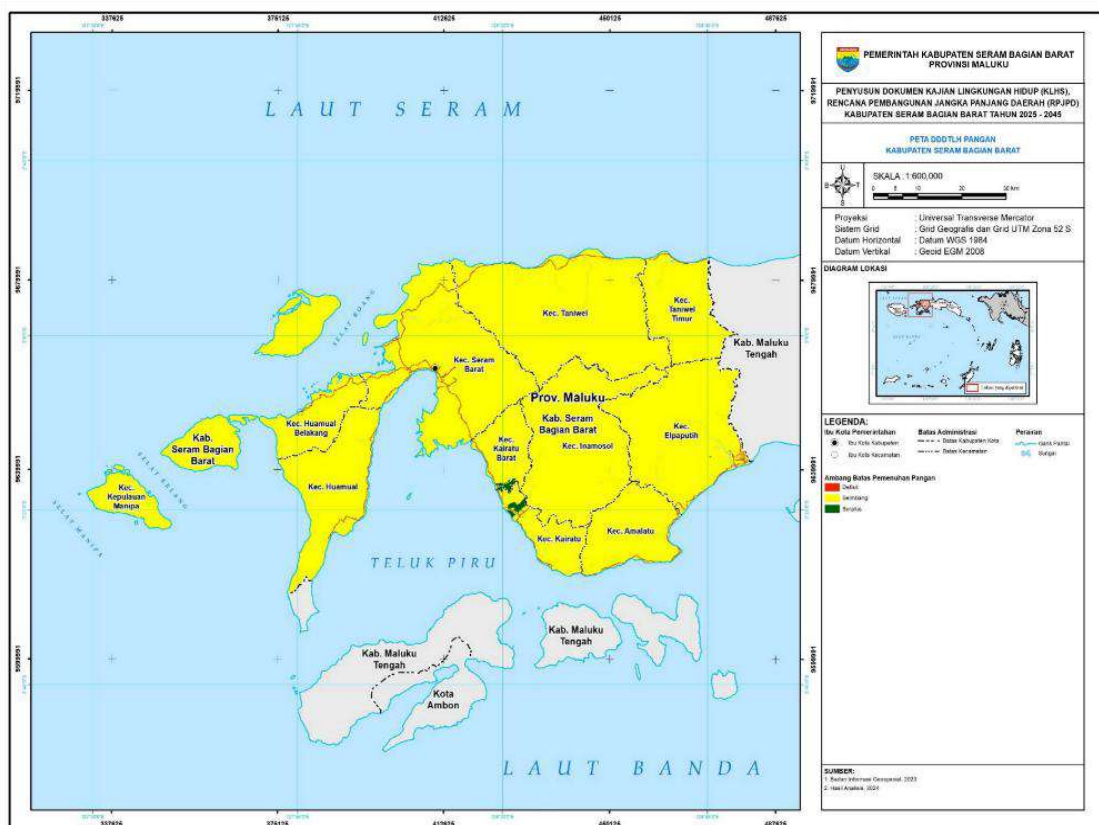
Terdapat 29 sungai yang terindikasi berair sepanjang tahun di Kabupaten Seram Bagian Barat. Dilihat dari jumlah sungai dan persebarannya yang mencakup keseluruhan wilayah maka Kabupaten Seram Bagian Barat memiliki potensi air permukaan yang sangat besar, dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan domestik (air bersih dan air baku), serta untuk kegiatan pertanian (irigasi) untuk tanaman. Pemenuhan kebutuhan keperluan air bersih dan air baku teridentifikasi di Kecamatan Seram Bagian Barat (RISPAM Kab. Seram Bagian Barat 2014) untuk alternatif pengembangan SPAM Kota Piru, yaitu S. Amarale, S. Cabang Tiga, S. Waemeteng, S. Batuluhi dan S. Laiuen. Selain potensi yang sudah teridentifikasi potensi air bersih dan air baku pada wilayah yang lain akan menjadi prioritas pembangunan bagi masyarakat di Kabupaten Seram Bagian Barat.

3) Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Dari sudut pandang daya dukung dan daya tampung lingkungan, Kabupaten Seram Bagian Barat secara umum memiliki kapasitas yang memadai dalam penyediaan pangan dan air bersih untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduknya. Surplus ketersediaan sumber daya di sejumlah wilayah menunjukkan adanya potensi distribusi yang dapat

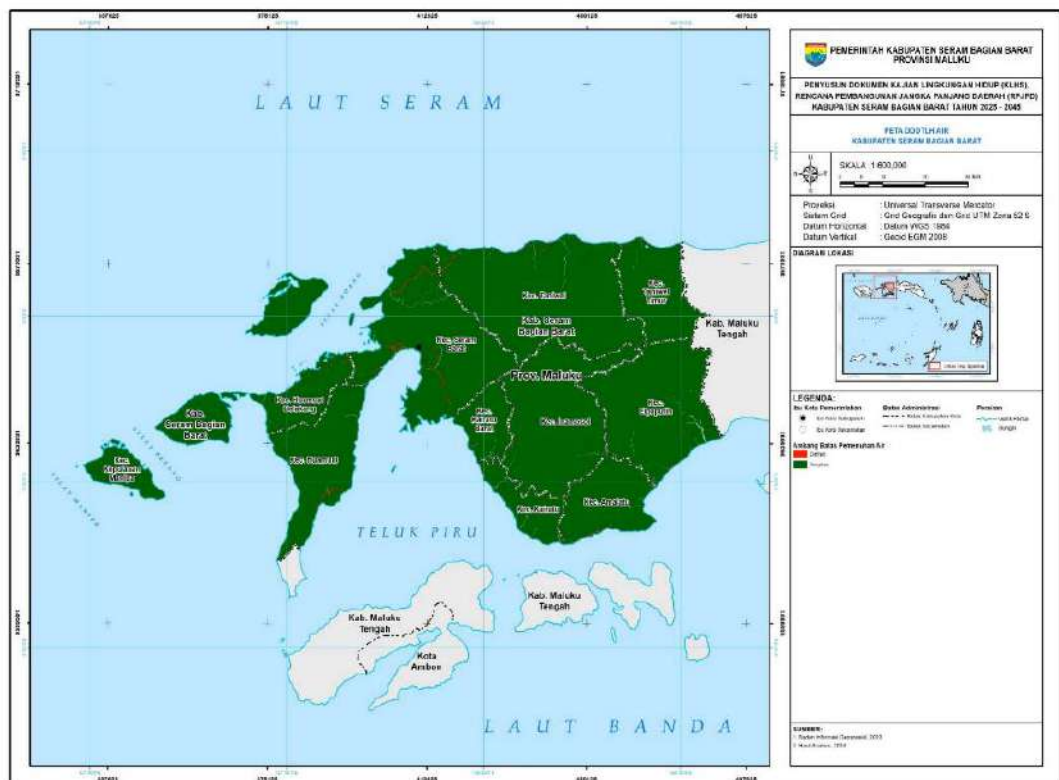
dioptimalkan guna menciptakan keseimbangan spasial dalam pemenuhan kebutuhan antarwilayah. Kinerja jasa lingkungan di kabupaten ini menunjukkan variasi antar sektor. Potensi sektor rekreasi dan ekowisata tergolong tinggi, dengan cakupan wilayah seluas 355.714,24 hektare yang berfungsi mendukung aktivitas pariwisata berbasis alam. Sebaliknya, kapasitas jasa penyediaan pangan masih berada pada tingkat rendah, yang mengindikasikan perlunya peningkatan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya untuk mendukung ketahanan pangan secara berkelanjutan. Layanan penyediaan air bersih umumnya memadai, meskipun terdapat kantong-kantong wilayah yang masih mengalami defisit ketersediaan air, yang memerlukan intervensi kebijakan pengelolaan sumber daya air secara terpadu.

**Gambar 2.2. D3TLH Penyedia Bahan Pangan
di Kabupaten Seram Bagian Barat**



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025-2029

**Gambar 2.3. D3TLH Penyedia Air Bersih
di Kabupaten Seram Bagian Barat**



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025-2029

Kabupaten Seram Bagian Barat juga memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap berbagai bencana alam, termasuk gempa bumi, banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan. Wilayah pegunungan menunjukkan tingkat bahaya tinggi terhadap kejadian tanah longsor dan gempa bumi, yang menuntut penanganan mitigatif yang lebih sistematis. Di sisi lain, ancaman cuaca ekstrem dan abrasi pantai semakin signifikan, khususnya di kawasan pesisir, yang menuntut strategi adaptasi berbasis ekosistem serta peningkatan kapasitas masyarakat lokal dalam menghadapi risiko iklim. Data perubahan suhu permukaan daratan selama periode 2016–2023 menunjukkan kecenderungan peningkatan suhu di sejumlah kawasan, yang merefleksikan tren pemanasan global dan menandai tantangan nyata dalam upaya adaptasi perubahan iklim di tingkat daerah.

Kondisi ini menegaskan urgensi pengarusutamaan prinsip keberlanjutan dalam perencanaan tata ruang wilayah melalui pendekatan yang adaptif terhadap risiko bencana dan perubahan iklim. Pengelolaan ekosistem secara berkelanjutan dan berbasis lanskap

menjadi krusial untuk menjaga keseimbangan ekologis serta meminimalkan dampak lingkungan jangka panjang.

Dalam konteks pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), Kabupaten Seram Bagian Barat telah menunjukkan kemajuan pada sejumlah indikator, khususnya pada pilar sosial, dengan tingkat pencapaian mencapai sekitar 70% dari target yang ditetapkan. Namun demikian, capaian pada pilar lingkungan masih relatif rendah, dengan realisasi indikator baru mencapai 45%. Indikator yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam, konservasi keanekaragaman hayati, serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim memerlukan perhatian strategis yang lebih besar.

Untuk mempercepat pencapaian TPB secara komprehensif, diperlukan penguatan kebijakan lintas sektor yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengentasan kemiskinan, serta pemenuhan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan merata. Perluasan intervensi pembangunan berkelanjutan secara inklusif dan berbasis data menjadi kunci untuk memastikan bahwa setiap lapisan masyarakat memperoleh manfaat yang optimal dari agenda pembangunan daerah.

4) Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

a. Ketahanan Energi

Ketahanan energi merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan energi suatu wilayah secara berkelanjutan, andal, terjangkau, serta tidak terganggu oleh tekanan atau gangguan eksternal, baik dalam jangka pendek maupun panjang. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, ketahanan energi menjadi fondasi penting bagi stabilitas ekonomi, keamanan nasional, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Indikator ketahanan energi secara umum mencakup aspek ketersediaan (availability) sumber energi, aksesibilitas (accessibility) masyarakat terhadap energi, keterjangkauan harga (affordability), diversifikasi sumber energi, efisiensi penggunaan energi, serta ketergantungan terhadap energi impor.

Dalam lingkup kelistrikan, ketahanan energi dapat diukur melalui proksi data dari penyedia listrik utama seperti PT. PLN, meliputi kapasitas daya terpasang, volume produksi dan penjualan listrik, jumlah pelanggan, serta tingkat kehilangan energi (susut/hilang) dalam sistem distribusi. Evaluasi terhadap indikator-indikator tersebut memungkinkan pemerintah dan pemangku kepentingan untuk merumuskan kebijakan energi yang adaptif, inklusif, dan resilien terhadap perubahan global serta dinamika pasar energi internasional.

Tabel 2.11. Energi listrik yang bersumber dari PT. PLN di Kabupaten Seram Bagian Barat

Tahun	Daya Terpasang (kW)	Produksi Listrik (kWh)	Listrik Terjual (kWh)	Dipakai Sendiri (kWh)	Susut/ Hilang (kWh)	Pelanggan Listrik (kWh)
2019	16.042	41.628.614	33.115.935	356.533	5.491.174	34.018
2020	18.221	42.137.893	37.940.956	428.581	4.181.688	10.521
2021	36.135	46.318.234	40.209.816	285.906	5.822.511	42.936
2022	18.689	4.049.569	3.723.742	80.991	354.337	44.992
2023	18.043	26.656.725	44.873.106	129.266	842.460	46.997
2024	17.309	32.238.006	49.371.748	132.719	566.517	49.363

Sumber: Maluku Dalam Angka 2020-2025, BPS

Ketahanan energi listrik di Kabupaten Seram Bagian Barat menunjukkan fluktuasi signifikan dalam kurun waktu 2019 hingga 2024. Kapasitas daya terpasang tertinggi tercatat pada tahun 2021 sebesar 36.135 kW, namun mengalami penurunan tajam pada tahun-tahun berikutnya dan tercatat 17.309 kW pada tahun 2024. Produksi listrik mengalami penurunan drastis pada tahun 2022 (4.049.569 kWh) dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yang kemungkinan disebabkan oleh gangguan operasional atau perubahan sistem distribusi. Meskipun demikian, terjadi pemulihan

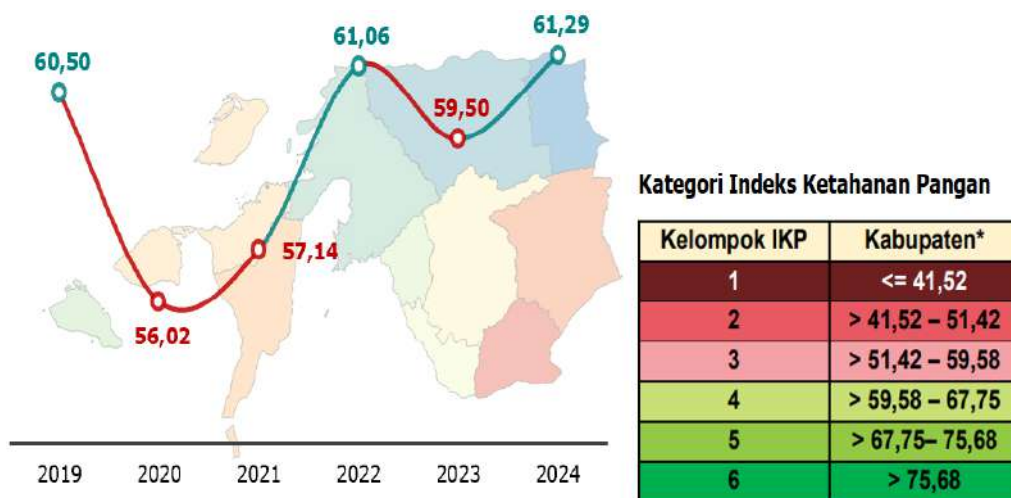
produksi pada tahun 2023 dan 2024, masing-masing mencapai 26,65 juta kWh dan 32,24 juta kWh, dengan peningkatan signifikan dalam volume listrik yang terjual.

Tingkat kehilangan energi (susut/hilang) menunjukkan efisiensi distribusi yang semakin baik, terlihat dari penurunan susut energi dari 5,49 juta kWh pada 2019 menjadi 566,5 ribu kWh pada 2024. Jumlah pelanggan listrik juga meningkat secara konsisten, dari 34.018 pelanggan pada tahun 2019 menjadi 49.363 pelanggan pada tahun 2024, mencerminkan perluasan akses layanan listrik di wilayah tersebut. Namun, nilai pemakaian sendiri yang relatif stabil menandakan perlunya evaluasi lebih lanjut terhadap manajemen beban internal. Secara keseluruhan, tren ini mencerminkan potensi ketahanan energi yang membaik, meskipun masih dibutuhkan intervensi kebijakan dan investasi infrastruktur untuk menjaga kontinuitas dan kualitas layanan kelistrikan secara berkelanjutan.

b. Indeks Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan pilar strategis dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan, karena berhubungan langsung dengan pemenuhan hak dasar masyarakat atas pangan yang cukup, aman, bergizi, dan terjangkau. Dalam upaya mengukur capaian pembangunan di sektor pangan, Indeks Ketahanan Pangan (IKP) menjadi instrumen penting yang menggambarkan kondisi ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan di suatu wilayah. Pembahasan mengenai Indeks Ketahanan Pangan di Kabupaten Seram Bagian Barat memberikan gambaran mengenai sejauh mana kapasitas wilayah dalam menjamin ketahanan pangan masyarakat, sekaligus mengidentifikasi potensi kerentanan dan intervensi kebijakan yang dibutuhkan untuk mewujudkan ketahanan pangan yang inklusif dan berkelanjutan.

**Gambar 2.4. Indeks Ketahanan Pangan
Kabupaten Seram Bagian Barat 2019-2024**



Sumber: Badan Pangan Nasional (Data Diolah, 2025)

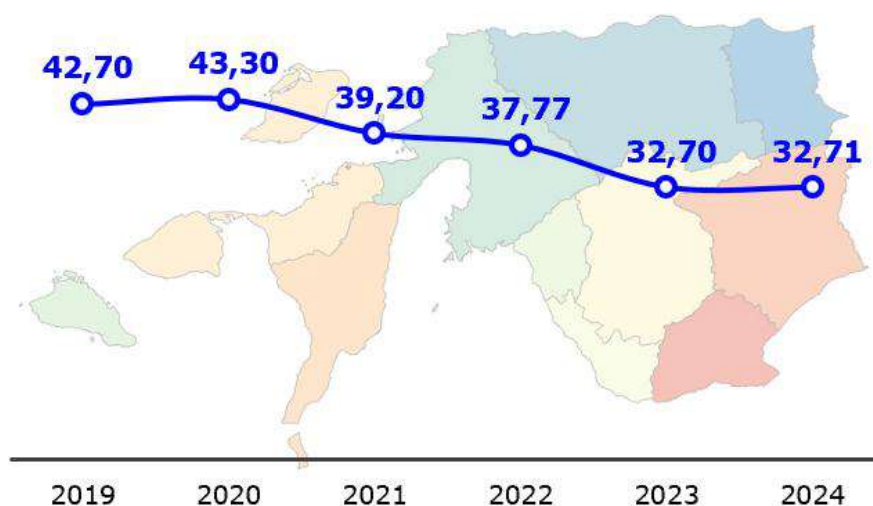
Perkembangan ketahanan pangan di Kabupaten Seram Bagian Barat dalam kurun waktu 2019–2024 menunjukkan dinamika yang mencerminkan respons daerah terhadap berbagai tantangan ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan. Berdasarkan data Badan Pangan Nasional, nilai Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Seram Bagian Barat sempat mengalami penurunan signifikan dari 60,50 pada tahun 2019 ke titik terendah 56,02 pada tahun 2020, sebelum kembali meningkat secara bertahap hingga mencapai 61,29 pada tahun 2024. Meskipun sempat masuk kategori rentan sedang (kelompok 3) pada tahun 2020–2021, secara umum tren peningkatan IKP mengindikasikan adanya perbaikan kinerja tata kelola pangan daerah menuju kategori cukup tahan (kelompok 4). Kondisi ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam memperkuat sistem pangan lokal yang resilien, terutama dalam menghadapi tekanan eksternal seperti disrupsi rantai pasok, perubahan iklim, dan dinamika sosial ekonomi masyarakat.

c. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan

Prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan merupakan indikator penting dalam mengukur tingkat kerawanan pangan pada level individu dan rumah tangga. Indikator ini mencerminkan persentase penduduk yang asupan energinya berada di bawah

kebutuhan minimum, sehingga berisiko mengalami masalah kesehatan, penurunan produktivitas, dan keterbatasan dalam pemenuhan hak atas pangan. Di Kabupaten Seram Bagian Barat, prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan menjadi isu strategis yang harus dianalisis secara komprehensif karena berkaitan langsung dengan dimensi aksesibilitas pangan, daya beli masyarakat, dan efektivitas program perlindungan sosial. Pemantauan terhadap indikator ini diperlukan guna merumuskan intervensi kebijakan yang lebih terarah dan responsif terhadap kelompok rentan serta mendorong terwujudnya sistem pangan yang inklusif dan berkelanjutan di tingkat lokal.

Gambar 2.5. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kabupaten SBB, 2019-2024



Sumber: Badan Pusat Statistika (Data Diolah, 2025)

Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan mengukur proporsi penduduk yang asupan energinya tidak memenuhi kebutuhan minimum harian, sehingga indikator ini menjadi barometer penting dalam menilai tingkat kerawanan pangan kronis di suatu wilayah. Di Kabupaten Seram Bagian Barat, tren prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan menunjukkan penurunan yang cukup konsisten selama periode 2019 hingga 2024, dari 42,7% menjadi 32,71%. Penurunan ini dapat mencerminkan adanya perbaikan dalam aksesibilitas pangan, efektivitas intervensi program pangan dan gizi, peningkatan kesadaran masyarakat

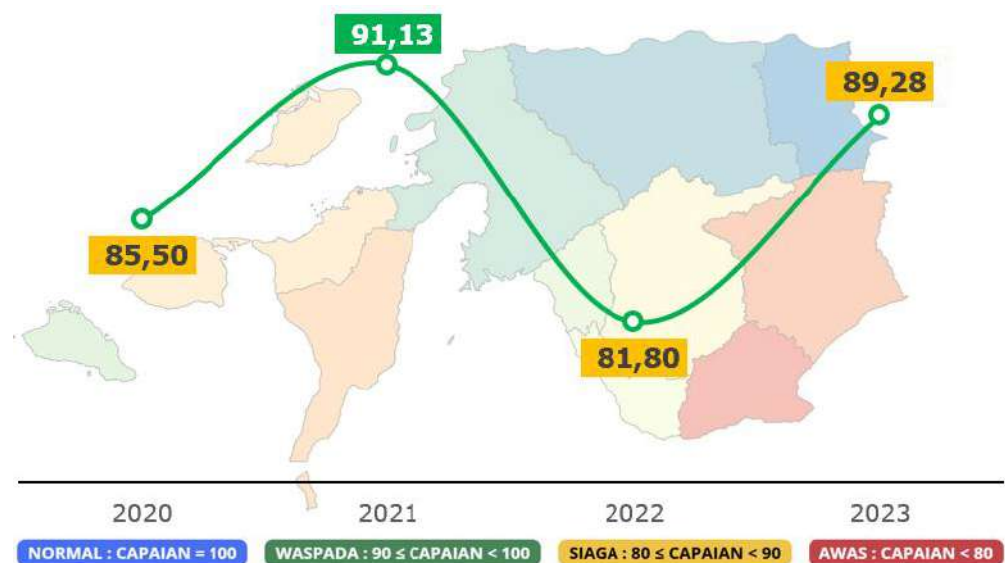
terhadap pola konsumsi sehat, serta penguatan sistem distribusi dan ketersediaan pangan lokal. Analisis lebih lanjut terhadap faktor-faktor penyebab dan kontribusi kebijakan yang berjalan menjadi penting untuk memastikan bahwa tren positif ini berkelanjutan dan menjangkau seluruh kelompok masyarakat, terutama yang paling rentan terhadap kerawanan pangan.

d. Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum

Akses rumah tangga terhadap sumber air minum yang layak merupakan salah satu indikator utama dalam mengukur derajat kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat, sekaligus bagian integral dari tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Ketersediaan air minum yang aman dan terjangkau tidak hanya berdampak langsung pada kesehatan masyarakat, tetapi juga berpengaruh terhadap produktivitas, ketahanan pangan, dan pencapaian pembangunan manusia secara menyeluruh.

Di Kabupaten Seram Bagian Barat, pemetaan terhadap tingkat akses air minum rumah tangga menjadi penting untuk menilai efektivitas pelayanan dasar, mengidentifikasi kesenjangan spasial, serta merumuskan kebijakan peningkatan infrastruktur air bersih yang berkelanjutan dan inklusif.

Gambar 2.6. Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum di Kabupaten Seram Bagian Barat, 2019-2023



Sumber: Susenas, BPS (Data Diolah, 2025)

Tingkat akses rumah tangga terhadap sumber air minum layak di Kabupaten Seram Bagian Barat menunjukkan dinamika yang relatif stabil dalam periode 2020–2023. Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2021 dengan persentase 91,13% dan masuk dalam kategori *waspada*, yang mencerminkan perbaikan signifikan dalam pemenuhan layanan dasar air bersih. Namun, penurunan terjadi pada tahun 2022 menjadi 81,80% (kategori *siaga*), yang mengindikasikan potensi gangguan terhadap kontinuitas layanan atau keterbatasan distribusi infrastruktur air minum. Pada tahun 2023, capaian kembali meningkat menjadi 89,28%, mengisyaratkan adanya pemulihan dan konsistensi kebijakan penyediaan air minum.

Secara keseluruhan, tren ini mencerminkan adanya upaya pemerintah daerah dalam memperluas cakupan layanan air minum layak, meskipun masih diperlukan peningkatan kapasitas infrastruktur dan penguatan kelembagaan agar target akses universal air bersih dapat tercapai secara merata dan berkelanjutan.

5) Lingkungan Hidup Berkualitas

a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Kualitas lingkungan sangat berpengaruh terhadap kualitas kehidupan manusia. Sumber daya alam yang diperlukan untuk mendukung kelangsungan hidup manusia mempunyai keterbatasan dalam banyak hal, yaitu keterbatasan tentang ketersediaan menurut kuantitas, kualitas, ruang dan waktu. Oleh sebab itu diperlukan pengelolaan lingkungan dan sumberdaya alam yang baik dan bijaksana. Pengelolaan tersebut yang berupa pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan adalah menjadi tanggung jawab bersama antara masyarakat dan peran pemerintah. Upaya-upaya pengelolaan lingkungan ditujukan dengan beberapa indikator sebagai berikut:

**Tabel 2.12. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020-2024**

No	Indikator	Capaian Indikator				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kualitas Udara	90,41	93,33	93,07	92,22	83,72
2	Indeks Kualitas Air	55,67	55,56	54,72	50,49	52,22
3	Indeks Kualitas Lahan	88,40	87,85	87,85	87,85	85,28
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	78,50	79,80	77,29	77,95	72,22

*Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seram Bagian Barat, 2024
(Data Diolah, 2025)*

Secara total Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2024 berada pada level 72,22, dimana angka ini pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 masih tetap berada pada kategori Baik ($70 < x < 90$). Capaian Indeks Kualitas Udara sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 berada pada kategori Baik ($70 < x \leq 90$) dimana pada tahun 2024 mencatat angka 83,72. Sedangkan untuk Indeks Kualitas Air pada rentang tahun 2020-2024 berada pada kategori Sedang ($50 < x < 70$) dimana tercatat tahun 2024 sebesar 52,22.

b. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Sanitasi yang layak dan aman merupakan salah satu indikator penting dalam upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat. Di Kabupaten Seram Bagian Barat, akses terhadap sanitasi yang aman menjadi perhatian utama dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam aspek kesehatan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pada bagian ini akan dibahas kondisi terkini rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi aman di wilayah tersebut, termasuk distribusinya serta tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan layanan sanitasi yang inklusif dan berkelanjutan.

Berdasarkan data tahun 2020 hingga 2024, capaian indikator rumah tangga dengan akses sanitasi aman di Kabupaten Seram Bagian Barat menunjukkan tren peningkatan meskipun masih berada dalam kategori SIAGA. Pada tahun 2020, proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi aman tercatat sebesar 76,12%, kemudian naik menjadi 77,17% pada tahun 2021. Selanjutnya, terjadi perbaikan bertahap pada tahun 2022 dengan capaian sebesar 78,24%, meningkat menjadi 78,38% pada tahun 2023, serta meningkat pada tahun 2024 menjadi 78,73%.

Gambar 2.7. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak di Kabupaten Seram Bagian Barat, 2020-2024



Sumber: Susenas, BPS (Data Diolah, 2025)

Peningkatan tersebut mencerminkan adanya perbaikan dalam penyediaan sarana dan prasarana sanitasi dasar di tingkat rumah tangga, meskipun belum cukup untuk keluar dari kategori kewaspadaan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa intervensi pembangunan sanitasi perlu terus diperkuat secara terpadu, baik melalui penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan investasi infrastruktur sanitasi, maupun edukasi perubahan perilaku masyarakat. Arah kebijakan ke depan perlu difokuskan pada perluasan cakupan layanan sanitasi aman yang memenuhi syarat teknis dan higienis, guna mendukung pencapaian target pembangunan berkelanjutan di bidang kesehatan dan lingkungan hidup.

c. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah

Permasalahan pengelolaan sampah saat ini menjadi salah satu isu krusial dalam dinamika pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, urbanisasi, dan pola konsumsi masyarakat, volume timbulan sampah terus mengalami peningkatan, yang apabila tidak dikelola secara efektif dapat menimbulkan dampak lingkungan, sosial, dan kesehatan masyarakat yang signifikan.

**Tabel 2.13. Timbulan Sampah di Kabupaten
Seram Bagian Barat Tahun 2023-2024**

Tahun	Timbulan Sampah Harian (Ton)	Timbulan Sampah Tahunan (Ton)	Penguran gan Sampah (Ton)	Penangan an Sampah (Ton)	Sampah Terkelola (Ton)
2023	85,99	31.386,93	-	2.715,60	2.715,60
2024	89,96	31.738,79	446,24	1.357,80	1.804,04

Sumber: Data SIPSN Kementerian LHK, 2024

Sepanjang tahun 2023, jumlah sampah yang berhasil tertangani di Kabupaten Seram Bagian Barat tercatat sebanyak 2.715,6 ton, namun mengalami penurunan signifikan pada tahun 2024 menjadi 1.357,8 ton. Penurunan volume sampah yang tertangani tersebut tidak semata mencerminkan keberhasilan pengurangan timbulan sampah, melainkan juga mengindikasikan keterbatasan cakupan sistem pengelolaan sampah yang belum merata di seluruh wilayah kabupaten.

Saat ini, pengelolaan sampah secara formal baru terfokus di empat desa yang berada di wilayah pusat pemerintahan kabupaten. Seluruh timbulan sampah dari desa-desa tersebut dikumpulkan melalui 15 unit Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan kemudian dibuang ke satu unit Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Sementara itu, sebanyak 88 desa lainnya masih melakukan pengelolaan sampah secara konvensional dan terbatas, seperti mengumpulkan sampah di kolam penampungan, membuang pada lokasi yang ditentukan oleh pemerintah desa, atau membakar

sampah secara terbuka—praktik yang memiliki risiko terhadap kesehatan dan pencemaran lingkungan.

Keterbatasan armada pengangkut sampah menjadi tantangan utama dalam pengelolaan persampahan di daerah ini. Hingga tahun 2024, Kabupaten Seram Bagian Barat hanya memiliki:

- 5 unit mobil pengangkut sampah;
- 2 unit alat berat; dan
- 1 unit truk tronton.

Keterbatasan sarana dan prasarana ini menyebabkan jangkauan layanan pengangkutan sampah menjadi sangat terbatas dan tidak dapat menjangkau sebagian besar wilayah pedesaan.

Di sisi lain, upaya pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui pemanfaatan teknologi komposter telah mulai diimplementasikan. Sepanjang tahun 2023, telah tersedia 29 unit komposter untuk pengolahan sampah organik. Melalui fasilitas ini, telah diolah sebanyak 33,9 ton sampah organik, yang menghasilkan 6,7 ton Pupuk Organik Cair (POC) dan 20,3 ton Pupuk Organik Padat (POP). Meskipun kontribusi ini masih relatif kecil terhadap total timbulan sampah, namun menunjukkan potensi pengembangan sistem pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular dan pemberdayaan masyarakat.

Secara keseluruhan, kondisi ini mencerminkan perlunya peningkatan kapasitas kelembagaan, penguatan infrastruktur persampahan, serta perluasan cakupan layanan ke wilayah desa, guna mendukung terwujudnya sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan, terintegrasi, dan berkeadilan lingkungan.

6) Resilensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

a. Kerentanan Adaptasi Perubahan Iklim

Analisis terhadap kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengukur tingkat kesiapsiagaan suatu wilayah atau sektor dalam merespons dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim. Kajian ini penting untuk merumuskan strategi adaptasi yang berbasis data dan kondisi lokal.

Beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim antara lain melalui analisis Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim dan analisis Indeks Kerentanan. Analisis jasa lingkungan pengaturan iklim menilai peran ekosistem dalam mengatur iklim mikro dan makro, termasuk kemampuan penyerapan karbon, pengaturan suhu, dan pengendalian kelembaban

**Tabel 2.14. Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim
di Kabupaten Seram Bagian Barat**

Kecamatan	Luas Wilayah Berdasarkan Kelas Jasa (Ha)				
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
Amalatu	-	352,96	90,03	1.107,51	28.065,99
Elpaputih	-	180,81	379,94	883,69	63.005,84
Huamual	-	385,03	340,16	2.799,80	37.254,93
Huamual Belakang	16,01	337,56	1.929,52	8.155,34	38.132,58
Inamosol	7,37	69,52	588,25	1.215,29	65.675,63
Kairatu	15,14	813,66	432,03	3.644,71	11.421,47
Kairatu Barat	-	588,27	361,67	2.099,07	13.030,40
Kepulauan Manipa	-	61,86	168,26	312,71	11.250,97
Seram Barat	5,63	992,92	2.277,65	8.583,26	64.885,92
Taniwel	-	145,33	307,08	1.437,87	90.814,16
Taniwel Timur	-	173,93	43,89	1.052,56	30.880,62
Kabupaten SBB	44,15	4.101,85	6.918,48	31.291,80	454.418,49

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025-2029

Sebagian besar wilayah di Kabupaten Seram Bagian Barat dikategorikan memiliki jasa lingkungan pengaturan iklim kelas sangat tinggi, dengan luas mencapai 454.418,49 ha. Kondisi ini mencerminkan kapasitas ekologis wilayah tersebut dalam mendukung fungsi pengaturan iklim, seperti penyerapan karbon, stabilisasi suhu, dan pengendalian kelembaban. Dengan dominasi

kelas jasa lingkungan yang tinggi, tingkat kerentanan terhadap perubahan iklim di wilayah ini dapat dikatakan relatif rendah, sementara kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim berada pada tingkat yang relatif tinggi.

**Tabel 2.15. Indeks Kerentanan Perubahan Iklim
Kabupaten Seram Bagian Barat**

Kecamatan	IKA	IKS	Indeks Kerentanan
Amalatu	0,47	0,53	0,41
Elpaputih	0,40	0,55	0,52
Huamual	0,50	0,54	0,41
Huamual Belakang	0,46	0,52	0,41
Inamosol	0,45	0,55	0,41
Kairatu	0,62	0,57	0,38
Kairatu Barat	0,46	0,52	0,41
Kepulauan Manipa	0,42	0,49	0,41
Seram Barat	0,53	0,52	0,41
Taniwel	3,69	3,64	0,47
Taniwel Timur	0,45	0,59	0,49
Amalatu	0,45	0,63	0,44
Elpaputih	0,54	0,52	0,41

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025-2029

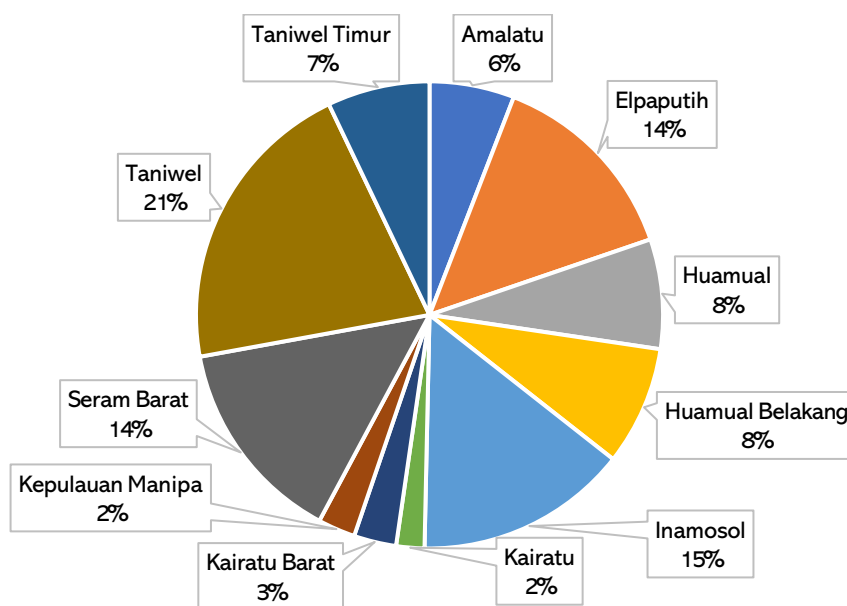
Secara keseluruhan, rata-rata indeks kerentanan terhadap perubahan iklim di Kabupaten Seram Bagian Barat berada pada angka 0,43, yang termasuk dalam kategori kerentanan cukup rendah. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah di kabupaten ini memiliki potensi dampak yang relatif minimal apabila terjadi bencana iklim. Oleh karena itu, dalam perencanaan program atau aksi adaptasi, lokasi dengan tingkat kerentanan dan/atau risiko yang lebih tinggi perlu diprioritaskan. Dalam konteks ini, Kecamatan Taniwel tercatat sebagai wilayah dengan indeks kerentanan tertinggi, sehingga layak menjadi prioritas dalam intervensi adaptasi iklim.

**Tabel 2.16. Potensi Emisi Karbon dan Cadangan Karbon
Berdasarkan Tutupan Lahan
di Kabupaten Seram Bagian Barat**

Tutupan Lahan	Cadangan Karbon (C Ton/Ha)	Emisi Karbon (Ton)
Bangunan Permukiman/ Campuran	27.031,36	1.054.222,87
Danau/Telaga	-	-
Hutan Lahan Rendah	72.240.674,39	10.474.897.786,82
Kebun dan Tanaman Campuran (Tahunan dan Semusim)	1.598.436,76	-
Lahan Terbuka Lain	847,66	8.476,55
Rawa Pedalaman	-	-
Rawa Pesisir	-	-
Sabana atau Herbal dan Rumput	53.488,69	133.721,72
Semak dan Belukar	72.308,59	2.169.257,84
Sungai	-	-
Tanaman Semusim Lahan Basah	2.310,51	23.105,14
Tanaman Semusim Lahan Kering	206.348,54	2.063.485,44

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025-2029

**Gambar 2.8. Grafik Persentase Potensi Emisi Karbon
Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Barat**



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025-2029

Lebih lanjut, emisi karbon menjadi salah satu faktor penting yang turut meningkatkan tingkat kerentanan terhadap perubahan iklim. Emisi ini umumnya bersumber dari perubahan tutupan atau penggunaan lahan yang menyebabkan pelepasan cadangan karbon ke atmosfer dalam bentuk gas rumah kaca (GRK). Sebaliknya, cadangan karbon memiliki peran penting dalam menurunkan tingkat kerentanan dan meningkatkan kapasitas adaptasi, karena fungsinya dalam menyerap dan menyimpan karbon, serta mendukung stabilitas ekosistem. Oleh karena itu, pengelolaan lanskap yang berkelanjutan, termasuk perlindungan kawasan hutan dan lahan penyerap karbon lainnya, menjadi strategi penting dalam mendukung ketahanan iklim di wilayah ini.

Potensi emisi karbon tertinggi di Kabupaten Seram Bagian Barat tercatat berada di Kecamatan Taniwel, yang menyumbang sebesar 21% dari total emisi karbon wilayah. Hal ini menunjukkan bahwa kecamatan tersebut memiliki tekanan perubahan tutupan lahan yang relatif tinggi, sehingga berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kerentanan iklim di wilayah tersebut.

Sementara itu, cadangan karbon terbesar terdapat pada tutupan lahan Hutan Lahan Rendah, dengan estimasi sebesar

72.240.674,39 C Ton/Ha, atau setara dengan 98% dari total cadangan karbon di Kabupaten Seram Bagian Barat. Cadangan ini menunjukkan pentingnya keberadaan hutan lahan rendah sebagai penyangga utama dalam mitigasi perubahan iklim, mengingat fungsinya sebagai penyerap karbon yang sangat efektif.

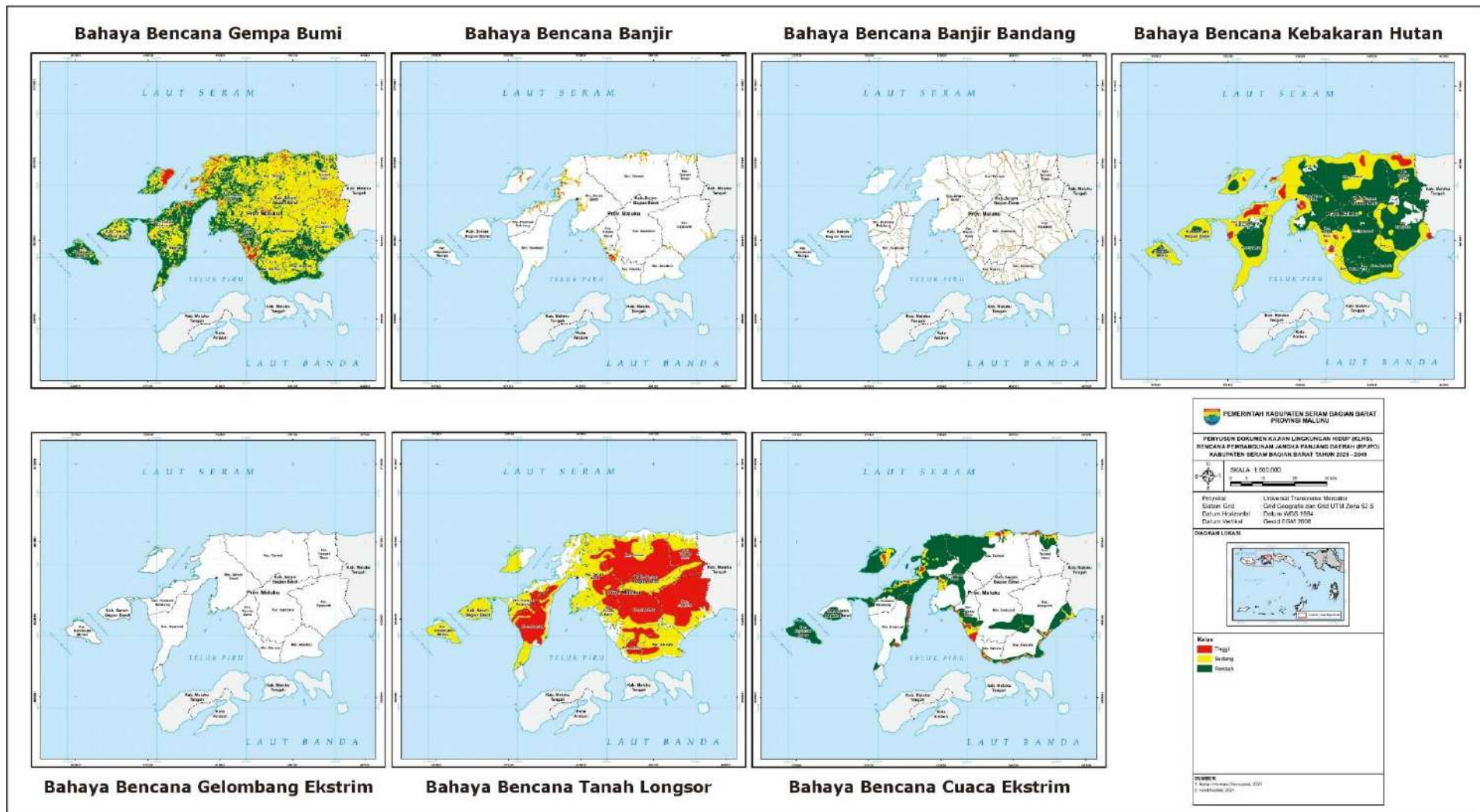
Oleh karena itu, upaya pelestarian kawasan hutan, khususnya di Kecamatan Taniwel, menjadi sangat strategis tidak hanya dalam menekan laju emisi karbon, tetapi juga dalam meningkatkan kapasitas adaptasi wilayah terhadap perubahan iklim. Pendekatan berbasis ekosistem (*ecosystem-based adaptation*) dapat menjadi arah kebijakan prioritas dalam mendukung ketahanan iklim yang berkelanjutan di daerah ini.

b. Kajian Risiko Bencana

Letak geografis dan karakteristik geologis Kabupaten Seram Bagian Barat menjadikan wilayah ini memiliki tingkat risiko bencana yang cukup tinggi dan beragam. Posisi geografis yang berada di kawasan pesisir menyebabkan wilayah ini rentan terhadap bencana hidrometeorologi seperti gelombang abrasi, banjir, banjir bandang, dan cuaca ekstrem. Sementara itu, keberadaan struktur geologi berupa pegunungan lipatan mengindikasikan adanya potensi signifikan terhadap bencana geologi, seperti gempa bumi dan tanah longsor.

Hampir seluruh wilayah di Kabupaten Seram Bagian Barat memiliki potensi bahaya gempa bumi, dengan total luas mencapai 496.631,23 hektare. Kelas bahaya yang paling mendominasi untuk bencana ini adalah kelas sedang, dengan cakupan seluas 306.196,87 hektare atau sekitar 61% dari total luas wilayah kabupaten. Hal ini menunjukkan bahwa gempa bumi merupakan salah satu jenis bencana yang memerlukan perhatian khusus dalam perencanaan penanggulangan bencana di wilayah ini.

Gambar 2.9. Peta Bahaya Bencana di Kabupaten Seram Bagian Barat



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025-2029

Bahaya banjir juga menjadi isu penting, dengan luas wilayah terdampak mencapai 17.792,94 hektare yang sebagian besar terletak di daerah pesisir. Kelas bahaya banjir yang paling dominan adalah kelas sedang (11.370,76 hektare atau 64%), sedangkan potensi bahaya banjir tinggi paling luas tercatat di Kecamatan Seram Barat, yaitu seluas 1.912,86 hektare.

Selain banjir, Kabupaten Seram Bagian Barat juga menghadapi risiko banjir bandang, terutama di wilayah-wilayah yang berada dekat dengan aliran sungai. Total luas wilayah yang memiliki potensi bahaya banjir bandang adalah 2.092,92 hektare, dengan dominasi kelas bahaya tinggi seluas 1.247,60 hektare atau sebesar 27% dari luas total bahaya. Kecamatan Taniwel Timur merupakan wilayah dengan cakupan potensi bahaya banjir bandang tinggi terluas, yaitu mencapai 15.012,31 hektare.

Bencana gelombang abrasi juga menjadi salah satu ancaman utama di wilayah pesisir, dengan luas potensi bahaya sebesar 8.923,84 hektare. Kelas bahaya yang mendominasi adalah kelas tinggi, dengan cakupan seluas 4.159,62 hektare (46%). Kecamatan Huamual Belakang merupakan wilayah dengan potensi abrasi tertinggi, mencakup 986,83 hektare untuk kelas bahaya tinggi.

Bahaya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tersebar hampir di seluruh wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat, dengan total luas potensi bahaya mencapai 465.733,20 hektare. Namun, kelas bahaya yang paling dominan adalah kelas rendah, dengan cakupan seluas 263.141,31 hektare atau sekitar 56% dari total luas wilayah. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun luas area yang berpotensi terdampak cukup besar, tingkat keparahan karhutla masih tergolong rendah secara umum.

Bencana tanah longsor juga menjadi risiko yang signifikan, dengan total luas wilayah rawan mencapai 428.963,32 hektare. Kelas bahaya tanah longsor yang paling dominan adalah kelas tinggi, yang identik dengan daerah perbukitan curam dan kondisi tanah labil.

Terakhir, potensi bahaya cuaca ekstrem di Kabupaten Seram Bagian Barat meliputi luas sebesar 181.083,29 hektare. Sebagian besar wilayah (80%) masuk dalam kelas bahaya rendah, dengan

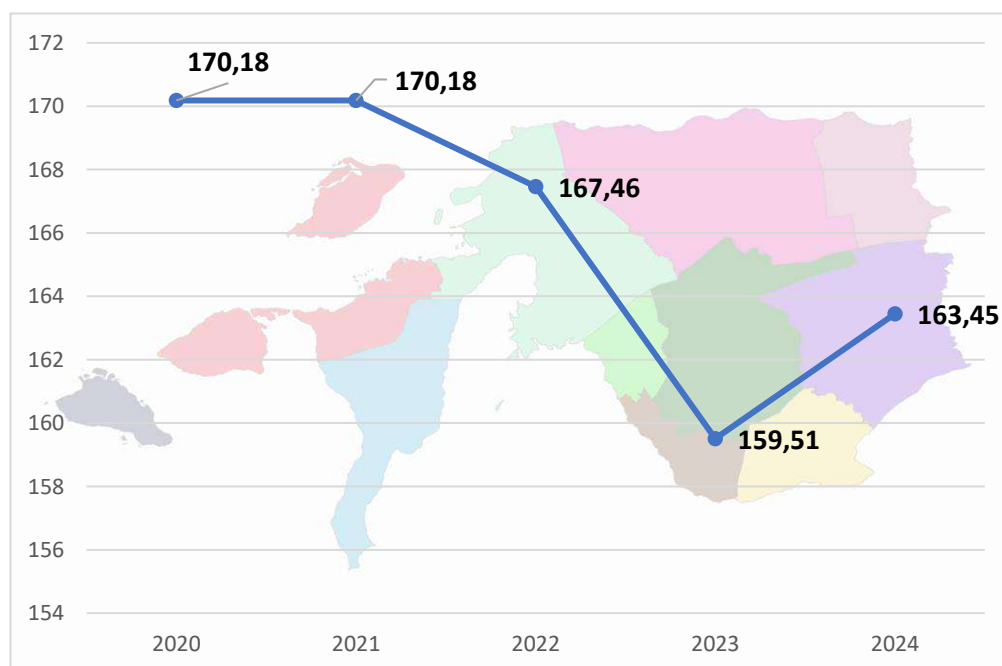
cakupan 146.108,38 hektare. Meski demikian, beberapa wilayah seperti Kecamatan Kairatu tercatat memiliki potensi bahaya cuaca ekstrem tinggi yang signifikan, yaitu seluas 2.201,90 hektare.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Seram Bagian Barat menghadapi multi-ancaman bencana yang memerlukan pendekatan penanggulangan berbasis spasial, integratif, dan berkelanjutan. Wilayah-wilayah dengan kelas bahaya tinggi, seperti Kecamatan Taniwel, Seram Barat, Taniwel Timur, dan Huamual Belakang, perlu menjadi prioritas dalam perencanaan program mitigasi dan adaptasi bencana yang diformulasikan dalam dokumen kebijakan daerah seperti RAD-PRB dan RAD-API. Optimalisasi sistem peringatan dini, penguatan kapasitas kelembagaan lokal, serta pengelolaan lingkungan berbasis ekosistem menjadi langkah strategis untuk meningkatkan ketahanan wilayah terhadap risiko bencana ke depan.

c. Indeks Risiko Bencana dan Kapasitas Daerah

Indeks Risiko Bencana merupakan alat ukur komprehensif yang mengintegrasikan faktor bahaya, kerentanan, dan kapasitas adaptasi dalam suatu wilayah untuk menilai potensi dampak bencana secara menyeluruh. Pada konteks Kabupaten Seram Bagian Barat, penghitungan dan analisis indeks ini menjadi krusial mengingat kompleksitas risiko bencana yang meliputi berbagai jenis ancaman, mulai dari bencana geologi seperti gempa bumi dan tanah longsor, hingga bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, dan gelombang abrasi. Dengan demikian, analisis indeks risiko bencana di Kabupaten Seram Bagian Barat menjadi landasan utama dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan yang responsif terhadap dinamika perubahan iklim dan lingkungan.

**Gambar 2.10. Indeks Risiko Bencana
Kabupaten Seram Bagian Barat**



Sumber: InaRisk BNPB, 2025

Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Seram Bagian Barat menunjukkan tren penurunan hingga tahun 2024, di mana nilai IRB tercatat sebesar 163,45. Meskipun terjadi penurunan, angka ini masih mengindikasikan tingkat risiko yang relatif tinggi, terutama jika dikaitkan dengan status kapasitas daerah yang berada pada kategori rendah. Kondisi ini mencerminkan keterbatasan sistemik dalam kesiapsiagaan, respons, dan pemulihan wilayah terhadap bencana. Kabupaten Seram Bagian Barat juga tergolong rentan terhadap beberapa jenis bencana utama, yakni kekeringan, gempa bumi, dan cuaca ekstrem. Tingkat paparan penduduk terhadap masing-masing bencana tersebut cukup signifikan, dengan persentase jiwa terpapar mencapai 100% untuk kekeringan, 80% untuk gempa bumi, dan 70% untuk cuaca ekstrem. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan kapasitas kelembagaan, sistem peringatan dini, serta integrasi kebijakan adaptasi dan mitigasi bencana dalam rencana pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan.

d. Indeks Ketahanan Daerah

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan alat ukur kapasitas daerah dalam menghadapi bencana. Nilai IKD di tingkat kabupaten/kota digunakan untuk menyusun peta kapasitas yang kemudian di-overlay dengan peta bahaya dan kerentanan guna menghasilkan peta risiko, sesuai dengan Perka BNPB No. 2 Tahun 2012 dan Petunjuk Teknis BNPB 2019. Nilai IKD diasumsikan seragam dalam satu wilayah administratif, meskipun rentang skalanya berbeda dengan indeks bahaya dan kerentanan, sehingga diperlukan normalisasi dalam analisis spasial terpadu.

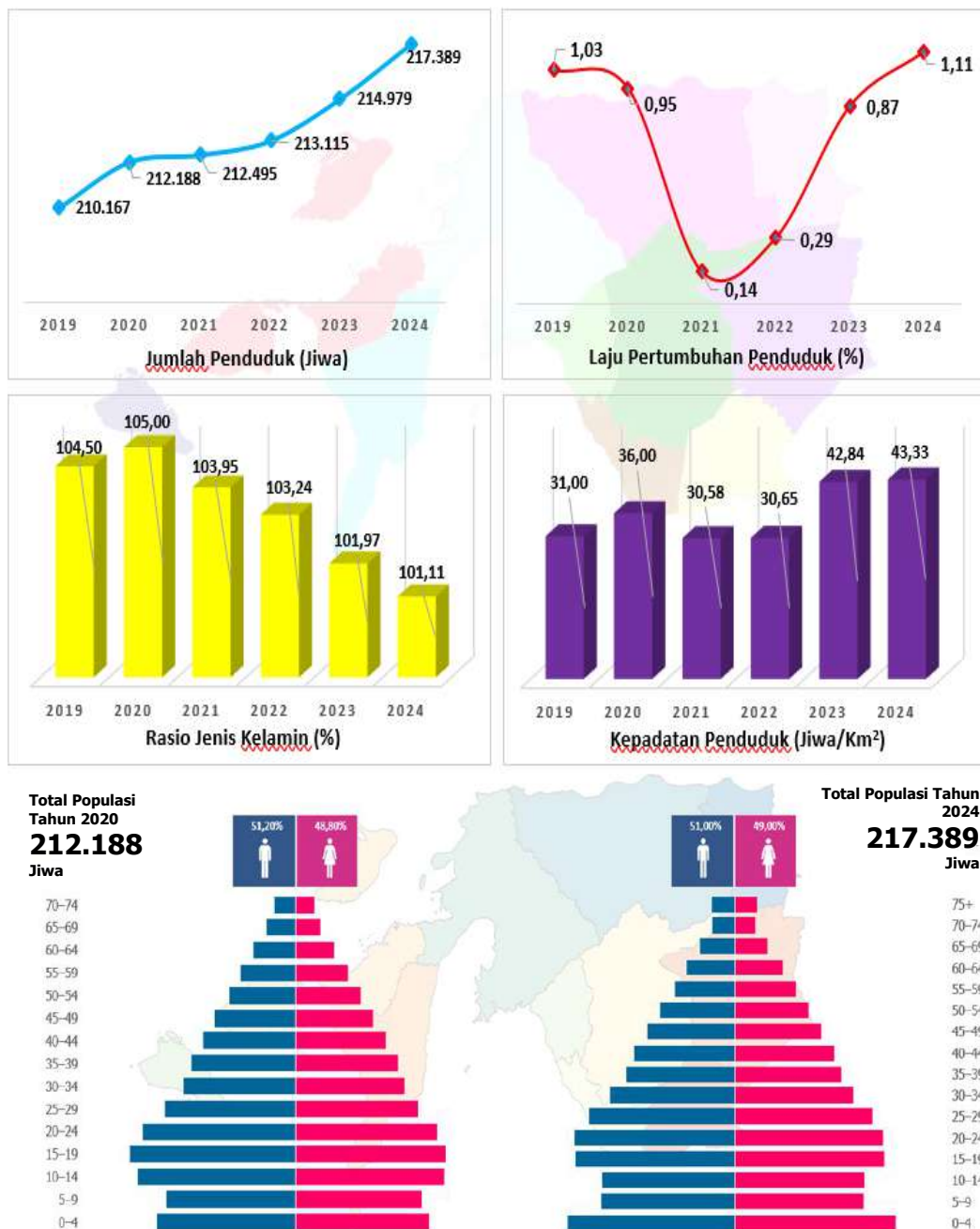
Berdasarkan hasil penghitungan menggunakan metode Indeks Ketahanan Daerah (IKD), Kabupaten Seram Bagian Barat pada tahun 2021 memperoleh nilai IKD sebesar 0,22, yang dikategorikan dalam kelas ketahanan rendah. Nilai ini mencerminkan masih terbatasnya kapasitas daerah dalam menghadapi potensi bencana, sehingga diperlukan upaya penguatan kapasitas pada berbagai sektor terkait pengurangan risiko bencana.

7) Demografi

a. Perkembangan Penduduk 2019-2024

Analisa data penduduk di Kabupaten Seram Bagian Barat merupakan salah satu indikator penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Dinamika jumlah penduduk dipengaruhi oleh faktor alami seperti kelahiran dan kematian, serta faktor migrasi yang mencerminkan mobilitas penduduk antarwilayah. Sebagai daerah yang terus berkembang, peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Seram Bagian Barat perlu dikelola secara terintegrasi, mengingat implikasinya terhadap kebutuhan pelayanan dasar, penyediaan infrastruktur, serta tata ruang wilayah. Oleh karena itu, pemantauan dan analisis terhadap tren pertumbuhan penduduk menjadi landasan strategis dalam merumuskan kebijakan pembangunan berkelanjutan di wilayah ini. Gambaran umum perkembangan penduduk di Kabupaten Seram Bagian Barat diperlihatkan pada Gambar berikut:

**Gambar 2.11. Perkembangan Penduduk Kabupaten
Seram Bagian Barat, 2019-2024**



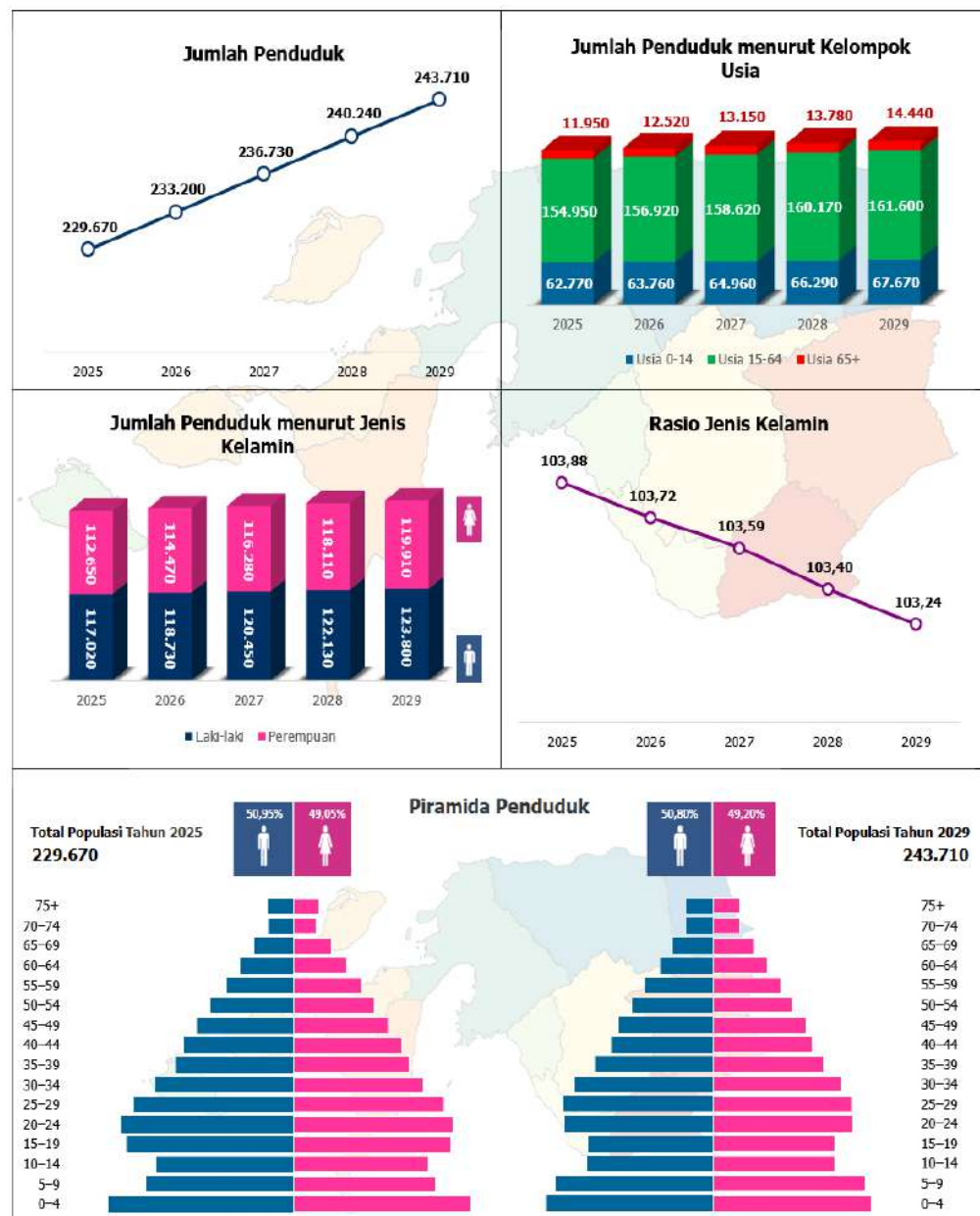
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat (Data Diolah, 2025)

b. Proyeksi Penduduk 2025-2029

Proyeksi penduduk merupakan salah satu komponen krusial dalam perencanaan pembangunan jangka menengah, karena menyediakan gambaran kuantitatif mengenai potensi jumlah penduduk di masa mendatang. Dalam konteks Kabupaten Seram Bagian Barat, proyeksi penduduk tahun 2025-2029 disusun sebagai

dasar perumusan kebijakan sektoral yang berorientasi pada penyediaan layanan dasar, pengelolaan sumber daya, dan pengendalian tata ruang wilayah. Analisis proyeksi ini mempertimbangkan tren pertumbuhan historis, angka kelahiran, kematian, serta pola migrasi yang berpengaruh terhadap dinamika demografi di wilayah ini. Dengan demikian, proyeksi ini menjadi instrumen penting dalam mendukung perencanaan pembangunan yang adaptif dan berkelanjutan. Hasil proyeksi penduduk di Kabupaten Seram Bagian Barat diperlihatkan pada Gambar 2.12.

Gambar 2.12. Proyeksi Penduduk Kabupaten Seram Bagian Barat, 2025-2029



Sumber: BPS Kabupaten Seram Bagian Barat (Data Diolah, 2025)

c. Keberadaan Masyarakat Adat

Keberadaan masyarakat adat di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) merupakan bagian integral dari struktur sosial dan budaya daerah yang berperan penting dalam menjaga nilai-nilai kearifan lokal, pengelolaan sumber daya alam, serta keberlanjutan sistem kehidupan komunitas. Masyarakat adat di wilayah ini hidup dalam tatanan nilai, norma, serta sistem pemerintahan adat yang telah diwariskan secara turun-temurun dan masih dijalankan hingga saat ini.

Kabupaten SBB memiliki 92 kesatuan masyarakat hukum adat yang dikenal dengan istilah *negeri*. Secara administratif, seluruh *negeri* tersebut telah ditetapkan sebagai desa melalui Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 11 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 165, Tambahan Nomor 0167), selanjutnya disebut Perda SBB Nomor 11 Tahun 2019. Pada Pasal 3 Perda tersebut dinyatakan bahwa: "Pembentukan desa di Kabupaten Seram Bagian Barat terdiri dari 92 (sembilan puluh dua) desa."

Sementara itu, pengakuan terhadap eksistensi dan kedudukan *negeri* sebagai kesatuan masyarakat hukum adat diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Negeri (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 167, Tambahan Nomor 0169), atau Perda SBB Nomor 13 Tahun 2019. Pasal 1 angka (7) menyebutkan bahwa *negeri* adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat genealogis-teritorial, memiliki batas wilayah yang jelas, serta berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, hukum adat, dan prakarsa masyarakat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional.

Hingga saat ini 92 *negeri* telah ditetapkan sebagai desa dalam Perda SBB Nomor 11 Tahun 2019, namun belum terdapat pengakuan formal yang eksplisit terhadap statusnya sebagai *negeri adat* dalam Perda SBB Nomor 13 Tahun 2019. Ketidaksinkronan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pengakuan keberadaan dan hak-hak masyarakat adat, serta membuka ruang disharmoni antara sistem pemerintahan administratif dan pemerintahan adat.

Penetapan suatu desa sebagai *negeri adat* memerlukan pemenuhan sejumlah kriteria substantif dan teknis, antara lain:

- Kriteria substantif: (a) sejarah masyarakat hukum adat, (b) batas wilayah adat, (c) hukum adat yang masih berlaku, (d) kepemilikan harta benda adat, dan (e) keberadaan sistem pemerintahan adat.
- Kriteria teknis: mencakup kelengkapan unsur negeri asli (seperti petuanan negeri, batu pamali, balai adat, dan lembaga negeri), kelengkapan *soa adat* (nama soa, kepala soa, simbol adat), serta silsilah dan atribut *matarumah* atau rumah tua.

Keberadaan masyarakat adat di Kabupaten Seram Bagian Barat perlu diarusutamakan, dimana pengakuan dan pemberdayaan masyarakat adat menjadi komponen penting dalam mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis budaya lokal.

B. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

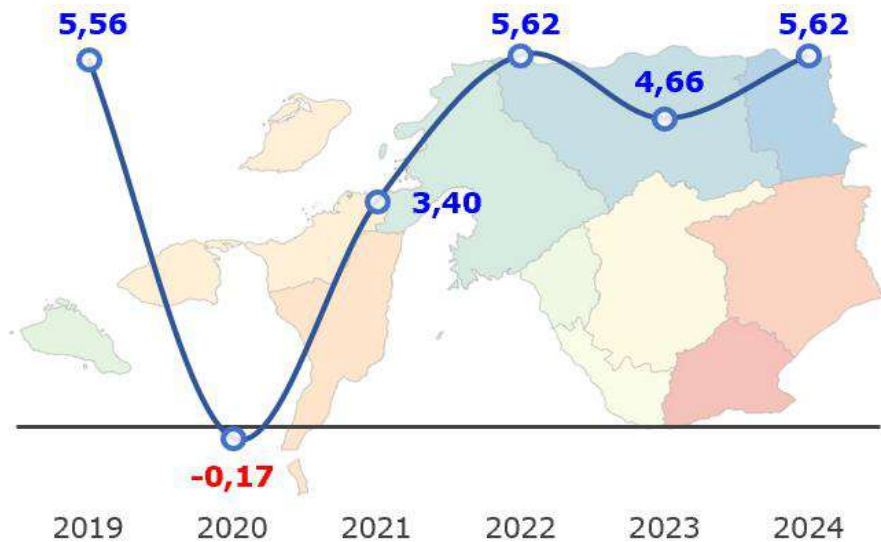
1) Kesejahteraan Ekonomi

a. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Seram Bagian Barat mencerminkan dinamika aktivitas produksi barang dan jasa di berbagai sektor yang berlangsung dalam satu periode tertentu. Sebagai indikator utama kinerja makroekonomi daerah, pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memberikan gambaran tentang arah dan kecepatan perkembangan ekonomi yang terjadi di wilayah ini. Analisis terhadap laju pertumbuhan PDRB penting dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan pembangunan, mengidentifikasi sektor-sektor unggulan maupun yang masih tertinggal, serta merumuskan strategi perencanaan yang adaptif dan berbasis potensi lokal. Kajian terhadap tren dan determinan laju pertumbuhan ekonomi menjadi landasan penting dalam perumusan program pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan kesenjangan

antarwilayah, dan penciptaan struktur ekonomi yang lebih inklusif dan berdaya saing.

Gambar 2.13. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Seram Bagian Barat, 2019-2024



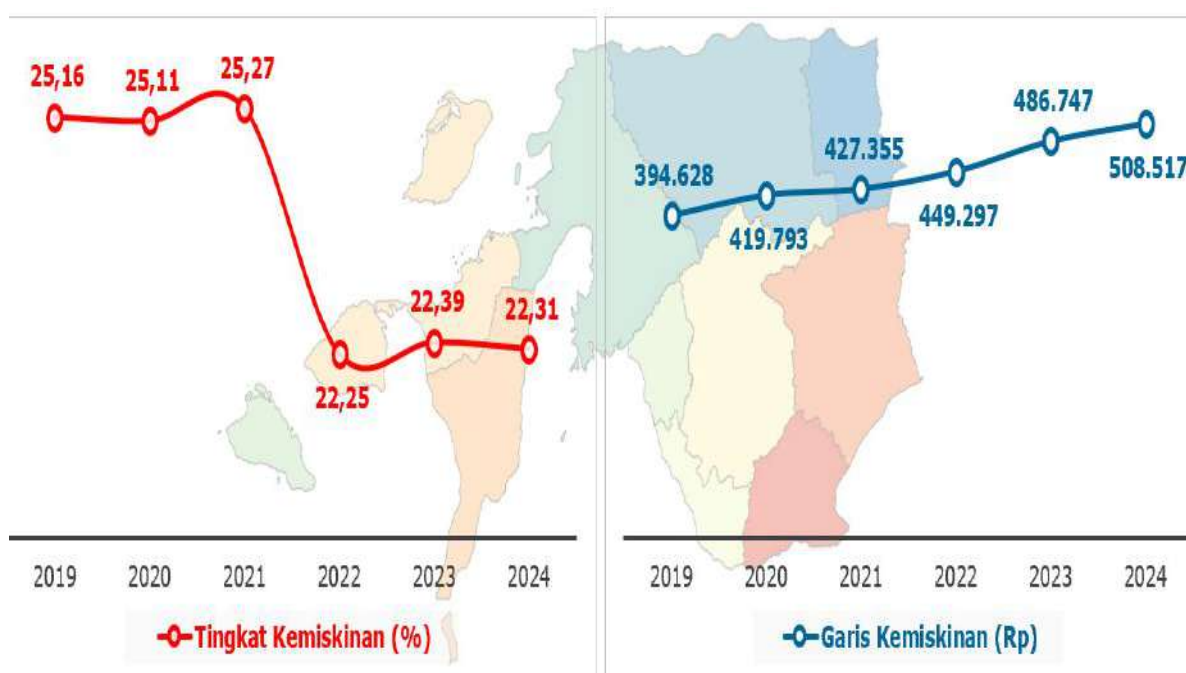
Sumber: BPS Kabupaten Seram Bagian Barat, Tahun 2025

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikator makroekonomi yang menggambarkan dinamika perkembangan aktivitas ekonomi dalam suatu wilayah dari waktu ke waktu. Di Kabupaten Seram Bagian Barat, fluktuasi pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) selama periode 2019–2024 mencerminkan respons perekonomian lokal terhadap berbagai faktor internal maupun eksternal, termasuk dampak pandemi COVID-19 dan pemulihan pasca pandemi. Pemantauan terhadap tren pertumbuhan ini penting untuk menilai efektivitas kebijakan pembangunan daerah, mengidentifikasi sektor-sektor pendorong pertumbuhan, serta merumuskan strategi pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Sebelum masuk pada pembahasan mendalam, uraian berikut menyajikan gambaran umum kinerja pertumbuhan ekonomi Kabupaten Seram Bagian Barat selama enam tahun terakhir sebagai dasar analisis perencanaan pembangunan ke depan.

b. Tingkat Kemiskinan

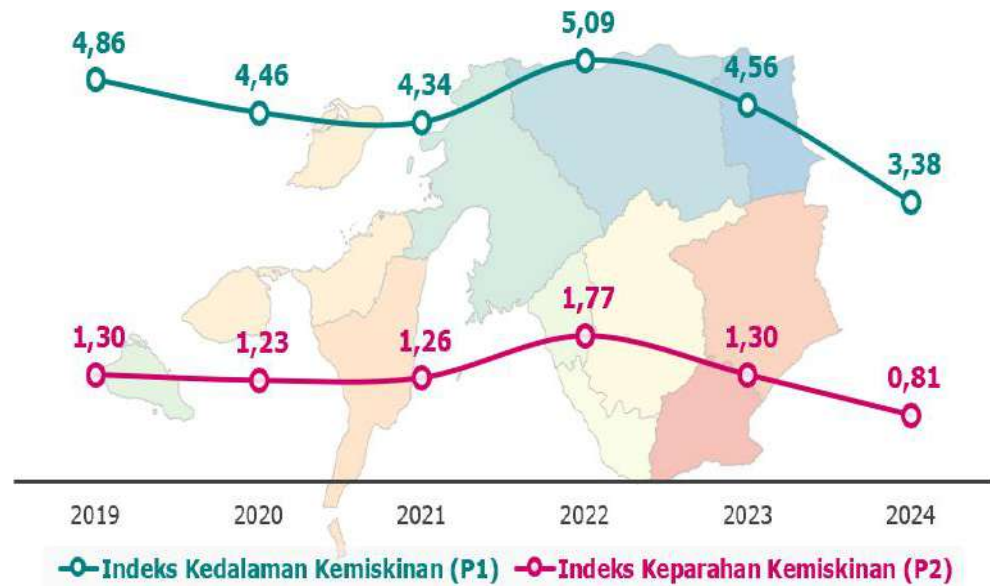
Tingkat kemiskinan merupakan salah satu indikator utama dalam mengukur kesejahteraan masyarakat dan keberhasilan pembangunan sosial-ekonomi suatu daerah. Indikator ini menggambarkan persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan, yaitu mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimum baik dari sisi makanan maupun non-makanan. Dalam konteks Kabupaten Seram Bagian Barat, analisis terhadap tingkat kemiskinan memiliki signifikansi strategis karena mencerminkan efektivitas intervensi kebijakan, distribusi hasil pembangunan, serta ketahanan sosial masyarakat terhadap tekanan ekonomi. Pemantauan terhadap dinamika kemiskinan secara periodik juga menjadi dasar dalam perumusan program penanggulangan kemiskinan yang lebih terarah, berbasis data, dan responsif terhadap kondisi lokal. Oleh karena itu, pemahaman atas tren, distribusi spasial, serta determinan kemiskinan menjadi komponen penting dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah yang inklusif dan berkeadilan.

Gambar 2.14. Persentase Tingkat Kemiskinan dan Garis Kemiskinan di Kabupaten Seram Bagian Barat, 2019-2024



Sumber: BPS Kabupaten Seram Bagian Barat, Tahun 2025

**Gambar 2.15. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan
Indeks Keparahan Kemiskinan di
Kabupaten Seram Bagian Barat, 2019-2024**



Sumber: BPS Kabupaten Seram Bagian Barat, Tahun 2025

Data menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Seram Bagian Barat mengalami penurunan dari 25,27% pada tahun 2021 menjadi 22,31% pada tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan adanya perbaikan kondisi sosial-ekonomi masyarakat, meskipun penurunan tersebut berlangsung secara gradual dan masih berada di atas rata-rata Provinsi Maluku.

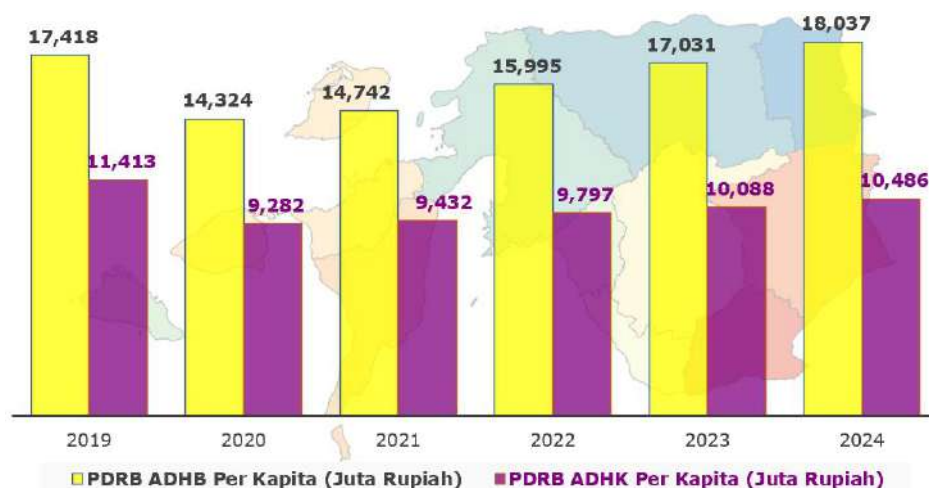
Garis kemiskinan terus meningkat dari Rp394.628 pada tahun 2019 menjadi Rp508.517 pada tahun 2024, yang menunjukkan adanya kenaikan kebutuhan hidup minimum sebagai akibat dari inflasi dan peningkatan harga barang kebutuhan dasar. Artinya, meskipun jumlah penduduk miskin menurun, daya beli masyarakat tetap menjadi isu kritis yang perlu diintervensi secara sistematis.

Indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2) juga menunjukkan tren positif, terutama pada tahun 2024, masing-masing menurun menjadi 3,38 dan 0,81. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar penduduk miskin telah bergerak lebih dekat ke garis kemiskinan, dan kesenjangan antar penduduk miskin mulai menurun. Artinya, efektivitas program pengentasan kemiskinan mulai menunjukkan hasil, namun belum sepenuhnya merata.

c. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita merupakan indikator makroekonomi yang menggambarkan tingkat rata-rata pendapatan masyarakat di suatu wilayah dan menjadi tolok ukur penting dalam menilai kesejahteraan ekonomi penduduk secara umum. Di Kabupaten Seram Bagian Barat, perkembangan PDRB per kapita mencerminkan dinamika pertumbuhan ekonomi yang terjadi, sekaligus mencerminkan kontribusi sektor-sektor ekonomi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, analisis PDRB per kapita memberikan dasar yang kuat untuk mengevaluasi capaian pembangunan ekonomi, mengidentifikasi kesenjangan antar wilayah atau kelompok penduduk, serta merumuskan kebijakan strategis untuk mendorong pemerataan dan peningkatan kesejahteraan. Oleh karena itu, pemantauan terhadap tren PDRB per kapita secara periodik menjadi penting dalam menyusun arah kebijakan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis potensi lokal.

Gambar 2.16. PDRB per Kapita Kabupaten Seram Bagian Barat, 2019-2024



Sumber: BPS Kabupaten Seram Bagian Barat, Tahun 2025

Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Kabupaten Seram Bagian Barat menunjukkan dinamika yang mencerminkan tekanan dan pemulihan ekonomi dalam kurun waktu enam tahun terakhir. Pada tahun 2020, baik PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (ADHB) maupun atas dasar harga konstan

(ADHK) mengalami penurunan tajam, masing-masing dari Rp17,418 juta menjadi Rp14,324 juta (ADHB) dan dari Rp11,413 juta menjadi Rp9,282 juta (ADHK). Penurunan tersebut selaras dengan dampak pandemi COVID-19 terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk gangguan pada sektor-sektor produktif utama di daerah.

Sejak tahun 2021, tren pemulihan mulai terlihat dengan peningkatan bertahap pada kedua indikator. PDRB per kapita ADHB meningkat dari Rp14,742 juta pada 2021 menjadi Rp18,037 juta pada 2024, sementara PDRB ADHK per kapita naik dari Rp9,432 juta menjadi Rp10,486 juta dalam periode yang sama. Kenaikan ini menunjukkan adanya pemulihan daya beli masyarakat, peningkatan produktivitas, serta stabilitas ekonomi yang berangsur membaik pasca pandemi.

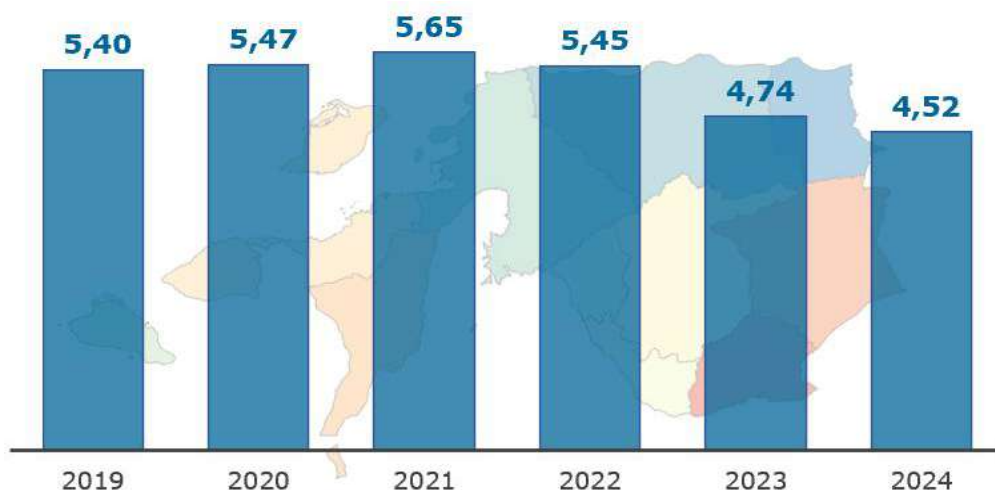
Namun demikian, meskipun pertumbuhan PDRB per kapita menunjukkan tren positif, besarnya nilai per kapita yang relatif rendah menunjukkan masih terbatasnya output ekonomi per individu, yang mencerminkan tantangan dalam hal produktivitas dan nilai tambah sektor-sektor ekonomi lokal. Oleh karena itu, diperlukan strategi pembangunan ekonomi yang lebih terfokus pada penguatan sektor unggulan, peningkatan keterampilan tenaga kerja lokal, serta perluasan akses terhadap pasar dan teknologi guna mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Seram Bagian Barat.

d. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator strategis dalam mengukur efektivitas pembangunan ekonomi daerah, khususnya dalam hal penciptaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja produktif. Di Kabupaten Seram Bagian Barat, dinamika TPT mencerminkan kemampuan struktur ekonomi lokal dalam menyediakan kesempatan kerja yang seimbang dengan pertumbuhan angkatan kerja. Pemantauan dan analisis terhadap perkembangan TPT menjadi penting untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan struktural maupun sektoral dalam pasar kerja, sekaligus menjadi dasar perumusan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih adaptif dan responsif terhadap tantangan pembangunan

daerah, termasuk tantangan digitalisasi, transformasi sektor-sektor unggulan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sebelum membahas lebih lanjut tren dan implikasi dari angka TPT di wilayah ini, penting untuk memahami konteks sosial-ekonomi yang melatarbelakanginya.

Gambar 2.17. Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten SBB, 2019-2024



Sumber: BPS Kabupaten Seram Bagian Barat, Tahun 2025

Data tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Seram Bagian Barat menunjukkan dinamika yang merefleksikan kondisi pasar tenaga kerja dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2019, TPT tercatat sebesar 5,40% dan mengalami peningkatan berturut-turut hingga mencapai 5,65% pada tahun 2021. Peningkatan ini diduga kuat dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 yang menekan aktivitas ekonomi, menyebabkan stagnasi sektor usaha, dan berdampak pada tersedianya lapangan kerja formal maupun informal.

Namun, mulai tahun 2022, tren TPT menunjukkan arah perbaikan dengan penurunan menjadi 5,45%, dan kembali turun lebih signifikan pada 2023 (4,74%) serta 2024 (4,52%). Penurunan ini dapat ditafsirkan sebagai indikasi pemulihan ekonomi daerah pasca-pandemi, peningkatan efektivitas program-program peningkatan keterampilan dan kewirausahaan, serta pergeseran ke sektor-sektor produktif seperti pertanian, perdagangan, dan jasa. Selain itu, keberlanjutan pembangunan infrastruktur dan kebijakan

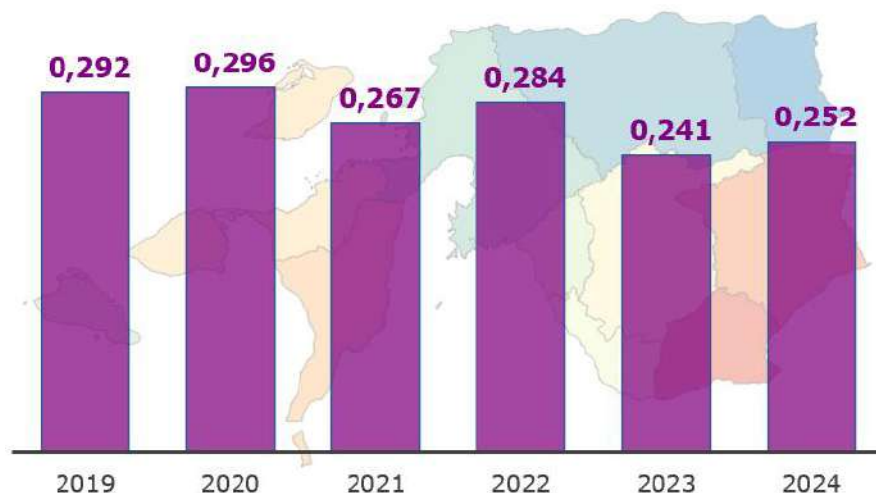
padat karya kemungkinan turut mendorong terciptanya lapangan kerja baru di berbagai wilayah kecamatan.

Kondisi ini perlu terus dipantau dan dianalisis secara holistik agar intervensi pemerintah daerah dalam RPJMD dapat lebih terarah, khususnya dalam hal penyediaan pelatihan berbasis kebutuhan pasar, pemberdayaan ekonomi lokal, serta penguatan sinergi antar-sektor dalam penciptaan lapangan kerja berkelanjutan dan inklusif.

e. Indeks Gini

Indeks Gini merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di suatu wilayah. Di Kabupaten Seram Bagian Barat, fluktuasi nilai Indeks Gini dari tahun ke tahun mencerminkan dinamika dalam pemerataan hasil pembangunan dan akses terhadap sumber daya ekonomi oleh masyarakat. Nilai yang semakin mendekati nol menunjukkan distribusi pendapatan yang lebih merata, sedangkan nilai yang mendekati satu menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Oleh karena itu, pengamatan terhadap tren Indeks Gini menjadi penting sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang berorientasi pada keadilan sosial dan pengurangan kesenjangan antar kelompok masyarakat.

Gambar 2.18. Rasio Gini Kabupaten Seram Bagian Barat, 2019-2024



Sumber: BPS Kabupaten Seram Bagian Barat, Tahun 2025

Berdasarkan data Indeks Gini Kabupaten Seram Bagian Barat dari tahun 2019 hingga 2024, terlihat adanya dinamika ketimpangan distribusi pendapatan antar penduduk. Pada awal periode, Indeks Gini tercatat sebesar 0,292 dan sempat mengalami sedikit peningkatan pada 2020 menjadi 0,296, yang mencerminkan melemahnya pemerataan pendapatan, kemungkinan akibat tekanan ekonomi dari pandemi COVID-19. Namun, penurunan tajam pada tahun 2021 hingga mencapai 0,267 menunjukkan adanya perbaikan dalam distribusi pendapatan, yang kemudian berfluktuasi di tahun-tahun berikutnya. Angka terendah tercapai pada 2023 yaitu 0,241, mencerminkan tingkat ketimpangan yang relatif rendah. Kenaikan kembali pada 2024 menjadi 0,252 perlu dicermati sebagai sinyal awal potensi ketimpangan yang membesar. Fluktuasi ini menandakan bahwa upaya peningkatan kesejahteraan dan pemerataan hasil pembangunan perlu terus diperkuat agar ketimpangan tidak kembali meningkat dan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Kabupaten Seram Bagian Barat.

f. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit yang mencerminkan capaian pembangunan jangka panjang di bidang kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Di Kabupaten Seram Bagian Barat, IPM menjadi tolok ukur penting dalam mengevaluasi kualitas hidup masyarakat serta efektivitas intervensi kebijakan pembangunan. Penguatan IPM mencerminkan keberhasilan daerah dalam menyediakan akses yang merata terhadap layanan dasar, meningkatkan daya saing sumber daya manusia, dan memperkuat ketahanan sosial-ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, analisis terhadap tren IPM di Kabupaten Seram Bagian Barat tidak hanya menggambarkan capaian pembangunan manusia secara makro, tetapi juga menjadi dasar strategis dalam perencanaan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas dan keadilan pembangunan antarwilayah serta antar kelompok sosial.

Gambar 2.19. Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Seram Bagian Barat, Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kabupaten Seram Bagian Barat, Tahun 2025

Berdasarkan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Seram Bagian Barat selama periode 2020–2024, terlihat adanya tren pertumbuhan positif yang konsisten dari tahun ke tahun. IPM meningkat dari 69,68 pada tahun 2020 menjadi 72,54 pada tahun 2024, yang mencerminkan perbaikan berkelanjutan dalam dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup masyarakat. Kenaikan yang cukup signifikan terjadi antara tahun 2021 dan 2022, menunjukkan kemungkinan pengaruh dari pemulihan pascapandemi serta efektivitas program-program pembangunan manusia yang dijalankan oleh pemerintah daerah. Tren ini mengindikasikan bahwa upaya pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Seram Bagian Barat telah berada pada jalur yang tepat, meskipun diperlukan analisis lanjutan untuk mengidentifikasi kontribusi spesifik dari masing-masing komponen penyusun IPM serta dampaknya terhadap ketimpangan dan keberlanjutan pembangunan jangka panjang.

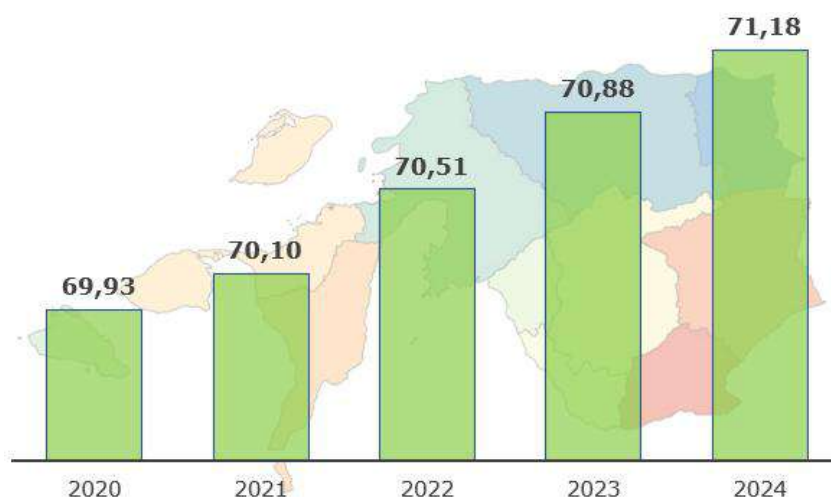
2) Kesehatan untuk Semua

a. Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan salah satu indikator utama dalam mengukur dimensi kesehatan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang mencerminkan kualitas layanan

kesehatan dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Di Kabupaten Seram Bagian Barat, UHH menjadi cerminan keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan, seperti akses terhadap layanan kesehatan dasar, ketersediaan fasilitas medis, serta perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat. Peningkatan UHH dari tahun ke tahun tidak hanya menunjukkan bertambahnya rata-rata umur hidup penduduk, tetapi juga mengindikasikan adanya perbaikan dalam kondisi lingkungan, gizi, serta penanganan penyakit menular maupun tidak menular. Oleh karena itu, analisis terhadap tren UHH penting dilakukan sebagai dasar dalam merumuskan arah kebijakan kesehatan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di masa mendatang.

**Gambar 2.20. Usia Harapan Hidup
di Kabupaten Seram Bagian Barat, 2020-2024**



Sumber: BPS Kabupaten Seram Bagian Barat, Tahun 2025

Berdasarkan data Usia Harapan Hidup (UHH) di Kabupaten Seram Bagian Barat selama periode 2020 hingga 2024, terlihat adanya tren peningkatan yang konsisten dari 69,93 tahun pada 2020 menjadi 71,18 tahun pada 2024. Peningkatan ini menunjukkan perbaikan bertahap dalam aspek kesehatan masyarakat, yang dapat dikaitkan dengan membaiknya akses layanan kesehatan dasar, gizi, sanitasi, serta efektivitas program intervensi kesehatan oleh pemerintah daerah. Kenaikan signifikan pada periode 2021–2022 menunjukkan adanya momentum pemulihan pascapandemi COVID-19 yang berdampak positif terhadap kualitas hidup masyarakat. Tren ini juga mencerminkan keterkaitan erat antara sektor

kesehatan dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara keseluruhan. Oleh karena itu, UHH menjadi indikator penting dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan berkelanjutan di bidang kesehatan, terutama dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat.

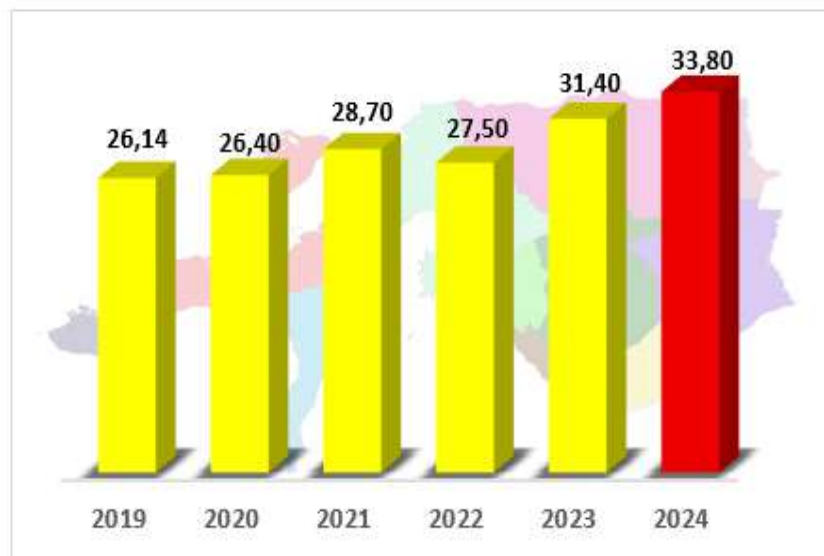
b. Indeks Keluarga Sehat

Indeks Keluarga Sehat (IKS) merupakan instrumen strategis dalam menilai derajat kesehatan masyarakat pada tingkat keluarga secara komprehensif, yang mengintegrasikan aspek perilaku, lingkungan, serta akses terhadap pelayanan kesehatan. Dalam konteks Kabupaten Seram Bagian Barat, meskipun belum tersedia data spesifik IKS di tingkat kabupaten, nilai IKS Provinsi Maluku tahun 2023 sebesar 0,172 dapat dijadikan acuan awal untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi di wilayah ini. Angka tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan indikator-indikator kesehatan keluarga masih berada pada tingkat rendah, yang mencerminkan perlunya intervensi yang lebih terfokus dan kolaboratif lintas sektor. Beberapa aspek prioritas yang perlu diperkuat meliputi peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat, perbaikan sanitasi lingkungan, serta perluasan cakupan dan mutu layanan kesehatan dasar. Dengan demikian, peningkatan IKS tidak hanya menjadi ukuran keberhasilan sektor kesehatan, tetapi juga menjadi cerminan dari keberhasilan pembangunan sosial dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh di Kabupaten Seram Bagian Barat.

c. Prevalensi Stunting

Prevalensi stunting menjadi indikator penting dalam menilai masalah gizi kronis anak yang berdampak pada pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif. Di Kabupaten Seram Bagian Barat, penanganan stunting menjadi prioritas dalam pembangunan kesehatan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Upaya penurunan stunting harus dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan melalui kebijakan lintas sektor.

**Gambar 2.21. Prevalensi Stunting di
Kabupaten Seram Bagian Barat, 2019-2024**



Sumber: Data SKI dan SSGI Kemenkes RI (Data Diolah, 2025)

Berdasarkan data prevalensi stunting di Kabupaten Seram Bagian Barat, terlihat adanya tren yang fluktuatif dalam lima tahun terakhir. Angka prevalensi stunting terus meningkat dari tahun ke tahun, dan pada tahun 2024 mencapai 33,80%. Kenaikan ini menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan intervensi stunting seperti intervensi gizi terpadu, peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak, serta penguatan program edukasi gizi di tingkat keluarga tidak berjalan dengan maksimal. Sebaliknya, lonjakan sebelumnya menunjukkan masih adanya kerentanan terhadap ketahanan pangan dan akses layanan dasar. Oleh karena itu, kesinambungan kebijakan dan penguatan koordinasi lintas sektor menjadi kunci untuk menjaga tren penurunan stunting secara berkelanjutan.

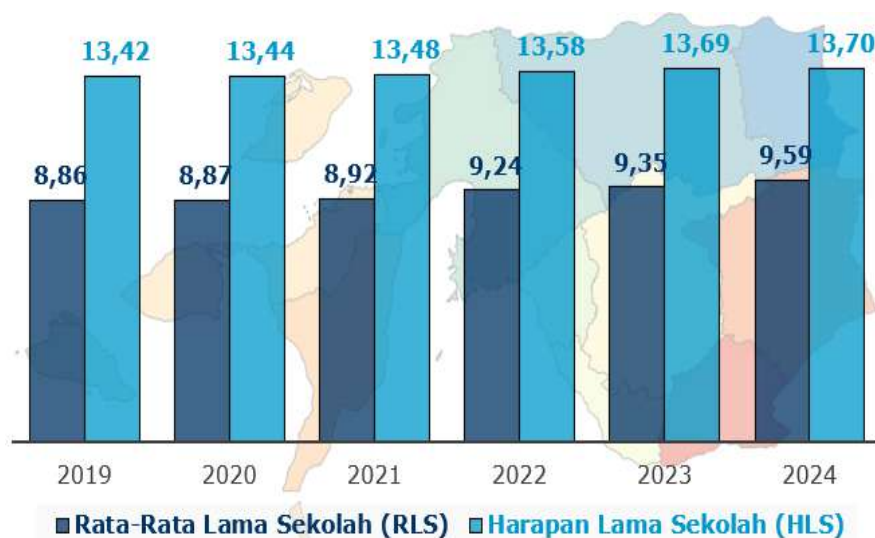
3) Pendidikan Berkualitas yang Merata

a. Indikator Capaian Lama Sekolah

Indikator capaian lama sekolah merupakan salah satu parameter penting dalam mengukur kualitas dan pemerataan pendidikan di suatu daerah. Lama sekolah mencerminkan rata-rata tahun pendidikan yang telah ditempuh oleh penduduk usia tertentu, sehingga menjadi gambaran umum tingkat pencapaian pendidikan masyarakat. Di Kabupaten Seram Bagian Barat, pemantauan

capaian lama sekolah menjadi acuan strategis untuk menilai keberhasilan program pendidikan, sekaligus sebagai dasar perumusan kebijakan peningkatan akses dan mutu pendidikan. Tren capaian lama sekolah yang positif akan berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan mendukung pembangunan daerah secara menyeluruh.

**Gambar 2.22. RLS dan HLS
di Kabupaten Seram Bagian Barat, 2019-2024**



Sumber: BPS Kabupaten Seram Bagian Barat, Tahun 2025

Indikator Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Seram Bagian Barat menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama periode 2019 hingga 2024. RLS yang bertambah dari 8,86 tahun pada 2019 menjadi 9,59 tahun pada 2024 mencerminkan peningkatan akses dan keberhasilan dalam mempertahankan peserta didik pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Sementara itu, HLS yang meningkat dari 13,42 tahun menjadi 13,70 tahun mengindikasikan ekspektasi masyarakat yang semakin tinggi terhadap durasi pendidikan, sebagai cerminan dari keberhasilan kebijakan pendidikan yang lebih inklusif dan perbaikan kualitas fasilitas pendidikan di wilayah ini.

Perkembangan positif kedua indikator tersebut tidak hanya merefleksikan kemajuan sistem pendidikan, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat secara

menyeluruh. Pendidikan yang lebih lama dan bermutu membuka peluang kerja yang lebih baik serta meningkatkan produktivitas tenaga kerja, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, tingkat pendidikan yang lebih tinggi berhubungan erat dengan penurunan kemiskinan dan pengangguran, serta peningkatan akses terhadap layanan kesehatan dan kesadaran pola hidup sehat. Oleh karena itu, upaya peningkatan pendidikan perlu diintegrasikan secara sinergis dengan program pengentasan kemiskinan, perbaikan layanan kesehatan, dan pengembangan ekonomi lokal untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Seram Bagian Barat.

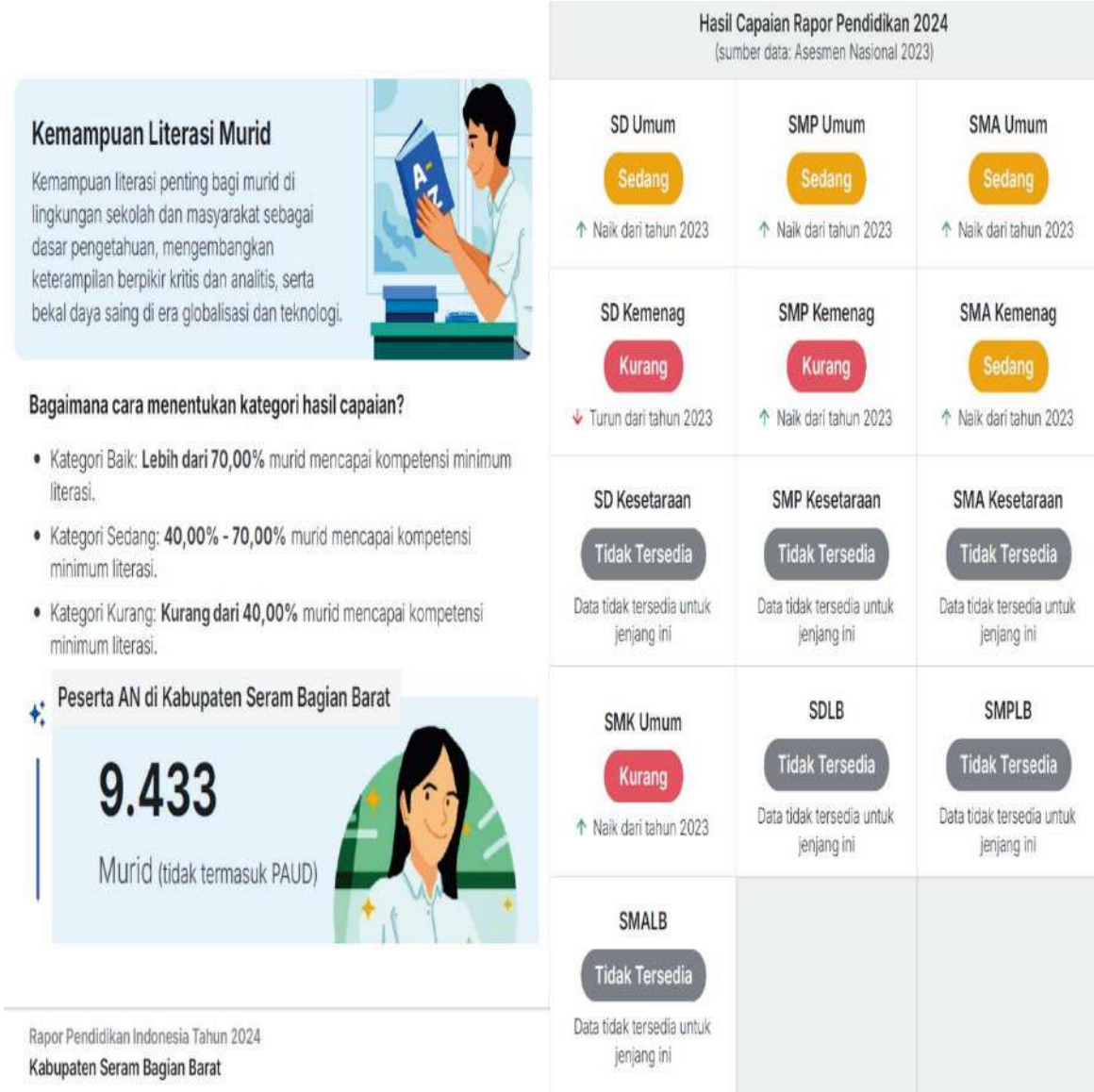
b. Indikator Capaian Literasi dan Numerasi

Rapor Pendidikan merupakan instrumen evaluasi komprehensif yang menilai berbagai aspek dalam sistem pendidikan, meliputi hasil belajar peserta didik, proses pembelajaran, pemerataan kualitas layanan, manajemen sekolah, serta kualitas sumber daya manusia yang terlibat di lingkungan sekolah. Sejak tahun 2022, Rapor Pendidikan telah diadopsi oleh sekolah dan pemerintah daerah sebagai pedoman strategis dalam merencanakan dan mengimplementasikan peningkatan mutu layanan pendidikan yang lebih merata dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan pendekatan ini, Rapor Pendidikan berperan penting dalam mendorong perbaikan berkelanjutan guna mewujudkan pendidikan yang inklusif dan berkualitas di tingkat daerah.

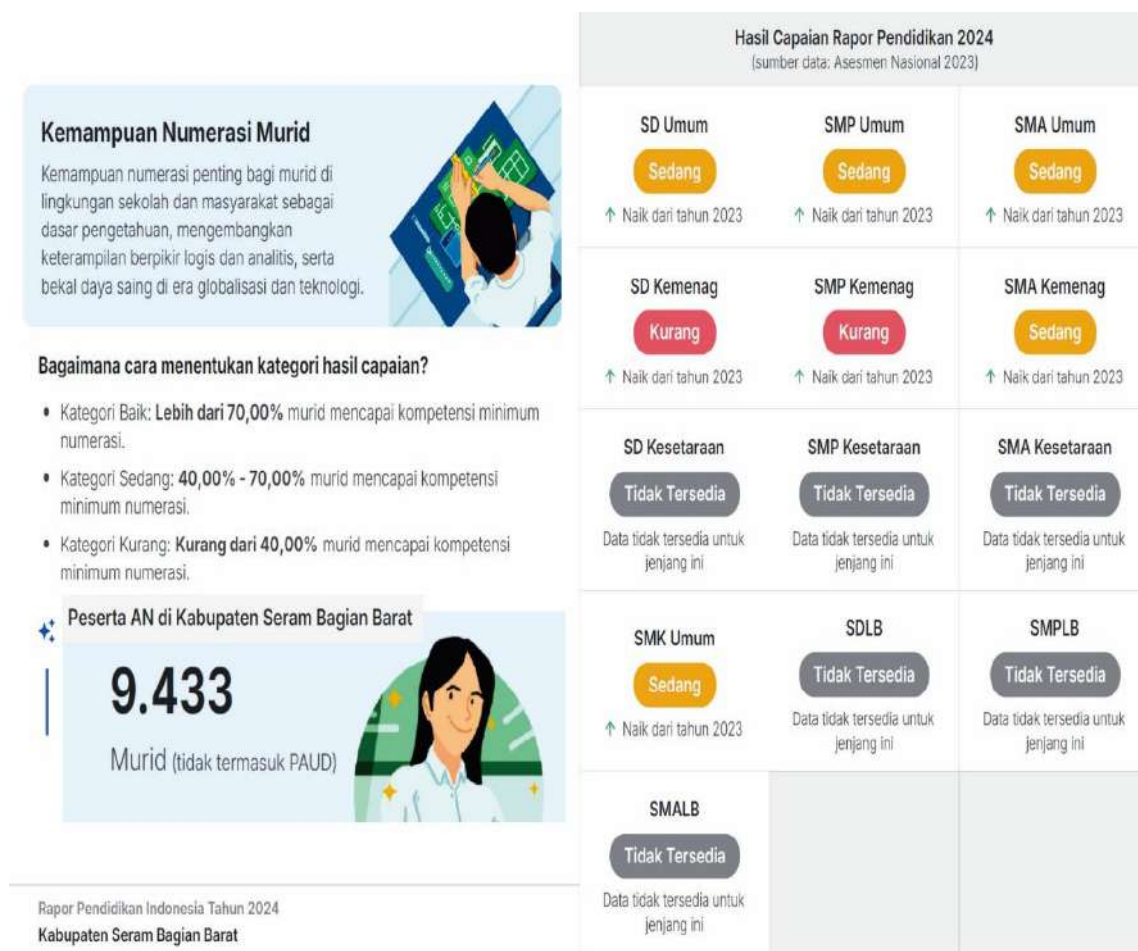
Laporan Kemampuan Literasi Murid Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2025, berdasarkan hasil Rapor Pendidikan Indonesia, memberikan gambaran komprehensif tentang capaian literasi siswa di berbagai jenjang pendidikan. Literasi diidentifikasi sebagai kompetensi fundamental yang esensial dalam menunjang keberhasilan pembelajaran dan pengembangan keterampilan berpikir kritis serta analisis, terutama di era digital dan globalisasi saat ini. Dengan partisipasi sebanyak 9.433 siswa dalam Asesmen Nasional, capaian literasi di tingkat pendidikan umum (SD, SMP, SMA) mengalami peningkatan di tahun 2024 dibandingkan tahun

sebelumnya (2023). Namun, capaian literasi di sekolah di bawah Kementerian Agama dan pendidikan vokasi (SMK) masih menunjukkan hasil di kategori kurang hingga sedang, menandakan perlunya fokus kebijakan dan intervensi strategis guna memperkuat kualitas literasi pada segmen tersebut. Laporan ini menjadi acuan penting bagi pemangku kepentingan dalam merumuskan langkah-langkah peningkatan mutu pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan di wilayah Seram Bagian Barat.

Gambar 2.23. Capaian Literasi Siswa di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2024



Gambar 2.24. Capaian Numerasi Siswa di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2024



Sumber: Rapor Pendidikan Indonesia, Tahun 2025

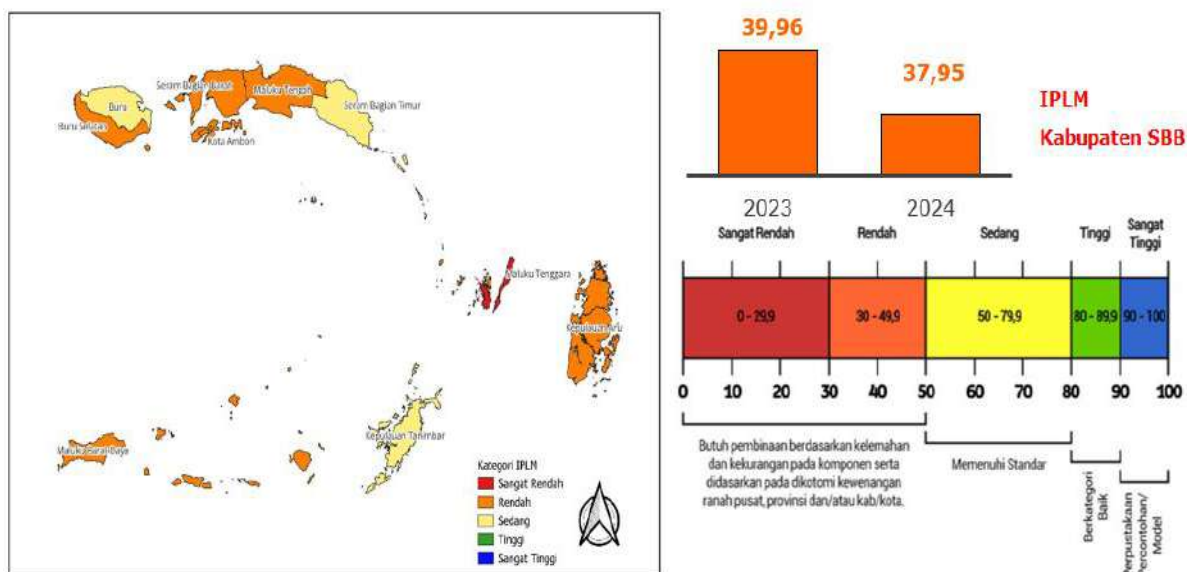
Hasil evaluasi Indeks Kemampuan Numerasi Murid di Kabupaten Seram Bagian Barat sesuai dengan Rapor Pendidikan Indonesia Tahun 2025. Numerasi, sebagai kompetensi kunci dalam memahami dan menerapkan konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari, meliputi kemampuan berpikir logis, penyelesaian masalah, serta analisis informasi berbasis angka. Dari total 9.433 siswa peserta Asesmen Nasional (tidak termasuk PAUD), capaian numerasi pada jenjang pendidikan umum (SD, SMP, SMA) menunjukkan peningkatan yang konsisten dibandingkan tahun sebelumnya, dengan kategori “Sedang” sebagai level pencapaian. Namun, capaian numerasi di sekolah di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag) dan pendidikan vokasi (SMK) masih berada pada kategori “Kurang,” meskipun menunjukkan perbaikan dari tahun sebelumnya. Temuan ini menegaskan perlunya

penguatan kebijakan dan program yang fokus pada peningkatan numerasi khususnya di sekolah berbasis agama dan vokasi, agar kualitas pembelajaran matematika dapat lebih merata dan meningkatkan daya saing sumber daya manusia di daerah ini. Laporan ini menjadi landasan penting dalam merancang strategi intervensi yang terintegrasi untuk memperbaiki kualitas numerasi secara menyeluruh di Kabupaten Seram Bagian Barat.

c. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat merupakan indikator penting yang mengukur tingkat kemampuan masyarakat dalam mengakses, memahami, dan memanfaatkan informasi secara efektif dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Indeks ini mencerminkan kualitas pendidikan nonformal dan formal serta kesadaran literasi yang berperan besar dalam mendorong peningkatan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat. Peningkatan indeks ini menunjukkan kemajuan dalam pembentukan budaya baca tulis yang inklusif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi, sekaligus menjadi tolok ukur keberhasilan program pemerintah dan komunitas dalam membangun sumber daya manusia yang kompeten dan mandiri.

Gambar 2.25. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat di Kabupaten SBB, 2023-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik (Data Diolah, 2025)

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat menunjukkan penurunan dari 39,96 pada tahun 2022 menjadi 37,95 pada tahun 2023. Penurunan ini mengindikasikan adanya kendala atau tantangan yang dialami masyarakat dalam mengakses bahan bacaan, keterbatasan kebijakan yang mendukung literasi, atau mungkin kurangnya partisipasi aktif dalam program-program literasi yang diinisiasi oleh pemerintah atau komunitas. Data yang belum lengkap untuk tahun-tahun sebelumnya membuat analisis tren jangka panjang menjadi terbatas, sehingga sulit untuk memetakan pola perkembangan literasi secara menyeluruh di wilayah ini.

Penurunan indeks ini menjadi sinyal penting bagi pemangku kebijakan untuk mengevaluasi dan memperkuat strategi pengembangan literasi masyarakat, misalnya dengan memperluas akses perpustakaan, meningkatkan kampanye literasi, dan mendorong peran aktif keluarga dan sekolah dalam pembentukan budaya baca tulis. Jika Anda ingin, saya dapat membantu menghubungkan data ini dengan indikator sosial-ekonomi lain atau mencari faktor-faktor penyebab lebih spesifik untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran.

d. Indeks Literasi Digital

Literasi digital di Kabupaten Seram Bagian Barat menghadapi tantangan signifikan meski akses internet dan perangkat digital mulai berkembang. Banyak masyarakat, terutama di daerah terpencil, belum mampu memanfaatkan teknologi secara optimal, sehingga menghambat akses informasi, pendidikan digital, dan partisipasi dalam ekonomi digital. Penyebabnya antara lain keterbatasan infrastruktur, rendahnya pengetahuan penggunaan teknologi, serta kesenjangan akses antara wilayah urban dan rural. Untuk itu, diperlukan program pelatihan literasi digital yang inklusif serta perluasan infrastruktur teknologi di seluruh wilayah Kabupaten.

Gambar 2.26. Indeks Literasi Digital Provinsi Maluku, Tahun 2019-2024



*Sumber: Komdigi RI dan *Expert Judgement PSP Unpatti 2025*

Gambar 2.26 memperlihatkan perkembangan Indeks Literasi Digital di Provinsi Maluku dari 2019 hingga 2024, dengan peningkatan yang stabil namun bertahap. Indeks ini naik dari 3,21 pada 2019 menjadi proyeksi 3,79 pada 2024, termasuk lonjakan signifikan antara 2021 dan 2022. Meski demikian, kemajuan literasi digital masih menghadapi tantangan terutama dalam pemerataan akses teknologi di wilayah terpencil. Untuk mempercepat peningkatan literasi digital, dibutuhkan penguatan infrastruktur teknologi, pelatihan berkelanjutan bagi masyarakat, serta kolaborasi lintas sektor yang intensif agar penguasaan teknologi dapat merata dan inklusif.

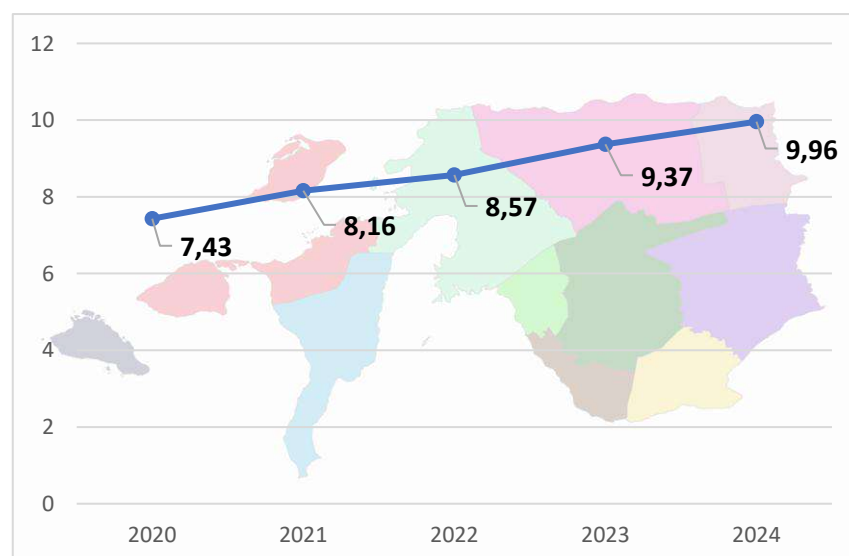
Selain itu, Indeks Literasi Digital Provinsi Maluku dapat dijadikan indikator proxy untuk Kabupaten Seram Bagian Barat. Kondisi sosial, ekonomi, dan geografis yang serupa serta kebijakan provinsi yang diterapkan memberikan gambaran relevan tentang tingkat literasi digital di kabupaten tersebut. Oleh karena itu, tren dan proyeksi tingkat provinsi ini penting untuk memahami potensi serta tantangan yang dihadapi Seram Bagian Barat dalam meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakatnya.

4) Perlindungan Sosial yang Adaptif

Perlindungan sosial merupakan salah satu instrumen penting dalam pembangunan manusia yang inklusif dan berkeadilan, khususnya dalam menjamin keberlangsungan hidup dan kesejahteraan kelompok rentan dan pekerja. Dalam konteks ketenagakerjaan, penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi bentuk tanggung jawab negara dan pemerintah daerah dalam melindungi tenaga kerja dari berbagai risiko sosial dan ekonomi yang mungkin terjadi selama menjalani aktivitas kerja. Program ini mencakup perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja, kematian, hari tua, dan pensiun, yang bertujuan untuk memberikan rasa aman, kepastian, dan keberlanjutan pendapatan bagi pekerja dan keluarganya.

Cakupan kepesertaan dalam program jaminan sosial tenaga kerja, seperti BPJS Ketenagakerjaan, menjadi indikator penting dalam mengukur seberapa adaptif sistem perlindungan sosial yang berjalan. Persentase tenaga kerja yang telah terdaftar dan aktif mengikuti program ini menggambarkan tingkat komitmen dan kesadaran terhadap pentingnya jaminan sosial, baik dari sisi pekerja maupun pemberi kerja. Oleh karena itu, peningkatan kepesertaan secara berkelanjutan menjadi bagian dari strategi daerah dalam menciptakan sistem perlindungan sosial yang tangguh, adaptif, dan responsif terhadap dinamika sosial dan ekonomi masyarakat.

Gambar 2.27. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja



Sumber: BPJS Ketenagakerjaan, Tahun 2025

Cakupan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja di Kabupaten Seram Bagian Barat menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama periode lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, persentase tenaga kerja yang telah terdaftar dan aktif mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan tercatat sebesar 7,43%. Angka ini mengalami peningkatan menjadi 8,16% pada tahun 2021, dan terus bertambah menjadi 8,57% di tahun 2022. Peningkatan ini menunjukkan adanya upaya berkelanjutan dari pemerintah daerah dalam mendorong perlindungan sosial bagi tenaga kerja, termasuk melalui sosialisasi program dan kolaborasi dengan berbagai pihak.

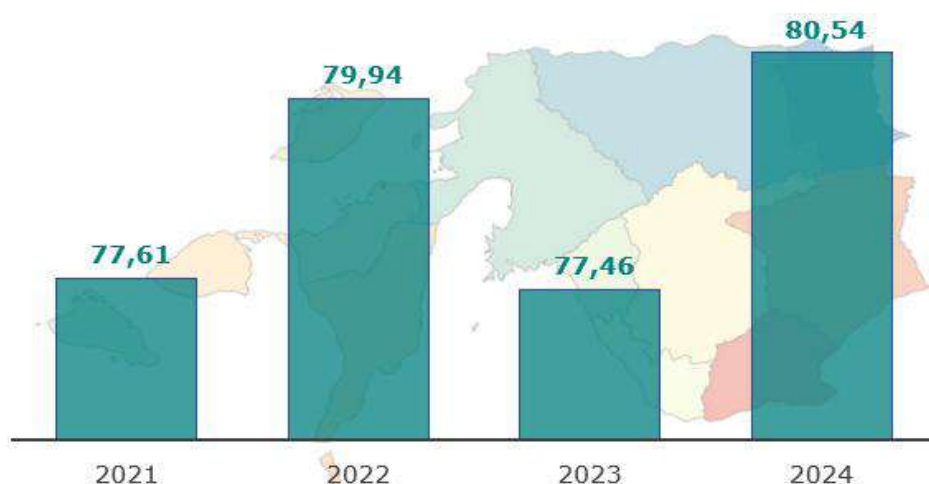
Lebih lanjut, pada tahun 2023 cakupan kepesertaan meningkat menjadi 9,37%, dan kembali naik pada tahun 2024 mencapai 9,96%. Kenaikan yang konsisten ini mencerminkan adanya peningkatan kesadaran di kalangan pemberi kerja dan pekerja terhadap pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan. Meski demikian, capaian ini masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan total potensi angkatan kerja yang ada, sehingga diperlukan strategi yang lebih agresif dan kolaboratif, baik dari sisi regulasi, insentif, maupun penguatan kapasitas kelembagaan untuk memperluas jangkauan perlindungan sosial yang lebih merata dan adaptif ke depan.

5) Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

a. Indeks Kerukunan Umat Beragama

Indikator Kerukunan Umat Beragama mengukur tingkat harmoni, toleransi, dan kohesi antar pemeluk agama di suatu wilayah. Di Kabupaten Seram Bagian Barat, indikator ini sangat strategis sebagai cermin stabilitas sosial dan keberhasilan pembangunan berbasis kebhinekaan. Kerukunan beragama tidak hanya mempengaruhi kualitas kehidupan bermasyarakat, tetapi juga menjadi dasar keamanan, pembangunan inklusif, dan partisipasi warga. Oleh karena itu, pemantauan dan penguatan kerukunan umat beragama penting dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berlandaskan nilai kebersamaan.

Gambar 2.28. Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Maluku, 2021-2024



Sumber: Kemenag RI (Data Diolah, 2025)

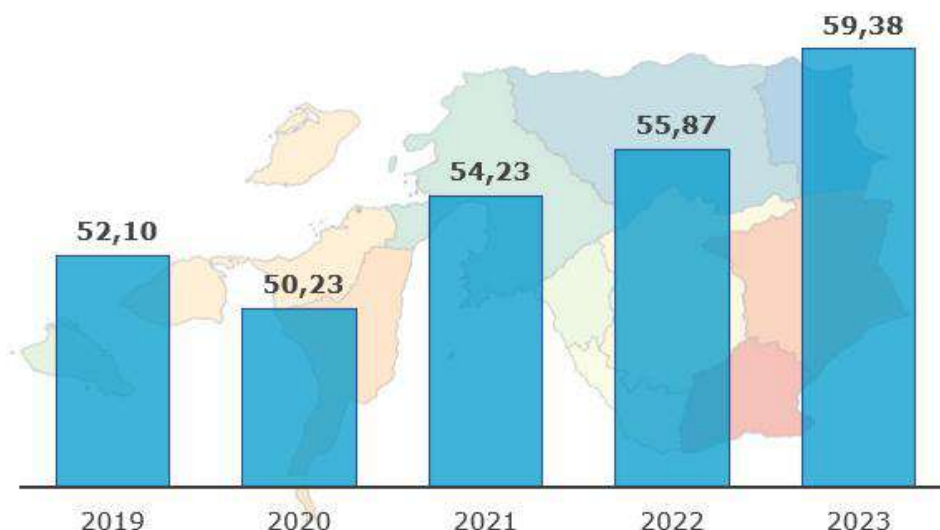
Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) di Provinsi Maluku menunjukkan fluktuasi namun relatif stabil antara 2021 hingga 2024, dengan capaian tertinggi 80,54 pada 2024 yang masuk kategori tinggi. Karena data khusus untuk Kabupaten Seram Bagian Barat belum tersedia, indeks provinsi ini dapat dijadikan proxy untuk memperkirakan kondisi kerukunan di kabupaten tersebut, mengingat kesamaan dinamika sosial dan keagamaan. Kenaikan indeks dari 77,61 pada 2021 ke 80,54 pada 2024 menandakan penguatan nilai toleransi dan harmonisasi antarumat beragama, yang didukung peran aktif Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), tokoh agama, dan kebijakan daerah. Meski terjadi penurunan kecil pada 2023, tren keseluruhan positif. Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian ini, perlu upaya berkelanjutan dalam edukasi kebhinekaan, dialog lintas iman, serta penguatan sistem pencegahan konflik berbasis komunitas.

b. Indeks Pembangunan Kebudayaan

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) adalah indikator komprehensif yang mengukur kontribusi pembangunan kebudayaan terhadap kemajuan daerah. IPK mencerminkan integrasi nilai-nilai budaya dalam pendidikan, ekonomi, dan partisipasi sosial, sekaligus menilai pelestarian warisan budaya dan peran budaya dalam membentuk identitas serta meningkatkan kualitas hidup

masyarakat. Sebagai alat strategis dalam perencanaan pembangunan daerah, IPK membantu memetakan potensi budaya sebagai kekuatan pendorong pembangunan yang inklusif, inovatif, dan berkelanjutan.

Gambar 2.29. Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Maluku, 2019-2023



Sumber: Kemendikdasmen RI (Data Diolah, 2025)

SPBE (IPK) Provinsi Maluku yang meningkat dari 52,10 pada 2019 menjadi 59,38 pada 2023 menunjukkan tren positif dalam pengarusutamaan budaya pada pembangunan daerah. Sebagai proksi capaian Kabupaten Seram Bagian Barat, tren ini menjadi landasan penting untuk merumuskan strategi pembangunan berbasis budaya yang terintegrasi dan mendukung kebijakan sektoral secara sinergis.

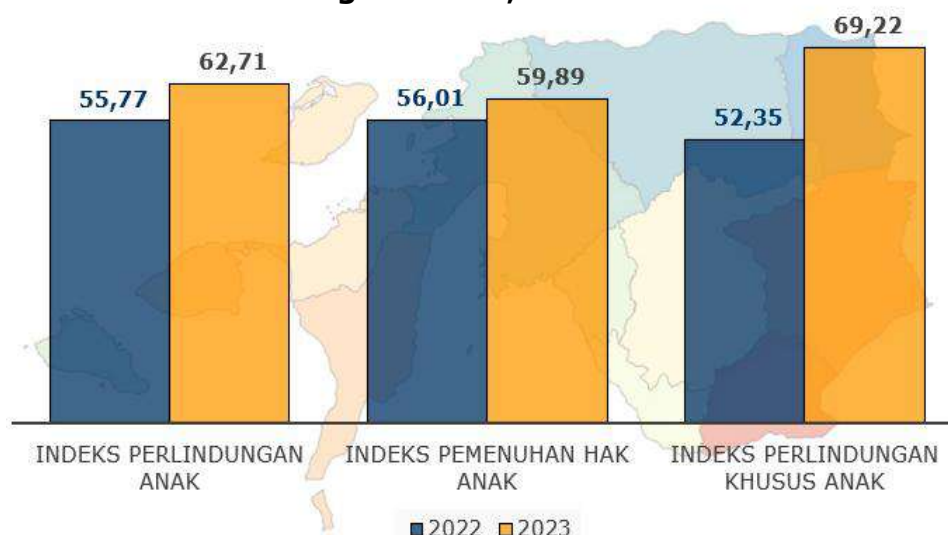
6) Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

a. Indeks Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Anak merupakan alat ukur penting yang menggambarkan sejauh mana upaya perlindungan terhadap hak-hak anak terlaksana dalam suatu wilayah. Indeks ini mencakup berbagai aspek seperti pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi, serta akses anak terhadap layanan pendidikan dan kesehatan yang layak. Dengan memantau indeks ini, pemerintah dan pemangku kepentingan dapat menilai efektivitas

kebijakan serta program perlindungan anak, sekaligus mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian lebih. Indeks Perlindungan Anak menjadi indikator kunci dalam menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembang optimal bagi anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.

Gambar 2.30. Indeks Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Barat, 2022-2023



Sumber: Kementerian PPPA RI (Data Diolah, 2025)

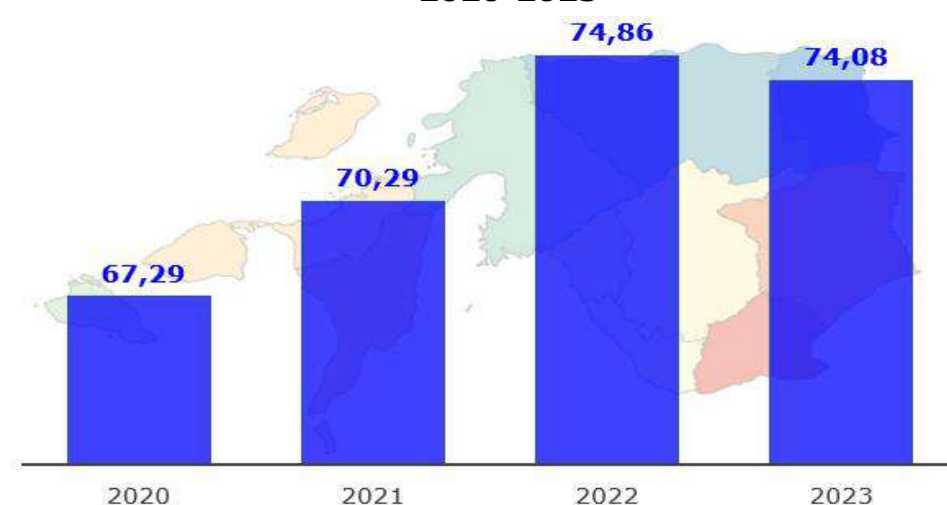
Indeks Perlindungan Anak di Seram Bagian Barat menunjukkan peningkatan dari 55,77 pada 2022 menjadi 62,71 pada 2023, mencerminkan kemajuan dalam upaya perlindungan anak secara umum. Peningkatan ini juga tercermin pada dua komponen penting, yaitu Indeks Pemenuhan Hak Anak yang naik dari 56,01 menjadi 59,89, dan Indeks Perlindungan Khusus Anak yang mengalami lonjakan signifikan dari 52,35 menjadi 69,22.

Kenaikan tersebut menandakan perbaikan yang cukup berarti dalam pemenuhan hak-hak anak serta perlindungan terhadap kelompok anak yang rentan dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi. Meski demikian, data tahun 2019–2021 belum tersedia, sehingga tren jangka panjang belum bisa dianalisis secara menyeluruh. Upaya berkelanjutan dan sinergi lintas sektor sangat dibutuhkan untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian perlindungan anak demi menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi perkembangan anak-anak di Seram Bagian Barat.

b. Indeks Kualitas Keluarga

Indeks Kualitas Keluarga (IKK) adalah indikator menyeluruh yang mengukur kualitas hidup keluarga melalui berbagai aspek seperti sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan kebahagiaan. Indeks ini menggambarkan kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar, menjaga keharmonisan, serta mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan. Dengan komponen utama meliputi akses pendidikan dan layanan kesehatan, stabilitas ekonomi, partisipasi sosial, dan kualitas lingkungan, IKK menjadi alat penting dalam merancang kebijakan yang fokus pada penguatan ketahanan keluarga, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dalam perencanaan pembangunan daerah, IKK berperan sebagai instrumen evaluasi untuk memastikan implementasi kebijakan keluarga yang efektif dan berkelanjutan.

Gambar 2.31. Indeks Kualitas Keluarga Provinsi Maluku, 2020-2023



Sumber: Kementerian PPPA RI (Data Diolah, 2025)

Indeks Kualitas Keluarga (IKK) Provinsi Maluku dijadikan proksi untuk menggambarkan capaian IKK di Kabupaten Seram Bagian Barat karena keterbatasan data di tingkat kabupaten. Tren IKK Maluku menunjukkan peningkatan positif dari 67,29 pada 2020 menjadi 74,86 pada 2022, meski sedikit menurun menjadi 74,08 pada 2023. Peningkatan signifikan juga terlihat pada dua dimensi utama, yaitu Kualitas Ketahanan Sosial-Psikologi (KKSP) yang naik

dari 61,05 menjadi 71,01, serta Kualitas Ketahanan Sosial Budaya (KKSB) yang meningkat dari 58,42 menjadi 68,66 selama periode tersebut. Perkembangan ini mencerminkan kemajuan dalam kohesi keluarga, dukungan emosional, dan penguatan nilai-nilai budaya di wilayah ini. Keberhasilan program pembangunan keluarga tingkat provinsi ini diduga turut berdampak positif pada kondisi keluarga di Seram Bagian Barat. Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian tersebut, diperlukan strategi berkelanjutan yang menitikberatkan pada peningkatan akses layanan dasar, penguatan lembaga masyarakat, dan pelibatan aktif keluarga dalam kegiatan sosial budaya di komunitas.

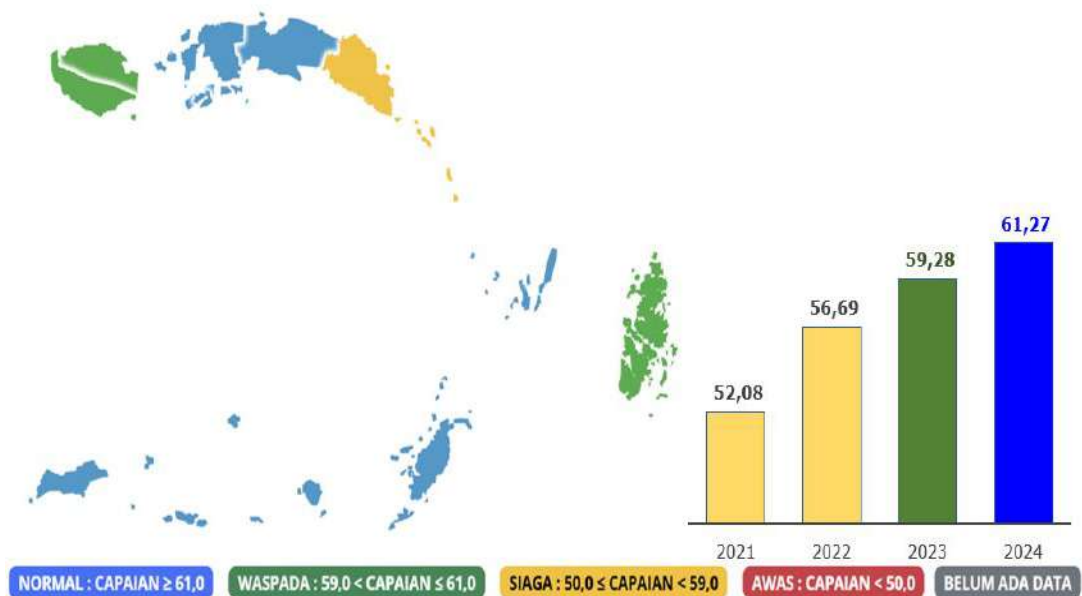
c. Indeks Pembangunan Keluarga

Indeks Pembangunan Keluarga (IPKeluarga) merupakan indikator penting yang mengukur kemajuan dan kualitas pembangunan keluarga dalam suatu wilayah. Indeks ini mencakup berbagai aspek seperti kesejahteraan ekonomi, kesehatan, pendidikan, serta hubungan sosial dalam keluarga. IPKeluarga memberikan gambaran komprehensif tentang seberapa baik keluarga dapat memenuhi kebutuhan dasar dan mengembangkan potensi anggotanya, sekaligus menjadi tolok ukur keberhasilan program-program pembangunan keluarga yang dilaksanakan pemerintah. Dengan memahami capaian Indeks Pembangunan Keluarga, pemangku kebijakan dapat merancang strategi yang lebih tepat sasaran untuk memperkuat ketahanan keluarga dan mendorong pembangunan sosial yang inklusif dan berkelanjutan.

Indeks Pembangunan Keluarga di Kabupaten Seram Bagian Barat menunjukkan tren peningkatan yang positif selama periode 2021 hingga 2024. Nilai indeks yang meningkat dari 52,08 pada 2021 menjadi 61,27 pada 2024 mencerminkan kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan keluarga, termasuk kesejahteraan ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan hubungan sosial. Peningkatan ini menunjukkan keberhasilan upaya pembangunan keluarga yang berkelanjutan dan memperkuat ketahanan keluarga di wilayah tersebut. Tren positif ini menjadi indikator penting bagi pemerintah daerah untuk terus mengembangkan program dan kebijakan yang

mendukung peningkatan kualitas hidup keluarga secara menyeluruh.

Gambar 2.32. IBANGGA Kabupaten Seram Bagian Barat, 2021-2024



Sumber: BKKBN (Data Diolah, 2025)

d. Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender merupakan alat ukur penting yang menilai sejauh mana kesetaraan antara perempuan dan laki-laki tercapai dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, kesehatan, partisipasi ekonomi, dan keterlibatan politik. Indeks ini mencerminkan tantangan dan peluang dalam mewujudkan keadilan sosial serta pemberdayaan gender yang inklusif. Dengan mengidentifikasi ketimpangan yang masih ada, indeks ini menjadi dasar bagi perumusan kebijakan dan program yang bertujuan mengurangi kesenjangan gender, meningkatkan akses dan kesempatan bagi perempuan, serta menciptakan masyarakat yang lebih adil dan seimbang. Dalam konteks pembangunan daerah, Indeks Ketimpangan Gender membantu mengarahkan upaya yang lebih terfokus untuk mencapai kesetaraan dan pemberdayaan seluruh warga tanpa diskriminasi.

Indeks Ketimpangan Gender di Kabupaten Seram Bagian Barat menunjukkan tren penurunan yang positif dari tahun 2019 hingga

2024, dengan nilai menurun dari 0,659 pada 2019 menjadi 0,534 pada 2024. Penurunan indeks ini mengindikasikan semakin berkurangnya kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, kesehatan, partisipasi ekonomi, dan politik. Perkembangan ini mencerminkan kemajuan dalam upaya pemberdayaan perempuan dan peningkatan kesetaraan gender di wilayah tersebut. Namun, meskipun tren ini menggembirakan, masih diperlukan langkah-langkah berkelanjutan untuk memastikan bahwa kesetaraan gender dapat tercapai secara menyeluruh dan berdampak positif bagi seluruh masyarakat.

**Gambar 2.33. Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten
Seram Bagian Barat, 2019-2024**



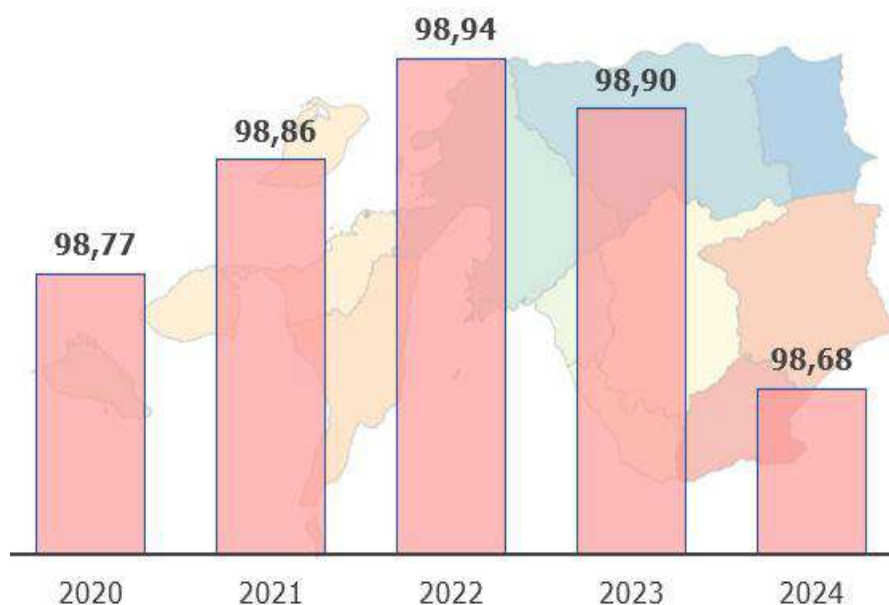
Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2025

e. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender merupakan indikator penting yang mengukur pencapaian kesetaraan dan pemberdayaan perempuan dalam berbagai aspek pembangunan, termasuk pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan partisipasi sosial-politik. Indeks ini mencerminkan sejauh mana suatu daerah mampu mengurangi kesenjangan gender serta meningkatkan kualitas hidup perempuan dan laki-laki secara seimbang. Dalam konteks pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, Indeks

Pembangunan Gender menjadi alat evaluasi strategis untuk menilai efektivitas kebijakan dan program yang mendukung pemberdayaan gender serta mendorong terciptanya masyarakat yang adil dan setara.

**Gambar 2.34. Indeks Pembangunan Gender
Kabupaten Seram Bagian Barat, 2019-2024**



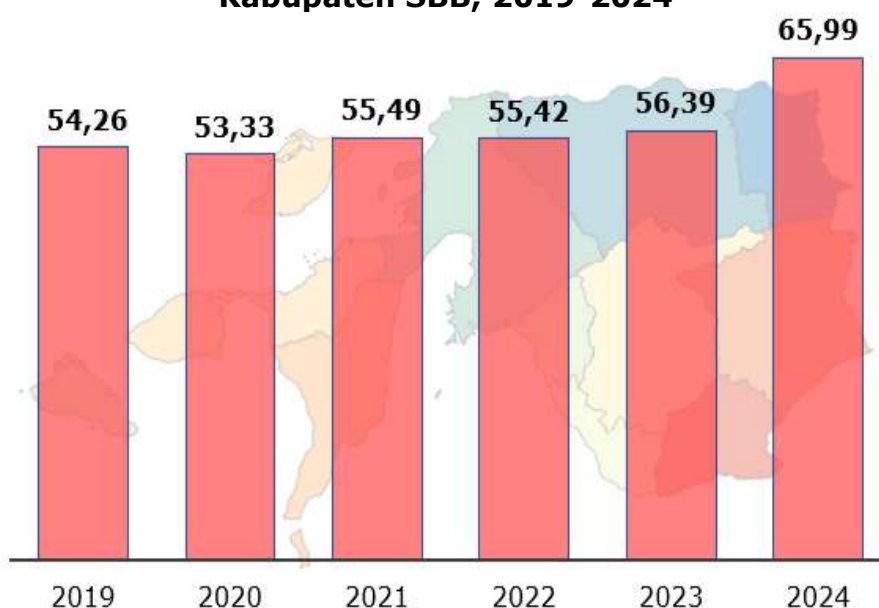
Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2025

Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Seram Bagian Barat menunjukkan tingkat pencapaian yang sangat tinggi dan relatif stabil dari tahun 2020 hingga 2024, dengan nilai berkisar antara 98,68 hingga 98,94. Hal ini mencerminkan keberhasilan daerah dalam mendorong kesetaraan dan pemberdayaan gender di berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, dan partisipasi sosial-ekonomi. Stabilitas nilai indeks tersebut menunjukkan konsistensi upaya pemerintah dan masyarakat dalam mengurangi kesenjangan gender serta menciptakan lingkungan yang mendukung kesempatan yang setara bagi perempuan dan laki-laki. Meski demikian, upaya berkelanjutan tetap diperlukan untuk menjaga dan meningkatkan capaian ini agar pembangunan yang inklusif dan adil dapat terus terwujud di Seram Bagian Barat.

f. Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender merupakan indikator penting yang mengukur tingkat partisipasi dan pengaruh perempuan dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Indeks ini mencerminkan sejauh mana perempuan diberdayakan untuk mengambil peran aktif dalam pengambilan keputusan, akses terhadap sumber daya, serta kesempatan yang setara dengan laki-laki. Dalam konteks pembangunan daerah, Indeks Pemberdayaan Gender menjadi alat ukur untuk menilai keberhasilan kebijakan dan program yang bertujuan menghapuskan diskriminasi gender serta meningkatkan kapasitas dan kemandirian perempuan. Peningkatan indeks ini menunjukkan kemajuan menuju masyarakat yang inklusif, adil, dan berkelanjutan, di mana setiap individu, tanpa memandang gender, memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dan berkembang.

**Gambar 2.35. Indeks Pemberdayaan Gender
Kabupaten SBB, 2019-2024**



Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2025

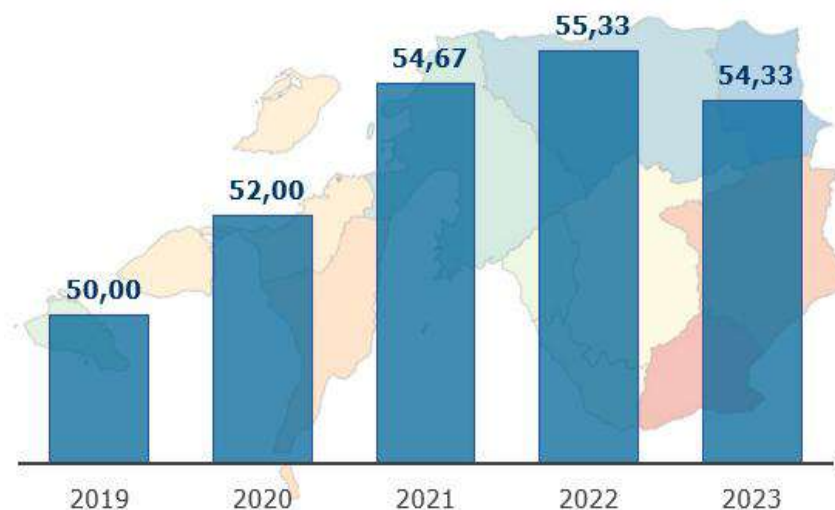
Capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) di Kabupaten Seram Bagian Barat menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan selama periode 2019 hingga 2024. Dimulai dari angka 54,26 pada 2019, indeks ini sempat mengalami sedikit fluktuasi di tahun-tahun awal namun menunjukkan lonjakan tajam pada tahun

2024 dengan nilai 65,99. Kenaikan ini mencerminkan adanya kemajuan dalam partisipasi perempuan dalam berbagai sektor strategis, seperti ekonomi, pemerintahan, dan pengambilan keputusan publik. Tren positif ini juga mengindikasikan keberhasilan program pemberdayaan perempuan di tingkat daerah, serta peningkatan kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender dalam pembangunan. Meski demikian, konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan afirmatif dan perluasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, serta kesempatan kerja bagi perempuan tetap menjadi kunci untuk mempertahankan dan mempercepat capaian yang telah diraih.

g. Indeks Pembangunan Pemuda

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) merupakan indikator yang mengukur kualitas hidup pemuda melalui berbagai dimensi seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, kesempatan kerja, partisipasi kepemimpinan, dan kesetaraan gender. IPP memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi pemuda dan menjadi dasar penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan pemuda yang efektif dan inklusif. Di Kabupaten Seram Bagian Barat, IPP berperan strategis dalam mengidentifikasi tantangan serta merancang program yang mendukung peningkatan kapasitas dan peran pemuda secara berkelanjutan.

**Gambar 2.36. Indeks Pembangunan Pemuda
Provinsi Maluku, 2019-2023**



Sumber: Kemenpora RI (Data Diolah, 2025)

Perkembangan pembangunan pemuda di Kabupaten Seram Bagian Barat dianalisis menggunakan data Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Provinsi Maluku, mengingat belum tersedianya data di tingkat kabupaten/kota. Sebagai bagian dari provinsi, kebijakan dan program pembangunan pemuda di Maluku turut memengaruhi kondisi pemuda di SBB. Data IPP provinsi dapat memberikan gambaran umum terkait tren, capaian, dan tantangan yang juga relevan di tingkat kabupaten. Pada periode 2019–2023, IPP Maluku menunjukkan tren peningkatan, mencerminkan kemajuan dalam akses pendidikan dan peluang kerja bagi pemuda, meskipun terjadi sedikit penurunan pada 2023. Temuan ini menegaskan perlunya evaluasi dan penguatan program agar pembangunan pemuda dapat berjalan lebih merata, efektif, dan berkelanjutan di seluruh wilayah, termasuk Kabupaten Seram Bagian Barat.

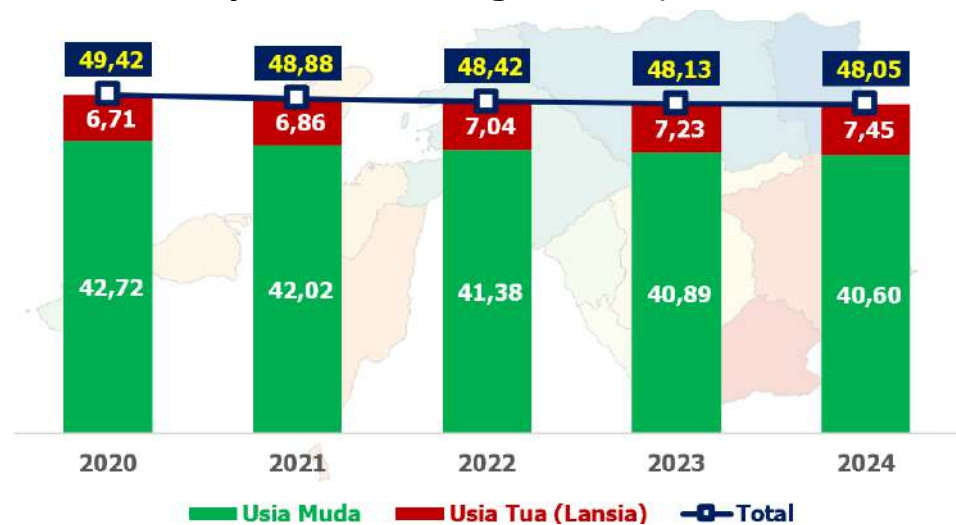
C. Aspek Daya Saing Daerah

1) Daya Saing Sumber Daya Manusia

a. Angka Ketergantungan

Angka Ketergantungan (Dependency Ratio) merupakan indikator demografis yang menunjukkan perbandingan antara jumlah penduduk usia non-produktif (usia 0–14 tahun dan 65 tahun ke atas) dengan jumlah penduduk usia produktif (15–64 tahun). Indikator ini menggambarkan tingkat beban ekonomi yang ditanggung oleh kelompok usia produktif dalam suatu wilayah. Semakin tinggi angka ketergantungan, semakin besar pula tekanan terhadap kelompok usia kerja dalam memenuhi kebutuhan kelompok usia yang tidak bekerja. Dalam konteks perencanaan pembangunan, angka ketergantungan menjadi penting untuk menilai kapasitas ekonomi masyarakat, efektivitas program perlindungan sosial, serta arah kebijakan ketenagakerjaan dan kependudukan.

**Gambar 2.37. Angka Ketergantungan di
Kabupaten Seram Bagian Barat, 2019-2024**



Sumber: Badan Pusat Statistik (Data Diolah oleh PSP UNPATTI, 2025)

Berdasarkan data Kabupaten Seram Bagian Barat, angka ketergantungan total menunjukkan tren penurunan tipis selama periode 2020 hingga 2024, dari 49,42% menjadi 48,05%. Penurunan ini terutama disumbang oleh menurunnya angka ketergantungan usia muda, dari 42,72% menjadi 40,60%, yang mengindikasikan proporsi penduduk usia sekolah atau belum bekerja relatif semakin kecil dibanding penduduk usia produktif. Sementara itu, angka ketergantungan usia tua (lansia) mengalami kenaikan dari 6,71% menjadi 7,45%, mencerminkan proses penuaan penduduk yang perlahan terjadi di wilayah ini. Secara keseluruhan, tren ini menunjukkan bahwa beban ekonomi yang ditanggung oleh penduduk usia kerja cenderung menurun, namun mulai muncul tantangan baru terkait perlindungan sosial dan layanan kesehatan bagi kelompok lansia. Hal ini perlu menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan demografi dan perencanaan pembangunan jangka panjang.

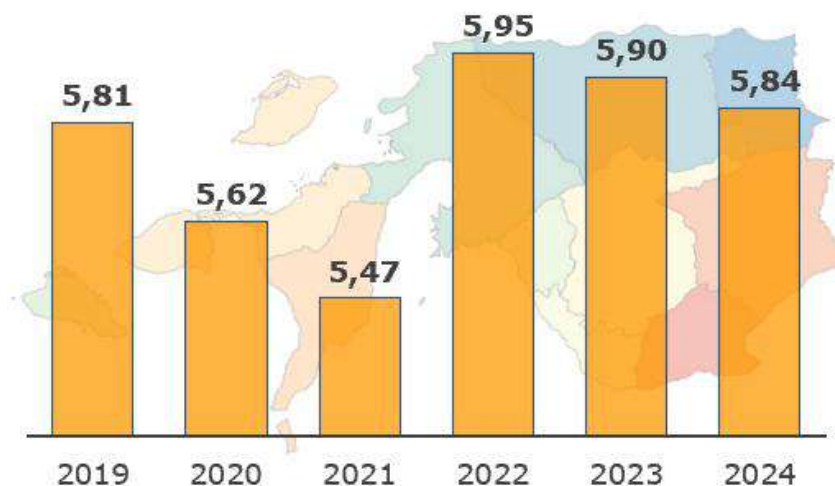
2) Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

a. Rasio PDRB Industri Pengolahan

Rasio PDRB Industri Pengolahan merupakan indikator penting yang menggambarkan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu

wilayah. Indikator ini mencerminkan sejauh mana aktivitas manufaktur dan pengolahan berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Di wilayah seperti Kabupaten Seram Bagian Barat, rasio ini berfungsi sebagai barometer bagi tingkat industrialisasi dan nilai tambah ekonomi lokal. Peningkatan rasio PDRB industri pengolahan menandakan berkembangnya kapasitas produksi, penyerapan tenaga kerja, serta integrasi ekonomi daerah ke dalam rantai pasok yang lebih luas. Sebaliknya, rasio yang rendah dapat menunjukkan dominasi sektor primer atau keterbatasan infrastruktur dan investasi industri. Oleh karena itu, pemantauan rasio ini penting untuk merancang strategi pembangunan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan berbasis transformasi struktural.

Gambar 2.38. Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten SBB, 2019-2024



Sumber: BPS Kabupaten Seram Bagian Barat, Tahun 2025

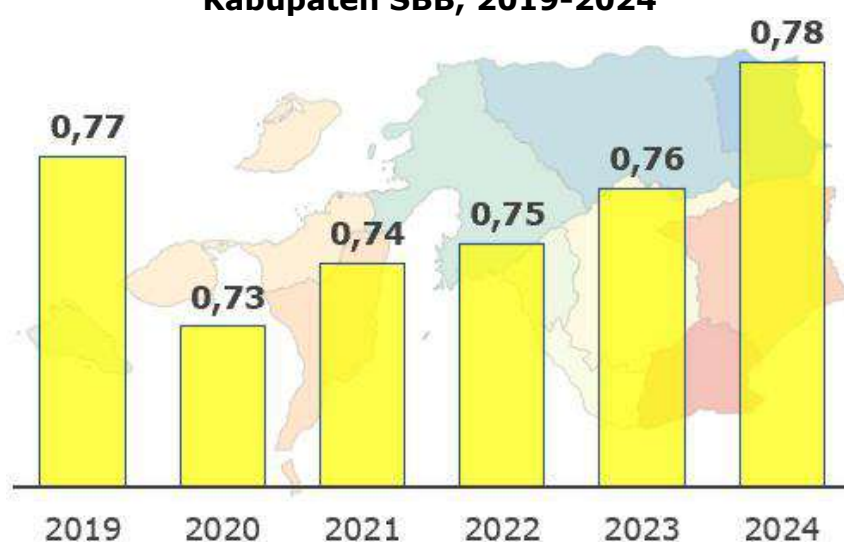
Perkembangan Rasio PDRB Industri Pengolahan di Kabupaten Seram Bagian Barat selama periode 2019–2024 menunjukkan sedikit fluktuasi namun cenderung stabil pada kisaran 5–6 persen. Rasio ini sempat menurun dari 5,81% pada 2019 menjadi titik terendah 5,47% pada 2021, sebelum kembali meningkat menjadi 5,95% pada 2022 dan sedikit turun menjadi 5,84% pada 2024. Pola ini mencerminkan bahwa kontribusi sektor industri pengolahan terhadap total PDRB Kabupaten masih relatif terbatas dan belum menunjukkan tren pertumbuhan signifikan. Hal ini dapat

mengindikasikan perlunya penguatan kebijakan hilirisasi, peningkatan investasi, serta perbaikan infrastruktur pendukung industri agar sektor ini dapat tumbuh lebih pesat dan memberikan kontribusi lebih besar terhadap ekonomi daerah.

b. Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum

Rasio PDRB Akomodasi, Makan dan Minum merupakan indikator penting untuk menilai kontribusi sektor pariwisata dan jasa konsumsi terhadap perekonomian daerah. Di Kabupaten Seram Bagian Barat, rasio ini mencerminkan peran sektor perhotelan, restoran, rumah makan, dan usaha kuliner lokal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Sebagai daerah yang memiliki potensi wisata alam dan budaya, perkembangan sektor ini menjadi penopang penting dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat ekonomi berbasis lokal. Dengan memantau rasio PDRB dari sektor ini, pemerintah daerah dapat merumuskan strategi pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif secara lebih terarah dan berkelanjutan.

**Gambar 2.39. Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum
Kabupaten SBB, 2019-2024**



Sumber: BPS Kabupaten Seram Bagian Barat, Tahun 2025

Berdasarkan data Kabupaten Seram Bagian Barat, rasio PDRB sektor Akomodasi, Makan dan Minum menunjukkan tren yang relatif stabil sepanjang periode 2019 hingga 2024, dengan sedikit

peningkatan dari 0,77% pada tahun 2019 menjadi 0,78% pada tahun 2024. Stabilitas ini mencerminkan kontribusi sektor tersebut yang cukup konsisten terhadap perekonomian daerah, meskipun masih tergolong kecil secara proporsional. Kondisi ini menunjukkan bahwa potensi sektor pariwisata dan jasa konsumsi belum tergarap secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan daya saing sektor ini melalui pengembangan infrastruktur pariwisata, promosi destinasi lokal, serta penguatan kapasitas pelaku usaha kuliner dan akomodasi agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis layanan dan pariwisata secara lebih signifikan.

c. Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif

PDRB Ekonomi Kreatif berdasarkan pendekatan produksi merupakan jumlah nilai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi Ekonomi Kreatif dalam suatu wilayah/region pada suatu jangka waktu tertentu, biasanya setahun. PDRB Ekonomi Kreatif berdasarkan pendekatan pendapatan merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor faktor produksi yang ikut di dalam proses produksi Ekonomi Kreatif di suatu wilayah/region pada jangka waktu tertentu (setahun). Balas jasa faktor produksi tersebut adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan. Dalam pengertian PDRB termasuk pula penyusutan barang modal dan pajak tidak langsung neto (Pajak tak langsung – subsidi). Jumlah semua komponen pendapatan per sektor disebut sebagai nilai tambah bruto sektoral. PDRB Ekonomi Kreatif merupakan jumlah dari nilai tambah bruto seluruh sektor Ekonomi Kreatif. Data proporsi PDRB Ekonomi Kreatif Kabupaten Seram Bagian Barat Belum Tersedia.

d. Rasio Kewirausahaan

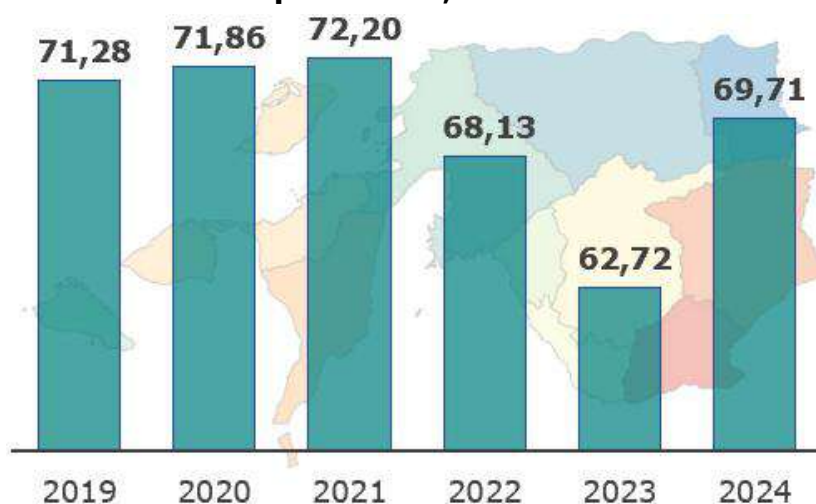
Rasio kewirausahaan daerah merupakan persentase jumlah wirausaha terhadap total populasi penduduk di suatu wilayah atau daerah tertentu. Rasio ini menunjukkan tingkat aktivitas kewirausahaan yang ada di daerah tersebut dan menjadi indikator penting dalam menilai perkembangan ekonomi lokal serta potensi penciptaan lapangan kerja. Pemerintah daerah berupaya

mendorong peningkatan rasio kewirausahaan daerah melalui berbagai program pelatihan, inkubasi usaha, dan pemberian akses pembiayaan, terutama bagi generasi muda dan kelompok rentan, agar dapat meningkatkan kontribusi kewirausahaan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan mengurangi tingkat pengangguran.

e. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator penting yang mencerminkan proporsi penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi, baik yang bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. TPAK memberikan gambaran mengenai sejauh mana potensi tenaga kerja dimanfaatkan dalam perekonomian suatu daerah. Di Kabupaten Seram Bagian Barat, pemantauan TPAK menjadi krusial untuk menilai dinamika pasar kerja, efektivitas kebijakan ketenagakerjaan, serta ketersediaan lapangan kerja yang layak. Tingkat partisipasi yang tinggi umumnya menunjukkan peluang kerja yang lebih luas dan keterlibatan produktif penduduk usia kerja, sedangkan tingkat yang rendah dapat mengindikasikan hambatan struktural seperti keterbatasan akses pendidikan, keterampilan, atau peluang ekonomi. Oleh karena itu, TPAK menjadi dasar penting dalam merancang strategi pembangunan ketenagakerjaan yang inklusif dan berkelanjutan di daerah.

Gambar 2.40. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten SBB, 2019-2024



Sumber: BPS Kabupaten Seram Bagian Barat, Tahun 2025

Data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Seram Bagian Barat menunjukkan fluktuasi selama periode 2019 hingga 2024. Pada tahun 2019 hingga 2021, TPAK relatif stabil di kisaran 71–72%, menandakan partisipasi angkatan kerja yang cukup tinggi. Namun, pada tahun 2022 dan 2023 terjadi penurunan signifikan hingga mencapai 62,72% pada 2023, yang mungkin mencerminkan dampak berbagai faktor ekonomi atau sosial seperti pandemi atau perubahan kondisi pasar tenaga kerja. Pada 2024, TPAK kembali meningkat menjadi 69,71%, menunjukkan tanda pemulihan partisipasi angkatan kerja. Tren ini mengindikasikan pentingnya upaya berkelanjutan untuk memperkuat keterlibatan penduduk usia kerja dalam aktivitas ekonomi melalui peningkatan kesempatan kerja, pelatihan keterampilan, dan kebijakan yang responsif terhadap dinamika pasar tenaga kerja di daerah.

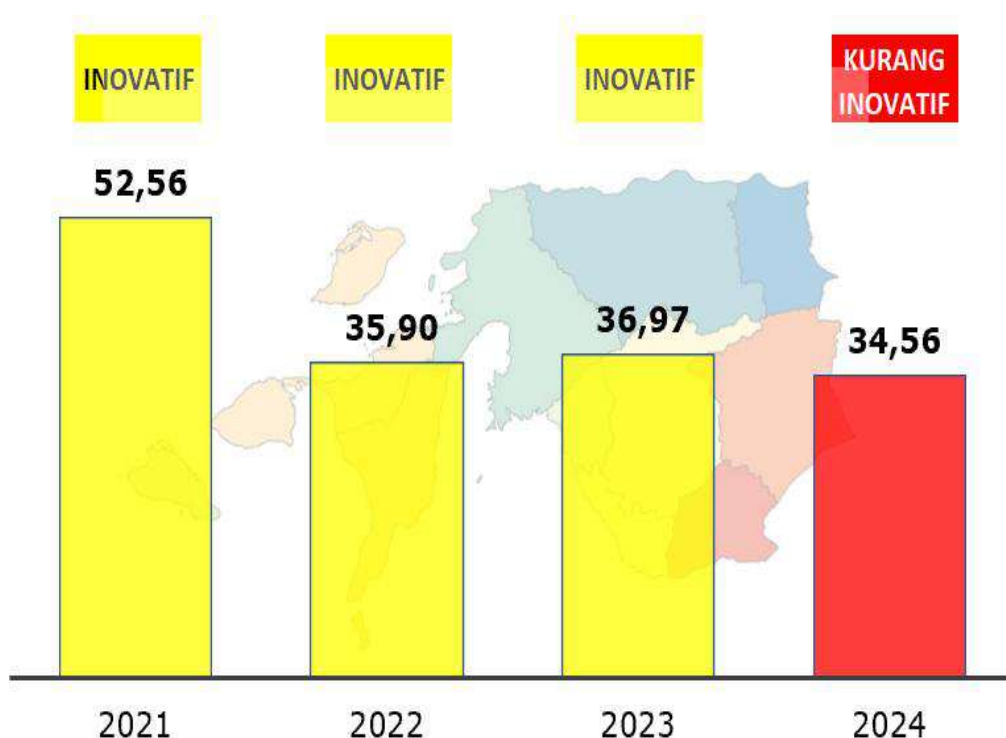
f. Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah (IID) merupakan indikator penting yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan dan kemajuan suatu daerah dalam menciptakan, mengadopsi, serta menerapkan inovasi di berbagai sektor pembangunan. Indeks ini mencerminkan seberapa efektif daerah dalam memanfaatkan sumber daya, teknologi, dan ide-ide baru untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, daya saing ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat. Dengan memahami perkembangan Indeks Inovasi Daerah, pemerintah dan pemangku kepentingan dapat mengidentifikasi kekuatan serta tantangan yang ada, sekaligus merancang kebijakan dan program yang tepat untuk mendorong ekosistem inovasi yang lebih dinamis dan berkelanjutan. Berikut ini adalah data dan analisis terkait Indeks Inovasi Daerah di Kabupaten Seram Bagian Barat.

Berdasarkan data indeks inovasi daerah, Kabupaten Seram Bagian Barat menunjukkan tren penurunan dalam kinerja inovasi selama periode 2021 hingga 2024. Pada tahun 2021, indeks berada di angka 52,56, yang dikategorikan sebagai inovatif. Namun, dalam dua tahun berikutnya terjadi penurunan signifikan, yaitu ke angka 35,90 pada 2022 dan 36,97 pada 2023, meskipun keduanya masih masuk dalam kategori inovatif dengan nilai minimum. Kondisi ini

semakin menurun pada tahun 2024, dengan indeks inovasi turun menjadi 34,56 dan masuk dalam kategori kurang inovatif. Penurunan ini mengindikasikan adanya tantangan dalam menjaga kesinambungan budaya inovasi di lingkungan pemerintah daerah. Faktor-faktor seperti lemahnya ekosistem inovasi, kurang optimalnya pemanfaatan teknologi informasi, rendahnya kolaborasi antar perangkat daerah, dan belum terbangunnya sistem insentif yang mendorong inovasi bisa menjadi penyebab utama.

Gambar 2.41. Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, Tahun 2021-2024



Sumber: Kemendagri RI (Data Diolah, 2025)

3) Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

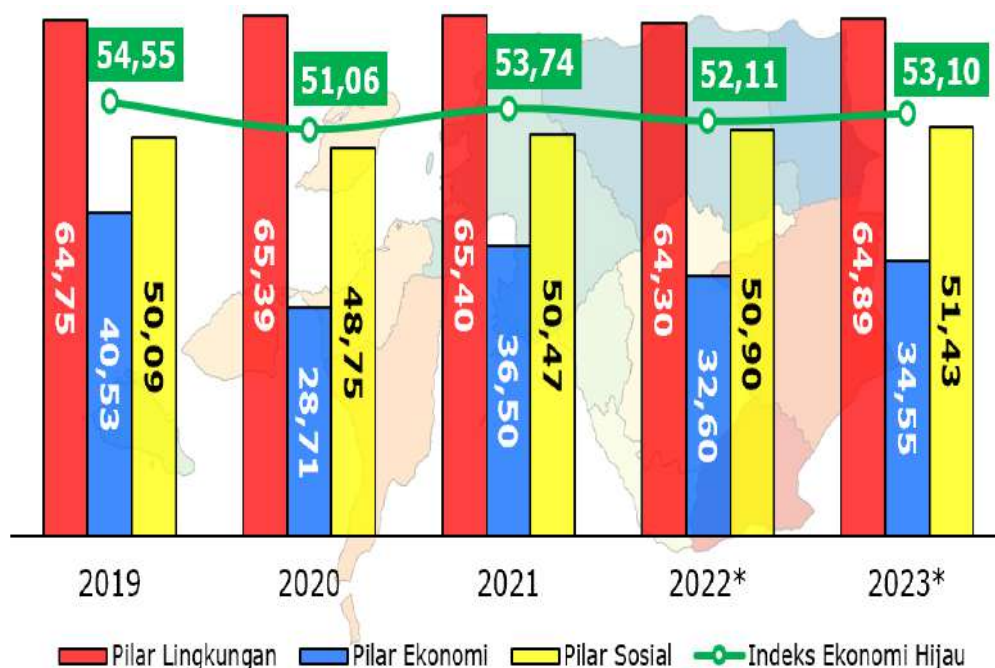
a. Indeks Ekonomi Hijau

Transformasi menuju ekonomi hijau menjadi fokus utama Kementerian PPN/Bappenas dalam arah pembangunan nasional. Untuk mengukur keberhasilan kebijakan ini, Indeks Ekonomi Hijau digunakan sebagai alat evaluasi yang komprehensif dan berbasis data. Indeks ini terdiri dari 15 indikator yang terbagi dalam tiga pilar utama: ekonomi (misalnya intensitas emisi dan PDRB per kapita),

sosial (termasuk tingkat kemiskinan dan harapan hidup), serta lingkungan (seperti tutupan lahan dan proporsi energi terbarukan). Dengan pendekatan ini, capaian pembangunan hijau dapat dipantau secara terukur, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Berdasarkan tren Indeks Ekonomi Hijau Provinsi Maluku 2019–2023, Pilar Lingkungan relatif stabil (nilai 64–65), Pilar Sosial meningkat bertahap mencapai 51,43 pada 2023, sementara Pilar Ekonomi meningkat bertahap mencapai 34,55 pada 2023, sementara Pilar Ekonomi menunjukkan fluktuasi dengan titik terendah di 2020 (28,71) dan peningkatan ke 34,55 pada 2023. Kondisi ini mengindikasikan tantangan utama pada aspek ekonomi terkait efisiensi sumber daya dan nilai tambah.

Gambar 2.42. Indeks Ekonomi Hijau Provinsi Maluku, 2019–2023



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas 2023 dan *Expert Judgement PSP Unpatti 2024

Untuk Kabupaten Seram Bagian Barat, optimalisasi sektor berbasis sumber daya alam—perikanan, pertanian, dan ekowisata—perlu diintensifkan guna memperkuat Pilar Ekonomi tanpa mengabaikan Pilar Lingkungan dan Sosial. Strategi kunci meliputi diversifikasi ekonomi hijau lokal, peningkatan kapasitas pelaku usaha melalui pelatihan green skills, integrasi kebijakan daerah

dengan agenda nasional ekonomi hijau, serta penguatan tata kelola lingkungan dan pemberdayaan sosial berbasis komunitas.

b. Indeks Ekonomi Biru Indonesia

Capaian Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI) Provinsi Maluku tahun 2023 sebesar 67,22, yang menempatkan Maluku pada peringkat kelima nasional, mencerminkan kemajuan signifikan dalam penerapan prinsip ekonomi biru secara produktif dan berkelanjutan. Nilai ini menunjukkan pemanfaatan sumber daya kelautan yang semakin optimal di tingkat provinsi, termasuk di kabupaten pesisir seperti Seram Bagian Barat.

Dengan garis pantai luas dan ekosistem pesisir yang kaya, Kabupaten Seram Bagian Barat memiliki potensi strategis untuk meningkatkan kontribusi IBEI melalui: peningkatan sektor perikanan tangkap dan budidaya (Pilar Ekonomi); penguatan pengelolaan wilayah pesisir yang lestari, termasuk pengawasan penangkapan berlebih dan perlindungan kawasan konservasi (Pilar Lingkungan); serta pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pengembangan kapasitas, pelatihan usaha, dan akses teknologi tepat guna (Pilar Sosial).

Pendekatan terintegrasi berbasis potensi lokal ini akan menempatkan Seram Bagian Barat sebagai simpul kunci ekonomi biru Maluku sekaligus mendukung keberlanjutan sumber daya laut nasional dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

c. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer

Pada tahun 2023, kontribusi Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dalam bauran energi primer Provinsi Maluku tercatat terendah secara nasional, hanya sebesar 0,17%. Kondisi ini mencerminkan tantangan struktural yang juga dialami Kabupaten Seram Bagian Barat, terkait keterbatasan infrastruktur, investasi, dan akses energi. Faktor utama rendahnya penetrasi EBT meliputi minimnya fasilitas pendukung dan investasi, rasio elektrifikasi yang masih di bawah rata-rata nasional, serta kurangnya data potensi sumber daya EBT lokal seperti energi laut, surya, dan bioenergi, yang

menghambat perencanaan dan pengembangan yang efektif.

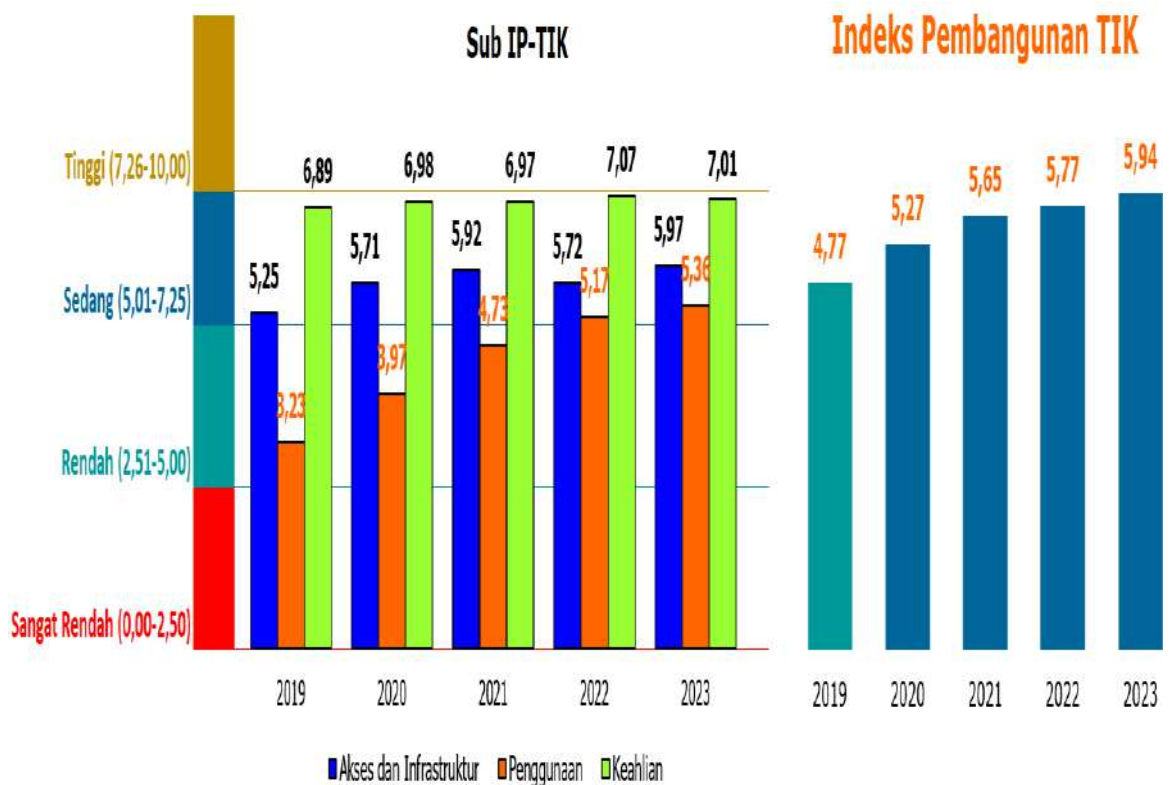
Meski demikian, Seram Bagian Barat memiliki potensi besar dalam pengembangan EBT, terutama energi laut yang dapat dimanfaatkan dari arus dan gelombang, serta energi surya dengan intensitas penyinaran tinggi sepanjang tahun, sangat ideal untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di daerah terpencil. Dengan perencanaan terarah dan kebijakan fokus, Seram Bagian Barat berpeluang menjadi wilayah prioritas transformasi energi bersih di Maluku, mendukung ketahanan energi, pengurangan emisi, dan percepatan pencapaian target pembangunan rendah karbon nasional.

4) Transformasi Digital

a. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) adalah instrumen pengukuran yang mencerminkan tingkat kemajuan suatu wilayah dalam pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung pembangunan sosial, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan. Indeks ini meliputi dimensi infrastruktur digital, kualitas layanan internet, literasi digital masyarakat, serta integrasi TIK dalam sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik. Peningkatan nilai IP-TIK menjadi indikator utama keberhasilan transformasi digital yang inklusif, efisien, dan adaptif terhadap tantangan teknologi global.

**Gambar 2.43. Indeks Pembangunan TIK Provinsi Maluku
Tahun 2019-2023**



Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2025

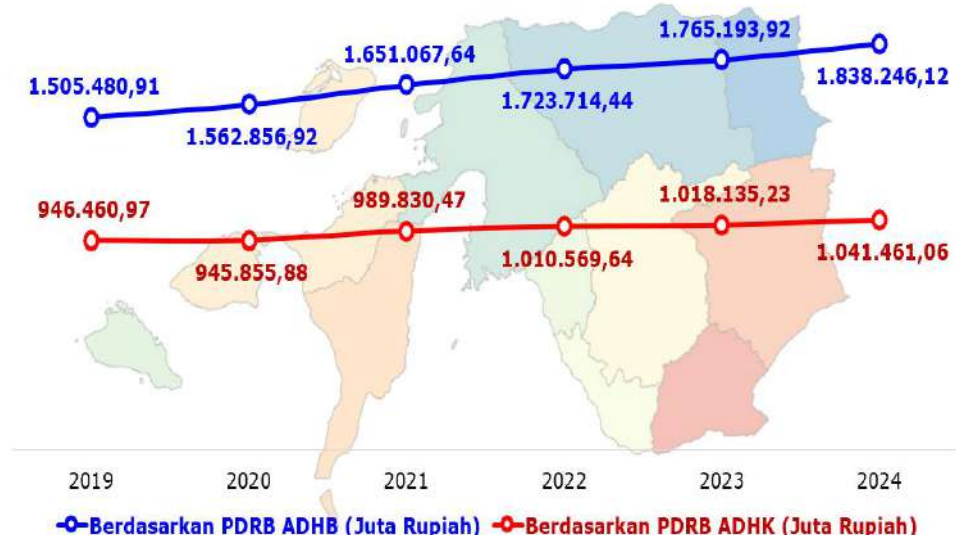
Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) Provinsi Maluku menunjukkan tren peningkatan konsisten dari 4,77 pada 2019 menjadi 5,94 pada 2023, yang juga mencerminkan kemajuan di Kabupaten Seram Bagian Barat. Peningkatan signifikan pada sub-indeks akses dan infrastruktur, dari 5,25 ke 5,97, mengindikasikan perbaikan konektivitas digital, sementara lonjakan pada komponen penggunaan dari 3,23 ke 5,36 mencerminkan adopsi teknologi yang meluas di masyarakat. Namun, fluktuasi pada komponen keahlian menandakan perlunya penguatan kapasitas sumber daya manusia di wilayah ini. Tren tersebut menjadi dasar strategis untuk mempercepat transformasi digital yang inklusif dan merata hingga ke kawasan kepulauan dan perdesaan melalui peningkatan literasi digital, pengembangan infrastruktur, dan kolaborasi lintas sektor secara berkelanjutan.

5) Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

a. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah ukuran penambahan dan pengurangan aset tetap dalam suatu unit produksi selama periode tertentu. Penambahan barang modal meliputi pengadaan, pembuatan, pembelian, serta sewa beli (financial leasing) barang modal baru baik dari dalam maupun luar negeri, termasuk perbaikan besar, transfer, barter barang modal, dan pertumbuhan aset sumber daya hayati yang dibudidaya. Sementara itu, pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer, barter, dan sewa beli barang modal bekas kepada pihak lain, dengan pengecualian kehilangan akibat bencana alam yang tidak dihitung sebagai pengurangan. Barang modal sendiri memiliki usia pakai lebih dari satu tahun dan mengalami penyusutan selama masa penggunaannya. Istilah “bruto” menunjukkan bahwa nilai PMTB belum dikurangi oleh penyusutan, yang merupakan konsumsi barang modal akibat penurunan nilai normal selama proses produksi dalam satu periode.

Gambar 2.44. Pembentukan Modal Tetap Bruto di Kabupaten SBB, 2019-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2025

Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) di Kabupaten Seram Bagian Barat periode 2019–2024. Berdasarkan data PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB), PMTB mengalami

peningkatan konsisten dari Rp. 1,51 triliun pada 2019 menjadi Rp. 1,84 triliun pada 2024. Secara riil, berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) yang disesuaikan inflasi, PMTB tumbuh dari Rp. 946,46 miliar pada 2019 menjadi Rp. 1,04 triliun pada 2024. Tren kenaikan ini mencerminkan peningkatan investasi dan akumulasi aset tetap, yang menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi serta penguatan infrastruktur daerah secara berkelanjutan.

b. Ekspor Barang dan Jasa

Net Ekspor Barang dan Jasa merupakan indikator penting yang menggambarkan selisih antara nilai ekspor dan impor barang serta jasa di suatu wilayah dalam periode tertentu. Di Kabupaten Seram Bagian Barat, neraca perdagangan ini mencerminkan kemampuan daerah dalam menghasilkan surplus perdagangan atau menghadapi defisit, yang berdampak langsung pada perekonomian lokal dan daya saing regional. Analisis terhadap net ekspor barang dan jasa memberikan gambaran tentang ketergantungan daerah pada produk luar, potensi ekspor unggulan, serta efektivitas strategi pengembangan sektor perdagangan dan jasa. Pemantauan indikator ini sangat penting untuk mendukung kebijakan ekonomi yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah dan penguatan basis produksi lokal di Kabupaten Seram Bagian Barat.

Gambar 2.45. Net Ekspor Barang dan Jasa di Kabupaten SBB, 2019-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2025

Data Net Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Seram Bagian Barat dari tahun 2019 hingga 2024 menunjukkan defisit yang konsisten, baik berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) maupun harga konstan (ADHK). Berdasarkan ADHB, nilai defisit berkisar antara sekitar Rp2,58 triliun pada 2019 hingga Rp2,42 triliun pada 2024, dengan fluktuasi yang relatif stabil selama periode tersebut. Sementara itu, berdasarkan ADHK yang sudah memperhitungkan inflasi, defisit juga mengalami penurunan dari sekitar Rp1,45 triliun pada 2019 menjadi Rp1,21 triliun pada 2024.

Defisit yang berkelanjutan ini menunjukkan bahwa nilai impor barang dan jasa di Kabupaten Seram Bagian Barat masih lebih besar dibandingkan nilai ekspornya, menandakan ketergantungan yang cukup tinggi pada produk dan jasa dari luar daerah maupun luar negeri. Namun, tren penurunan defisit secara riil (ADHK) mengindikasikan adanya perbaikan dalam struktur perdagangan, kemungkinan melalui peningkatan produksi dan ekspor lokal atau pengurangan impor.

Kondisi ini menuntut perhatian serius dalam upaya pengembangan sektor-sektor produktif yang mampu meningkatkan kapasitas ekspor, seperti perikanan, pertanian, dan sektor jasa berbasis sumber daya lokal. Penguatan daya saing produk lokal, diversifikasi pasar ekspor, serta peningkatan nilai tambah produk juga menjadi strategi penting untuk memperbaiki neraca perdagangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Seram Bagian Barat secara berkelanjutan.

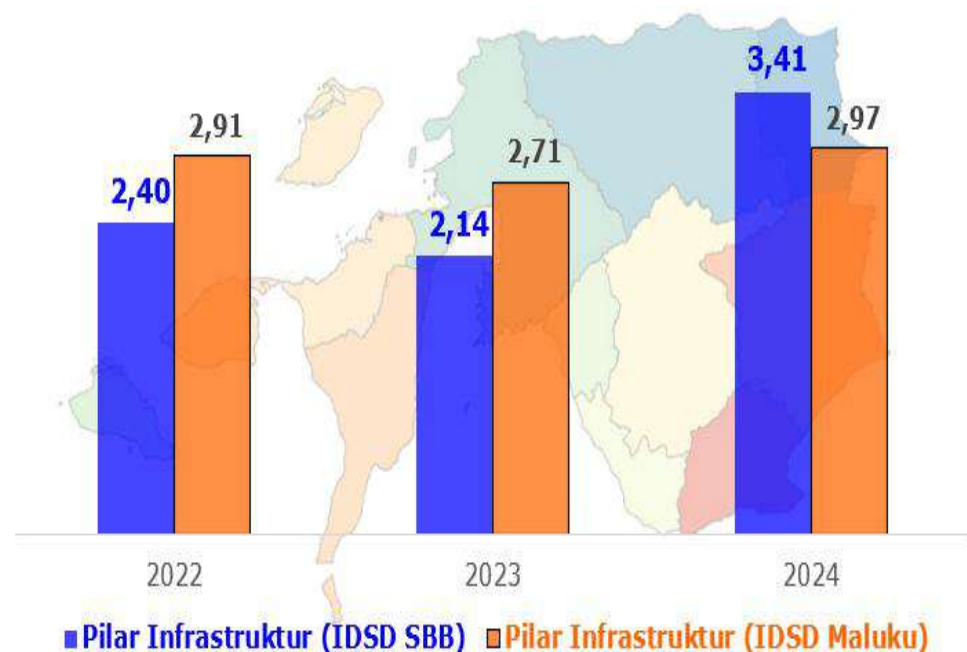
6) Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

a. Indeks Infrastruktur/Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur

Pilar Infrastruktur dalam Indeks Daerah Sumber Daya (IDSD) Kabupaten Seram Bagian Barat menjadi salah satu aspek krusial yang mencerminkan kesiapan dan kemampuan wilayah dalam mendukung pembangunan ekonomi dan sosial secara menyeluruh. Pilar ini mengukur ketersediaan dan kualitas fasilitas fisik dasar seperti jaringan jalan, akses listrik, sarana komunikasi, serta

infrastruktur pendukung lainnya yang menjadi fondasi utama bagi aktivitas produktif dan pelayanan publik. Kondisi dan perkembangan infrastruktur yang memadai sangat menentukan daya saing daerah, memperlancar konektivitas antar wilayah, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, evaluasi pilar infrastruktur di Kabupaten Seram Bagian Barat menjadi penting untuk mengidentifikasi potensi dan tantangan dalam mempercepat pembangunan berkelanjutan di daerah ini.

Gambar 2.46. Pilar Infrastruktur (IDSD) Kabupaten Seram Bagian Barat, 2022-2024



Sumber: BRIN (Data Diolah, 2025)

Data Pilar Infrastruktur (Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur/IDSD) Kabupaten Seram Bagian Barat menunjukkan perkembangan yang dinamis selama periode 2022 hingga 2024. Pada tahun 2022, indeks infrastruktur di Kabupaten Seram Bagian Barat tercatat sebesar 2,40, kemudian mengalami penurunan menjadi 2,14 pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024 terjadi peningkatan signifikan mencapai nilai 3,41. Fluktuasi tersebut mencerminkan adanya tantangan dalam penyediaan dan kualitas layanan infrastruktur yang dihadapi, disertai upaya perbaikan yang mulai menunjukkan hasil positif pada tahun terakhir. Jika dibandingkan dengan Pilar Infrastruktur Provinsi Maluku, nilai indeks

relatif lebih stabil. Meskipun Provinsi Maluku menunjukkan stabilitas yang baik, nilai indeks Pilar Infrastruktur Kabupaten Seram Bagian Barat pada tahun 2024 melampaui capaian provinsi, menandakan perbaikan kualitas dan akses layanan infrastruktur yang lebih nyata di tingkat kabupaten.

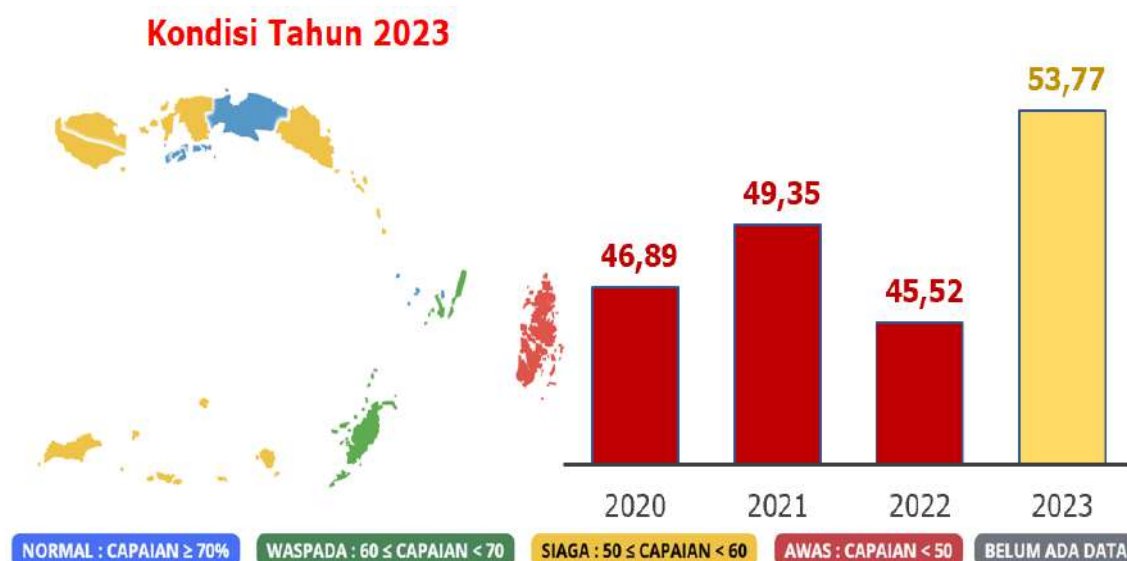
Peningkatan signifikan tersebut terutama menunjukkan kemajuan pada sektor-sektor strategis seperti jaringan jalan, pasokan listrik, dan fasilitas komunikasi yang berdampak positif pada layanan publik dan aktivitas ekonomi. Namun, penurunan indeks pada tahun 2023 mengindikasikan perlunya perhatian lebih lanjut terhadap konsistensi dalam pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur agar capaian positif dapat dipertahankan secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, tren ini menegaskan pentingnya penguatan kebijakan dan investasi infrastruktur yang terencana dan berkelanjutan di Kabupaten Seram Bagian Barat untuk mendukung percepatan pembangunan daerah yang inklusif dan berdaya saing.

b. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak

Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak merupakan indikator penting dalam mengukur kualitas kehidupan masyarakat di suatu wilayah. Indikator ini mencakup ketersediaan fasilitas dasar yang memenuhi standar kesehatan, keamanan, dan kenyamanan, seperti akses terhadap air bersih, sanitasi layak, struktur bangunan yang kokoh, serta kepemilikan hak atas rumah. Tingginya persentase rumah tangga yang memiliki akses hunian layak mencerminkan keberhasilan program pembangunan perumahan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum. Oleh karena itu, pemantauan indikator ini menjadi dasar strategis dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan pembangunan sosial dan infrastruktur perumahan di tingkat daerah maupun nasional.

Gambar 2.47. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak di Kabupaten SBB, 2020-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, Data Susenas, (Data Diolah, 2025)

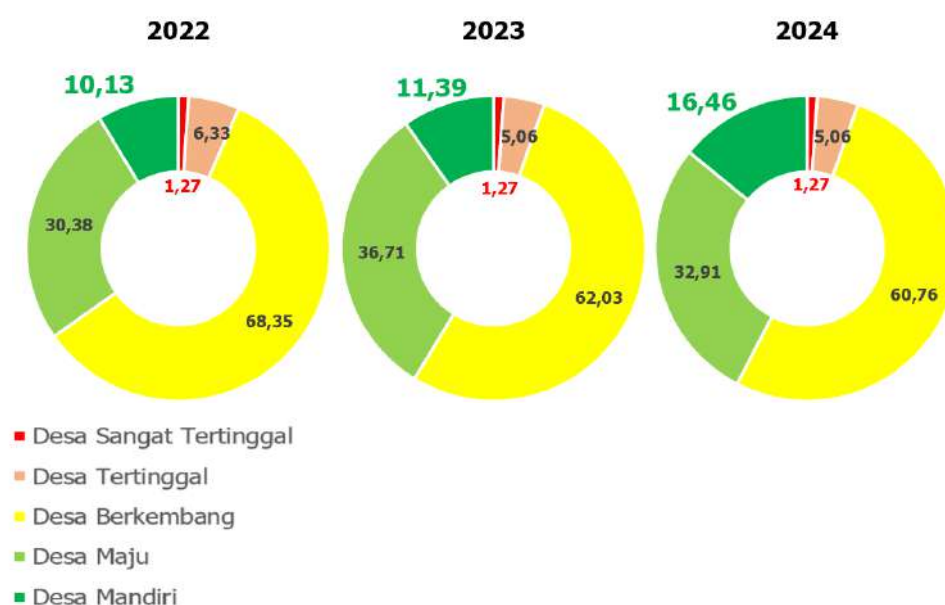
Data persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak di Kabupaten Seram Bagian Barat selama periode 2019–2022 menunjukkan dinamika yang bervariasi. Pada 2019, tingkat akses hunian layak tercatat sebesar 46,89%, meningkat menjadi 49,35% pada 2020, namun mengalami penurunan menjadi 45,52% pada 2021. Selanjutnya, terjadi peningkatan signifikan pada 2022, mencapai 53,77%. Fluktuasi tersebut mencerminkan tantangan dalam penyediaan hunian layak yang berkualitas dan merata di wilayah ini. Kenaikan pada 2022 menandakan efektivitas intervensi kebijakan dan program perumahan serta peningkatan infrastruktur pendukung. Namun, untuk menjaga keberlanjutan dan memperluas cakupan akses hunian layak, diperlukan sinergi kebijakan yang lebih terpadu dan penguatan kapasitas pelaksanaan di tingkat daerah. Data tahun 2023 dan 2024 belum tersedia sehingga monitoring berkelanjutan menjadi penting untuk evaluasi dan penyesuaian strategi pembangunan perumahan.

c. Persentase Desa Mandiri

Persentase Desa Mandiri merupakan indikator penting dalam menilai tingkat kemandirian dan kualitas pembangunan di tingkat desa. Desa Mandiri ditandai dengan kemampuan desa dalam

mengelola sumber daya lokal secara optimal, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menyediakan layanan dasar yang memadai tanpa ketergantungan berlebihan pada bantuan eksternal. Pengukuran persentase Desa Mandiri memberikan gambaran kemajuan desa-desa dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, memperkuat tata kelola pemerintahan desa, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat. Data ini menjadi acuan strategis bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan yang mendukung percepatan pembangunan desa dan peningkatan kualitas hidup warga di Kabupaten Seram Bagian Barat.

Gambar 2.48. Persentase Desa Mandiri di Kabupaten SBB, 2022-2024



Sumber: Kemendesa PDTT (Data Diolah, 2025)

Gambar 2.4 mengilustrasikan distribusi persentase klasifikasi desa di Kabupaten Seram Bagian Barat dari tahun 2022 hingga 2024, yang terbagi dalam lima kategori utama mulai dari Desa Sangat Tertinggal hingga Desa Mandiri. Analisis tren menunjukkan dinamika signifikan dalam pergeseran status desa selama periode tersebut. Secara rinci, terjadi penurunan proporsi desa yang masuk dalam kategori Desa Berkembang, dari 68,35% pada tahun 2022 menjadi 60,76% pada tahun 2024. Sebaliknya, proporsi Desa Mandiri mengalami peningkatan signifikan, dari 10,13% pada 2022

menjadi 16,46% pada 2024. Kategori Desa Sangat Tertinggal relatif stabil dengan persentase 1,27% sepanjang periode yang diamati.

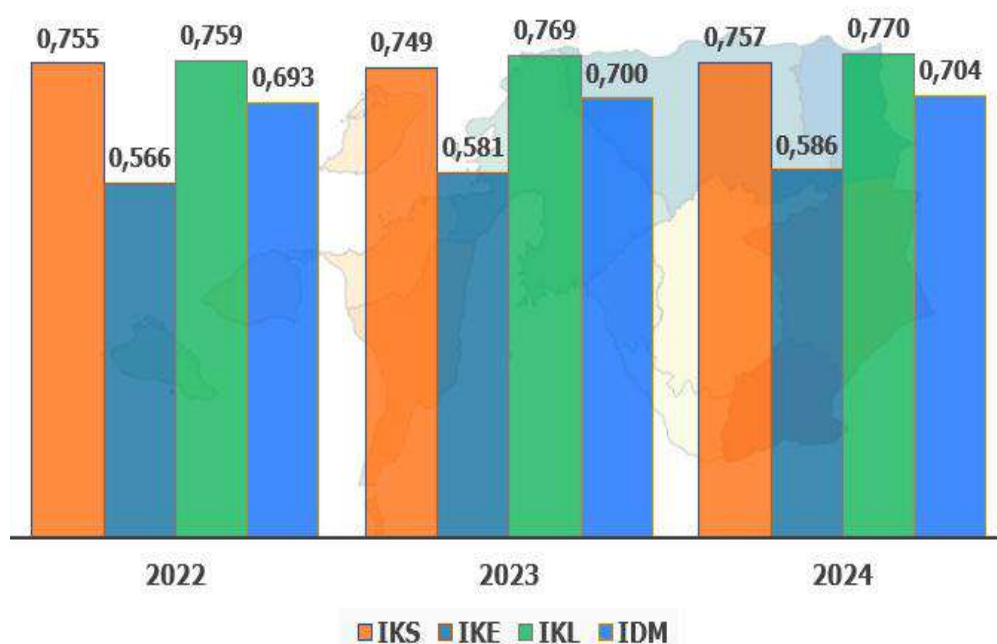
Perubahan ini mengindikasikan adanya kemajuan dalam upaya peningkatan kapasitas dan kemandirian desa, meskipun penurunan proporsi desa berkembang perlu diwaspadai sebagai potensi indikasi pergeseran kondisi desa yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Tren tersebut merefleksikan dampak dari kebijakan pembangunan desa serta pelaksanaan program pemberdayaan yang perlu dianalisis secara mendalam guna mengoptimalkan capaian pembangunan desa berkelanjutan di Kabupaten Seram Bagian Barat.

Data periode 2022 hingga 2024 pada menunjukkan tren positif dalam capaian indeks-indeks kesejahteraan di Kabupaten Seram Bagian Barat. Indeks Kesejahteraan Sosial (IKS) relatif stabil dengan nilai sekitar 0,75, menandakan tingkat kesejahteraan sosial yang konsisten dan relatif baik. Indeks Kesejahteraan Ekonomi (IKE) menunjukkan peningkatan bertahap dari 0,566 pada 2022 menjadi 0,586 pada 2024, yang mengindikasikan perbaikan kondisi ekonomi masyarakat secara perlahan.

Sementara itu, Indeks Kesejahteraan Lingkungan (IKL) juga mengalami peningkatan yang stabil dari 0,759 pada 2022 menjadi 0,770 pada 2024, mencerminkan upaya berkelanjutan dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan di wilayah tersebut. Secara komposit, Indeks Desa Membangun (IDM) meningkat dari 0,693 pada 2022 menjadi 0,704 pada 2024, mengindikasikan kemajuan menyeluruh dalam pembangunan desa yang meliputi aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.

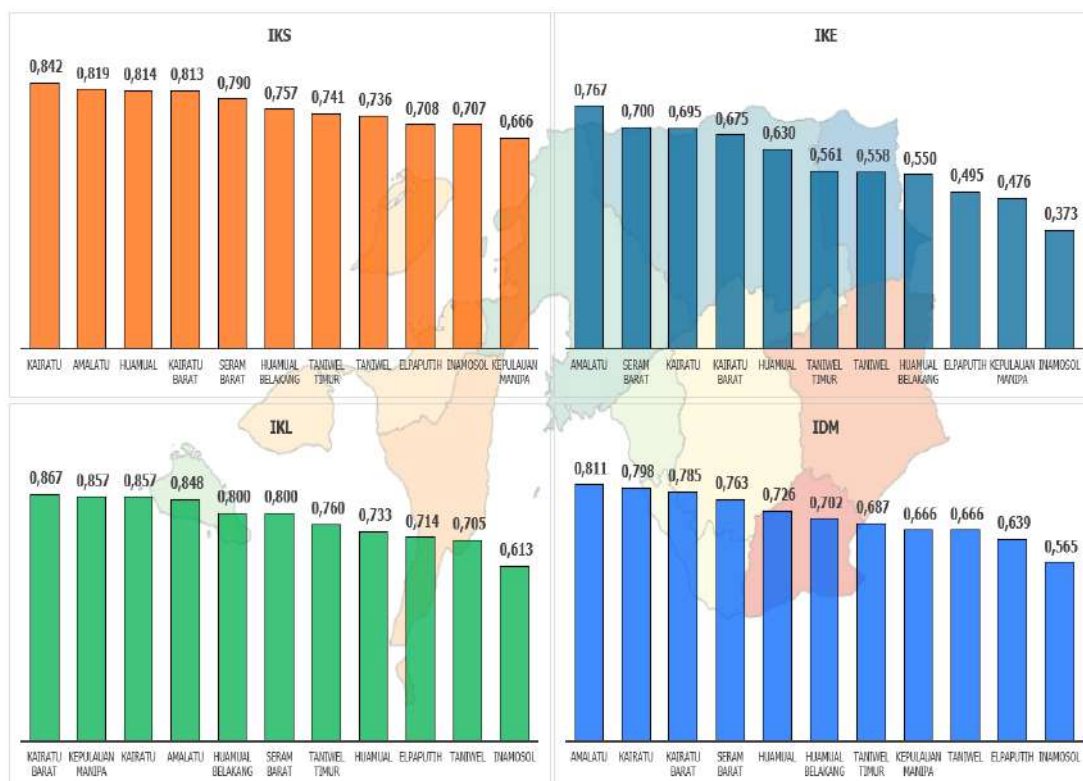
Secara keseluruhan, data ini mencerminkan tren pembangunan yang progresif dan berimbang di Kabupaten Seram Bagian Barat. Namun, peningkatan indeks ekonomi yang masih relatif lambat perlu menjadi perhatian khusus, dengan fokus pada strategi pemberdayaan ekonomi yang lebih efektif guna mempercepat kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Penguatan sinergi antar-pilar kesejahteraan diharapkan dapat mendorong percepatan pencapaian target pembangunan berkelanjutan di tingkat desa dan kabupaten.

Gambar 2.49. Rata-rata Capaian IDM di Kabupaten SBB, 2022-2024



Sumber: Kemendesa PDTT (Data Diolah, 2025)

Gambar 2.50. Capaian IDM dan Dimensi Penyusunnya pada setiap Wilayah Kecamatan di Kabupaten SBB, 2024



Sumber: Kemendesa PDTT (Data Diolah, 2025)

Data indeks kesejahteraan tahun 2024 pada tingkat kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Barat menunjukkan variasi capaian yang signifikan antar wilayah, mencerminkan perbedaan tingkat pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang perlu menjadi perhatian dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah.

Indeks Desa Membangun (IDM) di kecamatan-kecamatan di Seram Bagian Barat berkisar antara 0,56 hingga 0,81. Nilai ini mengindikasikan disparitas yang cukup lebar dalam capaian kesejahteraan, dimana sebagian wilayah sudah menunjukkan kemajuan signifikan, sementara wilayah lain masih menghadapi tantangan pembangunan yang cukup besar.

Kecamatan Amalatu menempati posisi tertinggi dengan IDM sebesar 0,8110, didukung oleh indeks sosial (IKS) 0,8188, indeks ekonomi (IKE) 0,7667, dan indeks lingkungan (IKL) 0,8476. Kinerja unggul ini mencerminkan integrasi pembangunan yang kuat antar pilar sosial, ekonomi, dan lingkungan. Selain itu, kecamatan Kairatu (IDM 0,7980) dan Kairatu Barat (IDM 0,7850) juga menunjukkan performa yang baik, terutama dalam aspek sosial dan lingkungan, dengan nilai IKS dan IKL yang mendekati atau melebihi 0,8.

Beberapa kecamatan seperti Seram Barat (IDM 0,7634), Huamual (0,7257), Huamual Belakang (0,7023), dan Taniwel Timur (0,6875) berada pada kategori menengah. Meski indeks sosial dan lingkungan relatif stabil dan tergolong baik, nilai indeks ekonomi di wilayah ini masih menunjukkan ruang perbaikan, dengan IKE berkisar antara 0,55 sampai 0,70.

Kecamatan Inamosol dan Elpaputih menjadi wilayah dengan capaian terendah, dengan IDM masing-masing sebesar 0,5647 dan 0,6391. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya indeks ekonomi, yaitu 0,3733 untuk Inamosol dan 0,4952 untuk Elpaputih, yang menandakan keterbatasan akses ekonomi dan peluang pengembangan usaha di wilayah tersebut.

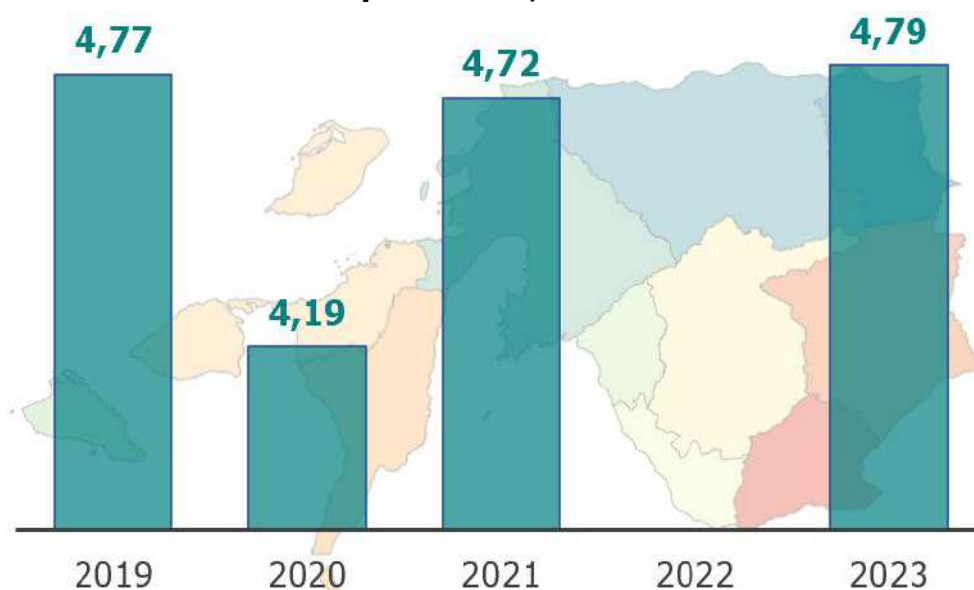
Perbedaan capaian indeks kesejahteraan ini menuntut pendekatan kebijakan yang bersifat tersegmentasi dan berbasis data. Prioritas perlu diberikan pada peningkatan pilar ekonomi di kecamatan dengan IKE rendah melalui program pemberdayaan ekonomi, pelatihan keterampilan, serta penyediaan akses modal dan

pasar. Sementara itu, kecamatan dengan indeks sosial dan lingkungan tinggi harus terus dipertahankan dan ditingkatkan dengan penguatan layanan sosial dan pelestarian sumber daya alam.

d. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif merupakan alat ukur komprehensif yang menilai sejauh mana pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Indeks ini mengintegrasikan berbagai aspek penting seperti distribusi pendapatan, akses terhadap peluang ekonomi, dan keterlibatan kelompok rentan dalam aktivitas ekonomi. Dengan demikian, Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif tidak hanya mengukur besarnya pertumbuhan ekonomi secara kuantitatif, tetapi juga kualitas dan keberlanjutan pertumbuhan tersebut dalam menciptakan kesejahteraan sosial yang adil dan merata. Pengukuran indeks ini menjadi acuan strategis dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang berorientasi pada pemerataan kesempatan dan pengurangan kesenjangan ekonomi di tingkat regional maupun lokal.

**Gambar 2.51. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif
Kabupaten SBB, 2019-2023**



Sumber: Bappenas RI (Data Diolah, 2025)

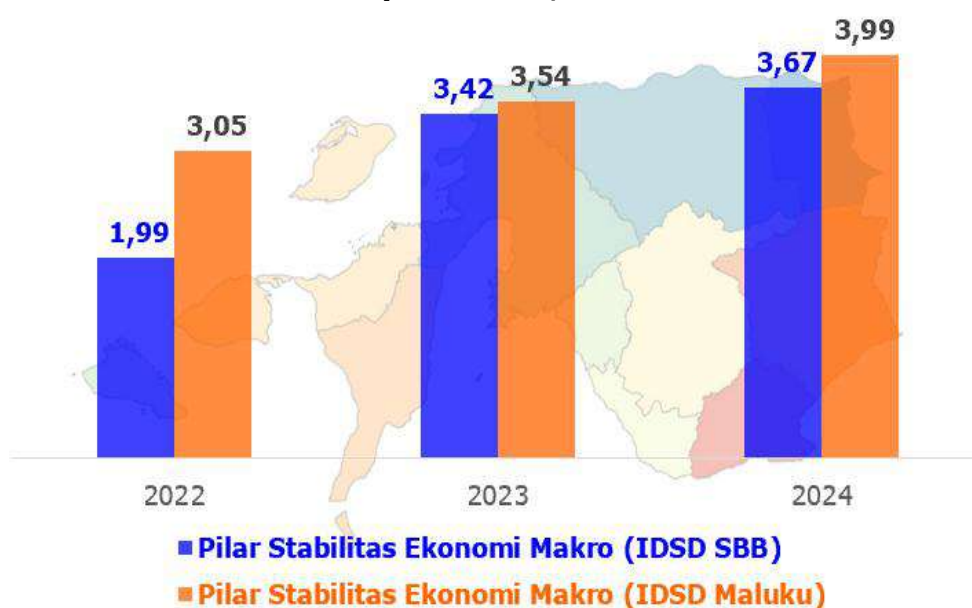
Perkembangan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) Kabupaten Seram Bagian Barat selama periode 2019 hingga 2023 menunjukkan dinamika yang fluktuatif, namun dengan kecenderungan perbaikan pada tahun-tahun terakhir. Pada tahun 2019, nilai indeks tercatat sebesar 4,77, kemudian mengalami penurunan signifikan menjadi 4,19 pada 2020, yang kemungkinan mencerminkan dampak langsung pandemi COVID-19 terhadap pemerataan dan aksesibilitas ekonomi lokal. Pada tahun 2021, nilai indeks kembali meningkat ke level 4,72, yang mencerminkan proses pemulihan. Setelah tidak tercatat pada 2022, nilai IPEI menunjukkan perbaikan menjadi 4,79 pada 2023. Tren ini mengindikasikan adanya kemajuan dalam upaya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, inklusif, dan berkeadilan, meskipun tetap diperlukan intervensi kebijakan yang konsisten untuk memastikan bahwa kelompok rentan dan wilayah terpencil juga memperoleh manfaat dari pembangunan ekonomi secara menyeluruh.

7) Stabilitas Ekonomi Makro

a. Indeks Stabilitas Ekonomi Makro

Pilar Stabilitas Ekonomi Makro merupakan indikator proxy yang mencerminkan ketahanan dan kestabilan perekonomian suatu wilayah terhadap tekanan eksternal maupun domestik. Indeks ini mengukur aspek-aspek fundamental seperti inflasi daerah, ketimpangan pendapatan, pengangguran, stabilitas fiskal, dan ketahanan sektor keuangan. Nilai indeks yang tinggi menunjukkan kondisi ekonomi yang relatif seimbang dan adaptif terhadap dinamika ekonomi nasional maupun global, sedangkan nilai rendah mencerminkan potensi kerentanan struktural. Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, pencapaian indeks ini menjadi dasar penting untuk merancang kebijakan fiskal dan moneter yang responsif, serta strategi pembangunan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan resilien.

**Gambar 2.52. Pilar Stabilitas Ekonomi Makro (IDSD)
Kabupaten SBB, 2022-2024**



Sumber: BRIN (Data Diolah, 2025)

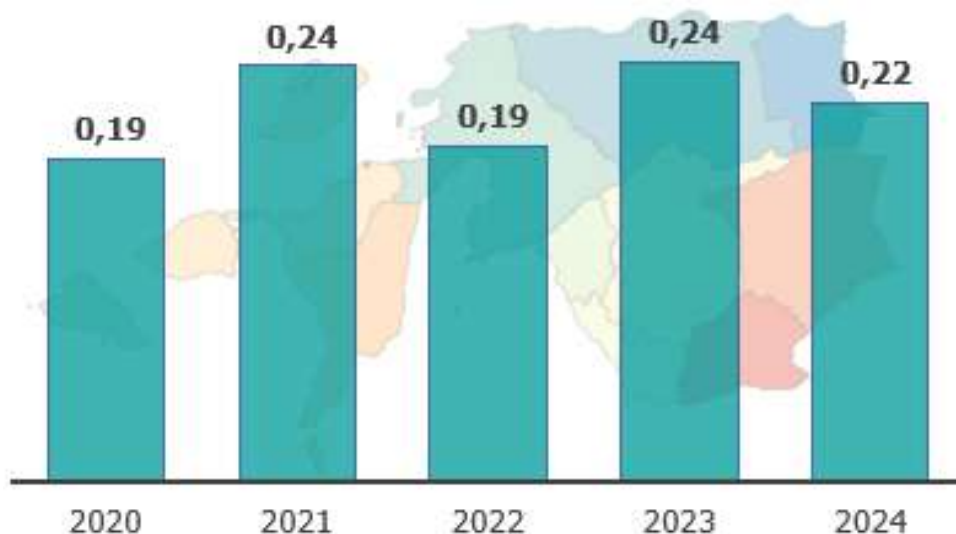
Data Pilar Stabilitas Ekonomi Makro Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) selama periode 2022 hingga 2024 menunjukkan tren pertumbuhan yang positif, meskipun masih berada di bawah capaian rata-rata Provinsi Maluku. Nilai indeks SBB meningkat dari 1,99 pada tahun 2022 menjadi 3,42 pada 2023, dan selanjutnya mencapai 3,67 pada 2024. Peningkatan ini mengindikasikan perbaikan dalam aspek-aspek makroekonomi daerah, seperti inflasi yang terkendali, peningkatan efisiensi fiskal, serta stabilitas harga dan ketenagakerjaan.

Sebagai perbandingan, Provinsi Maluku mencatat indeks sebesar 3,05 pada 2022 dan terus meningkat hingga 3,99 pada 2024. Meskipun selisih antar nilai indeks menunjukkan bahwa SBB masih perlu mengejar ketertinggalan terhadap rerata provinsi, arah tren yang sejalan menandakan bahwa kebijakan pengelolaan ekonomi di tingkat kabupaten mulai menunjukkan hasil. Untuk mempertahankan dan meningkatkan stabilitas ekonomi ke depan, diperlukan penguatan sinergi antar sektor fiskal, investasi, dan pengendalian inflasi, serta peningkatan kapasitas kelembagaan dalam perencanaan ekonomi makro yang berbasis data dan responsif terhadap dinamika lokal.

b. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Rasio Pajak Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator penting yang mencerminkan kapasitas fiskal suatu daerah dalam memobilisasi sumber-sumber pendapatan asli dari aktivitas ekonomi regional. Rasio ini mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap total nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh wilayah tersebut dalam satu periode tertentu. Semakin tinggi rasio ini, semakin besar pula kemandirian fiskal daerah, yang pada gilirannya dapat memperkuat kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan secara berkelanjutan tanpa ketergantungan yang tinggi terhadap transfer pusat. Oleh karena itu, pemantauan terhadap rasio ini menjadi krusial dalam menilai efektivitas kebijakan perpajakan daerah serta kinerja ekonomi lokal secara menyeluruh.

Gambar 2.53. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten SBB, 2020-2024



Sumber: Pengolahan Data PSP Unpatti, 2025

Berdasarkan data rasio Pajak Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Seram Bagian Barat selama periode 2019 hingga 2024, terlihat bahwa kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap total output ekonomi daerah masih berada pada level yang relatif rendah. Nilai rasio ini tercatat sebesar 0,19% pada tahun 2019, sempat meningkat menjadi 0,24% pada tahun 2020, namun kembali turun ke 0,19% pada tahun 2021.

Kenaikan kembali ke 0,24% terjadi pada tahun 2022, diikuti oleh sedikit penurunan menjadi 0,22% pada tahun 2023 dan stagnan di angka yang sama pada 2024.

Fluktuasi tersebut mengindikasikan adanya dinamika dalam efektivitas pemungutan pajak daerah serta respons terhadap perubahan struktur ekonomi lokal. Rasio yang masih di bawah 1% menandakan bahwa potensi penerimaan pajak daerah belum tergarap secara optimal. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti basis pajak yang sempit, tingkat kepatuhan pajak yang rendah, atau terbatasnya kapasitas institusional dalam pemungutan dan pengelolaan pajak daerah. Untuk meningkatkan kemandirian fiskal dan memperkuat kapasitas pembiayaan pembangunan daerah, diperlukan langkah-langkah strategis seperti ekstensifikasi basis pajak, peningkatan sistem administrasi pajak, serta edukasi dan sosialisasi kepada wajib pajak di tingkat lokal.

D. Aspek Pelayanan Umum

1) Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

a. Indeks Reformasi Hukum

Indeks Reformasi Hukum (IRH) merupakan instrumen untuk mengukur reformasi hukum melalui identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, serta penguatan sistem regulasi nasional. Perhitungan IRH telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Hukum Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. IRH menjadi salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, khususnya pada level meso, yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel. IRH bertujuan untuk menilai pelaksanaan reformasi hukum dalam rangka mewujudkan birokrasi yang kapabel serta memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi hukum pada kementerian/ lembaga.

IRH dinilai oleh Kementerian Hukum RI pada wilayah kerja masing-masing. Terkait penilaian IRH untuk seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku belum pernah dilakukan,

sehingga data capaian IRH tidak dapat diuraikan. Untuk penilaian mandiri yang dilakukan oleh pemerintah daerah IRH untuk tahun 2020-2024 berada pada kategori A (Nilai 80-90) dengan predikat sangat baik.

b. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kematangan implementasi teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola pemerintahan. Indeks ini mencerminkan sejauh mana instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, menerapkan prinsip-prinsip digitalisasi dalam proses administrasi, layanan publik, manajemen data, serta pengambilan keputusan. Pengukuran SPBE melibatkan dimensi kebijakan, tata kelola, manajemen, dan layanan, yang secara keseluruhan memberikan gambaran tentang efektivitas, efisiensi, dan integrasi sistem digital dalam mendukung kinerja birokrasi. Peningkatan nilai SPBE menjadi salah satu tolok ukur utama dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih terbuka, partisipatif, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dalam era transformasi digital.

Tabel 2.17. Indeks SPBE Kabupaten Seram Bagian Barat, 2019-2024

Capaian Indeks SPBE	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Indeks	1,10	1,10	1,60	1,75	1,86	1,90
Predikat	Kurang	Kurang	Kurang	Kurang	Cukup	Cukup

Sumber: KemenPANRB, Tahun 2025

Capaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Seram Bagian Barat menunjukkan tren

peningkatan moderat selama periode 2019 hingga 2024. Nilai indeks meningkat dari 1,10 pada tahun 2019 dan 2020, menjadi 1,60 pada 2021 dan 1,75 pada 2022, yang keseluruhannya masih berada pada kategori Kurang. Namun, pada tahun 2023, indeks mencapai nilai 1,86 dengan predikat Cukup, mencerminkan adanya perbaikan dalam tata kelola pemerintahan digital. Pencapaian tahun 2024 adalah sebesar 1,90 menandai tonggak penting dalam upaya digitalisasi birokrasi di daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Seram Bagian Barat mulai menunjukkan kemajuan dalam aspek kebijakan, tata kelola, manajemen layanan, serta penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Peningkatan ini perlu diakselerasi secara konsisten untuk mencapai kategori Baik atau Sangat Baik dalam beberapa tahun ke depan, seiring dengan agenda reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik yang berkelanjutan.

c. Indeks Pelayanan Publik

Salah satu indikator utama dalam menilai kualitas penyelenggaraan pelayanan publik oleh instansi pemerintah adalah Indeks Pelayanan Publik (IPP) yang disusun oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). IPP merupakan hasil evaluasi kinerja unit penyelenggara pelayanan publik, dengan penilaian yang mencakup sejumlah aspek krusial, antara lain: profesionalisme sumber daya manusia, ketersediaan dan kualitas sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, mekanisme konsultasi, penanganan pengaduan, serta inovasi pelayanan. Nilai IPP diberikan dalam rentang skala 0 hingga 5,00, dengan pengelompokan predikat sebagai berikut: nilai di bawah 1,00 tergolong *gagal* (predikat F), sedangkan nilai 4,51–5,00 dikategorikan sebagai *pelayanan prima* (predikat A).

**Tabel 2.18. Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Seram
Bagian Barat, Tahun 2023-2024**

Indeks Pelayanan Publik	2023	2024
Nilai Indeks	2,97	3,05
Predikat	Cukup	Baik (dengan catatan)

Sumber: KemenPANRB, Tahun 2025

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh KemenPAN-RB, Kabupaten Seram Bagian Barat pada tahun 2023 memperoleh nilai IPP sebesar 2,97, yang berada pada predikat C dengan kategori Cukup. Sementara itu, pada tahun 2024, nilai Indeks Pelayanan Publik tercatat 3,05, yang menandakan tidak adanya data atau ketidakterlaksanaan proses penilaian pada tahun tersebut. Kondisi ini mencerminkan perlunya penguatan sistem pelayanan publik di daerah, baik dari sisi tata kelola, kapasitas kelembagaan, maupun komitmen terhadap reformasi birokrasi agar kualitas pelayanan dapat meningkat secara berkelanjutan.

d. Indeks Integritas Nasional

Indeks Integritas Nasional merupakan hasil pengukuran yang dilakukan melalui Survei Penilaian Integritas (SPI) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menilai tingkat risiko korupsi dan integritas pada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia. Indeks ini mengukur persepsi dan pengalaman masyarakat serta data internal lembaga terkait transparansi, integritas pelaksanaan tugas, pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, perdagangan pengaruh, pengelolaan sumber daya manusia, dan sosialisasi antikorupsi.

e. Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi merupakan salah satu instrumen evaluatif yang digunakan untuk mengukur capaian pelaksanaan reformasi birokrasi pada instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Penilaian ini mencakup berbagai aspek strategis, seperti

manajemen perubahan, penataan kelembagaan, penguatan akuntabilitas, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pengawasan dan tata kelola. Indeks ini bertujuan untuk mendorong transformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2024, Kabupaten Seram Bagian Barat memperoleh predikat “C” (Nilai 38,89) dengan predikat kurang dalam Indeks Reformasi Birokrasi. Predikat ini mencerminkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah tersebut masih berada pada tahap *cukup*, dan memerlukan penguatan lebih lanjut agar mampu mencapai tingkat efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Tabel 2.19. Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Seram Bagian Barat, Tahun 2023-2024

Indeks Reformasi Birokrasi	2023	2024
Nilai Indeks	25,74	38,89
Predikat	Sangat Kurang	Kurang

Sumber: KemenPANRB, Tahun 2025

f. Indeks SAKIP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan instrumen evaluatif yang digunakan untuk menilai tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. SAKIP mengintegrasikan tiga sistem utama, yaitu sistem perencanaan, sistem penganggaran, dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan akuntabilitas keuangan. Melalui penerapan SAKIP, pemerintah daerah didorong untuk menyusun program dan kegiatan yang lebih tepat sasaran, efisien, dan berorientasi hasil, sekaligus memperbaiki tata kelola regulasi dan kebijakan publik secara berkelanjutan.

Penilaian SAKIP dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), dengan cakupan penilaian mencakup indikator-indikator strategis seperti

Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), dan Rencana Aksi. Hasil evaluasi diklasifikasikan ke dalam predikat nilai, mulai dari kategori *Sangat Memuaskan (AA)* hingga *Sangat Kurang (D)*.

Selama periode tahun 2022 hingga 2024, Kabupaten Seram Bagian Barat memperoleh predikat CC, yang berada dalam kategori *Cukup*. Capaian ini mencerminkan bahwa meskipun sistem akuntabilitas kinerja telah berjalan, masih terdapat ruang signifikan untuk perbaikan, terutama dalam konsistensi perencanaan kinerja, pengukuran hasil, serta pelaporan dan pemanfaatan hasil evaluasi untuk peningkatan kinerja instansi secara menyeluruh.

g. Opini BPK

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan indikator penting dalam menilai kualitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Opini tersebut mencerminkan tingkat kewajaran dan kepatuhan laporan keuangan terhadap standar akuntansi pemerintah yang berlaku.

Pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat berhasil meraih Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas LKPD. Capaian ini menandai perbaikan signifikan dibandingkan dua tahun sebelumnya, yaitu tahun 2021 dan 2022, di mana pemerintah daerah tersebut mendapatkan penolakan pemberian pendapat (*Disclaimer of Opinion*). Opini Disclaimer ini mengindikasikan bahwa laporan keuangan yang disajikan tidak memenuhi standar akuntansi yang cukup untuk memberikan opini auditor, mencerminkan kelemahan substansial dalam penyusunan dan pelaporan keuangan daerah. Dengan pencapaian opini WDP pada 2023, Kabupaten Seram Bagian Barat menunjukkan kemajuan dalam pengelolaan dan transparansi keuangan, meskipun masih terdapat beberapa pengecualian yang perlu diperbaiki untuk mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat sistem pengendalian internal dan tata kelola

keuangan daerah secara menyeluruh guna mendukung akuntabilitas dan kepercayaan publik.

2) Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

a. Persentase Penegakan Perda

Persentase Penegakan Perda merupakan indikator yang mengukur tingkat penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang dilakukan sesuai dengan standar prosedur yang telah ditetapkan. Semakin tinggi persentasenya, semakin banyak Perda atau Perkada yang ditegakkan secara sesuai standar, yang mencerminkan efektivitas penegakan hukum daerah dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum.

b. Persentase Capaian Aksi HAM

Persentase Capaian Aksi HAM merupakan indikator yang mengukur tingkat realisasi pelaksanaan aksi atau program yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau kementerian/lembaga terkait dalam suatu periode tertentu. Indikator ini digunakan untuk menilai efektivitas dan komitmen pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) di tingkat pusat maupun daerah.

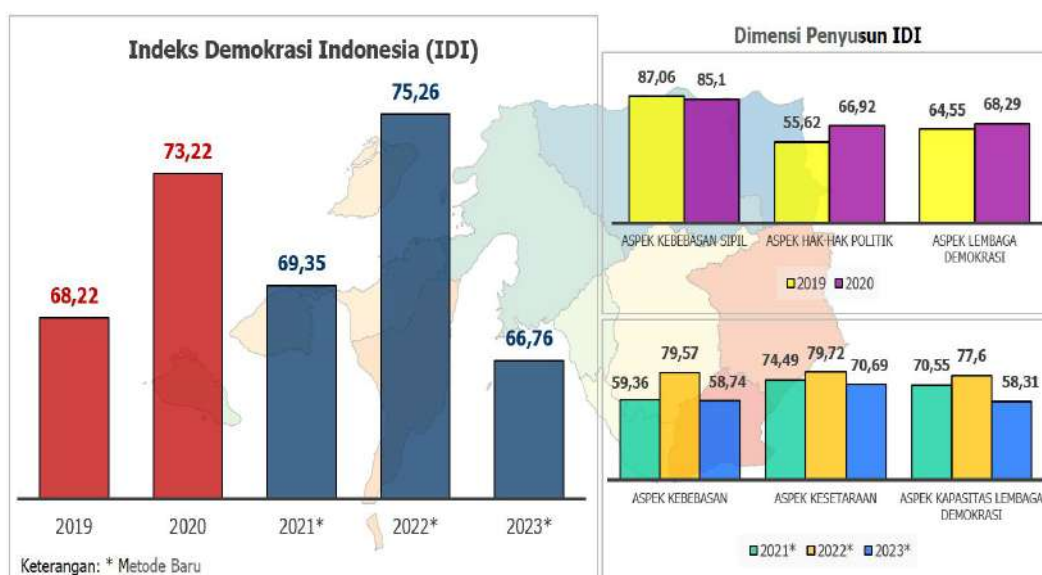
c. Indeks Demokrasi Indonesia

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan indikator strategis yang dikembangkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengukur kualitas demokrasi di tingkat provinsi serta kabupaten/kota. Indeks ini berdasar pada tiga dimensi utama, yaitu kebebasan sipil, partisipasi politik, dan kinerja lembaga demokrasi, dengan rentang nilai antara 0 hingga 100. IDI menyediakan gambaran kuantitatif mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi substantif di daerah, sekaligus berfungsi sebagai alat evaluasi bagi pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang inklusif, transparan, dan akuntabel. Selain itu, indeks ini menjadi landasan penting dalam perumusan kebijakan

yang bertujuan meningkatkan partisipasi publik dan melindungi hak-hak sipil secara berkelanjutan.

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Provinsi Maluku selama periode 2019 hingga 2023 mencerminkan dinamika yang kompleks dalam penerapan prinsip-prinsip demokrasi di tingkat regional, termasuk di Kabupaten Seram Bagian Barat. Pada tahun 2019, nilai IDI Provinsi Maluku tercatat sebesar 68,22, menunjukkan kondisi demokrasi berada pada tingkat sedang. Tahun 2020 mencatat peningkatan menjadi 73,22, yang mencerminkan perbaikan di aspek partisipasi politik dan penguatan hak-hak sipil. Namun, perubahan metodologi pengukuran IDI pada tahun 2021 menyebabkan penurunan nilai menjadi 69,35, yang lebih menggambarkan penyesuaian sistemik daripada kemunduran substantif.

Gambar 2.54. Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Maluku, 2019-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2025

Pada 2022, nilai IDI kembali meningkat signifikan ke angka 75,26, menandakan kemajuan dalam tata kelola demokrasi, termasuk peningkatan kualitas pemilihan umum dan penguatan kapasitas lembaga demokrasi lokal. Penurunan kembali ke 66,76 pada 2023 mengindikasikan adanya tantangan struktural dalam menjaga konsistensi kebebasan sipil dan efektivitas lembaga demokrasi, yang juga dirasakan di kabupaten seperti Seram Bagian Barat.

Sebagai bagian integral Provinsi Maluku, Kabupaten Seram Bagian Barat memberikan kontribusi terhadap capaian IDI provinsi dengan dinamika lokal yang khas. Tantangan utama yang dihadapi meliputi pemeliharaan ruang sipil yang inklusif, perlindungan kebebasan berekspresi, serta peningkatan partisipasi politik masyarakat secara aktif. Fluktuasi nilai IDI selama lima tahun terakhir menggarisbawahi urgensi penguatan tata kelola pemerintahan daerah, transparansi proses politik, dan keberfungsian lembaga demokrasi lokal. Dengan demikian, IDI menjadi rujukan strategis dalam merancang intervensi kebijakan yang terarah untuk mendorong kualitas demokrasi yang lebih substansial dan berkelanjutan di Kabupaten Seram Bagian Barat.

d. Keamanan, Ketenteraman, Ketertiban, dan Penegakan Hukum

Aspek keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum merupakan prasyarat fundamental dalam mendukung pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Stabilitas sosial yang terjaga tidak hanya menciptakan rasa aman bagi masyarakat, tetapi juga memberikan kepastian bagi aktivitas ekonomi, pelayanan publik, serta investasi. Oleh karena itu, pemantauan indikator-indikator proksi keamanan menjadi penting sebagai bahan evaluasi efektivitas penegakan hukum dan ketahanan sosial masyarakat.

Berdasarkan data Kabupaten Seram Bagian Barat periode 2019–2024, tren dinamika keamanan menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Jumlah kejahatan yang dilaporkan sempat menurun pada 2022 dengan 147 kasus, namun kembali melonjak menjadi 465 kasus pada 2023, sebelum menurun lagi menjadi 368 kasus pada 2024. Risiko penduduk mengalami tindak pidana per 100.000 penduduk juga menunjukkan pola serupa—menurun tajam pada 2022 (67), lalu meningkat menjadi 190 pada 2023, dan kembali menurun menjadi 153 pada 2024. Hal ini menunjukkan adanya kerentanan situasional yang dapat dipengaruhi oleh dinamika sosial, ekonomi, dan efektivitas aparat penegak hukum.

Tabel 2.20. Indikator Proxi Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban di Kabupaten Seram Bagian Barat, 2019-2024

INDIKATOR	TAHUN					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Kejahatan yang dilaporkan	247	200	320	147	465	368
Risiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana per 100.000 Penduduk	157	-	154	67	190	153
Persentase Penyelesaian Tindak Pidana (%)	63	41	69	10	17	80

Sumber: Maluku Dalam Angka 2022-2025

Sementara itu, persentase penyelesaian tindak pidana juga mengalami dinamika tajam. Setelah mencapai 69% pada 2021, capaian ini merosot drastis ke 10% pada 2022 dan hanya sedikit membaik di 2023 (17%). Namun, tahun 2024 menunjukkan peningkatan signifikan dengan tingkat penyelesaian mencapai 80%, yang menandakan perbaikan kinerja penegakan hukum atau reformasi dalam sistem penyidikan. Data ini menggambarkan bahwa meskipun terdapat tantangan dalam pengendalian kejahatan, upaya pemulihan dan perbaikan sistem peradilan mulai menunjukkan hasil positif.

Oleh karena itu, untuk menjaga konsistensi ketenteraman dan ketertiban di daerah, perlu adanya penguatan sinergi antar institusi keamanan, peningkatan kapasitas penegakan hukum, serta pelibatan aktif masyarakat dalam menciptakan lingkungan sosial yang aman dan harmonis.

3) Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

a. Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan alat ukur komprehensif yang digunakan untuk menilai kemampuan suatu wilayah dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi, investasi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. IDSD mengintegrasikan berbagai aspek penting seperti infrastruktur, sumber daya manusia, kualitas pelayanan publik, iklim investasi, dan inovasi daerah. Dengan menggunakan indeks ini, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan wilayahnya, serta merumuskan strategi pembangunan yang efektif untuk meningkatkan daya saing di tingkat nasional maupun regional. Indeks Daya Saing Daerah menjadi tolok ukur penting dalam mendorong percepatan pembangunan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di suatu daerah.

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2024 tercatat sebesar 3,06, mencerminkan perlunya penguatan kapasitas wilayah dalam menciptakan lingkungan yang kompetitif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pilar Lingkungan Pendukung menunjukkan capaian cukup baik pada aspek institusi (3,35), infrastruktur (3,41), dan stabilitas ekonomi makro (3,67), meskipun adopsi TIK masih perlu ditingkatkan (2,98). Pada pilar Sumber Daya Manusia, indikator keterampilan tenaga kerja tergolong tinggi (3,69), diikuti oleh kesehatan (3,14), namun pasar produk masih lemah (2,84). Di sisi Pasar, pasar tenaga kerja menunjukkan performa moderat (3,33), namun sistem keuangan masih menjadi hambatan serius dengan skor rendah (1,90), yang mengindikasikan terbatasnya inklusi dan intermediasi keuangan. Sementara itu, pilar Ekosistem Inovasi relatif stagnan dengan dinamisme bisnis (3,41) dan ukuran pasar (3,44) yang cukup stabil, namun kapabilitas inovasi sangat rendah (1,56), mencerminkan minimnya dukungan terhadap kegiatan riset dan pengembangan.

**Gambar 2.55. Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Seram
Bagian Barat, 2024**

INDEKS/INDIKATOR/PILAR PENYUSUN		TAHUN			
		2022	2023	2024	
Indeks Daya Saing Daerah		-	-	3,06	
LINGKUNGAN PENDUKUNG	Pilar 1 : Institusi	-	-	3,35	
	Pilar 2 : Infrastruktur	2,4	2,14	3,41	
	Pilar 3 : Adopsi TIK	1,92	2,69	2,98	
	Pilar 4 : Stabilitas Ekonomi Makro	1,99	3,42	3,67	
SUMBER DAYA MANUSIA	Pilar 5 : Kesehatan	3,23	3,24	3,14	
	Pilar 6 : Keterampilan	3,32	3,40	3,69	
	Pilar 7 : Pasar Produk	3,07	3,24	2,84	
PASAR	Pilar 8 : Pasar Tenaga Kerja	2,87	3,84	3,33	
	Pilar 9 : Sistem Keuangan	1,30	0,28	1,90	
EKOSISTEM INOVASI	Pilar 10 : Ukuran Pasar	0,13	3,42	3,44	
	Pilar 11 : Dinamisme Bisnis	5,00	1,90	3,41	
	Pilar 12 : Kapabilitas Inovasi	1,33	1,94	1,56	

Sumber: BRIN (Data Diolah, 2025)

Secara keseluruhan, capaian IDSD SBB menunjukkan perlunya intervensi prioritas pada penguatan sistem keuangan, pengembangan inovasi daerah, serta peningkatan pemanfaatan TIK dan efisiensi pasar produk. Hal ini menjadi dasar penting bagi penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih terarah, responsif, dan berbasis data.

4) Kinerja setiap urusan pemerintahan daerah.

Sub bab ini menyajikan gambaran capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada setiap urusan pemerintahan daerah selama periode tahun 2020 hingga 2024. Evaluasi terhadap IKK ini bertujuan untuk menilai kinerja penyelenggaraan urusan wajib maupun pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat, sebagai dasar dalam perumusan arah kebijakan dan strategi pembangunan pada periode perencanaan selanjutnya.

Tabel 2.21. Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	CAPAIAN				
		2020	2021	2022	2023	2024
A.	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT					
1	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi					
1.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	-0,17	3,4	5,63	4,67	5,62
1.2	Laju inflasi (%)	2,7	2,2	4,77	5,12	2,66
1.3	PDRB per kapita (juta rupiah)	14,324	14,742	15,995	17,031	18,037
1.4	Indeks Gini	0,296	0,267	0,284	0,241	0,252
1.5	Rasio Penduduk miskin (%)	25,11	25,27	22,25	22,39	22,31
1.6	Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	71,86	72,2	68,13	62,72	69,71
1.7	Tingkat pengangguran terbuka (%)	5,47	5,65	5,45	4,74	4,52
2	Kesejahteraan Sosial					
2.1	Pendidikan					
2.1.1	Angka melek huruf (%)	99,7	99,62	99,44	99,39	99,73
2.1.2	Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,44	13,48	13,58	13,69	13,7
2.1.3	Angka rata-rata lama sekolah (Tahun)	8,87	8,92	9,24	9,35	9,59

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	CAPAIAN				
		2020	2021	2022	2023	2024
2.1.4	Angka Partisipasi Kasar					
	- SD/MI (%)	112,86	99,05	99,05	110,73	106,83
	- SLTP/MTs (%)	84,32	98,56	98,56	82,18	89,95
	- SMA/SMK/MA (%)	102,8	83,04	83,04	103,2	94,51
2.1.5	Angka Partisipasi Murni					
	- SD/MI (%)	98,19	98,23	98,23	96,44	96,2
	- SLTP/MTs (%)	72,16	73,7	73,7	73,48	76,45
	- SMA/SMK/MA (%)	68,1	67,93	67,93	67,79	69,14
2.2	Kesehatan					
2.2.1	Angka Usia Harapan Hidup (Tahun)	69,93	70,10	70,51	70,88	71,18
2.2.2	Prevalensi Stunting (%)	26,4	28,7	27,5	31,4	33,8
2.2.3	Persentase Gizi buruk (%)	NA	9,8	11,2	20,4	20,3
2.2.4	Prevalensi Kekurangan Gizi (underweight) pada anak balita (%)	29,72	29	20	29,8	28,9
2.3	Kesempatan Kerja					
2.3.1	Rasio Penduduk Yang Bekerja (%)	94,53	94,35	94,55	95,26	95,48
2.3.2	Angka Partisipasi Kerja (%)	71,86	72,2	68,13	62,72	69,71
2.4	Angka Kriminalitas					
2.4.1	Rasio Kriminalitas (%)	0,055	0,15	0,115	0,167	0,119

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	CAPAIAN				
		2020	2021	2022	2023	2024
2.5	Fokus Seni dan Budaya					
2.5.1	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya (Kali)	2	2	2	3	3
B.	ASPEK PELAYANAN UMUM					
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR					
1.1	Pendidikan					
1.1.1	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi	2,5	2,6	2,76	16,87	15,09
1.1.2	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca	7,25	7,55	10,55	19,35	19,46
1.1.3	Persentase peserta didik yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca	34,17	35,18	39,71	48,32	49,49

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	CAPAIAN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.1.4	Persentase peserta didik yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi	23,62	24,55	28,41	47,64	15,09
1.1.5	Skor kemampuan literasi jenjang SD	NA	1,58	47,56	54,61	50,71
1.1.6	Skor kemampuan literasi jenjang SMP	NA	1,48	40,71	48,68	57,72
1.1.7	Skor Kemampuan numerasi jenjang SD	NA	1,51	33,77	48,17	45,64
1.1.8	Skor Kemampuan numerasi jenjang SMP	NA	1,57	27,39	51,27	54,54
1.1.9	Angka partisipasi sekolah (5-6)	75,12	76,41	76,97	77,12	77,4
1.1.10	Angka partisipasi sekolah (7-15)	97,51	97,72	98,65	98,7	98,88
1.2	Kesehatan					
1.2.1	Rasio Posyandu per satuan balita (/1.000)	1:52	1:50	1:38	1:32	1:37

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	CAPAIAN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.2.2	Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk (/1.000)	1 : 2.445	1 : 2.445	1 : 2.834	1: 2.905	1: 2.988
1.2.3	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk (/1.000)	0,009	0,009	0,013	0,013	0,013
1.2.4	Rasio dokter per satuan penduduk (/1000)	0,089	0,089	0,192	0,197	0,195
1.2.5	Rasio tenaga medis per satuan penduduk (/1000)	6,71	6,94	7,09	6,87	6,89
1.2.6	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun (%)	8,6	9,8	11,2	20,4	20,3
1.2.7	Prevalensi anemia pada ibu hamil (%)	8	10,6	5,52	7	20
1.2.8	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif (%)	20	23	27	27,67	29
1.2.9	Angka kematian ibu	192/100.000 KH	133,5/100/000 KH	59/100.000 KH	197/100.000 KH	294/100.000 KH

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	CAPAIAN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.2.10	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (%)	77,81	76,42	80,86	82,02	81,98
1.2.11	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan (%)	78	82	83,17	84,59	85,19
1.2.12	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup (%)	1,65	2,67	5,92	1,64	4,9
1.2.13	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	0	0	0	1,96	0
1.2.14	Persentase imunisasi dasar lengkap pada bayi (%)	55	71	55	58	59,5
1.2.15	Prevalensi HIV pada populasi dewasa (angka)	10	17	20	35	45
1.2.16	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk	45% (195 Kasus)	51% (219 Kasus)	41% (269 Kasus)	54% (302 Kasus)	26% (277 Kasus)

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	CAPAIAN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.2.17	Kejadian Malaria per 1000 orang (%)	0,86	0,68	0,24	0,66	0,28
1.2.18	Persentase deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	5,73	16,64	28,66	30,78	49,54
1.2.20	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	11	25	46	38	32
1.2.21	Persentase merokok pada penduduk umur ≤ 18 tahun (%)	2,01	1,9	1,83	1,74	1,63
1.2.22	Prevalensi tekanan darah tinggi (%)	2,71	2,8	12,4	21,1	23,2
1.2.23	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun (%)	0,86	0,48	0,56	1,3	1,25
1.2.24	Prevalensi penyalahgunaan narkoba (%)	0,003	0,002	0,0026	0,0029	0,0036
1.2.25	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir	0,72	0,64	0,61	0,6	0,53

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	CAPAIAN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.2.26	Unmet need pelayanan kesehatan	11,63	11,21	10,29	10,05	9,86
1.3	Pekerjaan Umum					
1.3.1	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan (%)	76,12	77,17	78,24	78,38	78,73
1.3.2	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan (%)	61,31	62,15	65,2	65,56	66,39
1.3.3	Proporsi panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi baik (%)	28,52	28,76	34,74	42,47	47,93
1.3.4	Rasio tempat ibadah per 1000 penduduk	1,6	1,6	1,59	1,58	1,56
1.3.5	Rasio tempat ibadah mesjid per 1000 penduduk umat Islam	0,65	0,64	0,64	0,64	0,63
1.3.6	Rasio tempat ibadah gereja per 1000 penduduk umat Kristen	0,65	0,65	0,65	0,64	0,63

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	CAPAIAN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.3.7	Persentase irigasi dalam kondisi baik (%)	63,42	48,79	48,79	29,67	31,72
1.4	Perumahan					
1.4.1	Cakupan ketersediaan rumah layak huni (%)	73,39	78,21	82,57	87,99	88,24
1.4.2	Persentase penanganan rumah tidak layak huni (%)	4,82	4,36	5,42	0,09	1,35
1.5	Ketenteraman dan Ketertiban Umum					
1.5.1	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	2,87	2,87	2,86	2,84	2,81
1.5.2	Penegakan PERDA (%)	0	0	0	0	0
1.5.3	Cakupan patroli petugas Satpol PP (%)	100	100	100	100	100
1.5.4	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (%)	100	100	100	100	100
1.5.5	Cakupan pelayanan bencana kebakaran (%)	100	100	100	100	100
1.5.6	Tingkat waktu tanggap/response time rate (menit)	15	15	15	15	15
1.5.7	Indeks Resiko Bencana (%)	65,33	66,2	67,12	159,51	163,45

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	CAPAIAN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.5.8	Tingkat Fasilitas Penanganan Pasca Bencana (%)	100	100	100	100	100
1.5.9	Tingkat Penanganan Bencana (%)	100	100	100	100	100
1.6	Sosial					
1.6.1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	2,49	2,3	2,3	5,18	4,63
1.6.2	Persentase PMKS yang tertangani (%)	87,71	88,12	85,12	88,35	88,73
1.6.3	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas (%)	58,74	61,52	61,52	61,52	63,77
1.6.4	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan	12565	12807	10.578	9302	9735
1.6.5	Persentase pendampingan psikososial korban bencana sosial %)	100	100	100	100	100
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR					

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	CAPAIAN				
		2020	2021	2022	2023	2024
2.1	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
2.1.1	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan	8	11	5	32	34
2.1.2	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun	6	11	4	29	33
2.1.3	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	3,33	3,33	3,33	3,33	13,33
2.1.4	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial	3,13	3,13	3,13	3,13	6,25
2.2	Ketahanan Pangan					
2.2.1	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (%)	43,3	39,2	37,77	32,7	32,71
2.2.2	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (kkal/kap/hr)	65,6	71,2	73,6	75,4	79,6
2.3	Lingkungan Hidup					

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	CAPAIAN				
		2020	2021	2022	2023	2024
2.3.1	Persentase sampah perkotaan yang tertangani (%)	60,86	60,71	60,12	64,84	65,7
2.3.2	Indeks Kualitas Udara	90,41	93,33	93,07	92,22	83,72
2.3.3	Indeks Kualitas Air	55,67	55,56	54,72	50,49	52,22
2.3.4	Indeks Kualitas Lahan	88,4	87,85	87,85	87,85	85,28
2.3.5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	78,5	79,8	77,29	77,95	72,22
2.4	Kependudukan dan Catatan Sipil					
2.4.1	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk (%)	78,59	80	85	91,9	92,37
2.4.2	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran (%)	83,08	83,73	84,6	86,47	89,34
2.4.3	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur (%)	86,85	87,07	87,32	90,24	93

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	CAPAIAN				
		2020	2021	2022	2023	2024
2.4.4	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK (sudah/belum)	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
2.5	Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan					
2.5.1	Indeks Desa Membangun	0,6336 (Berkembang)	0,6629 (Berkembang)	0,6933 (Berkembang)	0,6996 (Berkembang)	0,7043 (Berkembang)
2.5.2	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (%)	89,55	90,5	92,71	93,65	93,77
2.5.3	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK (Angka)	2	2	3	3	3
2.5.4	Persentase LSM aktif (%)	27,33	30,71	30,71	32,55	32,55
2.5.5	Persentase PKK aktif (%)	100	100	100	100	100
2.5.6	Persentase Posyandu aktif (%)	100	100	100	100	100
2.5.7	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat (%)	55,71	20,33	21,73	22,15	35,84
2.6	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera					

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	CAPAIAN				
		2020	2021	2022	2023	2024
2.6.1	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	23,78	1,1	1,5	2,06	1,57
2.6.2	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan (%)	81,59	84,14	86,81	87,54	89,25
2.6.3	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin (%)	42,57	45,36	46,58	57,54	67,09
2.6.4	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern (%)	22,71	18,87	10,24	18,21	24,98
2.6.5	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern (%)	7	5	5	15	15,79

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	CAPAIAN				
		2020	2021	2022	2023	2024
2.6.6	Total Fertility Rate (TFR)	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91
2.7	Perhubungan					
2.7.1	Jumlah arus penumpang angkutan umum (orang)	10.895.926	12.530.314	14.785.770	16.812.649	17.147.385
2.7.2	Rasio ijin trayek	0,00067	0,00068	0,0007	0,00091	0,00127
2.7.3	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	13	13	13	13	13
2.7.4	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	58,2	58,2	58,73	61,22	62,45
2.8	Komunikasi dan Informatika					
2.8.1	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam (%)	85	90	91,37	91,41	91,49
2.8.2	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband (%)	81	83	85	86	86,73
2.9	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah					
2.9.1	Persentase koperasi aktif (%)	13	6,79	30,49	29,69	29,69
2.9.2	Rasio pertumbuhan usaha mikro (%)	0,12	2,71	1,33	1,25	1,07

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	CAPAIAN				
		2020	2021	2022	2023	2024
2.10	Penanaman Modal					
2.10.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)					
2.10.2	Realisasi investasi Penanaman Modal Asing (US\$ Ribu)	NA	42,80	445,50	27.235,20	NA
2.10.3	Realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (Rp Juta)	NA	12.087,80	10.087,50	30.235,90	NA
2.11	Ketenagakerjaan					
2.11.1	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan (%)	7,43	8,16	8,57	9,37	9,96
2.11.2	Persentase tenaga kerja formal (%)	10	10	10	10	7,79
2.11.3	Upah rata-rata per jam pekerja (Rp)	16275	17306	17005	17156	17156
2.11.4	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur (%)	5,47	5,65	5,45	4,74	4,52

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	CAPAIAN				
		2020	2021	2022	2023	2024
2.11.5	Tingkat setengah pengangguran (%)	10	10,19	8,94	7,29	8,94
2.11.6	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET) (%)	0,17	0,24	0,52	0,47	0,41
2.12	Pemuda dan Olah Raga					
2.12.1	Persentase organisasi pemuda yang aktif (%)	69,3	69,3	78,8	78,8	78,8
2.12.2	Persentase wirausaha muda (%)	19,5	27,4	27,4	30,17	30,77
2.12.3	Cakupan pembinaan olahraga (%)	50,0	59,0	65,0	65	65
2.12.4	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi (%)	31,5	75,0	75,0	75	75
2.12.5	Cakupan pembinaan atlet muda (%)	48,07	52,17	70,0	67,12	55,21
2.12.6	Jumlah atlet berprestasi	3	59	4	1	2
2.12.7	Jumlah prestasi olahraga	3	36	52	1	1
2.13	Kebudayaan					

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	CAPAIAN				
		2020	2021	2022	2023	2024
2.13.1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya (Keg)	1	0	0	2	3
2.13.2	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi	13	13	13	13	13
2.13.3	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan	5	10	13	13	13
2.14	Statistik					
2.14.1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi (ada/tidak ada)	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA
2.14.2	Buku "kabupaten dalam angka" (ada/tidak ada)	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA
2.14.3	Buku "PDRB" (ada/tidak ada)	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA
2.15	Kearsipan					
2.15.1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku (%)	NA	53,2	55,76	57,12	57,12
3	URUSAN PILIHAN					
3.1	Pertanian					

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	CAPAIAN				
		2020	2021	2022	2023	2024
3.1.1	Kontribusi sektor pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB (%)	35,08	33,6	33,41	33,44	33,24
3.1.2	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB (%)	1,73	1,8	1,82	1,81	1,81
3.1.3	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB (%)	9,39	9,4	8,89	8,96	9,62
3.1.4	Kontribusi sektor pertanian dan perkebunan terhadap PDRB (%)	25,65	24,17	23,44	22,99	23,03
3.1.5	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB (%)	1,62	1,58	1,63	1,56	1,47
3.1.6	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (ton/ha)	3,3	3,3	4,6	4,6	3,3
3.1.7	Cakupan bina kelompok petani (%)	10,9	5,1	6,9	6,9	6,9
3.1.8	Nilai tukar petani (%)	97,36	103,97	104,34	106,10	102,34
3.2	Energi dan Sumber Daya Mineral					

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	CAPAIAN				
		2020	2021	2022	2023	2024
3.2.1	Persentase rumah tangga pengguna listrik(%)	NA	95,15	95,67	97,17	97,17
3.2.2	Jumlah pelanggan listrik (angka)	10521	42936	44992	46997	59363
3.3	Pariwisata					
3.3.1	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (angka)	0	0	1	39	24
3.3.2	Rata-rata kunjungan wisatawan (hari)	2	2	2	2	2
3.3.3	Retribusi sektor pariwisata (%)	0	3.750.000	0	18.952.400	22.787.850
3.4	Kelautan dan Perikanan					
3.4.1	Produksi perikanan tangkap (ton)	30309,01	31904,2	67.631,1	67.728,07	60.001,26
3.4.2	Produksi perikanan budidaya (ton)	258,633	315,635	77,605	116,712	20,896
3.4.3	Produksi hasil olahan perikanan (ton)	53631,000	90117,000	121732,000	117855,000	790088,000
3.5	Perdagangan					
3.5.1	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	8,49	8,77	9,13	9,38	9,68

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	CAPAIAN				
		2020	2021	2022	2023	2024
3.5.2	Jumlah sarana perdagangan (angka)	1487	1503	1526	1616	23411
3.5.3	Rasio sarana perdagangan per 100 penduduk (%)	0,7	0,71	0,72	0,75	10,77
3.6	Perindustrian					
3.6.1	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (%)	5,62	5,47	5,95	5,9	5,84
4	UNSUR PENDUKUNG, PENUNJANG, DAN PENGAWAS					
4.1	Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan administrasi pemerintah (Ada/tidak)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4.2	Nilai SAKIP (Predikat)	CC	CC	CC	CC	CC
4.3	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan (%)	71,12	76,37	80,42	77,53	80,19
4.4	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA (ada/tidak ada)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	CAPAIAN				
		2020	2021	2022	2023	2024
4.5	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA (ada/tidak ada)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4.6	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA (ada/tidak ada)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4.7	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA (ada/tidak ada)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4.8	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD (%)	100	100	100	100	100
4.9	Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD (%)	88,79	89,03	88,94	89,75	90,15
4.10	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase	26,66	29,46	33,12	34,37	33,35

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	CAPAIAN				
		2020	2021	2022	2023	2024
	dari total belanja pemerintah daerah (%)					
4.11	Opini BPK	Disclaimer	WDP	Disclaimer	WDP	WDP
4.12	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui (%)	77,47	73,69	73,14	74,92	74,25
4.13	Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB (%)	19,34	20,1	20,66	43,49	48,84
4.14	Indeks Inovasi Daerah	51,12	52,56	35,9	36,97	37,12
4.15	Rasio belanja APIP terhadap APBD (%)	0,53	0,79	0,77	0,79	0,98
5	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					
5.1	Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP (Keg)	0	0	1	2	2
5.2	Kegiatan pembinaan politik daerah (Keg)	2	2	2	2	3
C.	ASPEK DAYA SAING					

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	CAPAIAN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Kemampuan Ekonomi Daerah					
1.1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Ribuan Rupiah)	8.690	8.720	8.890	9.324	9.706
1.2	Produktivitas total daerah (Juta/Kapita/Tahun)	169.324	172.139	196.886	168.154	157,26
1.3	Nilai Tukar Petani	97,36	103,97	104,34	106,10	102,34
2	Fasilitas Wilayah / Infrastruktur					
2.1	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	58,2	58,2	58,73	61,22	62,45
2.2	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa (angka)	19	19	19	19	19
2.3	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum) (km)	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
2.4	Jumlah rumah makan/restoran (angka)	86	90	92	101	114
2.5	Jumlah penginapan dan hotel (angka)	29	29	32	32	34

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	CAPAIAN				
		2020	2021	2022	2023	2024
3	Iklm Berinvestasi					
3.1	Angka konflik sosial (angka)	0	0	4	6	5
3.2	Lama proses perijinan (Hari)	2	3	1	1	1
3.3	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah (Jenis)	31	31	31	31	31
3.4	Jumlah dan macam pajak daerah (Jenis)	9	9	9	9	9
3.5	Jumlah dan macam retribusi daerah (Jenis)	22	22	22	22	22
3.6	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha (Buah)	6	6	6	7	7
4	Sumber Daya Manusia					
4.1	Rasio lulusan S1/S2/S3 (%)	8,13	8,17	8,2	8,16	8,11
4.2	Rasio ketergantungan (%)	69,91	61,9	61,02	49,42	48,05

E. Standar Pelayanan Minimal

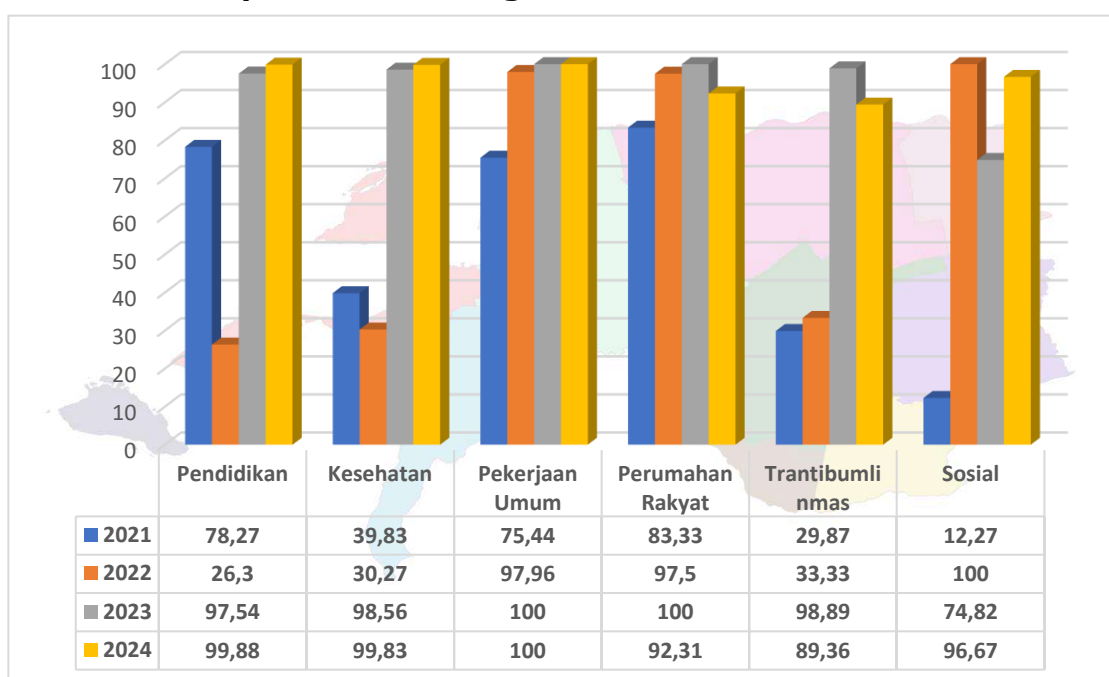
Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang wajib diperoleh setiap warga negara secara minimal. Penerapan SPM menjadi kewajiban bagi pemerintah daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Dalam konteks ini, Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat bertanggung jawab untuk memastikan penyelenggaraan pelayanan dasar yang berkualitas, adil, dan merata dalam enam urusan wajib pelayanan dasar, yaitu: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan sosial.

Pelaksanaan SPM selama 3 tahun terakhir telah menjadi bagian dari upaya untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan publik bagi seluruh masyarakat. Melalui penetapan indikator kinerja SPM, Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dapat memantau dan mengevaluasi kemajuan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat. Proses ini mencakup perencanaan berbasis kebutuhan, penganggaran, hingga pelaporan secara sistematis melalui aplikasi SPM yang terintegrasi dengan sistem nasional.

Walaupun terdapat capaian positif dalam beberapa urusan, tantangan dalam pemenuhan SPM masih ditemui, terutama terkait dengan keterbatasan anggaran, sebaran geografis wilayah, dan kapasitas sumber daya manusia penyelenggara layanan. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan komitmen lintas sektor, peningkatan efektivitas koordinasi antar perangkat daerah, serta optimalisasi dukungan pemerintah pusat dan mitra pembangunan, guna menjamin bahwa pelayanan dasar dapat diakses secara menyeluruh dan berkesinambungan.

Ke depan, pemenuhan target SPM akan menjadi salah satu fokus dalam perencanaan pembangunan daerah jangka menengah. Hal ini tidak hanya untuk memenuhi kewajiban regulatif, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral pemerintah daerah dalam menjamin terpenuhinya hak dasar masyarakat sebagai bagian dari pembangunan manusia yang berkelanjutan dan inklusif.

**Gambar 2.56. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2021-2024**



Sumber: Kementerian Dalam Negeri, Tahun 2025

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Seram Bagian Barat menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dalam empat tahun terakhir. Pada tahun 2021, capaian SPM secara keseluruhan berada pada angka 53,17%, yang kemudian meningkat menjadi 64,23% di tahun 2022. Peningkatan tersebut didorong oleh capaian maksimal pada urusan sosial (100%) meskipun masih terdapat beberapa urusan lainnya seperti pendidikan dan kesehatan yang masih rendah, masing-masing sebesar 26,3% dan 30,27%.

Memasuki tahun 2023, capaian SPM mengalami lonjakan menjadi 94,97%, dengan hampir semua urusan menunjukkan angka kinerja yang tinggi. Urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat mencapai 100%, sementara pendidikan dan kesehatan masing-masing berada pada kisaran 97–98%. Capaian ini semakin membaik di tahun 2024, dengan total capaian SPM sebesar 96,34%. Hampir seluruh urusan mencatat nilai di atas 90%, dengan urusan pekerjaan umum mencapai 100%, dan pendidikan serta kesehatan mendekati sempurna, yakni masing-masing 99,88% dan 99,83%.

Kinerja positif ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dalam meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan dasar kepada masyarakat. Capaian yang tinggi secara bertahap pada

seluruh urusan wajib layanan dasar menunjukkan adanya perbaikan dari sisi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi program berbasis SPM. Namun demikian, upaya pemantapan capaian SPM tetap diperlukan untuk menjaga keberlanjutan pelayanan serta memperkuat aspek pemerataan dan aksesibilitas, khususnya di wilayah-wilayah terpencil atau sulit dijangkau.

F. Kerjasama Daerah

Kerjasama daerah merupakan instrumen penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan percepatan pembangunan daerah. Melalui kerjasama yang strategis, pemerintah daerah dapat memanfaatkan sumber daya yang dimiliki pihak lain untuk mengatasi keterbatasan internal serta memperluas cakupan pelayanan kepada masyarakat. Kabupaten Seram Bagian Barat memandang bahwa pendekatan kolaboratif lintas sektor merupakan kunci dalam menciptakan pembangunan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Selama periode lima tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat telah menjalin berbagai bentuk kerjasama dengan sejumlah pihak, baik dari unsur pemerintah pusat dan daerah, lembaga pendidikan tinggi, maupun sektor swasta. Kerjasama dengan institusi akademik, seperti perguruan tinggi, difokuskan pada peningkatan kapasitas perencanaan pembangunan daerah melalui kajian ilmiah, riset kebijakan, serta pengembangan inovasi daerah. Sementara itu, kerjasama dengan kementerian dan lembaga teknis di daerah dilakukan dalam rangka sinkronisasi program nasional dan daerah, termasuk pendampingan teknis, pelatihan, serta penyelarasan data dan kebijakan sektoral.

Di samping itu, kerjasama dengan pelaku swasta juga terus diperluas, khususnya dalam mendukung pengembangan potensi ekonomi lokal. Sektor perikanan, pariwisata, dan pertanian menjadi ruang prioritas untuk mendorong keterlibatan dunia usaha melalui skema investasi, pendampingan UMKM, hingga pengembangan infrastruktur pendukung. Pendekatan ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan membuka peluang kerja bagi masyarakat.

**Tabel 2.22 Rincian Kerjasama Daerah yang Dilaksanakan oleh
Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dengan Pihak Lain
Diluar Pemerintah Daerah**

No	Kelompok Kerjasama	Nama Institusi		Uraian Kerjasama
1	Akademisi	1	Universitas Pattimura Ambon	1. Naskah Kajian Penelitian dan Ekspos Motif Khas Batik Kabupaten Seram Bagian Barat; 2. Kajian Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kab. Seram Bagian Barat; 3. Kajian Awal Pemetaan Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu untuk Peningkatan Nilai Ekonomi Masyarakat di Kab. Seram Bagian Barat 4. Tersusunnya naskah akademis Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat tentang Penetapan Negeri 5. Tersusunnya Rancangan Perda tentang Penetapan Negeri
		2	Institut Teknologi Bandung	Kajian Akademik Pemekaran Kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Barat Kajian Akademis Pembentukan Kota Kepulauan Huamual Kab. Seram Bagian Barat
		3	Rektor Universitas Gadjah Mada	Road Map Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kab. Seram Bagian Barat

No	Kelompok Kerjasama	Nama Institusi		Uraian Kerjasama
		4	Universitas Indonesia	Kajian Akademis tentang Revitalisasi Telaga Namaola terhadap Ekonomis Lingkungan di Desa Buano Utara
		5	Institut Agama Islam Negeri Ambon (IAIN)	Kajian Salam Khas Budaya Sesuai Struktur Bahasa Wamale dan Alune di Kabupaten Seram Bagian Barat
		6	Universitas Agama Kristen Maluku (UKIM)	Kajian Pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) sebagai Upaya Peningkatan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat di Kab. SBB
		7	STIKES Maluku Husada	Penempatan tenaga praktek klinik/lapangan
		8	Institut Pertanian Bogor	Pelaksanaan penyusunan Naskah Kajian Akademis
2	Kementerian/ Lembaga	1	Polres Seram Bagian Barat	keterlibatan pihak kepolisian pada setiap program penyuluhan hukum
		2	Kanwil Kemenkumham Maluku	Pembentukan Produk Hukum Daerah
		3	Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat	Penanganan Masalah Hukum dan Pencegahan Kebocoran Keuangan Daerah, & aset daerah
		4	BPJS Kesehatan Cab. Ambon	Pemberian dana Kapitasi dari BPJS kesehatan untuk Puskesmas yang ada di

No	Kelompok Kerjasama	Nama Institusi		Uraian Kerjasama
				Kabupaten Seram Bagian Barat
		5	BPJS Ketenagakerjaan Cab Ambon	Pemberian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri/ Non ASN/ Honorer Aparatur Pemerintah Desa dan/atau Aparatur Pemerintah Negeri, BPD dan /atau Badan Saniri Negeri dan Pekerja Rentan pada Lingkungan Daerah Kab. SBB
		6	Badan Pertanahan Nasional	Sinkronisasi dan Kolaborasi Layanan di Wilayah Kab.SBB
3	BUMN / BUMD	1	BPDM	Pembayaran dan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Secara Online
		2	BPR Modex	Penyaluran Fasilitas Kredit Kepada ASN Pemkab. SBB
		3	PT.PLN Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara	Pemungutan dan Penyetoran Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik dan Pembayaran Rekening Listrik Pemkab. SBB
4	Swasta/ Pelaku Usaha	1	CV. Tabgha Ocean Fishery	Kerjasama Investasi Budidaya Perikanan (Biota Laut) dan Pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan
		2	PT. Cahaya Timur Berkarya	Kerjasama Pengelolaan Unit Pengolahan Ikan di Tempat

No	Kelompok Kerjasama	Nama Institusi		Uraian Kerjasama
				Pelelangan Ikan (TPI) Waeyoho
		3	PT. Midi Indonesia Tbk	1. Pembukaan Gerai Alfamidi di wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat 2. Tenaga kerja dari masyarakat Kabupaten Seram Bagian barat 3. Promosikan produk IKM di Gerai Alfamidi
		4	PT. Indomarco Prismaatama (Indomaret)	1. Pembukaan Gerai Indomaret di wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat 2. Tenaga kerja dari masyarakat Kabupaten Seram Bagian barat 3. Promosikan produk IKM di Gerai Alfamidi
		5	CV. Tabgha Ocean Fishery	Kerjasama Investasi Budidaya Perikanan (Biota Laut)

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama Setda, Tahun 2025

Dengan adanya kerjasama yang terbangun secara formal dan fungsional, Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat memperoleh manfaat nyata dalam bentuk peningkatan kualitas layanan, efisiensi anggaran, serta pemanfaatan keahlian dan teknologi dari pihak mitra. Ke depan, arah kebijakan kerjasama daerah akan terus diarahkan untuk mendukung visi pembangunan jangka menengah daerah, serta memperkuat jejaring sinergi dalam kerangka pembangunan kawasan yang lebih luas.

G. Rencana Pembangunan Infrastruktur oleh APBN dan/atau APBD Provinsi di Kabupaten/Kota

Pembangunan infrastruktur dasar merupakan salah satu prioritas nasional yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025. Pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan terus melanjutkan pembangunan infrastruktur strategis di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Kabupaten Seram Bagian Barat. Dukungan pendanaan APBN ini dimaksudkan untuk menjamin keterjangkauan layanan dasar bagi masyarakat serta meningkatkan konektivitas antarwilayah.

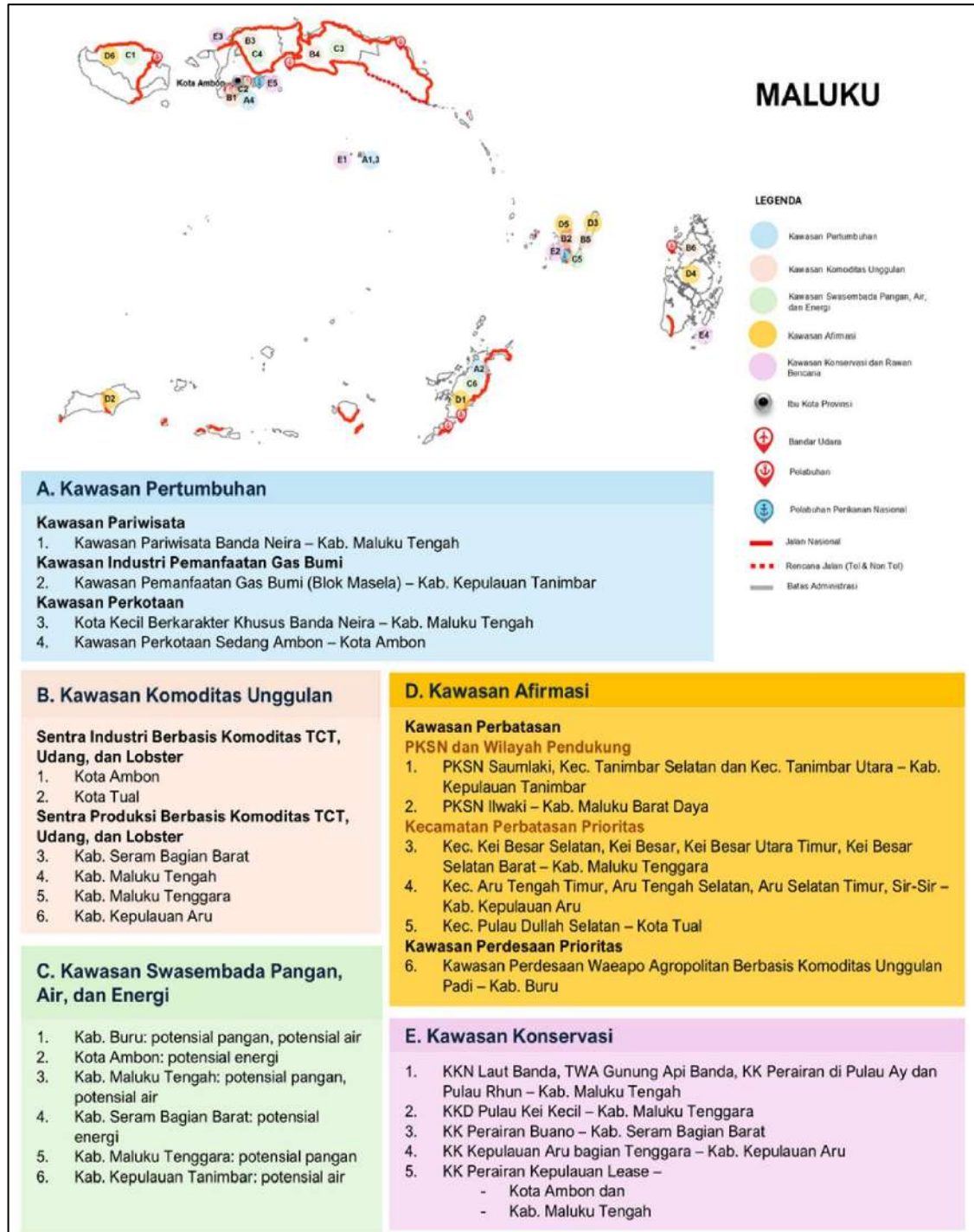
Di Kabupaten Seram Bagian Barat, infrastruktur dasar seperti jaringan jalan nasional menjadi prioritas utama yang dibiayai melalui APBN. Jalan nasional yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi serta jalur logistik antar pulau akan terus ditingkatkan kualitas dan jangkauannya guna menunjang aktivitas masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah. Pembangunan jalan ini tidak hanya mempermudah mobilitas barang dan jasa, tetapi juga memperkuat ketahanan wilayah dalam menghadapi bencana dan mendukung integrasi wilayah.

Selain infrastruktur konektivitas, pemerintah pusat juga akan membangun Sekolah Rakyat dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh kabupaten/kota di Indonesia, termasuk di Kabupaten Seram Bagian Barat. Sekolah Rakyat merupakan bagian dari upaya pemerataan akses pendidikan dasar berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama di daerah tertinggal dan terpencil. Sementara itu, SPPG hadir sebagai intervensi nyata pemerintah dalam menurunkan angka stunting dan meningkatkan kualitas kesehatan anak-anak melalui layanan gizi yang terintegrasi di tingkat lokal.

Di samping program-program umum tersebut, Kabupaten Seram Bagian Barat juga berpotensi menjadi lokasi pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diatur dalam RPJMN 2025–2029. PSN yang relevan dengan karakteristik daerah, seperti pembangunan pelabuhan, kawasan ekonomi berbasis potensi lokal, serta penguatan infrastruktur telekomunikasi dan ketenagalistrikan, akan menjadi perhatian dalam perencanaan lintas sektor antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah daerah akan terus berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait

untuk memastikan kesiapan daerah dalam mendukung pelaksanaan proyek-proyek strategis tersebut.

Gambar 2.57. Lokasi Prioritas Pembangunan RPJMN 2025-2029 di Provinsi Maluku



Sumber: Lampiran IV Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025, telah ditetapkan arah pengembangan wilayah nasional yang

mencakup pemanfaatan potensi daerah secara sektoral dan spasial. Kabupaten Seram Bagian Barat termasuk dalam wilayah yang direncanakan untuk pengembangan beberapa kawasan strategis berbasis potensi unggulan daerah. Peta pengembangan wilayah menunjukkan bahwa daerah ini memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan pangan, energi, dan konservasi lingkungan laut secara nasional.

Salah satu kawasan prioritas yang ditetapkan adalah Kawasan Komoditas Unggulan, yang difokuskan sebagai sentra produksi berbasis komoditas perikanan, khususnya Tuna, Cakalang, Tongkol (TCT), Udang, dan Lobster. Penetapan ini mencerminkan potensi kelautan dan perikanan Kabupaten Seram Bagian Barat yang melimpah dan bernilai ekonomi tinggi. Kawasan ini diarahkan menjadi pusat pengolahan dan distribusi hasil laut yang mendukung hilirisasi sektor kelautan serta membuka peluang investasi dan peningkatan kesejahteraan nelayan lokal.

Selanjutnya, wilayah ini juga masuk dalam kategori Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi, khususnya dengan status sebagai daerah potensial dalam penyediaan energi. Potensi ini dapat dikembangkan melalui pemanfaatan sumber daya terbarukan seperti energi mikrohidro, tenaga surya, dan biomassa yang tersedia di wilayah Seram Bagian Barat. Pengembangan energi lokal diharapkan mampu mendukung ketahanan energi nasional sekaligus menjawab tantangan keterbatasan akses listrik di beberapa wilayah terpencil.

Selain itu, dalam peta pengembangan wilayah juga tercantum Kawasan Konservasi Perairan Buano, yang diarahkan sebagai kawasan perlindungan dan pelestarian sumber daya perairan. Penetapan ini bertujuan menjaga ekosistem laut, keberlanjutan sumber daya hayati, dan mendukung praktik perikanan yang ramah lingkungan. Kawasan konservasi ini memiliki nilai strategis, tidak hanya dari aspek ekologis, tetapi juga dari sisi edukasi dan pariwisata bahari yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan.

Gambar 2.58 Proyek Strategis Nasional (PSN) yang Dilaksanakan di Provinsi Maluku

Bendungan Way Apu

Kementerian Pekerjaan Umum
Swasembada Air



Pengembangan Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela

Swasta
Swasembada Energi



Pengembangan Pelabuhan Ambon Terpadu

Kementerian Kelautan dan Perikanan,
Kementerian Perhubungan
Konektivitas dan Kawasan



Sumber: Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025

Salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang akan memberikan dampak signifikan bagi Provinsi Maluku, khususnya Kabupaten Seram Bagian Barat, adalah pengembangan Maluku Integrated Port atau Pelabuhan Ambon Terpadu. Proyek ini dirancang sebagai pelabuhan terpadu berskala besar yang berfungsi sebagai salah satu hub logistik Indonesia Timur. Tujuannya adalah memperkuat konektivitas antarpulau, memperlancar arus barang dan logistik, serta mendukung distribusi hasil produksi wilayah timur Indonesia ke pasar nasional dan internasional. Proyek ini merupakan bagian dari agenda besar pemerintah pusat untuk menyeimbangkan pembangunan antara wilayah barat dan timur Indonesia.

Maluku Integrated Port direncanakan akan dibangun di Desa Kamal, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, menjadikan kabupaten ini sebagai simpul strategis dalam jaringan pelabuhan nasional. Diharapkan kehadiran pelabuhan ini tidak hanya mendorong pertumbuhan sektor perikanan, perdagangan, dan industri, tetapi juga meningkatkan aksesibilitas wilayah terdekat, menciptakan lapangan kerja, serta memacu pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menyiapkan dukungan infrastruktur, perizinan, serta pemberdayaan masyarakat setempat dalam mendukung keberhasilan proyek ini.

H. BUMD yang mendukung Kinerja Pelayanan PEMDA.

Dalam rangka mendukung kinerja pelayanan pemerintah daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah, Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat memiliki satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berbentuk Perseroan Terbatas, yaitu PT. Saka Mese Nusa Utama (Perseroda). Keberadaan BUMD ini diharapkan dapat menjadi instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui pengelolaan usaha yang berorientasi pada pelayanan publik dan keuntungan bisnis. Namun demikian, dalam praktik pelaksanaannya, kinerja BUMD ini masih belum mencapai hasil yang diharapkan.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja terakhir, PT. Saka Mese Nusa Utama dikategorikan sebagai BUMD yang tidak sehat. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi kondisi ini adalah pengelolaan penyertaan modal dari pemerintah daerah yang belum optimal, baik dari sisi tata kelola manajemen, perencanaan bisnis, maupun implementasi kegiatan usaha. Hingga saat ini, belum terdapat kontribusi berupa dividen yang disetorkan kepada kas daerah, yang seharusnya menjadi salah satu indikator keberhasilan kinerja keuangan BUMD.

Adapun saat ini, kegiatan usaha yang dijalankan oleh PT. Saka Mese Nusa Utama berfokus pada pengelolaan lokasi wisata Air Putri, yang merupakan salah satu destinasi wisata alam unggulan di Kabupaten Seram Bagian Barat. Meskipun pengelolaan ini menjadi langkah awal yang positif, namun belum sepenuhnya memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan pelayanan publik maupun peningkatan PAD. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap rencana bisnis BUMD, penguatan

kapasitas manajerial, serta kemungkinan kerja sama dengan pihak swasta atau mitra strategis lainnya untuk mendorong transformasi BUMD menjadi entitas yang sehat, produktif, dan berdaya saing tinggi.

2.2. Gambaran Keuangan Daerah

Dukungan keuangan merupakan aspek penting dalam pembangunan daerah. Pemerintah daerah harus mampu mengelola keuangan dengan baik, mencari sumber pendanaan alternatif serta memastikan bahwa dana yang ada digunakan secara efisien untuk kesejahteraan Masyarakat. Dengan keuangan yang kuat, pembangunan daerah, terutama dibidang infrastruktur, layanan publik dan sektor ekonomi dapat berjalan dengan optimal, lancar dan berkelanjutan. Keuangan daerah dikelola berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dimana pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Analisis kinerja pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Lebih lanjut melalui analisis yang dilakukan dapat diketahui efisiensi dan efektivitas anggaran, mengukur kemandirian keuangan daerah, membantu pengambilan Keputusan, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, mengidentifikasi resiko keuangan dan meningkatkan kapasitas investasi daerah. Dasar dari analisis pelaksanaan kinerja keuangan daerah pada tahun 2020 – 2024 masih mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri No.77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam APBD, sehingga analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya. Pengelolaan keuangan daerah diawali dengan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Perubahan APBD sebagai dasar dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Pelaksanaan APBD tersebut dilaporkan dalam bentuk laporan keuangan pemerintah daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berkenan untuk disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan pemeriksaan.

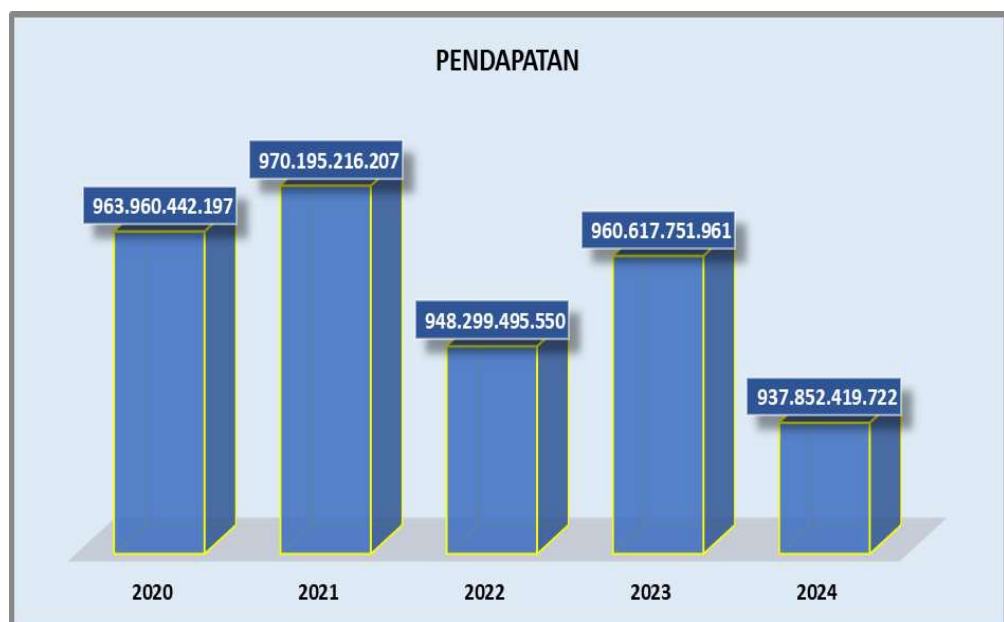
A. Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020 -2024.

1) Kinerja Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan uang yang masuk ke kas daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam satu periode tertentu. Pendapatan daerah bersumber dari berbagai penerimaan, baik yang berasal dari usaha sendiri (Pendapatan Asli Daerah/PAD), pendapatan transfer, maupun pendapatan lainnya yang sah. Pendapatan tersebut merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih.

Pendapatan daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dalam kurun waktu 2020 – 2024 mengalami perkembangan yang fluktuatif dan cenderung menurun, seperti tersaji pada Gambar 2.56. Terlihat bahwa di Tahun 2020 pendapatan daerah sebesar Rp.963,96 Miliar meningkat tertinggi pada tahun 2021 yang mencapai Rp.970.20 Miliar kemudian menurun dan mencapai titik terendah pada tahun 2024 yaitu sebesar Rp.937.85 Miliar. Hasil analisis tren menunjukkan bahwa dalam periode 5 tahun tersebut rata-rata laju penurunan pendapatan daerah Kabupaten Seram Bagian Barat adalah sebesar -0.67 % per tahun.

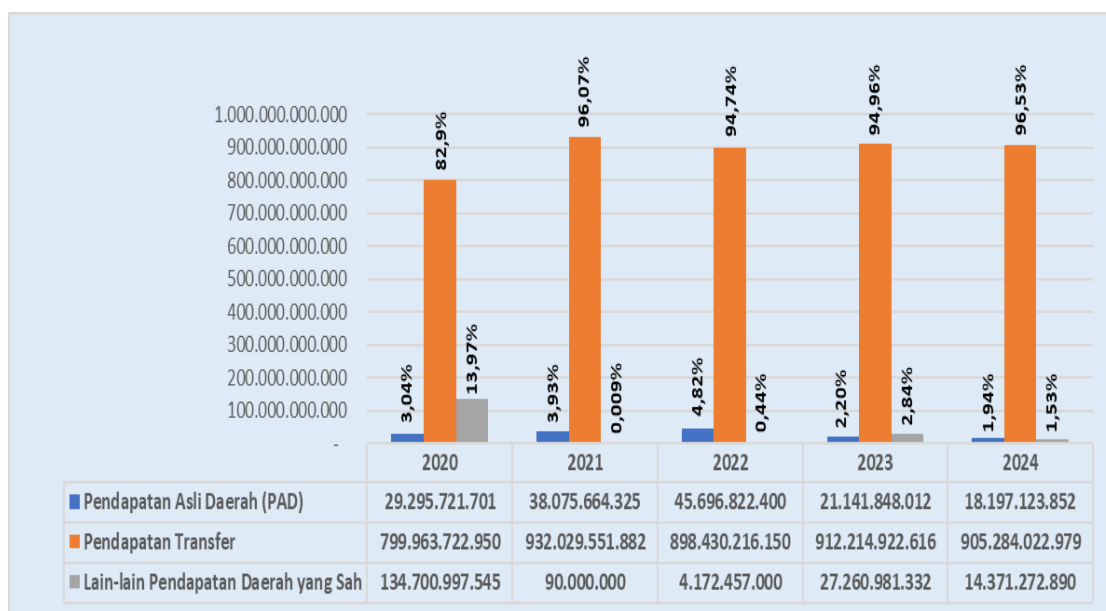
Gambar 2.59. Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat 2020 – 2024



Sumber: BPKAD, Tahun 2025

Berdasarkan sumber pendapatan yang ada, kontribusi tertinggi diberikan dari pendapatan transfer, kemudian posisi kedua berasal dari kontribusi lain-lain pendapatan daerah yang sah, sedangkan kontribusi ketiga dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah yang terkecil. Gambaran kontribusi PAD yang masih kecil menunjukkan Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) Kabupaten Seram Bagian Barat masih tergolong rendah, yaitu rata-rata 5 tahun terakhir baru mencapai kurang lebih 3.19%. Gambaran kontribusi dari sumber-sumber pendapatan daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, seperti tersaji pada Gambar berikut.

Gambar 2.60. Perkembangan Masing-masing Unsur Pendapatan Daerah di Kabupaten Seram Bagian Barat, Tahun 2020 - 2024



Sumber: BPKAD, Tahun 2025

Tabel 2.23. Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020 – 2024 (Rp.)

No.	Uraian	Realisasi Anggaran				
		2020	2021	2022	2023	2024
4	PENDAPATAN	963.960.442.197	970.195.216.207	948.299.495.550	960.617.751.961	937.852.419.722
4.1	Pendapatan Asli Daerah	29.295.721.701	38.075.664.325	45.696.822.400	21.141.848.012	18.197.123.852
4.1.1	Pajak Daerah	5.667.069.464	7.651.525.338	6.788.271.890	9.193.778.443	8.960.678.202
4.1.2	Retribusi Daerah	1.416.674.430	2.011.372.731	3.417.363.600	2.658.652.664	1.559.695.030
4.1.3	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan	2.935.198.155	3.107.298.510	3.107.298.510	3.593.405.024	3.157.157.337
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	19.276.779.652	25.305.467.746	32.383.888.400	5.696.011.881	4.519.593.283
4.2	Pendapatan Transfer	799.963.722.950	932.029.551.882	898.430.216.150	912.214.922.616	905.284.022.979
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	782.259.015.096	913.338.752.575	878.728.766.650	888.828.359.506	880.473.791.217

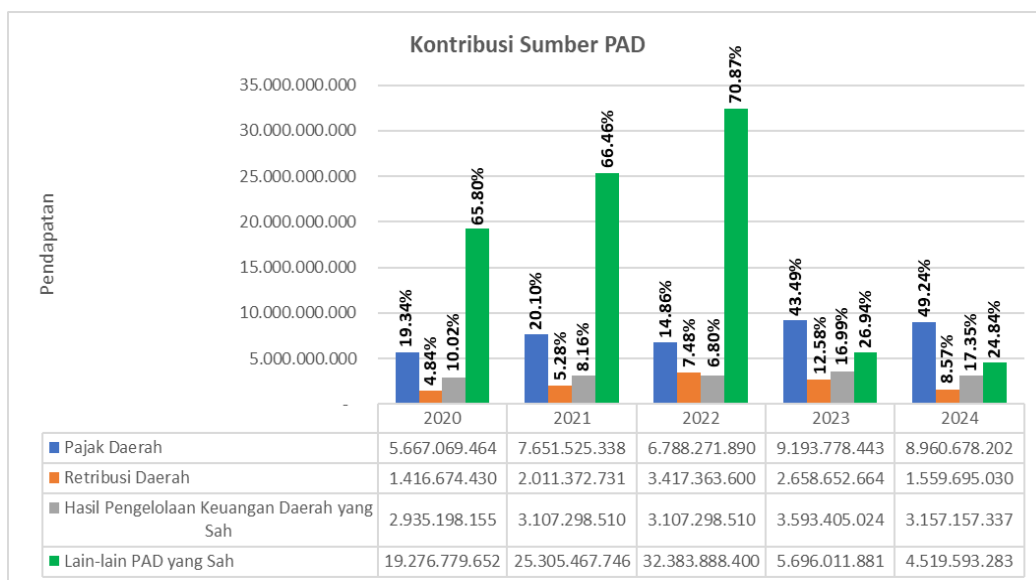
No.	Uraian	Realisasi Anggaran				
		2020	2021	2022	2023	2024
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	17.704.707.854	18.690.799.307	19.701.449.500	23.386.563.110	24.810.231.762
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	134.700.997.545	90.000.000	4.172.457.000	27.260.981.332	14.371.272.890
4.3.1	Pendapatan Hibah	26.482.600.000	90.000.000	4.172.457.000	11.460.980.650	0
4.3.2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	108.218.397.545	0	0	15.800.000.682	14.371.272.890

Sumber: BPKAD, Tahun 2025.

Diperoleh dari Gambar 2.57. bahwa Pendapata Asli Daerah (PAD) selama 5 tahun terakhir (2020 – 2024) mengalami penurunan, yaitu di tahun 2020 kontribusinya sebesar 3.04% dan pada tahun 2024 menurun menjadi 1.94%. Hal yang sama ditunjukkan juga oleh lain-lain pendapatan daerah yang sah, di tahun 2020 kontribusinya sebesar 13.97%, namun di tahun 2024 kontribusinya menurun drastis hingga mencapai 1.53%. Untuk pendapatan transfer dari pemerintah pusat, berdasarkan data tersaji terus mengalami peningkatan, pada tahun 2020 sebesar Rp.799.96 Miliar di tahun 2024 meningkat menjadi Rp.905.28 Miliar atau selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan rata-rata sebesar 3.42%.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencakup Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Selama kurun waktu 5 tahun (2020 – 2024) kontribusi dari masing-masing sumber PAD dapat dilihat pada Gambar berikut.

Gambar 2.61. Perkembangan Kontribusi Sumber PAD Terhadap PAD Kabupaten Seram Bagian Barat, 2020 – 2024



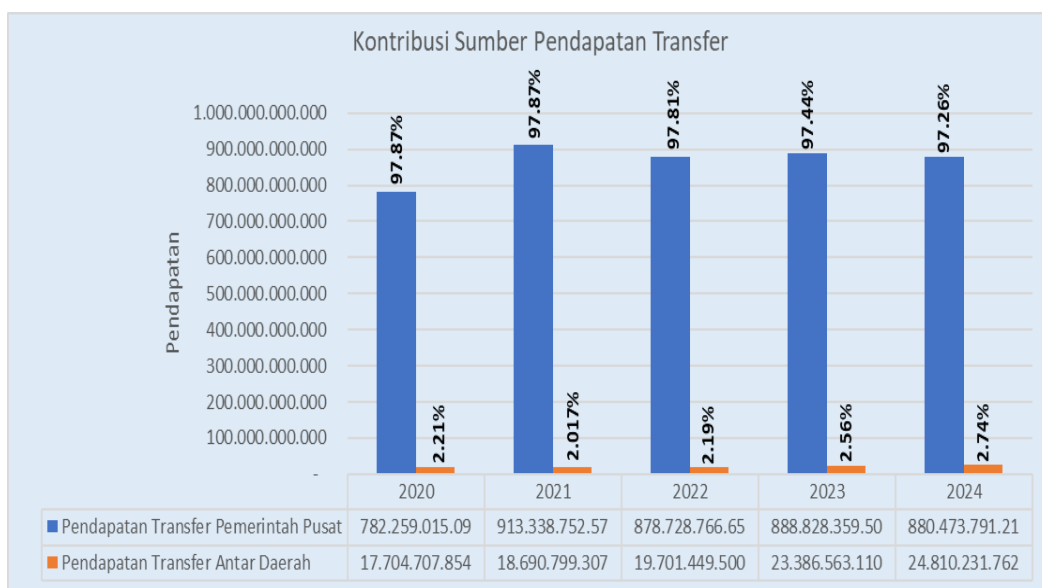
Sumber: BPKAD, Tahun 2025

Data pada Gambar 2.58. memperlihatkan bahwa kontribusi PAD terbesar berasal dari Lain-lain PAD yang Sah. Tren kontribusinya adalah sejak 3 tahun berturut-turut (2020–2022) kontribusi sumber pendapatan dari Lain-lain PAD yang Sah terus mengalami peningkatan (65.80% menjadi 70.87%), namun di tahun 2023 sampai tahun 2024

mengalami penurunan tajam (26.94% dan 24.84%). Selanjutnya, penerimaan PAD yang bersumber dari Pajak Daerah selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan, yaitu dari Rp.5.67 Miliar di tahun 2020 menjadi Rp.8.96 Miliar di tahun 2024, rata-rata laju peningkatan adalah sebesar 14.16%.

Kontribusi Retribusi Daerah terhadap penerimaan PAD masih tergolong sangat kecil, hanya berkisar Rp.1.4 Miliar sampai Rp.3.4 Miliar, dan perkembangan kontribusinya bersifat kuadratik, artinya selama 3 tahun terakhir mengalami peningkatan (2020 – 2022), kemudian setelah itu (2022 – 2024) mengalami penurunan sebesar 45.64% atau kontribusi di 2024 hanya sebesar Rp.1.56 Miliar. Selanjutnya kontribusi penerimaan PAD dari Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Sah cenderung mengalami peningkatan yaitu dari 10.02% di tahun 2020 (Rp.2.94 Miliar) menjadi 17.35% di tahun 2024 (Rp.3.16 Miliar). Penerimaan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dari sumber Pendapatan Transfer rata-rata selama 5 tahun (2020 – 2024) berada diatas 93,04 % (Gambar 2.57). Gambar 2.59. memperlihatkan bahwa dalam kurun waktu 5 tahun, Transfer Pemerintah Pusat terhadap Pendapatan Transfer Kabupaten Seram Bagian Barat sangat dominan, yaitu mencapai diatas 97 %, sedangkan kontribusi dari Pendapatan Transfer Antar Daerah hanya mencapai diatas 2 %.

Gambar 2.62. Perkembangan Kontribusi Sumber Pendapatan Transfer Terhadap Total Pendapatan Transfer.

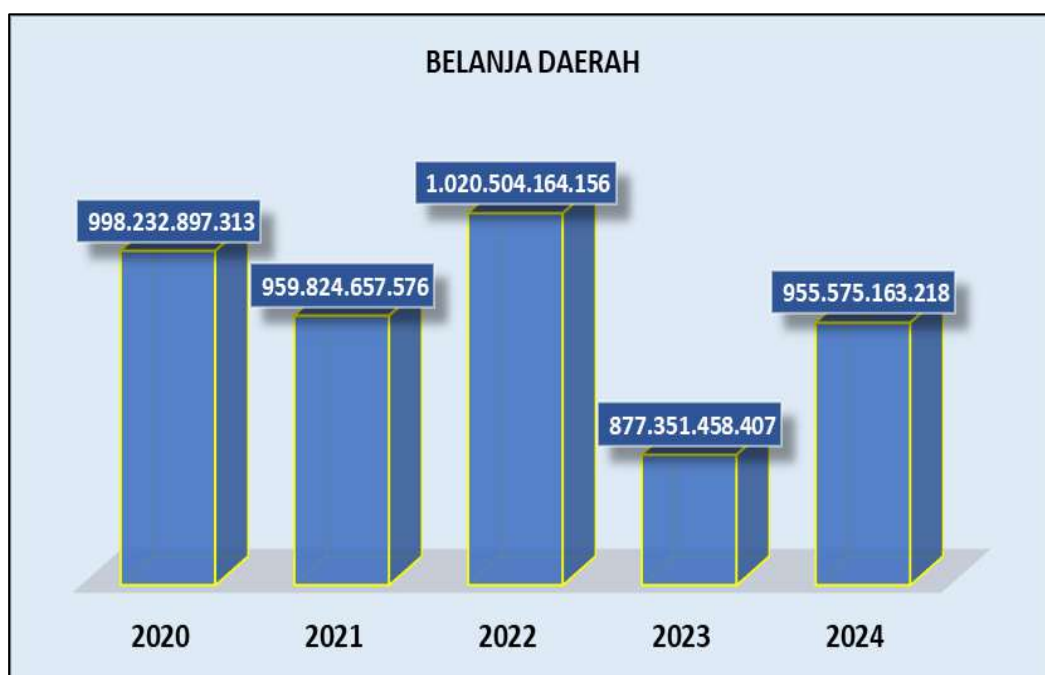


Sumber: BPKAD, Tahun 2025

2) Kinerja Belanja Daerah

Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Perkembangan belanja daerah Kabupaten Seram Bagian Barat selama 5 tahun terakhir menunjukkan angka yang fluktuatif. Data di gambar berikut memperlihatkan bahwa terdapat kecenderungan belanja daerah meningkat, di tahun 2020 tercatat realisasi sebesar Rp.998.23 Miliar dan di tahun 2022 meningkat menjadi Rp.1.02 Triliun, selanjutnya menurun hingga sampai tahun 2024 realisasinya tercatat sebesar Rp.955.58 Miliar.

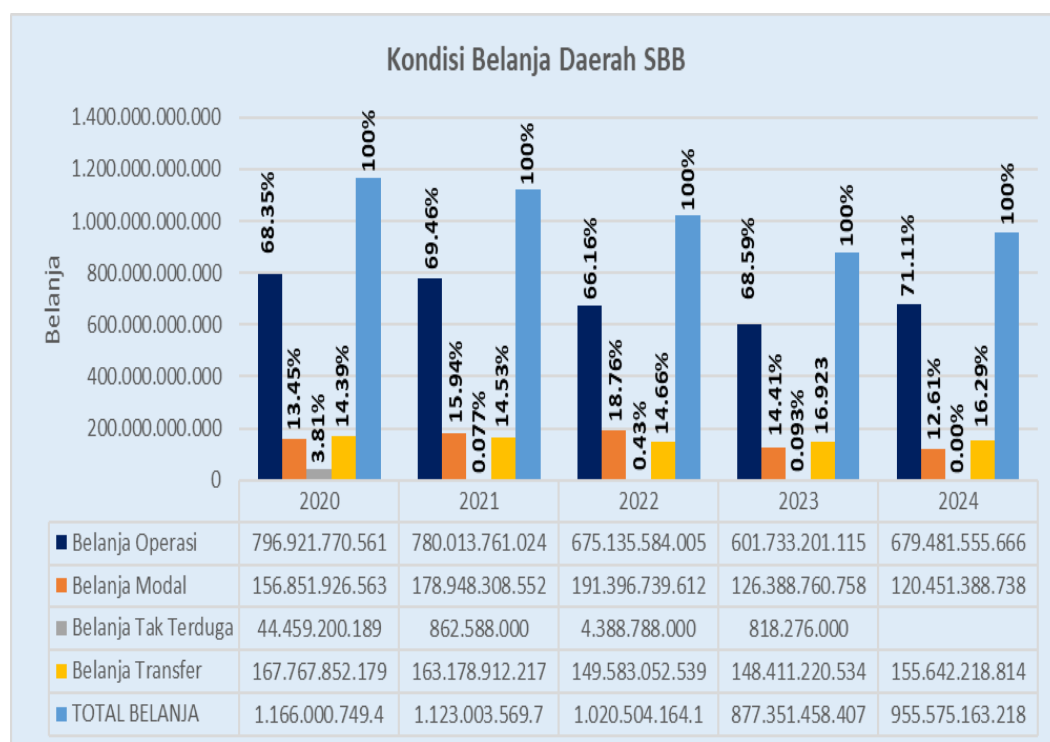
Gambar 2.63. Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, 2020 - 2024 (Rp.)



Sumber: BPKAD, Tahun 2025

Belanja daerah mencakup belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga. Alokasi dari perkembangan belanja daerah Kabupaten Seram Bagian Barat selama 5 tahun terakhir (2020 – 2024) dapat dilihat pada Tabel 2.14 dan Gambar berikut.

Gambar 2.64. Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, 2020 – 2024.

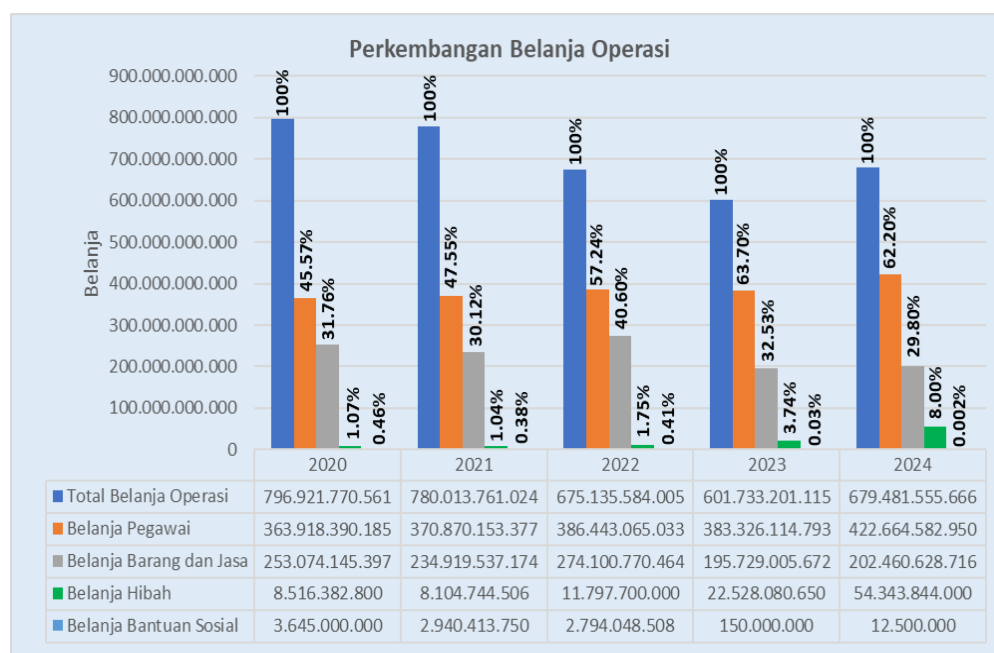


Sumber: BPKAD, Tahun 2025

Data pada Gambar tersebut memperlihatkan bahwa belanja daerah didominasi oleh belanja operasi, dalam kurun waktu 5 tahun perkembangannya cenderung meningkat, yaitu dari 68.35 % pada tahun 2020 meningkat menjadi 71.11% pada tahun 2024. Selanjutnya, perkembangan belanja modal di Kabupaten Seram Bagian Barat selama 5 tahun terakhir cenderung mengalami penurunan, tahun 2020 sebesar 13.45% (Rp.156.85 Miliar) dari total belanja, di tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 12.61% (Rp.120.45 Miliar). Perkembangan belanja transfer cenderung mengalami peningkatan, di tahun 2020 tercatat sebesar 14.39% dari total belanja dan pada tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi 16.29%. Secara rata-rata, belanja tak terduga cenderung mengalami penurunan dari waktu ke waktu.

a. Belanja Operasi

Gambar 2.65. Perkembangan Belanja Operasi Kabupaten Seram Bagian Barat, 2020 – 2024.



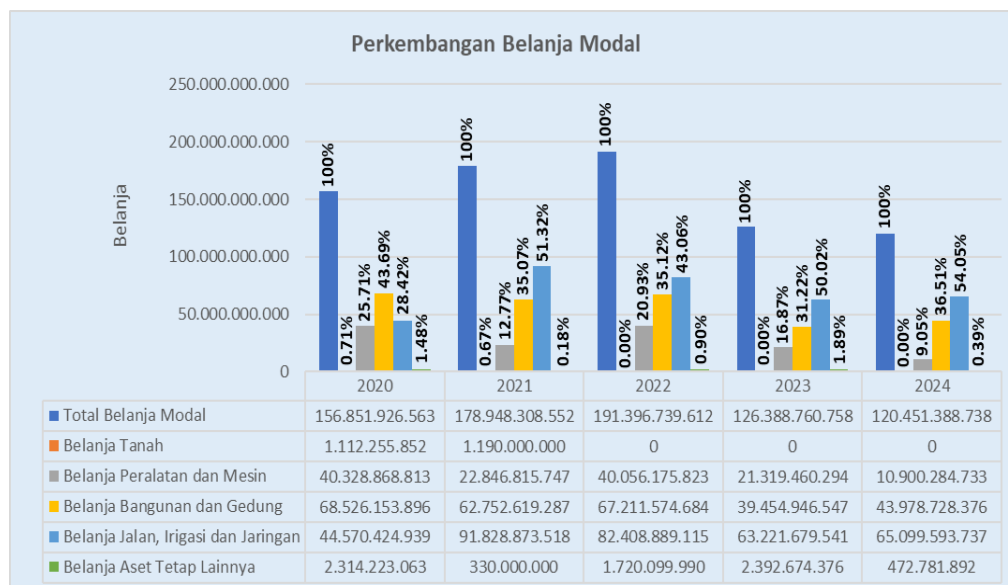
Sumber: BPKAD, Tahun 2025

Data pada Gambar 2.62 menunjukkan bahwa dominasi belanja operasi adalah belanja pegawai, selama 5 tahun terakhir perkembangan belanja ini terus mengalami peningkatan, tercatat di tahun 2020 sebesar 45.57% dari total belanja operasi dan di tahun 2024 meningkat menjadi 62.20% atau rata-rata mengalami peningkatan sebesar 6.42% per tahun. Dominasi kedua dari belanja operasi adalah belanja barang dan jasa, dan perkembangan belanja ini dari tahun ke tahun mengalami penurunan, tercatat di tahun 2020 sebesar 31.76% dari total belanja operasi pada tahun 2024 menurun menjadi 29.80%.

Perkembangan belanja hibah terus mengalami peningkatan, di tahun 2020 tercatat sebesar 1.07% dari total belanja operasi dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 8.00% dengan rata-rata peningkatan per tahun sebesar kurang lebih 44.87%. Selanjutnya belanja bantuan sosial mengalami penurunan, di tahun 2020 tercatat sebesar 0.46% dari total belanja operasi dan di tahun 2024 menurun menjadi 0.002%.

b. Belanja Modal

Gambar 2.66. Perkembangan Belanja Modal Kabupaten Seram Bagian Barat, 2020 – 2024.



Sumber: BPKAD, Tahun 2025

Selama 5 tahun terakhir perkembangan belanja modal Kabupaten Seram Bagian Barat mengalami fluktuatif, dan perkembangan besaran belanja ini masih berada dibawah Rp.200 Miliar, di tahun 2024 besarnya tercatat sebesar kurang lebih Rp.120.45 Miliar. Secara rata-rata, dari tahun 2020 – 2024 postur terbesar dari belanja ini diperuntukan untuk belanja jalan, irigasi dan jaringan dengan berkembang yang terus meningkat, tercatat di tahun 2020 sebesar 28.42% dari total belanja modal di tahun 2024 meningkat menjadi 54.05%. Postur terbesar kedua dari belanja modal adalah belanja bangunan dan gedung, selama 5 tahun terakhir perkembangan belanja ini mengalami penurunan, tercatat di tahun 2020 sebesar 43.69% dan di tahun 2024 hanya sebesar 36.51%.

Postur terbesar ketiga dari belanja modal adalah belanja peralatan dan mesin, perkembangan belanja ini juga mengalami penurunan, tercatat di tahun 2020 sebesar 25.71% dari total belanja modal pada tahun 2024 menurun menjadi 9.05%. Belanja aset tetap lainnya menempati dominasi ke empat dari postur belanja modal, perkembangannya selama 5 tahun terakhir cenderung

mengalami penurunan, tercatat di tahun 2020 sebesar 1.48% dan pada tahun 2024 tercatat sebesar 0.39%. Belanja tanah adalah yang terkecil dari belanja modal, alokasi belanja ini hanya berlangsung 2 tahun, yaitu 2020 dan 2021 dengan besaran kurang dari Rp.1.2 Miliar.

c. Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer

Seperti telah dijelaskan dan tersaji pada Gambar 2.65. bahwa belanja tak terduga pada APBD Kabupaten Seram Bagian Barat selama 5 tahun terakhir (2020 – 2024) dengan realisasi terbesar terjadi pada tahun 2020 yaitu 3,81% dari total belanja daerah atau sebesar 44 Milyar Rupiah untuk penanggulangan pandemi Covid-19. Selanjutnya pada tahun 2021 hingga tahun 2024, realisasi Belanja Tidak Terduga tercatat berkisar antara 0,08% hingga 0,43%.

Belanja Tranfer pemerintah daerah ditujukan kepada pemerintah desa dengan alokasi Dana Desa (DD) yang bersumber dari alokasi langsung pemerintah pusat serta Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari 10% TKDD diluar Dana Alokasi Khusus.

Tabel 2.24. Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020 – 2024.

No	URAIAN	PERKEMBANGAN BELANJA TAHUNAN (Rp.)				
		2020	2021	2022	2023	2024
5	BELANJA	998,232,897,313.00	959,824,657,576.00	1,020,504,164,156.00	877,351,458,407.00	955,575,163,218.00
5.1	Belanja Operasi	629,153,918,382.00	616,834,848,807.00	675,135,584,005.00	601,733,201,115.00	679,481,555,666.00
5.1.1	Belanja Pegawai	363,918,390,185.00	370,870,153,377.00	386,443,065,033.00	383,326,114,793.00	422,664,582,950.00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	253,074,145,397.00	234,919,537,174.00	274,100,770,464.00	195,729,005,672.00	202,460,628,716.00
5.1.5	Belanja Hibah	8,516,382,800.00	8,104,744,506.00	11,797,700,000.00	22,528,080,650.00	54,343,844,000.00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	3,645,000,000.00	2,940,413,750.00	2,794,048,508.00	150,000,000.00	12,500,000.00
5.2	Belanja Modal	156,851,926,563.00	178,948,308,552.00	191,396,739,612.00	126,388,760,758.00	120,451,388,738.00
5.2.1	Belanja Tanah	1,112,255,852.00	1,190,000,000.00	-	-	-
5.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	40,328,868,813.00	22,846,815,747.00	40,056,175,823.00	21,319,460,294.00	10,900,284,733.00
5.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	68,526,153,896.00	62,752,619,287.00	67,211,574,684.00	39,454,946,547.00	43,978,728,376.00
5.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	44,570,424,939.00	91,828,873,518.00	82,408,889,115.00	63,221,679,541.00	65,099,593,737.00
5.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	2,314,223,063.00	330,000,000.00	1,720,099,990.00	2,392,674,376.00	472,781,892.00
5.3	Belanja Tak Terduga	44,459,200,189.00	862,588,000.00	4,388,788,000.00	818,276,000.00	-
5.3.1	Belanja Tak Terduga	44,459,200,189.00	862,588,000.00	4,388,788,000.00	818,276,000.00	-
5.4	Belanja Transfer	167,767,852,179.00	163,178,912,217.00	149,583,052,539.00	148,411,220,534.00	155,642,218,814.00
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	167,767,852,179.00	163,178,912,217.00	149,583,052,539.00	148,411,220,534.00	155,642,218,814.00
6	PEMBIAYAAN					
6.1	Penerimaan Pembiayaan	96,272,572,742.00	62,000,117,626.00	75,273,168,496.00	24,248,868,990.00	109,094,232,759.00
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	96,272,572,742.00	62,000,117,626.00	75,273,168,496.00	24,248,868,990.00	109,094,232,759.00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	-	394,000,300.00	3,068,500,000.00	-	-
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	-	394,000,300.00	3,068,500,000.00	-	-
	PEMBIAYAAN NETO	96,272,572,742.00	61,606,117,326.00	72,204,668,496.00	24,248,868,990.00	109,094,232,759.00

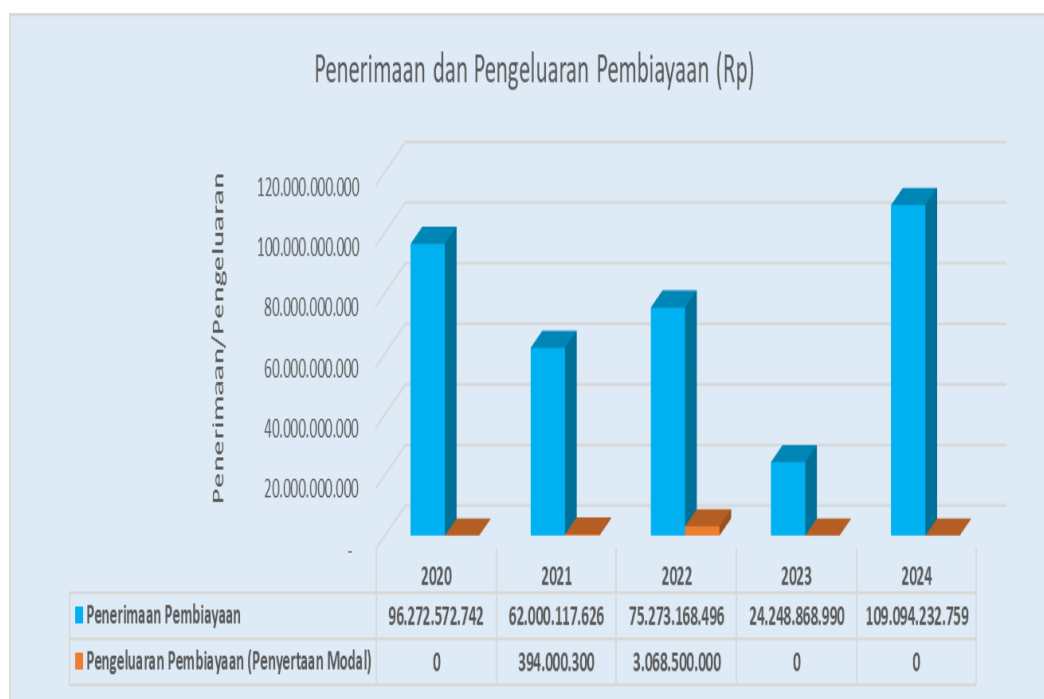
Sumber: BPKAD, Tahun 2025

3) Kinerja Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar Kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima Kembali, baik pada tahun-tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan pembiayaan daerah di Kabupaten Seram Bagian Barat berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya. Penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Seram Bagian Barat menunjukkan perkembangan yang fluktuatif, di tahun 2020 tercatat sebesar kurang lebih Rp.96.72 Miliar di tahun 2023 menurun tajam menjadi Rp.24.25 Miliar, kemudian pada tahun 2024 meningkat lagi menjadi kurang lebih Rp.109.09 Miliar.

Pengeluaran pembiayaan daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2020 – 2024) pengeluaran pembiayaan daerah Kabupaten Seram Bagian Barat menunjukkan perkembangan yang tidak pasti. Terlihat pada Gambar berikut bahwa pengeluaran pembiayaan hanya dalam bentuk pernyataan modal yang dialokasikan pada tahun 2021 sebesar Rp.394 juta dan tahun 2022 sebesar Rp.3,07 Miliar.

Gambar 2.67. Perkembangan Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Seram Bagian Barat, Tahun 2020-2024.



Sumber: BPKAD, Tahun 2025

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SiLPA tahun berjalan di Kabupaten Seram Bagian Barat menunjukkan perkembangan yang fluktuatif, di tahun 2020 tercatat sebesar Rp.96.27 Miliar, selanjutnya menurun dan tercatat mencapai titik terendah pada tahun 2023 yaitu sebesar Rp.24.25 Miliar, selanjutnya di tahun 2024 tercatat meningkat tajam mencapai Rp.109.09 Miliar. Kondisi ini menggambarkan bahwa di tahun 2024 pengelolaan keuangan mengalami perbaikan.

Gambar 2.68. Perkembangan SiLPA Tahun Berjalan Kabupaten Seram Bagian Barat, 2020 – 2024 (Rp.)



Sumber: BPKAD, Tahun 2025

Gambaran rata-rata pertumbuhan realisasi anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Seram Bagian Barat selama 5 tahun terakhir (2020 – 2024) seperti tersaji pada Tabel berikut. Data di Tabel 2.38. memperlihatkan bahwa realisasi pendapatan daerah sejak lima tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan negatif dengan rata-rata per tahun sebesar -0,67%. Perkembangan kinerja realisasi pendapatan daerah uraiannya terinci sebagai berikut:

- Pendapatan:
 - Pertumbuhan realisasi pendapatan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurun sebesar -4.38%, penurunan tersebut diakibatkan oleh penurunan lain-lain PAD yang sah mencapai -10.96%,
 - Pertumbuhan realisasi Pendapatan Transfer secara rata-rata menunjukkan perkembangan yang meningkat, tercatat sebesar 3.42% per tahun,
 - Pertumbuhan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah menunjukkan perkembangan yang meningkat sangat tajam, yaitu rata-rata tercatat sebesar 1.122% per tahun, utamanya disumbangkan dari Pendapatan Hibah.
- Belanja:
 - Pertumbuhan realisasi Belanja menunjukkan perkembangan yang negatif, rata-rata menurun sebesar -0,66% per tahun, disumbangkan dari belanja operasi sebesar -3,38%, belanja modal sebesar -4,41% dan belanja transfer sebesar -0,38%, sedangkan belanja tak terduga mengalami peningkatan sebesar 57,34%.
- Penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan:
 - Pertumbuhan realisasi penerimaan pembiayaan menunjukkan perkembangan yang meningkat, rata-rata per tahun tercatat sebesar 66,98%. Demikian halnya dengan pertumbuhan pengeluaran pembiayaan yang meningkat sebesar 169,70% per tahun.

**Tabel 2.25. Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat 5
Tahun Terakhir (2020– 2024).**

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%)
4	PENDAPATAN	0,65	-2,26	1,30	-2,37	-0,67
4.1	Pendapatan Asli Daerah	29,97	20,16	-53,73	-13,93	-4,38
4.1.1	Pajak Daerah	35,02	-11,28	35,44	-2,54	14,16
4.1.2	Retribusi Daerah	41,98	69,90	-22,20	-41,34	12,09
4.1.3	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan	5,86	0	15,64	-12,14	2,34
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	31,27	27,97	-82,41	-20,65	-10,96
4.2	Pendapatan Transfer	16,51	-3,61	1,53	-0,76	3,42
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	16,76	-3,79	1,15	-0,94	3,30
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	5,57	5,41	18,71	6,09	8,945
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	-99,93	4536,06	5,53	-47,28	1098,60
4.3.1	Pendapatan Hibah	-99,66	4536,06	174,68	0	1152,77
4.3.2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0	-9,04	-2,26
5	BELANJA	-3,85	6,32	-14,03	8,92	-0,66
5.1	Belanja Operasi	-2,12	-13,45	-10,87	12,92	-3,38
5.1.1	Belanja Pegawai	1,91	4,2	-0,81	10,26	3,89
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	-7,17	16,68	-28,59	3,44	-3,91
5.1.5	Belanja Hibah	-4,83	45,57	90,95	141,23	68,23
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	-19,33	-4,98	-94,63	-91,67	-52,65
5.2	Belanja Modal	14,09	6,96	-33,97	-4,70	-4,41
5.2.1	Belanja Tanah	6,99	0	0	0	1,75
5.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	-43,35	75,32	-46,78	-48,87	-15,92
5.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	-8,43	7,11	-41,30	11,47	-7,79
5.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	106,03	-10,26	-23,28	2,97	18,87
5.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	-86,00	421,24	39,00	-80,00	73,56
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	-98,06	408,79	-81,36	0	57,34
5.3.1	Belanja Tak Terduga	-98,06	408,79	-81,36	0	57,34
5.4	BELANJA TRANSFER	2,74	-8,33	-0,78	4,87	-0,38
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	2,74	-8,33	-0,78	4,87	-0,38
6.1	Penerimaan Pembiayaan	-35,60	21,41	-67,79	349,89	66,98
6.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA)	-35,60	21,41	-67,79	349,89	66,98
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	0	678,81	0	0	169,70
6.2.2	Penyertaan modal (Inveasti) daerah	0	678,81	0	0	169,70
	PEMBIAYAAN NETTO	-36,01	17,20	-66,42	349,89	66,17

Sumber: BPKAD, Tahun 2025

4) Neraca Keuangan Daerah

Neraca Keuangan Daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam menggambarkan kondisi keuangan pemerintah daerah secara menyeluruh, yang mencakup informasi mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada akhir periode anggaran. Melalui neraca keuangan, dapat diketahui kemampuan fiskal daerah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki untuk mendukung pelayanan publik dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Tabel 2.26. Neraca Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020-2024

URAIAN		2020	2021	2022	2023	2024
ASET		1.404.147.380.286,92	1.463.252.488.434,79	1.369.798.621.195,71	1.355.258.306.117,97	1.289.732.016.574,36
ASET LANCAR		91.336.558.481,35	97.090.913.801,70	67.669.697.350,65	160.850.578.419,99	111.962.076.971,38
	Kas dan Setara Kas	63.599.458.489,32	77.107.636.776,08	37.172.950.660,75	113.252.936.490,61	73.138.190.524,13
	Kas di Kas Daerah	40.053.513.639,85	49.077.874.391,77	23.562.373.844,39	99.720.143.501,92	64.708.761.987,52
	Kas di Bendahara Penerimaan	2.320.059,65	-	123.617.710,00	69.678.000,00	199.387.131,40
	Kas di Bendahara Pengeluaran	649.174.975,36	491.436.657,29	1.515.897.110,14	660.997.895,00	1.181.215.587,00
	Kas di Bendahara BOSP	22.886.615.668,00	26.233.176.876,00	11.161.507.940,00	7.012.866.631,57	3.274.159.627,00
	Kas di Bendahara FKTP	4.288.047,19	1.251.624.681,73	724.333.026,22	1.241.692.625,12	95.552.844,21
	Kas Lainnya	3.546.099,27	53.524.169,29	85.221.030,00	4.547.557.837,00	600,00
	Kas Dana BOK Puskesmas	-	-	-	-	3.679.112.747,00
	Piutang Pendapatan	13.379.478.135,64	-	-	-	-
	Piutang Pajak Daerah	-	9.665.011.259,00	10.598.772.246,00	13.641.170.249,46	14.482.476.022,46
	Piutang Retribusi	-	668.024.922,37	668.024.922,37	632.483.912,37	632.483.912,37
	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	-	115.359.884,00	40.012.484,00	23.188.600,00	2.185.077.065,00
	Piutang Transfer Pemerintah Lainnya	-	780.260.000,00	780.260.000,00	-	-
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah lainnya	-	5.342.694.496,27	6.009.585.499,00	5.412.425.098,00	-
	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	1.139.779.331,00	1.139.779.331,00	1.139.779.331,00	1.056.979.433,00

URAIAN		2020	2021	2022	2023	2024
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	1.530.372.844,00	1.528.372.844,00	1.526.372.844,00	1.526.372.844,00
	Uang Muka	-	-	-	219.311.760,00	-
	Penyisihan Piutang	- 5.409.423.782,15	- 6.075.674.172,13	- 6.977.719.523,28	- 10.464.818.590,91	- 11.828.835.896,79
	Piutang Lainnya	4.736.300.381,00	137.528.570,00	276.226.870,00	-	-
	Beban Dibayar Dimuka	36.196.588,66	20.773.681,26	47.658.218,74	31.305.688,96	3.755.112.490,76
	Persediaan	14.994.548.668,88	6.659.146.209,85	16.385.773.798,07	35.436.423.036,50	27.014.220.576,45
JUMLAH ASET LANCAR		91.336.558.481,35	97.090.913.801,70	67.669.697.350,65	160.850.578.419,99	111.962.076.971,38
INVESTIGASI JANGKA PANJANG		13.891.000.000,00	13.911.325.300,00	16.641.465.300,00	16.641.465.300,00	16.641.465.300,00
	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	-	-	-	-	-
	Investasi Jangka Panjang Permanen	-	-	-	16.641.465.300,00	16.641.465.300,00
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	13.891.000.000,00	13.911.325.300,00	16.641.465.300,00	16.641.465.300,00	16.641.465.300,00
	Investasi Permanen Lainnya	-	-	-	-	-
	Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen	13.891.000.000,00	13.911.325.300,00	16.641.465.300,00	16.641.465.300,00	16.641.465.300,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		13.891.000.000,00	13.911.325.300,00	16.641.465.300,00	16.641.465.300,00	16.641.465.300,00
ASET TETAP		1.198.147.007.620,99	1.251.659.489.766,51	1.185.186.322.947,48	1.170.345.995.337,61	1.153.437.182.704,79
	Tanah	12.854.108.040,00	21.134.904.745,00	21.134.904.769,00	22.466.133.833,85	45.113.558.901,22
	Peralatan dan Mesin	279.449.193.423,30	308.743.127.206,47	343.661.590.347,65	359.043.986.996,65	374.588.846.944,30
	Gedung dan Bangunan	672.606.769.903,35	747.990.233.399,85	807.373.772.599,11	882.630.649.429,36	925.350.498.588,69

URAIAN		2020	2021	2022	2023	2024
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	968.147.948.986,34	1.064.029.025.070,20	1.127.192.434.267,87	1.160.961.793.273,80	1.237.430.221.548,84
	Aset Tetap Lainnya	9.712.959.388,33	9.275.123.061,18	9.321.250.061,00	9.602.266.301,00	10.466.545.949,00
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	41.945.921.893,69	110.399.450.149,33	89.371.812.545,45	95.022.602.098,65	69.770.642.986,88
	Akumulasi Penyusutan	- 786.569.894.014,02	- 1.009.912.373.865,52	- 1.212.869.441.642,60	- 1.359.381.436.595,70	- 1.509.283.132.214,14
	JUMLAH ASET TETAP	1.198.147.007.620,99	1.251.659.489.766,51	1.185.186.322.947,48	1.170.345.995.337,61	1.153.437.182.704,79
	DANA CADANGAN	-	-	-	-	-
	Dana Cadangan	-	-	-	-	-
	JUMLAH DANA CADANGAN	-	-	-	-	-
	ASET LAINNYA	100.772.814.184,58	100.590.759.566,58	100.301.135.597,58	7.420.267.060,37	7.691.598,19
	Aset Tidak Berwujud	4.044.342.592,00	4.326.442.592,00	4.486.597.592,00	4.686.547.592,00	4.876.547.592,00
	Akumulasi Amortisasi	- 1.601.963.253,53	- 2.066.117.871,53	- 2.515.896.840,53	- 3.076.801.759,00	- 3.568.447.950,00
	Aset Lain-lain	98.330.434.846,11	98.330.434.846,11	98.330.434.846,11	86.814.325.005,37	92.020.446.554,19
	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	-	-	-	- 81.003.803.778,00	- 85.821.947.598,00
	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	-	-	-	-	184.693.000,00
	JUMLAH ASET LAINNYA	100.772.814.184,58	100.590.759.566,58	100.301.135.597,58	7.420.267.060,37	7.691.291.598,19
	JUMLAH ASET	1.404.147.380.286,92	1.463.252.488.434,79	1.369.798.621.195,71	1.355.258.306.117,97	1.289.732.016.574,36
	KEWAJIBAN	38.834.087.888,70	47.149.233.015,90	32.760.930.777,90	30.065.297.700,45	39.472.121.393,19
	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	38.834.087.888,70	47.149.233.015,90	32.760.930.777,90	30.065.297.700,45	39.472.121.393,19
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	9.820.863.017,55	9.969.948.949,02	6.429.119.670,90	4.140.053.453,05	2.154.499.534,09
	Pendapatan Diterima Dimuka	3.488.962.969,00	3.488.962.969,00	3.488.962.969,00	-	-

URAIAN			2020	2021	2022	2023	2024
		Utang Belanja	-	6.338.248.961,06	5.812.938.752,00	9.080.063.384,40	37.193.076.135,10
		Utang Beban	4.769.041.192,15	-	-	-	-
		Utang Jangka Pendek Lainnya	20.755.220.710,00	27.352.072.136,82	17.029.909.386,00	16.845.180.863,00	124.545.724,00
		JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	38.834.087.888,70	47.149.233.015,90	32.760.930.777,90	30.065.297.700,45	39.472.121.393,19
		KEWAJIBAN JANGKA PANJANG					
		JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-	-	-	-	-
		JUMLAH KEWAJIBAN	38.834.087.888,70	47.149.233.015,90	32.760.930.777,90	30.065.297.700,45	39.472.121.393,19
		EKUITAS					
		EKUITAS	1.365.313.292.398,22	1.416.103.255.418,89	1.337.037.690.417,81	1.325.193.008.417,52	1.250.259.895.181,17
		JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	1.404.147.380.286,92	1.463.252.488.434,79	1.369.798.621.195,71	1.355.258.306.117,97	1.289.732.016.574,36

Sumber: BPKAD, Tahun 2025

Secara umum, neraca keuangan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat selama periode 2020–2024 menunjukkan tren peningkatan nilai aset secara signifikan, terutama pada komponen aset tetap dan investasi. Peningkatan ini mencerminkan adanya penguatan dalam pengelolaan kekayaan daerah, khususnya pada sektor infrastruktur seperti jalan, irigasi, jaringan, serta gedung dan bangunan. Di sisi lain, kewajiban daerah masih berada dalam batas yang relatif wajar dan terkendali, meskipun mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Kewajiban jangka pendek yang mendominasi, seperti utang pihak ketiga dan utang belanja barang dan jasa, memerlukan pengelolaan arus kas yang hati-hati untuk menghindari tekanan likuiditas.

Nilai ekuitas daerah yang terus meningkat dari tahun ke tahun menandakan adanya pertumbuhan nilai bersih aset atau akumulasi surplus fiskal. Hal ini merupakan indikator positif terhadap stabilitas keuangan daerah. Namun, perlu menjadi perhatian bahwa besarnya ekuitas tidak serta-merta mencerminkan likuiditas, terutama jika sebagian besar aset bersifat tidak lancar. Oleh karena itu, optimalisasi pemanfaatan aset lancar, efisiensi pengelolaan investasi, serta pemulihan dan perencanaan penggunaan dana cadangan perlu terus ditingkatkan untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah secara berkelanjutan.

5) Gambaran Umum Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah harus menganut prinsip yang mendukung keberlanjutan pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya dengan memperhatikan kekuatan kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh pemerintah daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah bawah, keuangan daerah harus dikelola dengan prinsip-prinsip transparan, efisiensi, efektif, akuntabilitas dan partisipatif. Untuk itu kebutuhan belanja pembangunan daerah selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam pelaksanaan program-program pembangunan yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendapatan non APBD, seperti APBN, hibah dan

kontribusi pelaku usaha melalui Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*).

RPJMD merupakan dasar bagi penyusunan pengelolaan keuangan daerah dalam masa 5 (lima) tahun anggaran yang kemudian di jadikan acuan untuk penyusunan RKPD untuk mengelola keuangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran. Selanjutnya RKPD akan dijadikan pedoman untuk penyusunan APBD dengan menggunakan prinsip dasar *money follow programme* yang berorientasi pada pencapaian indikator pembangunan dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

6) Kebijakan Pendapatan Daerah

Arah kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Seram Bagian Barat memperhatikan kebijakan yang ada dalam RPJMD sebelumnya dengan terus melakukan perbaikan dan penguatan untuk peningkatan kinerja pendapatan daerah kedepan.

Kebijakan peningkatan pendapatan daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dilakukan melalui pelaksanaan 6 pendekatan, yaitu:

1. Meningkatkan manajemen tata Kelola pemungutan dan penerimaan pendapatan daerah sesuai dengan mekanisme dan standar baku serta memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada saat ini,
2. Meningkatkan pendapatan daerah melalui pendekatan intensifikasi dan ekstensifikasi berbagai sumber pendapatan daerah secara optimal,
3. Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan asset yang diarahkan pada peningkatan pendapatan asli daerah,
4. Mendorong Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang sampai saat ini belum menjalankan Perusahaan sesuai dengan bada usahanya sehingga dapat memberikan kontribusi yang optimal kepada PAD pada khususnya dan Pemerintah Daerah pada umumnya,
5. Mengadakan peninjauan Kembali atas berbagai Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kondisi terkini,
6. Optimalisasi koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak serta peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat dibidang pendapatan daerah.

7) Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah 5 (lima) tahun sebelumnya ditujukan untuk mencapai berbagai target pembangunan yang telah ditetapkan, baik pada bidang tata kelola, pelayanan dasar, ekonomi, sosial-budaya, infrastruktur, kepemudaan, lingkungan, kondisi keamanan daerah dan lainnya. Dengan demikian, perencanaan pembangunan diarahkan untuk memperkuat pembangunan yang telah ditetapkan tersebut.

Berdasarkan pada gambaran perkembangan pendapatan yang ada, maka arah kebijakan belanja daerah 5 (lima) tahun sebelumnya diantaranya terinci sebagai berikut:

1. Belanja daerah yang bersifat wajib dan mengikat seperti belanja pegawai menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada tahun berkenan,
2. Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku,
3. Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah pada pemerintahan desa merupakan bentuk distribusi fiskal yang ditentukan berdasarkan proporsi besaran pendapatan transfer dan pendapatan asli daerah, khususnya pajak daerah dan retribusi daerah serta menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku,
4. Belanja daerah berupa bantuan keuangan kepada desa diarahkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan beserta aturan pelaksanaannya,
5. Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga (*standby budget*) terutama disiapkan untuk antisipasi dan penanganan bencana alam maupun sosial, termasuk didalamnya belanja penanganan yang bersifat darurat dan mendesak.
6. Belanja daerah berupa belanja operasi dan belanja modal setiap Perangkat Daerah (PD) diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat serta pencapaian sasaran program pembangunan yang

telah ditetapkan dalam RPD tahun sebelumnya dan antisipasi penetapan prioritas pembangunan tahun kedepan,

7. Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah dan turut serta mendukung skala pelayanan regional maupun nasional.

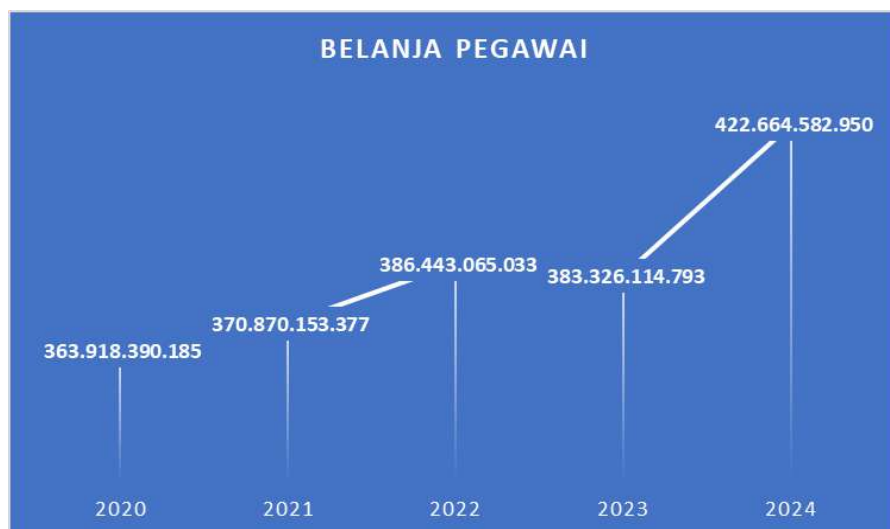
B. Proyeksi Keuangan Daerah Lima Tahun Kedepan

1) Proporsi Penggunaan Anggaran

a. Analisis Belanja untuk Pemenuhan Aparatur

Belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur di Kabupaten Seram Bagian Barat relatif besar dan terus meningkat. Di tahun 2020 tercatat sebesar Rp.363.918.390.185 dan di tahun 2024 tercatat sebesar Rp.422.664.582.950. Perkembangan belanja pemenuhan kebutuhan aparatur (pegawai) seperti terlihat pada Gambar berikut.

Gambar 2.69. Perkembangan Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Pegawai) Kabupaten Seram Bagian Barat, 2020 – 2024.

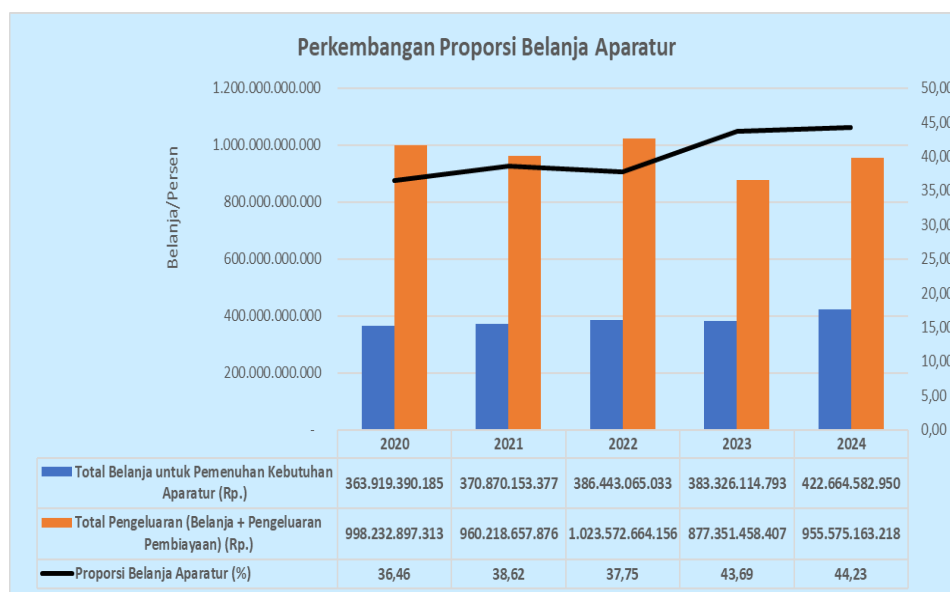


Sumber: BPKAD, Tahun 2025

Dibandingkan dengan total pengeluaran (belanja dan pengeluaran pembiayaan), proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terus mengalami peningkatan, di tahun 2020 tercatat

sebesar 36,46% kemudian pada tahun 2024 telah mencapai 44,23%. Secara rinci perkembangan proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur selama 5 tahun terakhir tersaji pada Gambar berikut.

Gambar 2.70. Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Seram Bagian Barat, Tahun 2020 – 2024.



Sumber: BPKAD, Tahun 2025

b. Analisis Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat Setara Prioritas Utama.

Belanja periodik yang wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Daerah, seperti gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, Bunga atau belanja sejenis lainnya. Belanja periodik prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar setiap periodik oleh Pemerintah Daerah dalam rangka keberlangsungan pelayanan dasar prioritas Pemerintah Daerah, yaitu pelayanan Pendidikan dan Kesehatan, seperti honorarium guru dan tenaga medis serta belanja sejenis lainnya. Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran.

Pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama di Kabupaten Seram Bagian Barat, yaitu untuk belanja pegawai dengan kecenderungan yang meningkat dari sebesar Rp.363,92 Miliar pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp.422,66 Miliar pada tahun 2024. Sementara itu, pengeluaran pembiayaan hanya diperuntukan untuk penyertaan modal (investasi) sedangkan lainnya tidak ada. Penyertaan modal yang dikeluarkan hanya berlangsung 2 tahun, yaitu tahun 2021 sebesar kurang lebih Rp.390 juta dan tahun 2022 sebesar kurang lebih Rp.3,1 Miliar. Perkembangan pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama di Kabupaten Seram Bagian Barat dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.27. Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Seram Bagian Barat, Tahun 2020 – 2024.

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
A	Belanja					
1	Belanja Pegawai	363.918. 390.185	370.870.1 53.377	386.443.0 65.033	383.326. 114.793	422.664. 582.950
B	Pengeluaran Pembiayaan					
1	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	0	394.000.3 00	3.068.500. 000	0	0
2	Pembentukan Pokok Utang	0	0	0	0	0
TOTAL		363.918. 390.185	371.264. 153.677	389.511. 565.033	383.326. 114.793	422.664. 582.950

Sumber: BPKAD, Tahun 2025

Berdasarkan data pada tabel diatas, selanjutnya dilakukan perhitungan proyeksi untuk memperoleh gambaran kebutuhan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama. Analisis dilakukan dengan proyeksi 5 tahun kedepan untuk menghitung kerangka pendanaan pembangunan daerah, hasil proyeksinya untuk tahun 2025 – 2029 seperti tersaji pada Tabel berikut.

Tabel 2.28. Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Seram Bagian Barat, Tahun 2025 – 2029.

No	Uraian	2025	2026	2027	2028	2029
A	Belanja					
1	Belanja Pegawai	438.776.966. 744,61	454.889.350. 539,21	471.001.734. 333,82	487.114. 118,42	503.226.501. 923,03
B	Pembiayaan Pengeluaran					
1	Penyertaan Modal (Investasi Daerah)	-	5.126.058. 066,03	7.183.616. 132,06	-	-
2	Pembentukan Pokok Utang	-	-	-	-	-
Total (A+B)		438.776.966. 744,61	460.015.408. 605,24	478.185.350. 465,88	487.114. 118,42	503.226.501. 923,03

Sumber: BPKAD, Tahun 2025

2) Analisis Pembiayaan

Analisis ini dilakukan untuk memberi Gambaran masa lalu tentang kebijakan anggaran dalam menutup defisi riil anggaran Pemerintah Daerah. Selama kurun waktu 5 tahun, 2020 – 2024, kondisi surplus dan deficit secara rinci terlihat pada Tabel berikut. Terlihat bahwa, selama 3 tahun, Kabupaten Seram Bagian Barat mengalami defisit anggaran, yaitu di tahun 2020 tercatat Rp.34.272.455.166, tahun 2022 tercatat Rp.75.273.168.606 dan tahun 2024 tercatat Rp.17.722.743.496. Tahun 2021 dan 2023 Kabupaten ini mengalami surplus anggaran, masing-masing sebesar Rp.9.976.558.331 dan Rp.83.266.293.554.

Tabel 2.29. Defisit Riil Anggaran Kabupaten Seram Bagian Barat, 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Realisasi Pendapatan Daerah dikurangi Realisasi	963.960.442. 197,00	970.195.216. 207,00	948.299.495. 550,00	960.617.751. 961,00	937.852.419. 722,00
2	Belanja Daerah	998.232.897. 313,00	959.824.657. 576,00	1.020.504.164. 156,00	877.351.458. 407,00	955.575.163. 218,00

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	-	394.000. 300,00	3.068. 500,00	-	-
	Surplus/Defisit	-34.272.455. 116,00	9.976.558. 331,00	- 75.273.168. 606,00	83.266.293. 554,00	-17.722.743. 496,00

Sumber: BPKAD, Tahun 2025

Penerimaan pembiayaan daerah sebagai sumber penutup defisit riil berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Gambaran secara jelas tentang hal ini dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.30. Komposisi Penerimaan Pembiayaan Sebagai Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Seram Bagian Barat, Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	96.272.572. 742,00	62.000.117. 626,00	75.273.168. 496,00	24.248.868. 990,00	109.094.232. 759,00
2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah (Investasi)	-	394.000. 300,00	3.068.500. 000,00	-	-
	SiLPA Neto	96.272.572. 742,00	61.606.117. 326,00	72.204.668. 496,00	24.248.868. 990,00	109.094.232. 759,00

Sumber: BPKAD, Tahun 2025

Berdasarkan data di Tabel tersebut, dari SiLPA yang ada selama 5 tahun terakhir dapat dipakai untuk menutupi defisit anggaran yang terjadi pada tahun 2020, 2022 dan tahun 2024.

3) Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah

Proyeksi APBD Kabupaten Seram Bagian Barat dilakukan dengan menggunakan beberapa asumsi sebagai berikut:

- Kondisi perekonomian nasional dan daerah berada pada pertumbuhan yang cukup tinggi dengan laju inflasi pada angka yang stabil, yaitu berada pada kisaran lebih besar sama dengan 1,5% dan lebih kecil sama dengan 3,5%.

- Pendapatan asli daerah mengalami kenaikan seiring dengan perbaikan pengelolaan pajak, retribusi dan sumber-sumber pendapatan daerah lainnya yang sah,
- Pendapatan transfer pemerintah pusat tidak mengalami perubahan (selain tahun 2025 yang mengalami kebijakan efisiensi anggaran), sedangkan pendapatan transfer dari pemerintah provinsi terutama berasal dari bagi hasil pajak mengalami peningkatan.

Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2026 – 2030 tersaji pada Tabel berikut dibawah ini.

Tabel 2.31. Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, 2026 - 2030

No	Uraian	Target (Rp.)				
		2026	2027	2028	2029	2030
1	PENDAPATAN	1.028.184.521.387	1.048.859.809.398	1.064.210.726.408	1.073.057.167.224	1.087.003.559.157
1.1	Pendapatan Asli Daerah	23.994.157.877,00	25.791.191.901,00	29.588.225.926,00	30.385.259.951,00	32.182.293.976,00
1.2	Pendapatan Transfer	988.237.072.202,00	1.005.533.307.790,00	1.015.505.172.366,00	1.021.972.560.748,00	1.032.539.900.248,00
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	15.953.291.299,00	17.535.309.707,00	19.117.328.116,00	20.699.346.525,00	22.281.364.933,00
2	BELANJA	1.028.184.521.378,00	1.043.733.751.332,00	1.057.027.110.276,00	1.073.057.167.224,00	1.087.003.559.157,00
2.1	Belanja Operasi	705.913.388.181,00	732.345.220.697,00	739.477.053.212,00	754.747.844.871,00	765.844.877.104,00
2.2	Belanja Modal	165.932.879.356,00	155.172.517.767,00	161.456.285.169,00	162.337.791.431,00	165.309.392.104,00
2.3	Belanja Tak Terduga	1.287.475.458,00	1.756.674.917,00	2.225.874.375,00	2.695.073.834,00	3.164.273.292,00
2.4	Belanja Transfer	155.050.778.383,00	154.459.337.951,00	153.867.897.520,00	153.276.457.088,00	152.685.016.657,00
	Surplus/ (Defisit)	0,00	5.126.058.066,00	7.183.616.132,00	0,00	0,00
3	PEMBIAYAAN					
3.1	Penerimaan Pembiayaan	0	0	0	0	0
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	-	5.126.058.066,00	7.183.616.132,00	-	-

No	Uraian	Target (Rp.)				
		2026	2027	2028	2029	2030
	Total APBD	1.028.184. 521.378,00	1.048.859. 809.398,00	1.064.210. 726.408,00	1.073.057. 167.224,00	1.087.003. 559.157,00

Sumber: BPKAD, Tahun 2025

2.3. Permasalahan dan Isu Strategis

Permasalahan Daerah dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025–2029 disusun untuk menggambarkan kondisi riil pembangunan yang dihadapi saat ini, sekaligus mengidentifikasi berbagai tantangan strategis yang perlu diantisipasi ke depan. Permasalahan pembangunan dimaknai sebagai kesenjangan antara kondisi aktual dengan target-target pembangunan yang telah ditetapkan, serta perbedaan antara cita-cita pembangunan jangka menengah dengan capaian riil pada saat perencanaan dilakukan.

Secara umum, pembangunan daerah Kabupaten Seram Bagian Barat masih menghadapi sejumlah tantangan dan permasalahan mendasar yang saling berkaitan sebagaimana dijelaskan dalam bab 2 dokumen ini. Permasalahan tersebut mencakup berbagai aspek yang memerlukan penanganan secara simultan dan terpadu guna mendorong akselerasi pembangunan daerah. Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat memandang perlu adanya pendekatan pembangunan yang bersifat holistik, integratif, tematik, dan spasial (HITS), yang mencakup aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing baik daya saing ekonomi, iklim investasi, infrastruktur maupun daya saing sumberdaya manusia, serta aspek pelayanan umum.

A. Permasalahan Pada Aspek Geografi dan Demografi

Dari aspek geografis dan demografis, teridentifikasi permasalahan sebagai berikut:

- Ancaman bencana geologi dan hidrometeorologi tinggi (gempa bumi, longsor, banjir, abrasi dan kebakaran hutan).
- Batas administrasi dengan Kabupaten Maluku Tengah belum tuntas, terutama di Kecamatan sebagian Huamual (Tanjung Sial).

- c. Status tanah untuk mendukung ketersediaan infrastruktur belum dipenuhi masyarakat.
- d. Sebaran permukiman tidak merata, mayoritas desa berada di daerah dengan aksesibilitas rendah.

B. Permasalahan Pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Dari aspek kesejahteraan masyarakat, teridentifikasi permasalahan sebagai berikut:

- a. Nilai PDRB per kapita relatif rendah.
- b. Kemiskinan dan Stunting masih tinggi.
- c. Ketimpangan akses terhadap sanitasi dan air bersih.
- d. Indeks Ketahanan pangan dalam kategori cukup tahan (rentan).
- e. Capaian literasi dan numerasi masih belum merata.
- f. Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) masih rendah (IPM pada angka 72,54 lebih rendah dari rata-rata nasional).
- g. Indeks Perlindungan Anak Masih Rendah.
- h. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tinggi, tetapi Pemberdayaan Rendah.
- i. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Masih Rendah.
- j. Indeks Pembangunan Kebudayaan Masih Rendah.

C. Permasalahan Pada Aspek Daya Saing

1) Daya Saing Ekonomi Daerah

- a. Pertumbuhan ekonomi yang melambat.
- b. Ketergantungan Ekonomi pada Sektor Primer.
- c. PDRB Per Kapita yang Masih Rendah.
- d. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Lemah.
- e. Rasio PDRB Industri Pengolahan masih rendah

2) Daya Saing SDM

- a. Rendahnya Literasi Digital.
- b. Jumlah Pengangguran Masih Tinggi.
- c. Pertumbuhan Angkatan Kerja Tidak Seimbang dengan Lapangan Kerja.
- d. Tingginya Rasio Ketergantungan.

- e. Daya saing SDM aparatur dan masyarakat masih rendah dan tidak merata.

3) Daya Saing Infrastruktur

- a. Infrastruktur jalan dan jembatan masih terbatas terutama di daerah pegunungan, lingkaran pulau dan sebagian wilayah pesisir Huamual bagian barat
- b. Akses Air Bersih yang Belum Merata.
- c. Transportasi dan Perhubungan yang Belum Memadai.
- d. Ketersediaan Listrik Belum Optimal dan Distribusi Belum Merata.

4) Daya Saing Iklim Investasi

- a. Potensi Konflik Sosial yang Masih Terjadi.
- b. Tantangan dalam Konsolidasi Demokrasi.
- c. Indeks ketahanan daerah dalam kelas ketahanan rendah.
- d. Indeks Inovasi Daerah dalam kategori kurang inovatif.

D. Permasalahan Pada Aspek Pelayanan Umum

- a. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yang Masih Rendah (Indeks Reformasi Birokrasi dan SAKIP mendapat predikat C (Cukup).
- b. Indeks Pelayanan Publik Masih Rendah (Predikat C - Cukup).
- c. Indeks SPBE Kabupaten SBB dalam kategori cukup.

1) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

a. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

- Masih rendahnya kualitas infrastruktur sekolah di daerah terpencil dan di kepulauan.
- Kurangnya tenaga pengajar, khususnya untuk mata pelajaran eksata dan guru di wilayah terpencil.
- Belum meratanya akses pendidikan berbasis teknologi di seluruh wilayah.
- Tingginya angka putus sekolah akibat kondisi ekonomi dan sosial.
- Minimnya program pelatihan untuk peningkatan kompetensi guru.

b. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

- Terbatasnya fasilitas sarana dan prasarana kesehatan di wilayah pegunungan dan kepulauan.
- Masih kurangnya tenaga medis, terutama dokter spesialis dan paramedis.
- Tingginya angka stunting dan gizi buruk pada anak-anak balita.
- Kurangnya akses terhadap air bersih dan fasilitas sanitasi layak di beberapa desa.
- Belum optimalnya pelayanan kesehatan melalui program JKN dan BPJS kesehatan.
- Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat dan imunisasi.

c. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Kondisi infrastruktur jalan kabupaten yang belum terhubung secara memadai ke semua wilayah.
- Kurangnya jaringan irigasi untuk mendukung sektor pertanian dan ketahanan pangan.
- Terbatasnya akses terhadap fasilitas air bersih, terutama di daerah terpencil;
- Masalah banjir akibat buruknya infrastruktur drainase.
- Belum optimalnya pengembangan kawasan sesuai dengan tata ruang wilayah.
- Minimnya pemeliharaan infrastruktur publik yang telah dibangun.

d. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

- Tingginya jumlah rumah tidak layak huni.
- Kurangnya pengawasan terhadap pembangunan kawasan permukiman di daerah rawan bencana.
- Ketidakseimbangan pembangunan permukiman antara wilayah perkotaan dan pedesaan.
- Lambatnya program rehabilitasi dan renovasi kawasan kumuh.

- Belum memadainya hunian untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

e. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Satpol PP, DAMKAR dan BPBD)

- Tingginya angka kriminalitas kecil seperti pencurian dan konflik antar kelompok.
- Belum optimalnya penerapan teknologi dan pengawasan keamanan wilayah.
- Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban umum.
- Minimnya sistem peringatan dini dan mitigasi bencana.
- Keterbatasan sarana dan prasarana penanganan bencana.

f. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

- Tingginya angka kemiskinan.
- Kurangnya program pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.
- Tidak memadainya layanan bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas dan lansia.
- Belum terintegrasinya data penerima bantuan sosial secara digital.
- Kurangnya pusat rehabilitasi untuk menangani penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- Rendahnya pelibatan masyarakat dalam program-program sosial.

2) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar.

a. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

- Tingginya angka pengangguran, terutama di kalangan pemuda.
- Minimnya pelatihan ketrampilan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar.
- Kurangnya investasi untuk menciptakan lapangan kerja baru.

- Tidak meratanya distribusi tenaga kerja di berbagai sektor.
- Masih rendahnya kualitas perlindungan tenaga kerja, terutama di sektor informal.
- Kurangnya informasi dan akses terhadap program-program ketenagakerjaan.

b. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- Rendahnya tingkat partisipasi perempuan dalam sektor ekonomi formal.
- Belum meratanya program pemberdayaan perempuan di seluruh wilayah.
- Minimnya layanan rehabilitasi bagi korban kekerasan.
- Kurangnya fasilitas ramah anak, seperti taman bermain dan pusat kegiatan anak.

c. Urusan Pemerintahan Bidang Ketahanan Pangan

- Belum optimalnya produksi pangan lokal akibat keterbatasan teknologi dan modal.
- Tingginya ketergantungan pada pasokan pangan dari luar daerah.
- Kurangnya pengelolaan cadangan pangan untuk mengantisipasi krisis pangan.
- Minimnya infrastruktur pendukung seperti gudang penyimpanan dan pengolahan hasil pangan.
- Terbatasnya program diversifikasi pangan lokal.
- Masalah alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian.

d. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

- Masih tingginya konflik agraria dan sengketa tanah, terutama di kawasan perkebunan dan perbatasan desa.
- Kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) kepada masyarakat.

- Lemahnya penegakan hukum terkait kepemilikan dan penggunaan lahan yang tidak sesuai peruntukkan tata ruang.

e. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

- Tingginya kerusakan lingkungan akibat penebangan liar dan aktivitas pertambangan.
- Kurangnya pengelolaan sampah di wilayah perkotaan dan pedesaan.
- Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan.
- Tingginya tingkat pencemaran air di beberapa sungai dan laut.
- Kurangnya pengawasan terhadap pelanggaran hukum lingkungan.
- Penurunan kualitas ekosistem pesisir akibat aktivitas manusia.

f. Urusan Pemerintahan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- Rendahnya cakupan layanan administrasi kependudukan, terutama di wilayah terpencil.
- Banyaknya penduduk yang belum memiliki dokumen kependudukan.
- Kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan administrasi kependudukan.
- Tingginya angka perpindahan penduduk yang tidak terdata secara baik.
- Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan.

g. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- Belum optimalnya pemanfaatan dana desa untuk program-program yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat.
- Rendahnya kapasitas aparatur desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan desa.

- Masih banyak desa tertinggal yang belum memanfaatkan teknologi informasi untuk pelayanan administrasi dan pengelolaan pembangunan.
- Kurangnya pendampingan intensif dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berpotensi meningkatkan pendapatan desa.
- Terbatasnya akses masyarakat desa terhadap program-program pelatihan dan ketrampilan.

h. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- Tinggnya angka kelahiran di beberapa desa akibat kurangnya program KB.
- Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perencanaan keluarga.
- Tidak meratanya distribusi alat kontrasepsi dan layanan KB.
- Rendahnya tingkat edukasi tentang kesehatan reproduksi di kalangan remaja.
- Belum optimalnya pelaksanaan program keluarga berencana berbasis komunitas.

i. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

- Kurangnya infrastruktur transportasi darat dan laut.
- Minimnya akses transportasi yang menghubungkan antar wilayah pulau.
- Belum optimalnya pengelolaan pelabuhan dan terminal.
- Kurangnya sarana transportasi umum yang layak dan terjangkau.
- Lemahnya pengawasan terhadap keselamatan transportasi laut.
- Rendahnya kualitas jalan penghubung antar desa dan kecamatan.

j. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

- Belum meratanya akses jaringan internet di wilayah terpencil dan pulau-pulau.
- Rendahnya literasi digital masyarakat.

- Kurangnya infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang memadai.
- Lemahnya pengawasan terhadap penyebaran informasi palsu (hoaks).
- Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik.

k. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

- Rendahnya akses koperasi dan UMKM terhadap sumber pembiayaan atau permodalan dari lembaga keuangan formal.
- Kurangnya pendampingan teknis bagi UKM dalam meningkatkan kualitas produk, pemasaran, dan diversifikasi usaha.
- Tingginya angka koperasi tidak aktif dan bermasalah.
- Lemahnya sinergi pemerintah daerah, koperasi, dan pelaku UKM dalam pengembangan sektor usaha.
- Minimnya dukungan infrastruktur ekonomi, seperti pusat pelatihan, teknologi produksi, dan pasar lokal bagi UKM.

l. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- Rendahnya daya tarik investasi akibat minimnya infrastruktur pendukung.
- Kurangnya promosi investasi kepada calon investor dalam dan luar negeri.
- Lambatnya proses perizinan yang menghambat masuknya investasi.
- Belum optimalnya pemanfaatan kawasan strategis untuk pengembangan investasi.
- Tidak adanya insentif yang menarik bagi investor lokal.
- Lemahnya pengawasan terhadap realisasi investasi yang telah disetujui.

m. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

- Kurangnya fasilitas olahraga yang memadai dan tersebar di seluruh wilayah.
- Rendahnya pembinaan atlet muda berbakat di berbagai cabang olahraga.
- Minimnya program pengembangan ketrampilan kepemimpinan bagi pemuda.
- Tidak adanya agenda rutin untuk kompetisi olahraga tingkat daerah.
- Kurangnya perhatian terhadap pemberdayaan pemuda di wilayah pedesaan.
- Belum optimalnya pemanfaatan teknologi untuk kegiatan olahraga dan kepemudaan.

n. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

- Kurangnya data statistik yang akurat, terkini, dan relevan untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah.
- Minimnya tenaga kerja terlatih dalam pengumpulan, pengelolaan, dan analisis data statistik di tingkat kabupaten hingga desa.
- Tidak terintegrasinya sistem statistik antar organisasi perangkat (OPD) untuk mendukung data berbasis elektronik.
- Lemahnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya data statistik dalam mendukung pengambilan kebijakan.
- Terbatasnya anggaran untuk pengembangan sistem informasi statistik yang andal dan terintegrasi.

o. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

- Kurangnya tenaga ahli di bidang keamanan siber dan persandian.
- Rendahnya pengamanan informasi sensitif pemerintah daerah dari ancaman siber.
- Belum optimalnya sistem pengamanan komunikasi antar instansi.
- Rendahnya kesadaran instansi terhadap pentingnya pengamanan data digital.

- Belum terintegrasinya sistem persandian dalam layanan pemerintah daerah.

p. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

- Kurangnya pelestarian budaya lokal yang mulai tergerus modernisasi.
- Minimnya fasilitas pendukung untuk kegiatan kebudayaan, seperti museum dan pusat seni.
- Rendahnya minat generasi muda terhadap budaya lokal.
- Kurangnya dokumentasi dan publikasi tentang kebudayaan daerah.
- Tidak adanya festival budaya yang konsisten untuk memproduksi kearifan lokal.

q. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

- Minimnya jumlah perpustakaan yang tersedia di tingkat desa dan kecamatan.
- Rendahnya tingkat minat baca masyarakat, terutama di kalangan anak-anak dan remaja.
- Tidak memadai koleksi buku dan bahan bacaan lainnya yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- Kurangnya program literasi yang melibatkan masyarakat, sekolah dan lembaga pendidikan nonformal.
- Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan perpustakaan dan layanan perpustakaan digital.

r. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

- Rendahnya kesadaran instansi pemerintah terhadap pentingnya pengelolaan arsip.
- Belum memadainya fasilitas penyimpanan arsip, baik fisik maupun digital.
- Kurangnya tenaga profesional di bidang manajemen arsip.
- Tidak terintegrasinya sistem kearsipan antara OPD dan pemerintah daerah.
- Tingginya risiko kehilangan data penting akibat tidak adanya cadangan arsip.

- Minimnya pelatihan tentang tata kelola arsip bagi aparatur pemerintah.

3) Urusan Pemerintahan Pilihan

a. Urusan Pemerintahan Bidang Perikanan

- Kurangnya infrastruktur pendukung seperti pelabuhan perikanan dan tempat pelelangan ikan.
- Lemahnya pengawasan terhadap aktivitas penangkapan ikan ilegal.
- Rendahnya akses nelayan terhadap teknologi perikanan modern.
- Tidak meratanya distribusi bantuan sarana perikanan kepada nelayan kecil.
- Minimnya program diversifikasi usaha nelayan untuk meningkatkan pendapatan.
- Kurangnya pelatihan pengolahan hasil perikanan bagi masyarakat pesisir.

b. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

- Kurangnya promosi wisata daerah yang terintegrasi dan masif.
- Tidak memadainya infrastruktur pendukung di destinasi wisata, seperti akses jalan dan penginapan.
- Lemahnya pelibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan wisata.
- Rendahnya pengembangan atraksi wisata berbasis budaya lokal.
- Kurangnya regulasi untuk menjaga kelestarian lingkungan di kawasan wisata.
- Minimnya investor yang tertarik untuk mengembangkan sektor pariwisata daerah.

c. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

- Rendahnya akses petani terhadap pupuk bersubsidi dan benih unggul.
- Kurangnya pelatihan teknis pertanian modern bagi petani.

- Tidak memadainya infrastruktur irigasi untuk mendukung produksi pertanian.
- Lemahnya pengawasan terhadap alih fungsi lahan pertanian.
- Kurangnya akses pasar bagi petani untuk memasarkan hasil pertanian.
- Minimnya dukungan teknologi pertanian berbasis digital.

d. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

- Kurangnya pusat perdagangan modern di wilayah kabupaten.
- Tidak memadainya sistem distribusi barang ke wilayah terpencil.
- Minimnya program pemberdayaan bagi pelaku UMKM.
- Rendahnya akses terhadap pembiayaan usaha kecil dan menengah.
- Lemahnya pengawasan terhadap harga barang kebutuhan pokok.
- Tidak adanya regulasi yang melindungi pedagang lokal dari persaingan usaha besar.

e. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

- Kurangnya pengembangan kawasan industri kecil dan menengah.
- Lemahnya inovasi dalam pengolahan produk lokal untuk meningkatkan daya saing.
- Rendahnya akses pelaku industri terhadap teknologi modern.
- Minimnya kolaborasi antara industri dan institusi pendidikan.

4) Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

a. Sekretariat Daerah

- Belum optimalnya pembangunan kelembagaan berbasis kinerja.
- Kurangnya efektivitas kebijakan pemerintah daerah.

b. Sekretariat DPRD

- Belum optimalnya koordinasi antar bagian dalam proses pelayanan anggota dewan.

5) Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

a. Perencanaan

- Rendahnya kualitas data sebagai dasar perencanaan pembangunan.
- Belum optimalnya koordinasi antarinstansi dalam penyusunan rencana pembangunan.
- Lemahnya integrasi rencana pembangunan dengan potensi wilayah.
- Minimnya anggaran untuk mendukung proses perencanaan yang berbasis teknologi.

b. Keuangan

- Lemahnya kapasitas SDM dalam pengelolaan keuangan daerah.
- Kurangnya pengawasan terhadap pengelolaan anggaran.
- Rendahnya tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan.
- Tingginya ketergantungan terhadap pendapatan transfer dari pusat.
- Kurangnya upaya diversifikasi sumber pendapatan asli daerah.
- Pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah yang masih terbatas.

c. Kepegawaian

- Kurangnya pelatihan untuk meningkatkan kapasitas ASN di daerah.
- Tidak meratanya distribusi ASN di wilayah terpencil dan pulau-pulau kecil.
- Lemahnya sistem manajemen karier ASN di tingkat daerah.
- Minimnya penghargaan dan motivasi untuk ASN berprestasi.
- Terbatasnya penerapan teknologi dalam pengelolaan kepegawaian.

d. Penelitian dan Pengembangan

- Rendahnya anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan penelitian daerah.
- Kurangnya kolaborasi antara pemerintah daerah dengan perguruan tinggi.
- Minimnya penelitian yang berbasis kebutuhan masyarakat dan potensi daerah.
- Tidak adanya pusat penelitian daerah yang fokus pada inovasi lokal.
- Lemahnya publikasi hasil penelitian sebagai bahan pengambilan kebijakan.
- Rendahnya minat generasi muda terhadap kegiatan penelitian.

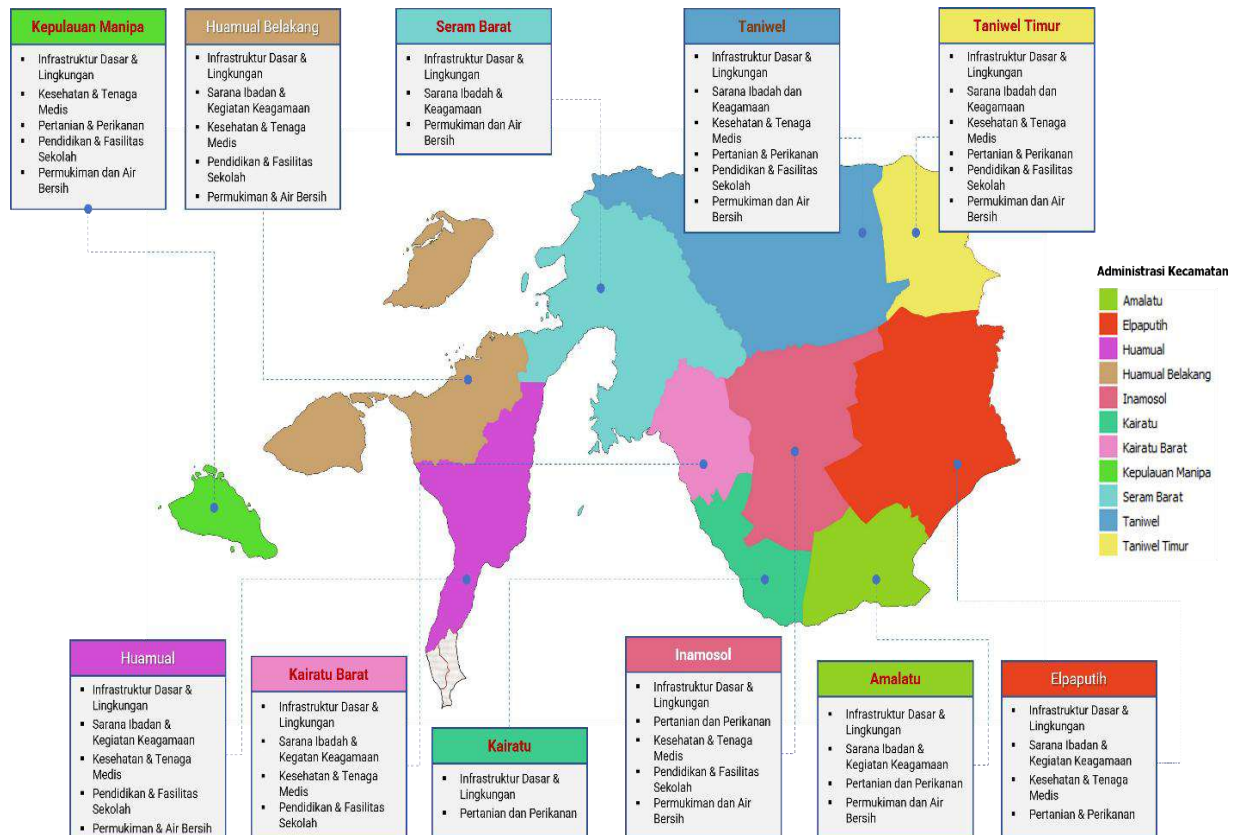
6) Unsur Pengawas Urusan Pemerintahan

a. Inspektorat Daerah

- Kurangnya tenaga auditor yang profesional dan independen.
- Lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah.
- Tidak adanya mekanisme pelaporan yang mudah diakses masyarakat.
- Rendahnya tindak lanjut atas temuan audit sebelumnya.
- Minimnya transparansi dalam proses pengawasan keuangan daerah.
- Tidak adanya sistem berbasis teknologi untuk mendukung pengawasan.

7) Unsur Kewilayahan

Gambar 2.71. Permasalahan Unsur Kewilayahan Kabupaten Seram Bagian Barat.



8) Unsur Pemerintahan Umum

- Masih tingginya konflik sosial.

E. Isu Strategis

Isu strategis merupakan kondisi atau persoalan penting yang perlu menjadi prioritas dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Hal ini disebabkan oleh dampaknya yang besar terhadap kemajuan daerah, baik dalam jangka menengah maupun panjang. Karakteristik isu ini mencakup sifatnya yang krusial, mendesak, dan fundamental dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa depan.

Mengacu pada Pasal 164 ayat (2) dan (3) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, penentuan isu strategis daerah dilakukan melalui kajian terhadap berbagai sumber, seperti Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), dokumen perencanaan pembangunan yang relevan, hasil pengendalian dan

evaluasi pembangunan, serta isu strategis dari masing-masing perangkat daerah.

Perumusan isu strategis juga harus mencerminkan dinamika lingkungan eksternal yang berkembang, baik di tingkat regional, nasional, maupun global, yang berpotensi memengaruhi pembangunan daerah dalam jangka waktu menengah hingga panjang.

F. Isu Strategis Global, Nasional dan Regional

1) Isu Strategis Global

Transformasi global yang cepat di berbagai sektor, atau megatren global, ditandai dengan perubahan besar, jangka panjang, dan masif akibat kemajuan teknologi digital, komputasi, dan kecerdasan buatan. Situasi ini semakin relevan mengingat Maluku telah mengembangkan hubungan internasional, terutama dalam bidang ekonomi, dengan Kabupaten Seram Bagian Barat berperan sebagai pendukung utama bagi Seram Bagian Barat sendiri dan Maluku Tengah. Dengan demikian, analisis mendalam terhadap isu-isu strategis global menjadi penting untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan yang akan dihadapi Kabupaten Seram Bagian Barat dalam konteks global. Isu global yang merupakan megatren global diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.32. Isu Global dan Tantangannya

No	Isu Global	Tantangan
1	Perkembangan demografi global	Penyesuaian terhadap tingginya kebutuhan hidup masyarakat dengan terbatasnya ketersediaan pangan dan lahan
2	Perkembangan teknologi	Kemampuan adaptasi masyarakat untuk memanfaatkan teknologi secara optimal dibarengi dengan meminimalkan risiko akibat disrupsi teknologi
3	Peningkatan urbanisasi dunia	Peningkatan jumlah penduduk perkotaan

No	Isu Global	Tantangan
		yang mengakibatkan perkembangan kawasan sekitar yang harus dikelola dengan baik
4	Perubahan konstelasi perdagangan global	Perdagangan internasional sangat terpengaruh dengan cepatnya perubahan teknologi dan digital
5	Pergeseran tata kelola keuangan global	Pendapatan negara akan dipengaruhi dengan perubahan struktur ekonomi dan produktivitas penduduk yang berpotensi meningkatkan penerimaan negara secara signifikan
6	Pertumbuhan kelas menengah (middle class)	Proporsi kelas menengah yang terus mengalami peningkatan berdampak pada penciptaan jenis lapangan pekerjaan baru termasuk kebutuhan gaya hidup baru
7	Peningkatan persaingan pemanfaatan sumber daya alam (SDA)	Peningkatan kebutuhan SDA (air, pangan, energi) mendorong upaya konservasi SDA, pengembangan teknologi baru, serta perubahan pola konsumsi dan pola produksi
8	Perubahan iklim, kerusakan lingkungan dan polusi, serta kehilangan keanekaragaman hayati	Perlu adanya perubahan perilaku secara signifikan dan berkelanjutan untuk menghadapi dampak negatif krisis global pada berbagai aspek kehidupan, seperti lingkungan, kesehatan, penghidupan masyarakat, dan laju pembangunan

2) Isu Strategis Nasional (RPJMN 2025-2029)

Isu strategis nasional merupakan tantangan dan agenda prioritas yang ditetapkan pemerintah pusat dan berdampak langsung terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Kabupaten Seram Bagian Barat sebagai bagian dari sistem pemerintahan nasional turut menghadapi berbagai isu strategis, baik yang bersifat sektoral maupun lintas sektor, yang memerlukan perhatian dan sinergi kebijakan antara pusat dan daerah. Penguatan peran daerah dalam merespons isu-isu tersebut menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan, sejalan dengan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029.

a. Rendahnya produktivitas

Mengacu pada rilis laporan Asian Productivity Organization (2024), rata-rata produktivitas Indonesia yang tercermin dari *Total Factor Productivity* selama tahun 2015-2022 hanya tumbuh positif sebesar 60 basis poin dari periode sebelumnya tahun 2010-2015 (-0,9 persen ke -0,3 persen). Kondisi produktivitas yang rendah diantaranya disebabkan oleh kualitas sumber daya manusia yang masih tertinggal, terlebih pada Perempuan, produktivitas sektor ekonomi yang rendah, kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi yang tertinggal, serta kelembagaan seperti sistem insentif, regulasi, dan kepastian hukum yang masih lemah.

b. Rendahnya kualitas sumber daya manusia

Pembangunan manusia unggul dihadapkan pada tantangan rendahnya daya saing tenaga kerja yang ditunjukan dengan rendahnya kualifikasi Pendidikan tenaga kerja. Berdasarkan pada kualifikasi Pendidikan, data Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2024 menunjukan sebesar 52,32 persen penduduk yang termasuk angkatan kerja merupakan lulusan Pendidikan rendah (sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah sederajat ke bawah), sedangkan penduduk yang termasuk angkatan kerja berpendidikan menengah (sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan sederajat) sebesar 34,82 persen, dan penduduk yang termasuk

angkatan kerja berpendidikan tinggi sebesar 12,86 persen. Kualifikasi Pendidikan tenaga kerja yang rendah berdampak pada keterserapan tenaga kerja di pasar kerja, hanya 41,23 persen pekerja yang bekerja di bidang keahlian menengah dan tinggi.

c. Pergeseran struktur kelas menengah

Calon kelas menengah merupakan kelompok sosial ekonomi terbesar di Indonesia. Pada periode 2019-2024, jumlahnya meningkat sebesar 8,65 juta orang sehingga mencapai 137,5 juta orang atau sekitar 49,2 persen dari total populasi. Disisi lain, jumlah warga yang rentan miskin juga meningkat sebanyak 12,72 juta orang dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2024, angka ini mencapai 67,69 juta atau 24,33 persen dari total populasi. Meskipun jumlah masyarakat calon kelas menengah dan rentan miskin, disebabkan oleh tingginya angka pemutusan hubungan kerja. Pada Agustus 2024, tercatat 46.420 pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja (Kementerian Ketenagakerjaan, 2024) dan angka ini diperkirakan akan terus meningkat.

d. Kebutuhan hidup tinggi pada usia produktif

Berdasarkan data BPS (2023), jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) diproyeksikan mencapai 147,71 juta jiwa. Hal ini menjadi tantangan Pembangunan, yaitu tingginya kebutuhan hidup masyarakat dengan terbatasnya ketersediaan sumber daya alam (pangan, energi, dan air) serta lahan. Selain itu, terdapat kewajiban terhadap pemenuhan perlindungan sosial, diperlukan strategi dalam upaya pemenuhan kebutuhan penduduk yang besar.

e. Krisis lingkungan

Perkembangan dunia saat ini dihadapkan dengan tiga krisis lingkungan yang mengancam masa depan bumi dan manusia, yaitu perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, serta polusi dan kerusakan lingkungan. Kerugian ekonomi akibat risiko bencana diperkirakan sebesar Rp22,8 triliun per tahun (Kementerian Keuangan, 2023), sementara jumlah kematian selama 10 tahun terakhir mencapai 9.176 orang (BNPB, 2024).

Ekstraksi sumber daya alam di dunia meningkat tiga kali lipat dalam lima decade terakhir dengan pertumbuhan lebih dari 2,3 persen per tahun. Indonesia sebagai negara dengan Tingkat ekstraksi pertambangan terbesar ke-8 di dunia (*United Nations Environment Programme, 2023*), turut berkontribusi dalam krisis tersebut. Data dari Kementerian ESDM tahun 2022 menunjukkan masih terdapat 2.741 lokasi tambang ilegal yang berpotensi merusak lingkungan. Pertumbuhan populasi dan aktivitas ekonomi yang tinggi serta kelangkaan dan persaingan untuk mengakses sumber daya alam (energi, air, dan pangan) di Tingkat global berpotensi mendorong terjadinya kompetisi dan persaingan geopolitik di berbagai wilayah.

f. Geopolitik dan Geoekonomi

Salah satu tantangan geopolitik yang perlu diantisipasi Indonesia adalah eskalasi persaingan antarnegara adidaya yang meluas dan memunculkan kekuatan baru. Kemunculan berbagai kekuatan baru telah memengaruhi perkembangan kondisi di Kawasan maupun tatanan global, serta sikap Indonesia dalam dunia internasional. Persaingan geopolitik terutama di Kawasan Indo-Pasifik yang dekat dengan Indonesia semakin meningkat dan meluas. Kawasan Indo-Pasifik yang diproyeksikan akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru dunia telah menarik perhatian banyak pihak. Tentu saja hal tersebut berdampak pada penciptaan persaingan pengaruh antarnegara, baik yang berada di dalam maupun luar Kawasan.

g. Tata Kelola dan akuntabilitas pemerintah

Pemberantasan korupsi merupakan isu strategis yang membutuhkan sinergi dari semua pemangku kepentingan. Hal ini menjadi prasyarat upaya percepatan pencapaian sasaran pembangunan nasional, mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan, serta meningkatkan investasi. Hal ini merupakan pijakan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi.

Dalam lima tahun terakhir, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia menunjukkan tren penurunan dari 40 pada tahun 2019 menjadi 34 pada tahun 2022 dan stagnan di angka yang sama pada 2023 (peringkat 115 dari 180 negara). Adapun pada indikator Indeks Perilaku Anti Korupsi Indonesia, meski mengalami tren perbaikan pada periode 2019-2022, namun capaian tersebut sedikit mengalami tantangan pada tahun berikutnya. Hal ini mencerminkan risiko dalam pencapaian pemberantasan korupsi. Selanjutnya, tata Kelola data memainkan peran kunci dalam mendukung pembangunan nasional, terutama dalam pengambilan Keputusan yang lebih akurat, efektif, dan berkelanjutan.

Sementara itu, isu strategis pembangunan wilayah di Provinsi Maluku sesuai dengan RPJMN 2025-2029, antara lain sebagai berikut:

- a. Pertumbuhan ekonomi wilayah melambat setelah tumbuh 14,2 persen (2022) menjadi 13,5 persen (2023), terutama disebabkan oleh pertumbuhan lebih kecil pada sektor dominan.
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Maluku lebih tinggi dari capaian nasional (Maluku : 6,11 dan Nasional 4,91) dan tingkat pengangguran terbuka tertinggi cenderung terdapat pada lulusan di atas Pendidikan dasar (data BPS, 2024 TPT pada lulusan SD: 2,69; SMP: 4,35; SMA: 8,94; Sarjana: 7,09).
- c. Masih terkonsentrasinya kegiatan ekonomi pada Kabupaten/Kota tertentu ditunjukkan oleh 49 persen *share* PDRB Provinsi Maluku 2023 berasal dari Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah. Hal ini disebabkan oleh belum meratanya infrastruktur, konektivitas intra dan antar pulau, dan belum optimalnya pengembangan komoditas local sebagai sumber pertumbuhan ekonomi.
- d. IPM masih lebih rendah dari nasional (Maluku: 73,40; Nasional 75,02 (2024)), disebabkan oleh:
 - Umur Harapan Hidup (UHH) yang masih rendah (Maluku 70,68; Nasional 74,15 (BPS, 2024). Hal ini terjadi seiring dengan masih rendahnya akses air minum layak serta masih rendahnya akses sanitasi layak, serta masih rendahnya prevalensi imunisasi dasar lengkap pada anak.

- RLS di 1 dari 11 kabupaten/kota di Maluku masih lebih rendah dari capaian nasional. Selain itu, HLS di 6 dari 11 kabupaten/kota di Maluku masih lebih rendah dari capaian nasional. Kondisi ini disebabkan diantaranya adalah masih tingginya proporsi desa dengan akses yang sulit/sangat sulit terhadap fasilitas Pendidikan SMA/ sederajat pada kabupaten/kota dengan capaian yang masih lebih rendah dibandingkan dengan kabupaten/kota dengan capaian yang telah lebih tinggi dari angka nasional (Maluku: 24,7 persen dibandingkan dengan 18,8 persen (Indeks Desa, diolah Bappenas, 2024).
- e. Masih tingginya prevalensi *stunting* di Provinsi Maluku (28,4 persen).
- f. Masih belum tuntasnya penyakit Malaria pada 11 kabupaten/kota di wilayah maluku, diiringi dengan masih rendahnya angka penemuan kasus TBC (Maluku: 70,6 persen, Nasional 77,5 persen), serta masih rendahnya prevalensi imunisasi dasar lengkap pada anak (Maluku: 54,05 persen, Nasional: 57,78 persen) (Kemenkes, 2023).
- g. Persentase penduduk miskin Provinsi Maluku lebih tinggi dibanding nasional, dengan 9 dari 11 kabupaten/kota memiliki tingkat kemiskinan di atas angka nasional.
- h. Masih rendahnya nilai tambah pada sektor pertanian yang menjadi lapangan kerja bagi Sebagian besar pekerja (Maluku: 31,77 persen) serta nilai tukar petani yang masih dibawah nasional (Maluku: 104,41; Nasional: 112,46) (BPS, 2023).
- i. Pekerja di sektor Industri belum sepenuhnya lebih Sejahtera dengan rata-rata upah buruh yang lebih rendah dibandingkan angka nasional (Maluku: Rp2,3 juta; Nasional: Rp3,02 juta), yang disebabkan diantaranya oleh kualitas SDM pekerja di Sektor Industri yang masih rendah (Proporsi Lulusan SD/Tidak Lulus SD/Tidak Sekolah Maluku: 32,43 persen) (BPS, Sakernas Februari 2024).
- j. Provinsi Maluku memiliki indeks resiko bencana kategori tinggi, terutama untuk ancaman gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, gelombang ekstrem dan abrasi.

- k. Banyaknya Kawasan konservasi yang berlokasi di sekitar Kawasan pertumbuhan sehingga berpotensi terdampak oleh pengembangan Kawasan pertumbuhan.

3) Isu Strategis Regional

Isu Strategis jangka panjang yang tertuang dalam RPJPD Provinsi Maluku 2025-2045 sebagai berikut:

- a. Tingkat Perekonomian Daerah Rendah;
- b. SDM Berdaya Saing Terbatas;
- c. Infrastruktur Dan Literasi Digital Rendah;
- d. Pelestarian Budaya Belum Optimal Dan Potensi Instabilitas Sosial;
- e. Kesenjangan Antar Wilayah;
- f. IPTEKIN Dan Riset Lemah;
- g. Kemitraan Dalam Pembangunan Belum Optimal;
- h. Risiko Bencana, Ancaman Perubahan Iklim Dan Kerentanan Daya Dukung Wilayah.

Selanjutnya, isu strategis jangka menengah mengacu pada Rancangan Teknokratik RPJMD Provinsi Maluku 2025-2029, sebagai berikut:

- a. Belum Optimalnya Infrastruktur Dasar Serta Infrastruktur Transportasi Dan Telekomunikasi Untuk Meningkatkan Konektivitas Antar Pulau;
- b. Kesenjangan Antar Wilayah;
- c. SDM Yang Berdaya Saing Terbatas;
- d. Belum Optimalnya Pengembangan IPTEKIN dan Riset;
- e. Pembangunan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan Khususnya Hilirisasi Komoditas Unggulan;
- f. Risiko Bencana, Ancaman Perubahan Iklim Dan Kerentanan Daya Dukung Wilayah
- g. Masih Tingginya Angka Kemiskinan dan Prevalensi Stunting;
- h. Pelestarian Budaya Belum Optimal Dan Potensi Stabilitas Sosial;
- i. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Belum Optimal.

4) Isu Strategis KLHS RPJMD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025-2029

Isu strategis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025–2029 merupakan hasil analisis mendalam terhadap keterkaitan antara aspek pembangunan dan daya dukung serta daya tampung lingkungan hidup di wilayah ini. Isu-isu ini diidentifikasi untuk memastikan bahwa rencana pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, menjaga keberlangsungan fungsi lingkungan, serta mencegah timbulnya risiko lingkungan di masa depan. Isu strategis KLHS menjadi fondasi penting dalam proses perencanaan yang berwawasan lingkungan, serta berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah yang bertanggung jawab terhadap ekosistem dan kesejahteraan masyarakat. Isu strategis KLHS RPJMD 2025-2029 antara lain sebagai berikut:

- a. Tingginya angka kemiskinan dan ketimpangan sosial antar wilayah;
- b. Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik belum efektif;
- c. Pengembangan kualitas sumber daya manusia yang belum optimal;
- d. Pelayanan infrastruktur dasar belum merata dan kualitasnya masih rendah;
- e. Keterbatasan diversifikasi ekonomi lokal dan ketergantungan pada sektor rentan;
- f. Degradasi lingkungan daratan dan pesisir akibat pemanfaatan SDA yang tidak berkelanjutan.

Hasil identifikasi terhadap isu strategis dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025–2029 menunjukkan adanya tantangan yang bersifat multidimensional dan saling terkait antara aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Salah satu persoalan utama yang masih dihadapi adalah tingginya tingkat kemiskinan serta belum optimalnya kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Kondisi ini dipengaruhi oleh ketimpangan akses terhadap pelayanan dasar, terbatasnya kesempatan kerja, serta lemahnya distribusi manfaat pembangunan, terutama di wilayah-wilayah terpencil dan pesisir.

Di sisi lain, rendahnya upaya pemberdayaan sumber daya manusia juga menjadi isu strategis yang krusial. Kualitas pendidikan, keterampilan, dan kapasitas masyarakat dalam berpartisipasi aktif dalam pembangunan masih terbatas, sehingga menghambat akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Ketimpangan kualitas SDM ini juga berdampak pada minimnya inovasi lokal serta lemahnya pemanfaatan potensi wilayah yang beragam di Kabupaten Seram Bagian Barat.

Dalam aspek lingkungan hidup, pengelolaan sampah dan air limbah yang belum optimal menjadi perhatian penting karena berkontribusi langsung terhadap pencemaran lingkungan, terutama di kawasan pesisir dan pemukiman padat. Hal ini diperparah oleh keterbatasan fasilitas pengelolaan limbah yang ramah lingkungan dan minimnya kesadaran masyarakat terhadap pola hidup bersih dan sehat. Selain itu, masih terbatasnya penyediaan utilitas air bersih dan sanitasi yang layak dan berkualitas juga menjadi isu yang berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat, khususnya di desa-desa terpencil dan wilayah yang sulit dijangkau.

Pengembangan infrastruktur berkualitas yang belum merata juga menjadi salah satu isu strategis dalam dokumen KLHS RPJMD ini. Infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, serta sarana pendidikan dan kesehatan masih belum sepenuhnya menjangkau seluruh wilayah, yang berdampak pada keterisolasian wilayah dan keterlambatan pelayanan publik. Isu-isu ini menuntut perhatian serius dalam perencanaan pembangunan daerah yang tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin keberlanjutan lingkungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

5) Isu Strategis Pembangunan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat 2025-2029

Isu Strategis Pembangunan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025–2029 merupakan hasil telaah mendalam yang mengintegrasikan berbagai sumber, mulai dari isu global, nasional, regional Provinsi Maluku, hingga hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD. Identifikasi ini dilakukan secara partisipatif dan berbasis

data, dengan mempertimbangkan berbagai faktor utama seperti perubahan iklim, kemajuan teknologi, ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan, pertumbuhan ekonomi, serta ketimpangan wilayah dan sosial. Selain itu, tantangan lokal seperti keterbatasan infrastruktur dasar, aksesibilitas antarpulau, dan kapasitas kelembagaan daerah turut menjadi fokus perhatian. Penetapan isu-isu strategis ini menjadi dasar penting dalam merumuskan arah pembangunan daerah yang adaptif, inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Selanjutnya, isu strategis jangka menengah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025-2029 mengacu pada hasil telaah isu strategis yang telah dijelaskan sebelumnya. Hasil telaah isu strategis Jangka Menengah Kabupaten Seram Bagian Barat kurun waktu 2025-2029, dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2.33. Rumusan Isu Strategis Daerah

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
<ul style="list-style-type: none"> - Estimasi potensi perikanan tangkap pada 2 wilayah TPP (714 dan 715) mencapai 1,7 juta ton per tahun - Luas wilayah daratan mencapai 5.014 Km2 dengan luas kawasan permukiman hanya mencakup 0,63% dari total luas kabupaten - Luas tanam tanaman perkebunan mencapai 12,7 Ribu Ha (di tahun 2024) dan luas tanam untuk tanaman pangan mencapai 27 Ribu Ha (di tahun 2024) - Potensi mineral logam (nikel) dan non logam serta batuan (marmer dan garnet) - Potensi pariwisata sebanyak 56 objek wisata 	<ul style="list-style-type: none"> - Pertumbuhan ekonomi yang melambat - Ketergantungan ekonomi pada sektor primer - PDRB per kapita yang masih rendah - Pendapatan asli daerah yang lemah - Rasio PDRB industri pengolahan masih rendah 	<p>Keterbatasan diversifikasi ekonomi lokal dan ketergantungan pada sektor rentan</p>	<p>Peningkatan persaingan pemanfaatan sumber daya alam</p>	<p>Minimnya hilirisasi komoditas unggulan</p>	<p>Tingkat perekonomian daerah rendah</p>	<p>Masih rendahnya produktivitas dan hilirisasi komoditas unggulan</p>
			<p>Perubahan konstelasi perdagangan global</p>	<p>Rendahnya produktivitas</p>	<p>Kemitraan dalam pembangunan belum optimal</p>	<p>Keterbatasan diversifikasi ekonomi lokal</p>
<ul style="list-style-type: none"> - memiliki 52 Pulau yang sangat berpotensi sebagai wisata alam bahari - Kawasan pertanian lahan kering hampir diseluruh 	<ul style="list-style-type: none"> - Infrastruktur jalan dan jembatan masih terbatas terutama di daerah pegunungan, lingkak pulau dan 	<p>Pelayanan infrastruktur dasar belum merata dan</p>	<p>Perkembangan teknologi</p>	<p>Pembangunan infrastruktur belum merata</p>	<p>Belum optimalnya infrastruktur dasar serta infrastrutur transportasi dan telekomunikasi</p>	<p>Konektivitas antar wilayah yang belum optimal</p>

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
wilayah kecamatan Seram Barat, Taniwel dan Kairatu - Kawasan pegunungan yang memiliki potensi pengembangan komoditas pertanian dataran tinggi	sebagian wilayah pesisir Huamual Bagian Barat - Akses air bersih yang belum merata - Transportasi dan perhubungan yang belum memadai - Ketersediaan listrik belum optimal dan distribusi belum merata - Status tanah untuk mendukung ketersediaan infrastruktur belum dipenuhi masyarakat - Sebaran permukiman tidak merata, mayoritas desa berada di daerah dengan aksesibilitas rendah	kualitasnya masih rendah			untuk meningkatkan konektivitas antar pulau	Ketimpangan pembangunan antar wilayah
		Tingginya angka kemiskinan dan ketimpangan sosial antar wilayah			Kesenjangan antar wilayah	
Kaya akan adat istiadat dan budaya	- Potensi konflik sosial yang masih terjadi		Pertumbuhan kelas menengah (middle class)	Kebutuhan hidup tinggi pada usia produktif	Pelestarian budaya belum optimal dan	Pelestarian budaya dan sosial kemasyarakatan

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
	- Tantangan dalam konsolidasi demokrasi				potensi stabilitas sosial	yang belum optimal
<ul style="list-style-type: none"> - Menurunnya angka ketergantungan usia muda dari 42,71% di tahun 2020 menjadi 60,60% di tahun 2024 - Penduduk usia produktif pada tahun 2029 diproyeksikan mencapai 66,31% 	<ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya literasi digital - Jumlah pengangguran masih tinggi - Pertumbuhan angkatan kerja tidak seimbang dengan lapangan kerja - Tingginya rasio ketergantungan - Daya saing SDM aparatur dan masyarakat masih rendah dan tidak merata 	Pengembangan kualitas sumber daya manusia yang belum optimal	Perkembangan demografi global	Rendahnya kualitas sumber daya manusia	SDM berdaya saing terbatas	Kualitas dan daya saing SDM yang masih rendah
	<ul style="list-style-type: none"> - Akuntabilitas kinerja pemerintah yang masih rendah - indeks pelayanan publik masih rendah - indeks SPBE dalam kategori cukup 	Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik belum efektif	Demografi global dan peningkatan urbanisasi dunia	Tata kelola dan akuntabilitas pemerintah	Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan belum optimal	Tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik belum efektif

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
<ul style="list-style-type: none"> - Sumber daya air melimpah baik berupa air permukaan maupun air bawah tanah dengan 46 daerah aliran sungai (DAS) dengan total mencapai 496 ribu Ha. - Tingginya curah hujan tahunan yang mencapai lebih dari 2.000 mm per tahun (normal) - Wilayah dengan karakteristik kepulauan (52 pulau) 	<ul style="list-style-type: none"> - Ancaman bencana geologi dan hidrometeorologi tinggi (gempa bumi, longsor, banjir, abrasi dan kebakaran hutan) - Tingginya tingkat pencemaran air di beberapa sungai dan laut - Kurangnya pengelolaan sampah di wilayah perkotaan dan pedesaan 	Degradasi lingkungan daratan dan pesisir akibat pemanfaatan SDA yang tidak berkelanjutan	Perubahan iklim, kerusakan lingkungan dan polusi, serta kehilangan keanekaragaman hayati	Krisis lingkungan	Risiko bencana, ancaman perubahan iklim dan kerentanan daya dukung wilayah	Kerentanan terhadap risiko bencana dan perubahan iklim

a. Masih Rendahnya Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan

Produktivitas komoditas unggulan seperti perikanan, pertanian, dan perkebunan di Kabupaten Seram Bagian Barat masih tergolong rendah akibat keterbatasan teknologi, sarana produksi, serta lemahnya akses pasar. Selain itu, proses hilirisasi atau pengolahan hasil produksi menjadi produk turunan dengan nilai tambah juga belum berkembang secara signifikan. Hal ini menyebabkan potensi ekonomi lokal belum dapat dimaksimalkan untuk mendorong pertumbuhan wilayah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

b. Konektivitas Antar Wilayah yang Belum Optimal

Keterbatasan infrastruktur transportasi darat, laut, dan penyeberangan antar pulau masih menjadi tantangan utama dalam menjamin kelancaran mobilitas barang dan orang. Kondisi ini berdampak pada lambatnya distribusi logistik, keterisolasian beberapa wilayah, serta tingginya biaya ekonomi. Konektivitas antar wilayah yang belum optimal juga menghambat pemerataan pembangunan serta integrasi ekonomi antar kawasan di Kabupaten Seram Bagian Barat.

c. Kualitas dan Daya Saing SDM yang Masih Rendah

Tingkat pendidikan, keterampilan kerja, serta kualitas layanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Seram Bagian Barat belum mampu mendorong lahirnya sumber daya manusia yang kompetitif dan adaptif terhadap perubahan zaman. Akses terhadap pendidikan berkualitas, pelatihan vokasional, serta fasilitas kesehatan dasar masih terbatas di beberapa wilayah. Kondisi ini turut memengaruhi produktivitas tenaga kerja lokal dan daya saing daerah secara keseluruhan.

d. Keterbatasan Diversifikasi Ekonomi Lokal

Perekonomian daerah masih bergantung pada sektor primer seperti pertanian dan perikanan, dengan kontribusi sektor industri pengolahan dan jasa yang masih minim. Keterbatasan inovasi usaha, modal, dan akses pasar juga menghambat berkembangnya sektor-sektor ekonomi kreatif, pariwisata, dan UMKM. Diversifikasi

ekonomi yang belum optimal menyebabkan rentannya struktur ekonomi terhadap fluktuasi harga komoditas dan perubahan eksternal lainnya.

e. Kerentanan terhadap Risiko Bencana dan Perubahan Iklim

Kabupaten Seram Bagian Barat merupakan wilayah kepulauan yang rentan terhadap bencana alam seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, serta dampak perubahan iklim seperti naiknya permukaan air laut dan perubahan pola cuaca. Kerentanan ini diperparah oleh belum optimalnya sistem peringatan dini, mitigasi bencana, dan tata ruang berbasis risiko. Upaya adaptasi dan ketahanan iklim perlu ditingkatkan untuk melindungi masyarakat dan aset pembangunan.

f. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Belum Efektif


Beberapa indikator menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan di Kabupaten Seram Bagian Barat masih menghadapi tantangan dalam hal efisiensi birokrasi, transparansi, akuntabilitas, serta kualitas pelayanan publik. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital, keterbatasan SDM aparatur, serta koordinasi antar perangkat daerah menjadi penghambat dalam menciptakan pemerintahan yang responsif, partisipatif, dan berorientasi pada hasil.

g. Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah

Ketimpangan akses terhadap layanan dasar, infrastruktur, dan kesempatan ekonomi antara wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, dan wilayah yang lebih terjangkau masih cukup tinggi. Daerah-daerah terpencil cenderung tertinggal dari segi pembangunan, sehingga memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi antar wilayah. Pemerataan pembangunan menjadi penting untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan pertumbuhan wilayah.

h. Pelestarian Budaya dan Sosial Kemasyarakatan yang Belum Optimal

Identitas budaya dan nilai-nilai sosial masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat merupakan aset penting dalam pembangunan. Namun, pengaruh modernisasi yang tidak seimbang serta



kurangnya program pelestarian budaya menyebabkan semakin tergerusnya kearifan lokal dan struktur sosial masyarakat. Diperlukan penguatan peran lembaga adat, seni budaya, serta pendidikan karakter untuk menjaga kesinambungan identitas lokal di tengah arus globalisasi.

BAB III

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seram Bagian Barat 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan strategis yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. RPJMD ini disusun sebagai implementasi dari visi dan misi kepala daerah yang terpilih, dengan tetap berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi.

Sebagai daerah yang memiliki potensi sumber daya alam dan budaya yang kaya, Kabupaten Seram Bagian Barat dihadapkan pada tantangan dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat daya saing daerah. Oleh karena itu, visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan yang dirumuskan dalam RPJMD ini diarahkan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta menjaga keseimbangan lingkungan. Dokumen ini menjadi landasan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan daerah secara terarah, terukur, dan berkelanjutan. Dengan adanya visi, misi, tujuan, dan sasaran yang jelas, diharapkan seluruh program dan kebijakan pembangunan dapat berjalan efektif dalam mewujudkan Seram Bagian Barat yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing.

3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

A. Visi dan Misi RPJMD Tahun 2025-2029

Dalam dokumen RPJPD Kabupaten Seram Bagian Barat 2025-2045 dirumuskan Visi jangka panjang sebagai berikut; "Seram Bagian Barat Berbudaya, Maju dan Berkelanjutan". Rumusan Visi ini sejatinya memiliki keterkaitan dengan Visi RPJPN 2025-2045, yaitu "Negara Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan" dan Visi RPJPD Provinsi Maluku 2025-2045, yaitu "Maluku Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan Berbasis Sumber Daya Kepulauan".

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seram Bagian Barat 2025-2029 disusun sebagai pedoman pembangunan

daerah dalam lima tahun ke depan. Dokumen ini menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan visi pembangunan daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan, serta penguatan daya saing daerah.

Visi RPJMD Kabupaten Seram Bagian Barat 2025-2029 merupakan gambaran ideal mengenai arah pembangunan yang ingin dicapai dalam periode lima tahun. Visi ini dirumuskan berdasarkan potensi dan tantangan yang dihadapi daerah, serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan arah kebijakan pembangunan nasional maupun provinsi.

Dengan adanya visi yang jelas, seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat bersinergi dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing. Visi ini menjadi dasar dalam perumusan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, sehingga dapat menghasilkan perubahan nyata bagi kemajuan Kabupaten Seram Bagian Barat serta peningkatan kualitas hidup masyarakatnya.

Berdasarkan Dokumen RPJMN 2025-2029, Dokumen RPJMD Provinsi Maluku 2025-2029 serta Visi dan Misi Bupati terpilih 2025-2039 maka disusun Visi Kabupaten Seram Bagian Barat periode 2025-2029 yaitu:

"SBB Maju, Harmonis, Dan Berkelanjutan Berbasis Agro-Marine"

Maju. Visi Seram Bagian Barat "Maju" mengandung arti bahwa masyarakat Seram Bagian Barat secara umum mencapai tingkat perkembangan yang tinggi dalam berbagai aspek kehidupan. Kemajuan tersebut antara lain dicirikan dengan ekonomi yang stabil dan berkembang, ditandai dengan pertumbuhan PDRB yang sehat, tingkat pengangguran dan kemiskinan yang rendah, serta distribusi pendapatan yang merata. Di samping indikator-indikator ekonomi, kemajuan suatu daerah juga ditandai dengan layanan publik yang berkualitas dan dapat diakses dengan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya untuk layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Ketersediaan infrastruktur yang baik, termasuk transportasi, komunikasi, air bersih, pemukiman, yang ditopang dengan pemanfaatan teknologi juga menandai kemajuan suatu daerah. Tak kalah pentingnya, pemanfaatan teknologi untuk mendorong efisiensi dan

pengelolaan lingkungan yang lebih berkelanjutan pada umumnya juga menjadi ciri kemajuan suatu daerah.

Maju mencirikan mampu mengoptimalisasi keunggulan komparatif dan kompetitifnya dalam memajukan perekonomian daerah. Daya saing suatu daerah dipengaruhi oleh setidaknya empat komponen yaitu lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi. Lebih lanjut Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menguraikan keempat komponen tersebut ke dalam 12 pilar daya saing daerah, yaitu: institusi, infrastruktur, adopsi teknologi informasi dan komunikasi, stabilitas ekonomi makro, kesehatan, keterampilan, pasar produk, pasar tenaga kerja, sistem keuangan, ukuran pasar, dinamisme bisnis, serta kapabilitas inovasi.

Capaian Kabupaten Seram Bagian Barat dalam keduabelas pilar tersebut cukup variatif. Dalam pengukuran Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) pada 2022 lalu, daya saing Kabupaten Seram Bagian Barat terutama berkontribusi oleh pilar kelembagaan (tata kelola pemerintahan), kesehatan, pasar produk, dan sistem keuangan. Sedangkan untuk pilar-pilar lain masih sangat perlu diperkuat, terutama yang terkait dengan infrastruktur, teknologi, stabilitas ekonomi makro, keterampilan, pasar tenaga kerja, ukuran pasar, serta kapabilitas inovasi.

Harmonis. Kata “Harmonis” mencerminkan cita-cita Seram Bagian Barat untuk membangun daerah yang hidup dalam keseimbangan antar unsur kehidupan manusia, alam, budaya, dan pembangunan. Harmonis berarti menciptakan ruang sosial yang rukun, inklusif, dan saling menghargai. Masyarakat Seram Bagian Barat yang terdiri dari berbagai latar belakang etnis, agama, dan adat istiadat, diikat oleh semangat gotong royong, toleransi, dan solidaritas. Dalam pembangunan, ini berarti semua pihak baik pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan generasi muda, bekerja bersama dalam satu irama, tanpa tumpang tindih, tanpa saling meniadakan. Lebih dalam lagi, harmonis juga berarti menyatukan modernisasi dengan kearifan lokal. Pembangunan infrastruktur, digitalisasi layanan publik, dan pengembangan sektor agro-marine dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan ekologi dan nilai-nilai budaya yang diwariskan leluhur. Alam tidak dieksploitasi, melainkan dikelola secara bijak sebagai mitra kehidupan.

Berkelanjutan. Pembangunan untuk generasi saat ini dan masa depan yang selaras antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan

serta ditopang dengan tata kelola yang baik. Pengurangan emisi karbon melalui penerapan ekonomi hijau merupakan upaya strategis dalam rangka mencapai kondisi yang berkelanjutan. Kestinambungan pembangunan antar periode tahunan, jangka menengah, dan jangka panjang juga bagian dari makna berkelanjutan. Kestinambungan menjadikan pembangunan Kabupaten Seram Bagian Barat memiliki kinerja yang semakin baik dan memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.

Berbasis Agro-Marine. Frasa “Berbasis Agro-Marine” dalam visi ini menegaskan bahwa arah pembangunan Kabupaten Seram Bagian Barat bertumpu pada penguatan sektor unggulan lokal, yakni pertanian (agro) dan kelautan/perikanan (marine) sebagai fondasi utama pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan kekayaan alam yang melimpah dari hamparan lahan subur di pedalaman hingga laut yang kaya hasil tangkapan di pesisir memiliki potensi strategis untuk dikembangkan secara terpadu dan berkelanjutan. Berbasis Agro-Marine juga berarti membangun konektivitas dan integrasi antara darat dan laut, antara petani dan nelayan, antara produksi dan industri pengolahan. Ini bukan sekadar sektor ekonomi, melainkan identitas daerah dan jalan menuju kemandirian.

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan yang telah ditetapkan, diperlukan misi yang menjadi landasan bagi perencanaan dan implementasi kebijakan serta program pembangunan di berbagai sektor. Misi RPJMD Kabupaten Seram Bagian Barat 2025-2029 dirancang untuk menjabarkan langkah-langkah strategis dalam mencapai visi daerah. Misi ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Dengan adanya misi yang jelas dan terukur, diharapkan setiap pemangku kepentingan, baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta, dapat bersinergi dalam mendukung pembangunan yang lebih maju dan berdaya saing. Misi ini akan menjadi pedoman dalam merumuskan kebijakan serta mengalokasikan sumber daya secara efektif guna mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan.

Berdasarkan Dokumen RPJMN 2025-2029, Dokumen RPJMD Provinsi Maluku 2025-2029 serta Visi dan Misi Bupati terpilih 2025-2030 maka ditetapkan Misi RPJMD Kabupaten Seram Bagian Barat sebagai berikut:

1. Mewujudkan SDM Unggul, Sejahtera dan Berbudaya

Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi fondasi utama dalam mendorong kemajuan Seram Bagian Barat yang berkelanjutan. Melalui misi ini, Pemerintah Daerah berkomitmen untuk menciptakan manusia Seram Bagian Barat yang cerdas, sehat, berdaya saing, hidup sejahtera, dan tetap berpijak pada nilai-nilai budaya lokal.

SDM unggul mencerminkan individu yang terdidik dan terampil sesuai kebutuhan dunia kerja; adaptif terhadap perkembangan teknologi dan digitalisasi; mampu berinovasi dalam berbagai sektor, khususnya sektor unggulan daerah seperti agro dan marine; tangguh secara mental, spiritual, dan sosial. Sejahtera bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga soal kualitas hidup yang layak dan merata. Berbudaya adalah identitas dan kekuatan sosial masyarakat Seram Bagian Barat. Dalam misi ini, pembangunan SDM tidak hanya ditujukan untuk mengejar kemajuan teknologi dan ekonomi, tetapi juga untuk merawat warisan nilai, adat istiadat, dan seni lokal yang menjadi roh kehidupan masyarakat.

2. Mewujudkan Iklim Investasi dan Ekonomi Daerah yang Kondusif dan Berkelanjutan Berbasis Agro-Marine

Misi ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat untuk menciptakan lingkungan usaha yang ramah investor dan pertumbuhan ekonomi yang merata, dengan tetap menjunjung prinsip keberlanjutan dan berbasis pada kekuatan lokal: pertanian dan kelautan (agro-marine).

Mewujudkan iklim investasi yang kondusif berarti membangun kepercayaan dan kenyamanan bagi investor lokal maupun luar daerah untuk menanamkan modalnya di Seram Bagian Barat. Kondusif saja tidak cukup, ekonomi yang tumbuh juga harus berkelanjutan dan berpihak pada lingkungan serta generasi masa depan. Potensi Seram Bagian Barat yang sangat besar di sektor pertanian (agro) dan kelautan/perikanan (marine) menjadi fondasi ekonomi daerah.

Dengan menjalankan misi ini, Kabupaten Seram Bagian Barat menargetkan terciptanya pertumbuhan ekonomi daerah yang kuat, inklusif, dan adaptif, serta mampu membuka lapangan kerja baru,

meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menjadikan Seram Bagian Barat sebagai daerah tujuan investasi agro-marine di kawasan timur Indonesia.

3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Adaptif, dan Kolaboratif

Misi ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat untuk menyelenggarakan pemerintahan yang berintegritas, responsif terhadap perubahan, dan terbuka terhadap partisipasi semua pihak, demi menciptakan pelayanan publik yang prima dan kepercayaan masyarakat yang tinggi. Tata kelola yang bersih berarti seluruh proses pemerintahan dijalankan dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Pemerintahan yang adaptif adalah pemerintahan yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, kebutuhan masyarakat, dan perkembangan teknologi. Dengan karakter adaptif, pemerintah Seram Bagian Barat siap menjawab tantangan masa depan, termasuk dinamika perubahan iklim, ekonomi global, dan perkembangan teknologi. Tata kelola yang kolaboratif menekankan pentingnya keterlibatan dan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media (pentahelix governance).

Dengan menjalankan misi ini, Kabupaten Seram Bagian Barat membangun pondasi pemerintahan yang modern, terbuka, dan responsif, demi memastikan setiap program pembangunan berjalan tepat sasaran, efisien, dan menyentuh kebutuhan nyata masyarakat.

4. Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan

Misi ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat untuk menghadirkan pembangunan infrastruktur yang merata, fungsional, dan tahan terhadap perubahan jangka panjang, guna mendorong konektivitas wilayah, mendukung pelayanan publik, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi berbasis agro-marine.

Infrastruktur berkualitas adalah infrastruktur yang dibangun sesuai dengan standar teknis dan kelayakan lingkungan, memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan perekonomian daerah dan tahan

terhadap gangguan cuaca ekstrem dan kondisi geografis Seram Bagian Barat yang kompleks. Pembangunan infrastruktur berkelanjutan berarti mempertimbangkan dampak lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam, partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan, pemanfaatan teknologi ramah lingkungan dan efisiensi energi, serta pemeliharaan berkelanjutan agar infrastruktur tetap berfungsi optimal dalam jangka panjang. Misi ini juga menekankan pentingnya pemerataan pembangunan infrastruktur, khususnya ke daerah terpencil, kepulauan, dan kawasan dengan tingkat pelayanan dasar yang masih rendah.

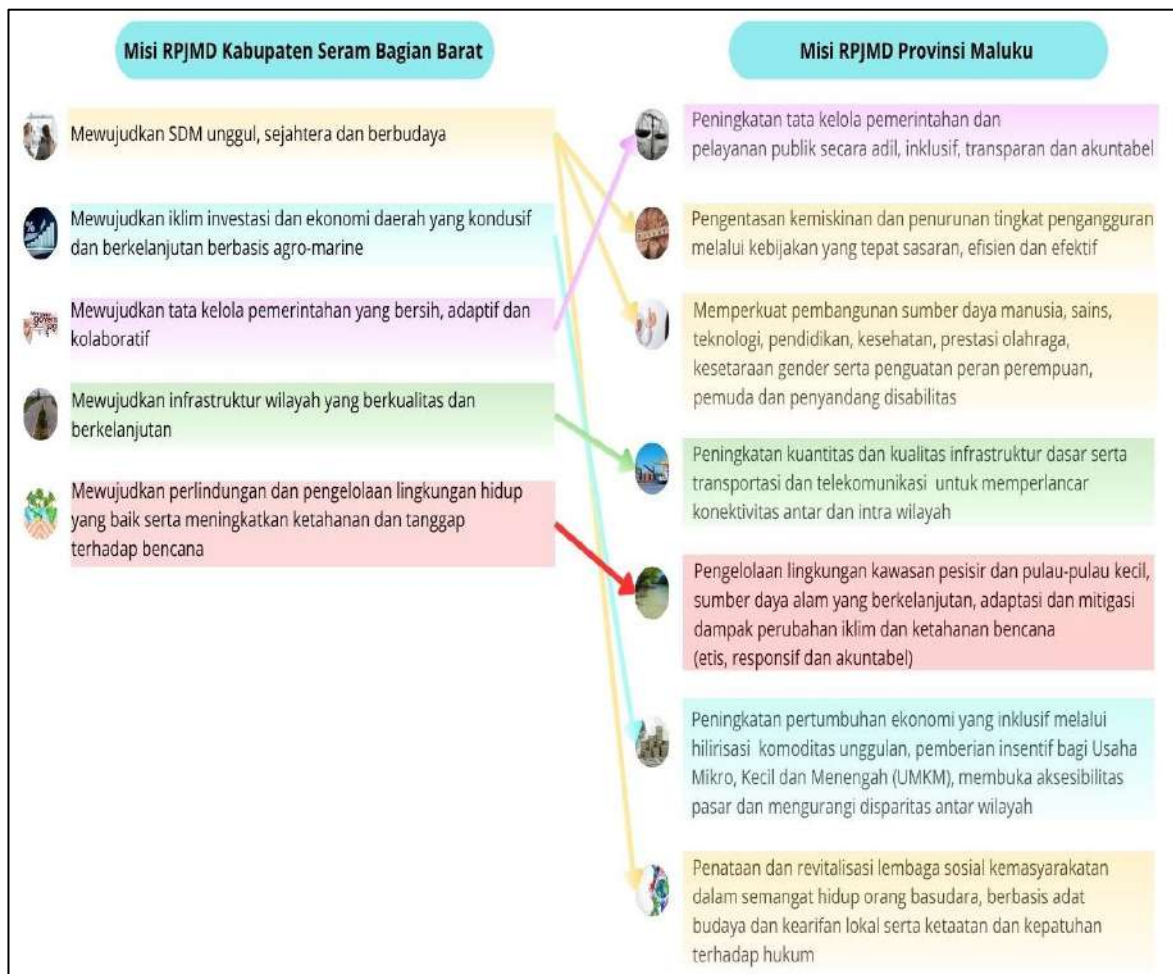
5. Mewujudkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Baik serta Meningkatkan Ketahanan dan Tanggap Terhadap Bencana

Misi ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dalam menjaga kelestarian lingkungan sebagai warisan hidup masyarakat serta membangun sistem yang siap menghadapi risiko bencana. Dalam konteks wilayah yang kaya sumber daya alam namun rawan bencana, misi ini menjadi pilar penting untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan melindungi generasi masa depan.

Pengelolaan lingkungan dilakukan dengan berbasis data spasial dan prinsip pembangunan hijau, untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas ekonomi khususnya di sektor agro dan marine, tetap berada dalam koridor daya dukung lingkungan. Kabupaten Sseram Bagian Barat berada di wilayah yang memiliki potensi bencana alam seperti gempa bumi, banjir, longsor, dan gelombang pasang. Oleh karena itu, membangun ketahanan daerah terhadap bencana adalah keharusan.

Dengan pelaksanaan misi ini, Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat ingin memastikan bahwa pembangunan tidak merusak, tetapi memulihkan dan menjaga, serta masyarakat tidak menjadi korban, tetapi justru menjadi pelaku utama dalam menjaga lingkungan dan menghadapi risiko bencana dengan kesiapsiagaan dan solidaritas. Rumusan Misi RPJMD ini telah diselaraskan dengan rumusan Misi RPJMD Provinsi Maluku 2025-2029 seperti terlihat pada Gambar 3.1.

Gambar 3.1. Penyelarasan Misi RPJMD Kabupaten Seram Bagian Barat dengan Misi RPJMD Provinsi Maluku



B. Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Seram Bagian Barat 2025-2029

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seram Bagian Barat 2025-2029 disusun sebagai pedoman utama dalam mengarahkan pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Dokumen ini berfungsi sebagai panduan bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat daya saing daerah, serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan berkelanjutan.

Tujuan pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Seram Bagian Barat 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi dan misi yang telah ditetapkan. Tujuan ini dirumuskan berdasarkan tantangan dan peluang pembangunan daerah, serta selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan

provinsi. Dengan adanya tujuan yang terukur dan jelas, diharapkan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Dokumen ini menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam memastikan bahwa setiap langkah pembangunan yang dilakukan memiliki arah yang jelas dan terstruktur. Dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang tepat, Kabupaten Seram Bagian Barat diharapkan dapat mencapai kemajuan yang signifikan dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat. Perumusan tujuan pembangunan untuk menjawab misi RPJMD tahun 2025-2029 antara lain yaitu:

1. Terwujudnya kualitas hidup masyarakat yang lebih baik melalui SDM yang sehat, berpendidikan, berkarakter, sejahtera serta berbudaya lokal;
2. Terwujudnya struktur ekonomi daerah yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing berbasis potensi lokal agro-marine;
3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel, serta didukung oleh kolaborasi dan kapasitas kelembagaan yang adaptif;
4. Terwujudnya aksesibilitas dan kualitas infrastruktur wilayah yang merata, berkelanjutan, dan adaptif terhadap perubahan iklim;
5. Terwujudnya kualitas lingkungan hidup yang lestari dan ketahanan wilayah yang tanggap terhadap bencana.

Tujuan pembangunan daerah merupakan pernyataan umum mengenai hal-hal yang perlu dicapai dalam jangka menengah daerah sebagai penjabaran dari visi dan misi kepala daerah. Tujuan ini mencerminkan arah pembangunan yang lebih terfokus dan terukur, serta menjadi dasar dalam perumusan sasaran dan indikator kinerja utama daerah. Dalam konteks RPJMD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025–2029, tujuan pembangunan dirumuskan untuk mengatasi isu strategis daerah dan memperkuat kapasitas daerah dalam mencapai kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Tujuan pembangunan daerah mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat dan tata kelola pemerintahan, yang secara langsung mencerminkan misi-misi pembangunan daerah. Misalnya, untuk mendukung misi peningkatan kualitas sumber daya manusia, ditetapkan

tujuan berupa meningkatnya kualitas dan aksesibilitas layanan pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial. Sementara itu, untuk mendukung misi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dirumuskan tujuan seperti meningkatnya produktivitas komoditas unggulan dan daya saing perekonomian lokal.

Selanjutnya, dalam rangka menjabarkan misi pembangunan yang berkaitan dengan penguatan infrastruktur wilayah dan konektivitas antarwilayah, ditetapkan tujuan berupa meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar, termasuk transportasi, energi, air bersih, dan sanitasi. Adapun untuk mendukung misi reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan adaptif, ditetapkan tujuan berupa meningkatnya kapasitas birokrasi, tata kelola pelayanan publik, dan sistem pengawasan serta pengendalian pembangunan daerah.

Secara keseluruhan, tujuan pembangunan daerah dalam RPJMD ini disusun dengan mempertimbangkan sinergi antara kepentingan lokal, prioritas nasional, serta pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs). Tujuan-tujuan tersebut menjadi kompas utama dalam memastikan seluruh perangkat daerah bergerak dalam satu arah yang selaras, efisien, dan berorientasi pada hasil nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat.

Setelah tujuan pembangunan daerah ditetapkan sebagai arah utama yang ingin dicapai dalam lima tahun ke depan, maka diperlukan perumusan sasaran pembangunan sebagai bentuk operasionalisasi yang lebih terukur dari setiap tujuan tersebut. Sasaran pembangunan menggambarkan hasil antara (*intermediate outcomes*) yang hendak dicapai dalam jangka menengah, serta menjadi dasar bagi perumusan strategi, arah kebijakan, dan program prioritas daerah. Setiap sasaran disusun secara spesifik, relevan, dan dapat diukur, sehingga mampu mencerminkan kemajuan pencapaian tujuan serta mempermudah proses monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan daerah secara periodik.

Tabel 3.1. Rumusan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025-2029

VISI DAN MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET INDIKATOR KINERJA PER TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
Visi: SBB Maju, Harmonis, dan Berkelanjutan Berkbasis Agro-Marine										
Misi 1: Mewujudkan SDM Unggul, Sejahtera dan Berbudaya	Terwujudnya kualitas hidup masyarakat yang lebih baik melalui SDM yang sehat, berpendidikan, berkarakter, sejahtera, serta berbudaya lokal		Indeks Pembangunan Manusia	72,54	73,16	74,31	74,86	75,91	76,56	75,96
		Terwujudnya akses dan kualitas pendidikan yang merata, inklusif, dan mendukung peningkatan literasi masyarakat	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca	9,43	9,09 - 9,09	10 - 12	13,26 - 14,5	15,16 - 16,28	17,22 - 18	18,18 - 27,27
			Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen	9,02	9,09	10,87	12,77	14,21	16,74	18,18

VISI DAN MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET INDIKATOR KINERJA PER TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
			tingkat nasional untuk numerasi							
			Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca	18,46	18,97	21,6	22,53	25,87	26,13	27,41
			Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi	15,09	15,55	18,37	20,98	22,59	21,32	22,05
			Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,59	10,59	10,79	10,99	11,03	11,07	11,12

VISI DAN MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET INDIKATOR KINERJA PER TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
			Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,7	13,77	13,83	13,9	13,96	14,03	14,19
			Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	14,11	14,94	15	15,07	15,13	15,19	15,57
			Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	72,22	73,81	74,51	75,21	75,91	76,61	77,28
		Terpenuhinya layanan kesehatan yang bermutu, merata, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat	Usia Harapan Hidup (tahun)	62,61	71,16	71,57	71,99	72,4	72,54	72,81
			Angka kematian ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	294	187	177	143	137	128	121
			Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	33,8	24,7	23,78	22,86	21,94	21,02	18,8

VISI DAN MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET INDIKATOR KINERJA PER TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
			Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%)	277	85	85	85	85	85	85
			Angka keberhasilan pengobatan Tuberkolusis (treatment success rate) (%)	98,5	90	90	90	90	90	90
			Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	90	98,6	98,09	98,19	98,28	98,38	99
		Terciptanya kondisi sosial yang inklusif bagi kelompok rentan, keluarga, dan kesetaraan gender dalam pembangunan daerah	Indeks Ketahanan Sosial (baru)	0,762	0,763	0,765	0,766	0,768	0,769	0,77
			Indeks Ketimpangan Gender	0,534	0,525	0,512	0,506	0,495	0,487	0,479
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	56,1	56,2	56,71	57,22	57,73	58,24	59,76
			Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	61,27	65,49	65,75	65,94	66,39	66,97	67,86

VISI DAN MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET INDIKATOR KINERJA PER TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
			Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan dan/atau dari Dinas yang menangani bidang ketenagakerjaan (orang)	0	0	25	65	85	115	150
			Jumlah Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan di tingkat kab (unit)	0	0	0	0	0	1	1
		Meningkatnya partisipasi pemuda dan capaian prestasi olahraga sebagai bagian dari	Indeks Pembangunan Pemuda	54,33	54,31	54,79	55,12	55,67	56,13	56,77
			Indeks Pembangunan Olahraga	0,470	0,471	0,512	0,533	0,586	0,617	0,719

VISI DAN MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET INDIKATOR KINERJA PER TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
		pembangunan SDM unggul								
		Terlestarinya nilai budaya dan meningkatnya harmonisasi sosial berbasis agama, budaya, dan kearifan lokal	Indeks Pembangunan Kebudayaan	60,25	60,55	61,22	61,81	62,4	62,99	63,11
Misi 2: Mewujudkan Iklim Investasi dan Ekonomi Daerah yang Kondusif dan Berkelanjutan Berbasis Agro-Marine	Terwujudnya struktur ekonomi daerah yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing berbasis potensi lokal agro-marine;		Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,62	5,21	5,92	6,80	7,09	7,75	7,88
			Indeks Daya Saing Daerah	3,06	3,26	3,47	3,79	3,89	4,11	4,12
			Indeks Ekonomi Hijau Daerah	53,10	60,7	62,19	63,89	65,62	66,83	67,4
			Tingkat Kemiskinan (%)	22,61	16,51	15,12	14,19	12,97	12,08	12
		Menurunnya Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,52	4,29	4,23	4,07	3,95	3,85	3,77
			Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	34,25	35	36,75	38,5	40,25	41,77	42

VISI DAN MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET INDIKATOR KINERJA PER TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
			Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%)	9,96	32,29	40,23	42,03	44,83	46,13	47,09
		Meningkatnya peran dan kontribusi koperasi serta usaha kecil dan menengah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	2,01	2,03	2,28	2,33	2,54	2,68	2,87
			Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB (%)	0,70	0,75	0,89	1,04	1,18	1,32	0,8
			Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (%)	1,78	1,79	1,79	1,8	1,81	1,82	1,83
		Terciptanya iklim investasi daerah yang aman, menarik, dan berkelanjutan bagi pelaku usaha	Persentase Pertumbuhan Realisasi Nilai investasi (%) (PMA dan PMDN)	1,20	1,25	1,45	1,65	2,15	2,15	2,15
		Meningkatnya nilai tambah dan kontribusi sektor	Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	5,62	5,8	6,12	6,73	7,57	7,87	8

VISI DAN MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET INDIKATOR KINERJA PER TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
		unggulan berbasis agro-marine terhadap perekonomian daerah	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	0,78	1,7	1,72	1,74	1,75	1,76	1,77
			Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Ekraf Nasional (%)	0,13	0,14	0,15	0,16	0,16	0,17	0,18
			Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribu Orang)	0,022	0,025	0,035	0,045	0,055	0,065	0,075
			Return on Asset (ROA) BUMD (%)	2,45	2,49	2,63	2,78	2,93	3,08	3,17
		Terjaganya stabilitas ekonomi daerah melalui perdagangan yang sehat, industri yang tumbuh, dan sistem ketahanan	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	5,25	5,5	5,72	5,82	5,92	6,31	6,55
			Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Kabupaten (%)	8,50	8,53	8,36	8,19	8,03	7,97	7,86
			Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	29,25	29,53	29,89	30,25	31,61	32,97	33,28

VISI DAN MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET INDIKATOR KINERJA PER TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
		pangan yang kuat	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	3,05	3,08	3,14	3,27	3,39	3,41	3,43
			Tingkat Inflasi (%)	1,7	1,7 - 2	1,7 - 2	1,7 - 2	1,7 - 2	1,7 - 2	1,7 - 2
			Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)	19,68	20,47	20,59	21,34	21,76	22,57	23,71
			Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	0,21	0,23	0,25	0,29	0,32	0,33	0,35
			Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Provinsi (Rupiah)	-	822.214,73	835.720,55	912.732,86	1.139.731,12	1.561.420,70	1.613.285,16
			Total Kredit/PDRB (%)	24,33	26,17	28,75	29,48	30,22	31,37	32,14
			Indeks Akses Keuangan Daerah	-	3,14	3,19	3,23	3,27	3,32	3,34
			Indeks Ketahanan Pangan	62,26	62,51	62,73	63,48	65,77	67,34	67,75
			Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	32,71	28,97	27,78	26,59	25,4	24,21	24,53

VISI DAN MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET INDIKATOR KINERJA PER TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
Misi 3: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Adaptif, dan Kolaboratif	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel, serta didukung oleh kolaborasi dan kapasitas kelembagaan yang adaptif		Indeks Reformasi Birokrasi	52,25	61,2	62,18	64,89	68,75	71,13	73,48
			Indeks Demokrasi Indonesia	66,76	76,69	77,15	78,96	79,16	80,92	81,88
			Indeks Kerukunan Umat Beragama	80,54	80,84	80,99	81,47	81,89	82,05	82,36
		Terlaksananya reformasi birokrasi yang efektif, adaptif, dan berbasis digital dalam mendukung pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1,9	2,53	2,65	2,77	2,89	2,91	2,98
		Terbangunnya budaya taat hukum dan meningkatnya kepatuhan masyarakat	Indeks Reformasi Hukum	69,55	70	70,55	70,65	70,85	71,05	71,5
			Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah (%)	69,55	70	71,12	72,47	73,63	74,58	75,7

VISI DAN MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET INDIKATOR KINERJA PER TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
		terhadap peraturan perundang-undangan	Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM (%)	58	60	63	66	68	69	70
			Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)	69	70	71	72	73	74	75
		Terciptanya kualitas pelayanan publik yang responsif, inklusif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat	Indeks Pelayanan Publik	3,0	3,5	3,7	3,8	3,9	4,2	4,4
		Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	Persentase Desa Mandiri (%)	14,46	15,22	16,3	17,39	18,48	19,57	21,74

VISI DAN MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET INDIKATOR KINERJA PER TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang berbasis data dan didukung oleh inovasi daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	95	95	100	100	100	100	100
			Indeks Inovasi Daerah	48,84	38,71	49,8	60,89	71,98	72,56	72,86
		Terjaminnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip tata kelola yang baik	Indeks Integritas Nasional	67,40	67,43	68,12	68,81	69,5	69,88	70,19
			Rasio Pajak Terhadap PDB (%)	0,22	1,51	1,59	1,62	0,65	0,67	1,68
		Meningkatnya kapasitas, integritas, dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah dalam	Indeks Sistem Merit	245	249	255	265	270	275	280

VISI DAN MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET INDIKATOR KINERJA PER TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
		mendukung pelayanan publik								
Misi 4: Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Terwujudnya aksesibilitas dan kualitas infrastruktur wilayah yang merata, berkelanjutan, dan adaptif terhadap perubahan iklim;		Indeks Infrastruktur	53,41	64,33	65,17	66,21	67,88	68,75	69,12
		Meningkatnya kualitas dan keterhubungan infrastruktur wilayah yang mendukung mobilitas, akses layanan dasar, serta pengembangan ruang wilayah secara berkelanjutan	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	9	10	12	13	14	15	16
			Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	53,77	67,45	69,07	70,69	72,31	73,93	74,59
			Kapasitas Tampungan Air (m3/kapita)	0,09	0,1	0,23	0,36	0,49	0,62	0,68
			Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	38,09	40,39	43,37	46,35	49,33	52,31	52,68
			Konsumsi Listrik Per Kapita (kWh)	320	350	380	420	470	500	533
		Terwujudnya infrastruktur teknologi	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	5,74	5,8	5,98	6,06	6,12	6,2	6,8

VISI DAN MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET INDIKATOR KINERJA PER TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
		informasi dan komunikasi yang merata dan mendukung konektivitas digital wilayah								
Misi 5: Mewujudkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Baik serta Meningkatkan Ketahanan dan Tanggap Terhadap Bencana	Terwujudnya kualitas lingkungan hidup yang lestari dan ketahanan wilayah yang tanggap terhadap bencana.		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72,22	82,87	83,04	83,21	83,39	83,56	83,62
		Terjaganya kualitas lingkungan hidup dan meningkatnya ketahanan wilayah terhadap dampak perubahan iklim	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,542	0,542	0,546	0,558	0,561	0,568	0,579
			Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	10	10	13	19	22	24	25
			Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	10	10	12,77	18,75	21,52	23,17	23,85
			Persentase Penurunan Emisi GRK Kumulatif (%)	97,39	97,39	97,52	97,65	97,78	97,91	98,5

VISI DAN MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET INDIKATOR KINERJA PER TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
			Persentase Penurunan Emisi GRK Tahunan (%)	27,3	85,84	87,12	89,49	92,73	95,02	97,99
			Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	85,84	27,3	29,07	30,84	32,61	33,37	34,38
			Intensitas energi primer (SBM/ Rp milyar)	233324	233324	223596	213869	204143	194416	194417
		Terbangunnya sistem mitigasi bencana yang tangguh, responsif, dan berbasis partisipasi masyarakat	Indeks Risiko Bencana	163,45	161,63	158,19	156,75	154,31	152,87	150,22

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah merupakan arah strategis yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Seram Bagian Barat. Tujuan pembangunan disusun untuk menggambarkan kondisi ideal yang ingin dicapai dalam jangka menengah, sementara sasaran pembangunan dirumuskan lebih spesifik agar dapat diukur secara nyata melalui berbagai indikator kinerja. Dengan demikian, tujuan dan sasaran tidak hanya berfungsi sebagai orientasi pembangunan, tetapi juga sebagai instrumen pengendali agar pembangunan daerah berjalan secara terarah, terukur, dan konsisten dengan agenda pembangunan nasional maupun provinsi.

Dalam konteks penyusunan RPJMD Tahun 2025–2029, sembilan indikator utama pembangunan daerah ditetapkan sebagai alat ukur ketercapaian pembangunan selama lima tahun ke depan. Indikator-indikator tersebut merepresentasikan capaian pembangunan pada berbagai dimensi, baik sosial, ekonomi, maupun tata kelola pemerintahan, yang secara langsung mencerminkan keberhasilan daerah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Setiap indikator utama pembangunan memiliki keterkaitan langsung dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, sehingga mampu menunjukkan relevansi antara arah kebijakan dengan hasil pembangunan yang diharapkan.

Keterpaduan antara tujuan, sasaran, dan indikator utama pembangunan menjadi kunci penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan dan akuntabel. Indikator utama tidak hanya berfungsi sebagai tolok ukur capaian pembangunan, tetapi juga sebagai dasar dalam melakukan evaluasi dan perbaikan kebijakan di masa mendatang.

Tabel 3.2. Sasaran Utama Pembangunan Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025-2029

No	Indikator	Target Tahunan					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,21	5,92	6,80	7,09	7,75	7,88
2.	Tingkat Kemiskinan	16,51	15,12	14,19	12,97	12,08	12

No	Indikator	Target Tahunan					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,29	4,23	4,07	3,95	3,85	3,77
4.	Indeks Modal Manusia (Poin) / IPM	73,16	74,31	74,86	75,91	75,56	75,96
5.	Gini Rasio (Poin)	0,2460	0,2400	0,2340	0,2280	0,2220	0,221
6.	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	85,84	87,12	89,49	92,73	95,02	97,99
7.	PDRB Perkapita (Rp.Juta)	19,04	20,05	21,06	22,07	23,08	24,05
8.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks)	82,87	83,04	83,21	83,39	83,56	83,62
9.	Kontribusi PDRB Kabupaten/ Kota (%)	6,51	6,54	6,57	6,60	6,63	6,67

3.2 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

A. Strategi dan Arah Kebijakan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seram Bagian Barat 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, diperlukan strategi yang efektif, terukur, dan berorientasi pada hasil.

Strategi dalam RPJMD ini disusun berdasarkan analisis terhadap potensi dan tantangan yang dihadapi daerah, baik dalam aspek ekonomi, sosial, infrastruktur, maupun lingkungan. Dengan strategi yang tepat,

pemerintah daerah dapat merancang kebijakan dan program pembangunan yang lebih fokus, efisien, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Strategi pembangunan yang diterapkan juga mempertimbangkan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan adanya strategi yang jelas dan terarah, Kabupaten Seram Bagian Barat diharapkan dapat menghadapi berbagai tantangan serta memanfaatkan peluang yang ada untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

Tabel 3.3. Strategi Pembangunan Daerah yang Disinkronkan dengan Isu Strategis yang Ditetapkan

ISU STRATEGIS		STRATEGI	
1	Kualitas dan Daya Saing SDM yang Masih Rendah	1	Peningkatan Akses Pendidikan Terutama Daerah yang Masih Belum Terjangkau
		2	Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun dan Peningkatan Partisipasi Pendidikan Tinggi
		3	Peningkatan Pemenuhan dan Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan
		4	Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Berbasis Gugus Pulau
		5	Pemenuhan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan
		6	Peningkatan Upaya Promotif-Preventif dan Pembudayaan Perilaku Hidup Sehat
		11	Pembinaan dan Penguatan Kelompok Pemuda dan Olahraga
2	Pelestarian Budaya dan Sosial Kemasyarakatan yang Belum Optimal	1	Peningkatan Perlindungan Sosial yang Adaptif

ISU STRATEGIS		STRATEGI	
		2	Peningkatan Kebijakan yang Inklusif bagi Kelompok Rentan
		3	Peningkatan Ketahanan Keluarga dan Lingkungan Pendukung Berbasis Kearifan Lokal
		4	Peningkatan Kerukunan Antar Etnis Agama
		5	Pelestarian dan Pengembangan Jalur Rempah sebagai Peradaban Budaya Masyarakat
3	Masih Rendahnya Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan	1	Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam
		2	Peningkatan Kerja Sama Pemasaran
		3	Peningkatan Kualitas Regulasi Pengelolaan Sumber Daya Kelautan
4	Keterbatasan Diversifikasi Ekonomi Lokal	1	Peningkatan Kemudahan Akses Terhadap Bantuan Permodalan dan Realisasi Investasi
		2	Pengembangan Kewirausahaan
		3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia bagi Tenaga Kerja
5	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Belum Efektif	1	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Kondusifitas Daerah
		2	Peningkatan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik

ISU STRATEGIS		STRATEGI	
		3	Peningkatan Kualitas Perumusan Kebijakan
		4	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Manajemen Risiko
		5	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dalam Mendukung Pembangunan Daerah
		6	Peningkatan Kualitas dan Integritas ASN Berbasis Sistem Merit
		7	Peningkatan Kualitas Kelembagaan
		8	Peningkatan Kontribusi Sumber-Sumber PAD terhadap Pendapatan Daerah
		9	Peningkatan Penganggaran Berbasis Kinerja
		10	Peningkatan Ekosistem Inovasi
6	Konektivitas Antar Wilayah yang Belum Optimal	1	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Pendukung Perekonomian
		2	Peningkatan Kolaborasi Kelembagaan Penyediaan dan Penataan Wilayah
7	Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah	1	Penguatan Regulasi dan Optimalisasi Penataan Ruang
		2	Peningkatan Akses Air Bersih dan Sanitasi Aman
		3	Peningkatan Utilitas dan Penataan Perkotaan

ISU STRATEGIS		STRATEGI	
		4	Penyediaan Regulasi dan Peningkatan Permukiman Layak Huni yang Merata
8	Kerentanan Terhadap Resiko Bencana dan Perubahan Iklim	1	Penguatan Regulasi dan Grand Desain Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
		2	Peningkatan Adaptasi dan Mitigasi Bencana Serta Perubahan Iklim
		3	Transformasi Infrastruktur dengan Konsep Rendah Karbon dan Teknologi Tepat Guna

Penetapan strategi pembangunan Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025–2029 disusun berdasarkan identifikasi isu-isu strategis utama yang menjadi tantangan dan peluang dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Penyusunan strategi tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa setiap permasalahan pembangunan dijawab dengan pendekatan kebijakan yang sistematis, terarah, dan berdampak nyata, sejalan dengan visi dan misi daerah dalam mewujudkan masyarakat yang maju, harmonis dan berkelanjutan.

Arah kebijakan pembangunan daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari strategi pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya. Penyusunannya dilakukan secara sistematis dan terukur untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang dirumuskan dapat secara langsung mendukung pencapaian misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah. Arah kebijakan berfungsi sebagai panduan pelaksanaan pembangunan lintas sektor dan menjadi landasan dalam perumusan program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang efektif dan efisien. Dengan demikian, arah kebijakan tidak hanya berperan sebagai penghubung antara strategi dan implementasi, tetapi juga sebagai instrumen kontrol dalam menjamin konsistensi, keberlanjutan, dan fokus pembangunan daerah sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan.

Tabel 3.4. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029

MISI		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
1	Mewujudkan SDM Unggul, Sejahtera dan Berbudaya	1	Peningkatan Akses Pendidikan Terutama Daerah yang Masih Belum Terjangkau	1	Pengembangan dan rehabilitasi infrastruktur pendidikan di daerah terpencil dan pulau-pulau kecil
				2	Pembangunan sistem transportasi dan rumah singgah atau sekolah berasramah untuk daerah sulit akses.
				3	Digitalisasi pembelajaran dengan memperluas jaringan internet dan penyediaan perangkat pembelajaran daring.
				4	Program kemitraan dengan lembaga non-profit atau swasta untuk membuka layanan pendidikan alternatif.
		2	Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun dan Peningkatan Partisipasi Pendidikan Tinggi	1	Program beasiswa penuh bagi siswa dari keluarga tidak mampu sampai jenjang perguruan tinggi
				2	Revitalisasi kurikulum sekolah agar lebih adaptif dengan kebutuhan lokal.
				3	Kerja sama dengan perguruan tinggi untuk membuka kelas jarak jauh atau satelit di daerah.
				4	Kampanye sadar pendidikan tinggi melalui tokoh masyarakat dan keagamaan.

MISI		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
		3	Peningkatan Pemenuhan dan Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan	1	Program afirmatif rekrutmen guru dari wilayah lokal dengan pelatihan lanjutan.
				2	Insentif khusus bagi guru yang bertugas di daerah tertinggal atau sulit akses
				3	Sertifikasi berkelanjutan dan pelatihan kompetensi berbasis teknologi.
				4	Rotasi dan distribusi tenaga pendidik berbasis kebutuhan riil sekolah.
		4	Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Berbasis Gugus Pulau	1	Pembangunan puskesmas pembantu di setiap pulau, pegunungan/dusun atau klinik keliling pulau.
				2	Penetapan gugus pulau sebagai basis pelayanan kesehatan regional.
				3	Penguatan sistem telemedisin antar pulau dengan rumah sakit rujukan di pusat kabupaten.
				4	Penyediaan kapal motor ambulans untuk evakuasi medis darurat.
		5	Pemenuhan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan	1	Program khusus pendidikan tenaga medis lokal (diutamakan untuk wilayah pulau kecil dan wilayah pegunungan) dengan ikatan dinas.

MISI		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
				2	Skema insentif dan jenjang karir yang menarik bagi tenaga medis di pulau-pulau kecil, daerah pesisir dan pegunungan.
				3	Penyusunan peta sebaran tenaga kesehatan secara digital dan interaktif.
				4	Kerja sama dengan Fakultas Kedokteran dan akademi kesehatan untuk penempatan magang/PKL/KKN.
				5	Membangun mitra kerjasama dengan akademi gizi dan kesehatan masyarakat untuk mendorong perbaikann gizi masyarakat.
		6	Peningkatan Upaya Promotif-Preventif dan Pembudayaan Perilaku Hidup Sehat	1	Pelatihan kader kesehatan negeri/desa/dusun dan pemberdayaan posyandu.
				2	Kampanye gizi seimbang dan sanitasi bersih melalui media lokal dan adat.
				3	Integrasi program hidup sehat ke dalam kurikulum sekolah dan kegiatan komunitas.
				4	Lomba negeri/desa/dusun sehat berbasis partisipatif.
		7	Pembinaan dan Penguatan	1	Pemberdayaan organisasi kepemudaan untuk kegiatan sosial dan wirausaha.

MISI		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
			Kelompok Pemuda dan Olahraga	2	Pembinaan atlet daerah dan pembangunan fasilitas olahraga yang layak.
				3	Program pemuda negeri/desa/dusun kreatif berbasis digital dan teknologi.
				4	Turnamen olahraga antar negeri/desa/dusun untuk mendorong solidaritas dan potensi bakat muda.
		8	Peningkatan Perlindungan Sosial yang Adaptif	1	Digitalisasi data kemiskinan dan sistem layanan bantuan sosial berbasis NIK.
				2	Integrasi berbagai program bantuan (PKH, BPNT, BLT) ke dalam satu pintu pelayanan sosial.
				3	Mekanisme penyaluran bantuan berbasis komunitas lokal dan pemerintah negeri/desa/dusun.
				4	Skema bantuan tanggap bencana untuk masyarakat terdampak bencana alam atau krisis ekonomi
				5	Pembentukan Lembaga Layanan Kesejahteraan Sosial di negeri/desa/dusun untuk mendukung pengaduan masyarakat berbasis sosial maupun ekonomi (Puskesmas)
		9	Peningkatan Kebijakan	1	Penyusunan Perda dan kebijakan daerah yang

MISI		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
			yang Inklusif bagi Kelompok Rentan		responsif gender dan inklusif disabilitas.
				2	Pusat layanan terpadu untuk anak, perempuan, dan kelompok disabilitas di tingkat kecamatan.
				3	Program pelatihan dan pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal untuk kelompok rentan.
				4	Pelibatan kelompok rentan dalam forum musrenbang negeri/desa/dusun, kecamatan dan kabupaten.
	10	Peningkatan Ketahanan Keluarga dan Lingkungan Pendukung Berbasis Kearifan Lokal		1	Penguatan fungsi Bina Keluarga melalui PKK dan kelompok masyarakat adat.
				2	Program parenting berbasis nilai budaya lokal dan agama.
				3	Revitalisasi ruang publik yang ramah anak dan keluarga.
				4	Pelestarian nilai-nilai kearifan lokal dalam praktik pengasuhan dan penyelesaian konflik keluarga.
				5	Edukasi dan pencegahan penyakit sosial masyarakat (Narkoba, KDRT, HIV/AIDS, Miras, dll)
	11	Peningkatan Kerukunan		1	Forum kerukunan umat beragama, adat dan dan pemerintah

MISI		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
			Antar Etnis dan Agama		negeri/desa/dusun dalam mediasi sosial.
				2	Festival budaya lintas agama dan etnis sebagai ruang interaksi sosial positif.
				3	Pendidikan toleransi dan multikulturalisme sejak usia dini.
				4	Peraturan daerah tentang perlindungan keberagaman budaya dan keyakinan.
				5	Penguatan lembaga hukum, adat dalam penyelesaian konflik
		12	Pelestarian dan Pengembangan Jalur Rempah sebagai Peradaban Budaya Masyarakat	1	Penetapan dan revitalisasi jalur rempah sebagai kawasan budaya dan pariwisata edukatif.
				2	Pendirian museum atau pusat informasi rempah berbasis masyarakat lokal.
				3	Festival jalur rempah tahunan dengan partisipasi komunitas adat dan generasi muda.
				4	Dukungan usaha kreatif berbasis rempah seperti kuliner, obat tradisional, dan kerajinan.
2	Mewujudkan Iklim Investasi dan Ekonomi Daerah yang	1	Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam	1	Penyusunan tata ruang wilayah berbasis potensi unggulan daerah (agrikultur, perikanan, kehutanan, tambang).

MISI		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
	Kondusif dan Berkelanjutan Berbasis Agro-Marine			2	Penguatan regulasi dan pengawasan terhadap pemanfaatan SDA agar berkelanjutan dan tidak eksploitatif.
				3	Peningkatan kapasitas masyarakat lokal dalam mengelola SDA secara produktif dan ramah lingkungan (eco-farming, perikanan berkelanjutan, agroforestry).
				4	Pengembangan hilirisasi melalui penerapan teknologi tepat guna untuk meningkatkan nilai tambah hasil SDA lokal.
				5	Mendorong BUMDes dan koperasi untuk terlibat dalam pengelolaan komoditas unggulan berbasis lokal.
		2	Peningkatan Kerja Sama Pemasaran	1	Penguatan branding produk unggulan daerah melalui sertifikasi, kemasan, dan promosi.
				2	Kolaborasi dengan pelaku usaha besar, marketplace, dan ritel modern untuk membuka akses pasar.
				3	Membangun sistem distribusi logistik antarpulau secara efisien, terutama untuk

MISI		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
					komoditas pertanian dan perikanan.
				4	Fasilitasi keikutsertaan pelaku usaha dalam pameran daerah, nasional, dan internasional.
				5	Pengembangan portal digital pemasaran produk lokal berbasis katalog komoditas unggulan kabupaten.
				6	Pendirian pusat UMKM sebagai Hub Pemasaran dan Distribusi Produk Lokal.
		3	Peningkatan Kualitas Regulasi Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	1	Review dan harmonisasi regulasi daerah terkait perikanan dan kelautan.
				2	Pelibatan nelayan dan masyarakat adat dalam penyusunan kebijakan pengelolaan laut.
				3	Pemanfaatan teknologi untuk pengawasan dan pelaporan aktivitas perikanan.
				4	Penguatan regulasi keberlanjutan (kuota tangkap, perlindungan ekosistem, konservasi laut).
		4	Peningkatan Kemudahan Akses Terhadap Bantuan Permodalan	1	Pembentukan pusat layanan terpadu UMKM dan investasi di kabupaten.
				2	Fasilitasi akses permodalan dari perbankan, koperasi, hingga fintech melalui edukasi

MISI		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
			dan Realisasi Investasi		keuangan dan pendampingan proposal usaha.
				3	Pemberian insentif fiskal dan kemudahan perizinan bagi investor yang berinvestasi di sektor prioritas daerah.
				4	Membangun sistem informasi investasi daerah berbasis digital dan terbuka.
				5	Mendorong peran Lembaga Keuangan Mikro dan BUMDes sebagai jembatan permodalan bagi pelaku usaha kecil.
		5	Pengembangan Kewirausahaan	1	Inkubasi wirausaha muda dan pelatihan berkelanjutan bagi UMKM.
				2	Kompetisi inovasi bisnis daerah untuk menjaring ide kreatif dari kalangan pemuda dan perempuan.
				3	Pengembangan rumah kreatif atau co-working space sebagai pusat pengembangan usaha lokal.
				4	Pemberdayaan komunitas adat dan perempuan dalam pengembangan produk lokal bernilai ekonomi tinggi.
				5	Digitalisasi UMKM melalui pelatihan e-commerce, pemasaran digital, dan

MISI		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
					pengelolaan keuangan berbasis aplikasi.
				6	Kajian motif dan pengembangan batik lokal untuk memperkuat bisnis berbasis budaya lokal.
		6	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia bagi Tenaga Kerja	1	Pengembangan balai latihan kerja (BLK) di wilayah strategis dan peningkatan pelatihan berbasis kompetensi.
				2	Kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) untuk program magang dan link-and-match.
				3	Sertifikasi kompetensi kerja bagi tenaga lokal melalui lembaga resmi yang diakui nasional.
				4	Program pelatihan vokasi untuk sektor potensial daerah seperti kelautan, pertanian, dan pariwisata.
				5	Pelatihan digital skill dasar dan lanjutan untuk generasi muda dan tenaga kerja informal.
				6	Peningkatan akses pendidikan dan pelatihan untuk tenaga kerja dari kelompok rentan.

MISI		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
3	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Adaptif, dan Kolaboratif	1	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Kondusifitas Daerah	1	Penguatan peran Satpol PP dan Linmas melalui pelatihan dan sarana pendukung.
				2	Pembentukan forum komunikasi masyarakat dan tokoh adat untuk mediasi sosial.
				3	Peningkatan pemantauan wilayah berbasis komunitas dan teknologi (CCTV, Command Center lokal).
				4	Penyuluhan hukum dan kesadaran sosial secara rutin di negeri/desa/dusun.
				5	Penegakan peraturan daerah secara humanis dan partisipatif.
		2	Peningkatan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	1	Digitalisasi layanan administrasi publik melalui sistem terpadu (e-office, e-perizinan, e-SPBE).
				2	Pengembangan aplikasi layanan publik satu pintu yang mudah diakses masyarakat.
				3	Pelatihan pegawai dan masyarakat terkait penggunaan layanan digital pemerintah.
				4	Pemanfaatan tanda tangan elektronik dan arsip digital untuk efisiensi layanan.

MISI		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
				5	Membangun infrastruktur TIK yang mendukung SPBE hingga tingkat kecamatan dan negeri/desa/dusun.
				6	Peningkatan keamanan data dan privasi pengguna dalam layanan digital.
		3	Peningkatan Kualitas Perumusan Kebijakan	1	Peningkatan kapasitas aparatur dalam analisis data, perencanaan, dan evaluasi kebijakan.
				2	Penguatan basis data sektoral sebagai acuan kebijakan berbasis evidence-based policy.
				3	Pelibatan akademisi, praktisi, dan masyarakat dalam FGD penyusunan kebijakan publik.
				4	Optimalisasi peran Bappeda dalam koordinasi lintas OPD.
				5	Pemanfaatan sistem informasi perencanaan daerah (e-planning).
		4	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Manajemen Risiko	1	Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) hingga tingkat perangkat daerah.
				2	Penerapan manajemen risiko di seluruh OPD secara terstruktur.
				3	Monitoring dan evaluasi berbasis digital terhadap

MISI		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
					pelaksanaan program kegiatan.
				4	Pelatihan tata kelola risiko dan audit internal.
				5	Penegakan reward and punishment berbasis kinerja terukur.
		5	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dalam Mendukung Pembangunan Daerah	1	Pelibatan aktif masyarakat dalam musrenbang negeri/desaa/dusun/kecamatan dan kabupaten serta monitoring pembangunan.
				2	Program pemberdayaan ekonomi komunitas berbasis potensi lokal (tanaman pangan, kerajinan, wisata).
				3	Pemberdayaan forum warga, PKK, karang taruna, dan kelompok tani/nelayan.
				4	Pengembangan negeri/desa/dusun mandiri dan kawasan berbasis partisipasi masyarakat.
				5	Penguatan literasi pembangunan melalui media lokal dan forum dialog warga.
		6	Peningkatan Kualitas dan Integritas ASN Berbasis Sistem Merit	1	Penerapan rekrutmen, promosi, dan mutasi berbasis kompetensi dan sistem merit.
				2	Peningkatan pelatihan dan sertifikasi kompetensi ASN secara berkelanjutan.

MISI		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
				3	Penilaian kinerja berbasis e-kinerja dan pengukuran secara objektif.
				4	Penguatan budaya kerja berintegritas dan profesional melalui kode etik dan sistem pengawasan.
				5	Digitalisasi manajemen SDM aparatur melalui sistem informasi kepegawaian terpadu.
		7	Peningkatan Kualitas Kelembagaan	1	Evaluasi kelembagaan secara berkala untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pelayanan publik.
				2	Penataan struktur organisasi yang ramping, efektif, dan efisien.
				3	Peningkatan sinergi antar perangkat daerah melalui forum koordinasi dan integrasi program.
				4	Penerapan SOP dan standar layanan di semua unit kerja.
				5	Penetapan indikator kelembagaan dalam RPJMD dan renstra perangkat daerah didukung dokumen-dokumen inti pembangunan dari setiap OPD.
		8	Peningkatan Kontribusi	1	Digitalisasi pemungutan PAD (e-retribusi, e-pajak daerah).

MISI		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
			Sumber-Sumber PAD terhadap Pendapatan Daerah	2	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber PAD berbasis potensi lokal (pariwisata, perikanan, pasar).
				3	Penguatan peran BUMD dan BUMDes sebagai motor ekonomi lokal dan sumber PAD.
				4	Sosialisasi dan edukasi wajib pajak secara berkelanjutan.
				5	Peningkatan koordinasi dengan instansi vertikal untuk basis data wajib pajak.
		9	Peningkatan Penganggaran Berbasis Kinerja	1	Penerapan anggaran berbasis kinerja di seluruh OPD.
				2	Penyusunan indikator output dan outcome pada setiap program/kegiatan.
				3	Pelatihan penyusunan RKA yang berbasis hasil (result-based budgeting).
				4	Integrasi e-budgeting dan e-planning untuk sinkronisasi rencana dan anggaran.
				5	Monitoring dan evaluasi capaian kinerja terhadap anggaran yang dialokasikan.
		10	Peningkatan Ekosistem Inovasi	1	Pembentukan laboratorium inovasi daerah (inovda) untuk menampung ide inovatif dari OPD dan masyarakat.

MISI		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
				2	Lomba inovasi daerah berbasis tantangan riil pelayanan publik yang didukung melalui pendaftaran dalam sistem inovasi nasional.
				3	Penguatan kolaborasi dengan perguruan tinggi dan komunitas inovator lokal.
				4	Replikasi dan adaptasi inovasi pelayanan publik terbaik dari daerah lain.
				5	Pemberian insentif bagi OPD dan individu yang menghasilkan inovasi terukur.
4	Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	1	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Pendukung Perekonomian	1	Pengembangan infrastruktur konektivitas antarwilayah (jalan, pelabuhan rakyat, jembatan).
				2	Pembangunan infrastruktur penunjang sektor unggulan: pasar, sentra produksi, dan gudang penyimpanan.
				3	Integrasi pengembangan kawasan industri kecil dan menengah dengan infrastruktur dasar.
				4	Pembangunan infrastruktur energi terbarukan di negeri/desa/dusun (PLTS, mikrohidro) untuk mendorong UMKM.
				5	Pemeliharaan rutin infrastruktur secara

MISI		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
		2	Peningkatan Kolaborasi Kelembagaan Penyediaan dan Penataan Wilayah		partisipatif berbasis masyarakat dan padat karya.
				1	Pembentukan forum koordinasi lintas kabupaten, OPD, lembaga vertikal, dan masyarakat untuk penataan ruang.
				2	Sinkronisasi perencanaan tata ruang dengan kebijakan sektoral: transportasi, energi, kelautan, dan permukiman.
				3	Pelibatan aktif tokoh masyarakat, adat, dan komunitas lokal dalam penyusunan rencana penataan wilayah.
				4	Kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga riset untuk kajian spasial dan tata guna lahan.
				5	Integrasi program pembangunan lintas sektor berbasis wilayah (area-based planning).
		3	Penguatan Regulasi dan Optimalisasi Penataan Ruang	1	Revisi dan sinkronisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang.
				2	Penetapan kawasan strategis berdasarkan potensi unggulan

MISI		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
					wilayah (perikanan, wisata, pertanian, industri kecil).
				3	Digitalisasi data tata ruang dalam bentuk geoportal untuk transparansi dan akses publik.
				4	Penguatan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang agar sesuai peruntukan.
				5	Penyusunan Perda dan Perkada yang mendukung pembangunan berkelanjutan dan mitigasi bencana.
		4	Peningkatan Akses Air Bersih dan Sanitasi Aman	1	Pembangunan dan rehabilitasi sistem jaringan perpipaan air bersih berbasis wilayah layanan.
				2	Penyediaan sistem air bersih berbasis komunitas di daerah terpencil/pegunungan/pesisir dan kepulauan.
				3	Pembangunan fasilitas sanitasi aman seperti IPAL komunal, MCK sehat, dan toilet sekolah.
				4	Edukasi masyarakat mengenai perilaku hidup bersih dan sanitasi berbasis budaya lokal.
				5	Penguatan kerja sama dengan sektor swasta dan NGO dalam penyediaan layanan air dan sanitasi.
		5	Peningkatan Utilitas dan	1	Penyusunan masterplan kawasan perkotaan yang

MISI		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
			Penataan Perkotaan		berorientasi lingkungan dan kebutuhan sosial ekonomi.
				2	Revitalisasi kawasan kumuh melalui pendekatan kolaboratif dan padat karya.
				3	Pengembangan ruang terbuka hijau (RTH) dan kawasan pedestrian yang ramah lingkungan.
				4	Modernisasi jaringan jalan, drainase, dan sistem penerangan kota.
				5	Penataan pasar tradisional dan terminal sebagai simpul pertumbuhan ekonomi kota.
				6	Ekspansi perluasan pembangunan kota Piru dalam rangka penataan tata kelola pemerintahan daerah.
		6	Penyediaan Regulasi dan Peningkatan Permukiman Layak Huni yang Merata	1	Penyusunan regulasi daerah tentang standar minimum rumah layak huni dan pembangunan permukiman.
				2	Bantuan stimulan perumahan swadaya untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
				3	Pemetaan dan prioritas kawasan rawan bencana untuk program relokasi permukiman.
				4	Pengembangan perumahan berbasis klaster negeri/desa/dusun dengan

MISI		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
					pendekatan partisipatif merujuk pada dokumen RP3KP.
				5	Penguatan kemitraan dengan pengembang lokal dan BUMDes dalam pembangunan rumah layak huni.
5	Mewujudkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Baik serta Meningkatkan Ketahanan dan Tanggap Terhadap Bencana	1	Penguatan Regulasi dan Grand Desain Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1	Penyusunan dan penguatan Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang terintegrasi dengan RTRW dan RPJMD.
				2	Penyusunan Grand Design PPLH daerah sebagai dokumen rujukan jangka panjang (20–30 tahun).
				3	Penerapan AMDAL, UKL-UPL, dan KLHS secara konsisten pada setiap rencana program/kegiatan pembangunan.
				4	Pengembangan sistem informasi lingkungan hidup daerah berbasis GIS (geo-informasi spasial).
				5	Penguatan kapasitas kelembagaan DLH
				6	Pengawasan pengelolaan lingkungan hidup berbasis partisipatif masyarakat.
		2	Peningkatan Adaptasi dan	1	Pemetaan daerah rawan bencana dan kerentanan iklim

MISI		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
			Mitigasi Bencana Serta Perubahan Iklim		secara berkala dan berbasis data spasial.
				2	Integrasi program adaptasi dan mitigasi ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan RPJMDes.
				3	Pengembangan negeri/desa/dusun tangguh bencana dan perubahan iklim melalui pelatihan, SOP evakuasi, dan sistem peringatan dini.
				4	Rehabilitasi dan konservasi ekosistem alami seperti mangrove, hutan lindung, dan daerah aliran sungai (DAS).
				5	Pengembangan kebijakan insentif fiskal untuk inisiatif lokal dalam konservasi dan mitigasi perubahan iklim.
		3	Transformasi Infrastruktur dengan Konsep Rendah Karbon dan Teknologi Tepat Guna	1	Pengembangan infrastruktur publik (jalan, bangunan, transportasi) yang mengadopsi prinsip efisiensi energi dan rendah emisi karbon.
				2	Pemanfaatan material lokal dan ramah lingkungan dalam pembangunan fasilitas umum.
				3	Penyediaan sarana energi terbarukan di fasilitas umum

MISI		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
					dan kawasan terpencil (PLTS, biogas, mikrohidro).
				4	Promosi teknologi tepat guna di sektor pertanian, perikanan, dan rumah tangga untuk menekan emisi dan limbah.
				5	Integrasi konsep smart infrastructure dalam perencanaan jangka panjang (terutama dalam pengelolaan air, limbah, dan energi).

B. Program Prioritas Pembangunan Daerah

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, diperlukan serangkaian program pembangunan yang terarah, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan serta potensi daerah.

Program pembangunan dalam RPJMD ini disusun berdasarkan prinsip keberlanjutan, inklusivitas, dan pemerataan, sehingga dapat menjawab berbagai tantangan serta memanfaatkan peluang yang ada. Setiap program yang dirancang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat infrastruktur, meningkatkan kualitas layanan publik, serta mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal.

Melalui perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan yang efektif, Kabupaten Seram Bagian Barat diharapkan dapat mencapai kemajuan yang signifikan dalam berbagai sektor, menciptakan pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mendorong pembangunan yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Guna menjawab Visi dan Misi RPJMD selama lima tahun ke depan, maka dirumuskan program-program prioritas pembangunan. Setiap program prioritas yang dijabarkan berdasarkan visi dan misi serta tujuan dan sasaran pembangunan pembangunan daerah.

**Tabel 3.5. Program Prioritas Pembangunan Daerah
Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025-2029**

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Program Prioritas	Program Perangkat Daerah Sesuai Kepmendagri 900.1- 2850 Tahun 2025	Bidang Urusan
SBB Maju, Harmonis, dan Berkelanjutan Berbasis Agro-Marine	Mewujudkan SDM Unggul, Sejahtera dan Berbudaya	Terwujudnya kualitas hidup masyarakat yang lebih baik melalui SDM yang sehat, berpendidikan, berkarakter, sejahtera, serta berbudaya lokal	Terwujudnya akses dan kualitas pendidikan yang merata, inklusif, dan mendukung peningkatan literasi masyarakat	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan	Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan	Program pengelolaan pendidikan	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
				Pemenuhan gizi anak sekolah	Pemberian makanan bergizi bagi anak-anak		
				Peningkatan prestasi siswa	Pendidikan gratis (penyediaan perlengkapan sekolah dan bahan pembelajaran) bagi siswa SD dan SMP		
					Pemberian beasiswa bagi siswa miskin berprestasi		
				Peningkatan kompetensi tenaga pendidik	Peningkatan kapasitas tenaga guru dan pengawas sekolah serta tenaga kesehatan	Program pendidik dan tenaga kependidikan	
					Pemberian insentif bagi guru di daerah terpencil		
				Peningkatan kualitas literasi masyarakat	Revitalisasi bahasa daerah	Program pengembangan bahasa dan sastra	

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Program Prioritas	Program Perangkat Daerah Sesuai Kepmendagri 900.1-2850 Tahun 2025	Bidang Urusan
					Memperkuat literasi	Program pembinaan perpustakaan	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
			Terpenuhinya layanan kesehatan yang bermutu, merata, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat	Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan	Pengobatan dan pemeriksaan kesehatan gratis	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
					Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan di Puskesmas		
				Peningkatan kapasitas rumah sakit rujukan	Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan di Rumah Sakit		
				Peningkatan kualitas tenaga kesehatan	Pemberian insentif bagi tenaga kesehatan di daerah terpencil	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	
			Terlestarinya nilai budaya dan meningkatnya harmonisasi sosial berbasis agama, budaya, dan kearifan lokal	Peningkatan kegiatan kebudayaan di daerah	Penguatan pendidikan budaya dan toleransi	Program pengembangan kebudayaan	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
				Peningkatan spiritualitas masyarakat dalam		Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Sekretariat Daerah

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Program Prioritas	Program Perangkat Daerah Sesuai Kepmendagri 900.1-2850 Tahun 2025	Bidang Urusan
				kehidupan sehari-hari			
	Mewujudkan Iklim Investasi dan Ekonomi Daerah yang Kondusif dan Berkelanjutan Berbasis Agro-Marine	Terwujudnya struktur ekonomi daerah yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing berbasis potensi lokal agro-marine;	Menurunnya Tingkat Pengangguran	Meningkatnya kualitas para pencari kerja	Pelatihan penguatan kapasitas bagi pedagang dan pelaku UMKM	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
			Meningkatnya peran dan kontribusi koperasi serta usaha kecil dan menengah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	Meningkatnya Kontribusi UMKM dalam Perekonomian	Bantuan (dukungan) fasilitas produksi bagi pedagang dan UMKM	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Terciptanya iklim investasi daerah yang aman, menarik, dan berkelanjutan bagi pelaku usaha	Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Penerbitan regulasi dan program untuk investasi yang sehat bagi sektor-sektor unggulan daerah	Program pengembangan iklim penanaman modal	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
			Meningkatnya nilai tambah dan	Meningkatnya kapasitas petani	Pelatihan penguatan kapasitas bagi petani	Program penyuluhan pertanian	Urusan Pemerintahan

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Program Prioritas	Program Perangkat Daerah Sesuai Kepmendagri 900.1-2850 Tahun 2025	Bidang Urusan
			kontribusi sektor unggulan berbasis agro-marine terhadap perekonomian daerah	Meningkatnya produksi pertanian	Bantuan (dukungan) fasilitas produksi bagi petani	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Bidang Pertanian
				Meningkatnya kapasitas nelayan	Pelatihan penguatan kapasitas bagi nelayan	Program pengelolaan perikanan tangkap	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan
						Program pengelolaan perikanan budidaya	
				Meningkatnya produksi perikanan	Bantuan (dukungan) fasilitas produksi bagi pelaku perikanan	Program pengelolaan perikanan tangkap	
						Program pengelolaan perikanan budidaya	
			Terjaganya stabilitas ekonomi daerah melalui perdagangan yang sehat, industri yang tumbuh, dan sistem ketahanan pangan yang kuat	Meningkatnya kualitas pasar tradisional/ pasar rakyat	Pengelolaan pasar tradisional secara profesional dan terintegrasi	Program perizinan dan pendaftaran perusahaan	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
					Pembangunan dan revitalisasi pasar tradisional bagi penciptaan ruang usaha berkualitas dan terjangkau	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	
				Terjaganya kestabilan harga	Operasi pasar sembako murah	Program stabilitas harga barang	

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Program Prioritas	Program Perangkat Daerah Sesuai Kepmendagri 900.1-2850 Tahun 2025	Bidang Urusan
				komoditas hasil bumi dan laut		kebutuhan pokok dan barang penting	
				Peningkatan produktivitas BUMD	Akses permodalan bagi BUMD	Program perekonomian dan pembangunan	Sekretariat Daerah
	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Adaptif, dan Kolaboratif	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel, serta didukung oleh kolaborasi dan kapasitas kelembagaan yang adaptif	Terbangunnya budaya taat hukum dan meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan	Meningkatnya tata kelola pertahanan	Mendukung kepastian hak atas tanah bagi masyarakat (sertifikat)	Program pengelolaan tanah kosong	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan
			Terciptanya kualitas pelayanan publik yang responsif, inklusif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Pelayanan KTP, KK, Akta Kelahiran dan pelayanan dasar lainnya secara cepat dan gratis melalui sistem terintegrasi	Program pendaftaran penduduk	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						Program pencatatan sipil	
			Terwujudnya tata kelola	Terbentuknya Desa baru	Pemekaran Dusun menjadi Desa	Program penataan desa	Urusan Pemerintahan

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Program Prioritas	Program Perangkat Daerah Sesuai Kepmendagri 900.1-2850 Tahun 2025	Bidang Urusan
			pemerintahan desa yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	Terbentuknya Kecamatan baru	Pemekaran wilayah kecamatan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	Program penataan desa	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				Terbentuknya desa adat	Penguatan kelembagaan dan pranata adat serta hak-hak masyarakat adat	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	
			Meningkatnya kapasitas, integritas, dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah dalam mendukung pelayanan publik	Meningkatnya kompetensi aparatur pemerintah daerah	Peningkatan kapasitas SDM dilingkup pemerintah daerah	Program kepegawaian daerah	Kepegawaian
				Meningkatnya kualitas birokrasi pemerintah daerah	Perekrutan dan promosi jabatan PNS sesuai dengan norma yang berlaku	Program pengembangan sumber daya manusia	Pendidikan dan Pelatihan
	Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang Berkualitas	Terwujudnya aksesibilitas dan kualitas infrastruktur	Meningkatnya kualitas dan keterhubungan infrastruktur	Meningkatnya status jalan dalam kondisi baik	Pembangunan dan peningkatan serta pemeliharaan infrastruktur jalan	Program penyelenggaraan jalan	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Program Prioritas	Program Perangkat Daerah Sesuai Kepmendagri 900.1-2850 Tahun 2025	Bidang Urusan	
	dan Berkelanjutan	wilayah yang merata, berkelanjutan, dan adaptif terhadap perubahan iklim;	wilayah yang mendukung mobilitas, akses layanan dasar, serta pengembangan ruang wilayah secara berkelanjutan	Tertatanya penataan daerah aliran sungai dan drainase	Pembangunan dan peningkatan serta pemeliharaan infrastruktur jembatan		Umum dan Penataan Ruang	
					Revitalisasi sungai	Program pengelolaan sumber daya air (SDA)		
					Pembangunan dan revitalisasi drainase	Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase		
				Tertatnya penataan ibu kota	Pembangunan land mark ibu kota kabupaten	Program penyelenggaraan penataan ruang		
					Revitalisasi dan penataan taman kota			
				Meningkatnya rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak	Pembangunan sanitasi layak	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah		
				Meningkatnya rumah tangga yang memiliki akses air bersih layak	Penyediaan akses air bersih	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah		
				Meningkatnya rumah layak huni	Mendukung program penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat	Program pengembangan perumahan		Urusan Pemerintahan Bidang

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Program Prioritas	Program Perangkat Daerah Sesuai Kepmendagri 900.1-2850 Tahun 2025	Bidang Urusan
							Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Mewujudkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Baik serta Meningkatkan Ketahanan dan Tanggap Terhadap Bencana	Terwujudnya kualitas lingkungan hidup yang lestari dan ketahanan wilayah yang tanggap terhadap bencana.	Terjaganya kualitas lingkungan hidup dan meningkatnya ketahanan wilayah terhadap dampak perubahan iklim	Meningkatnya luasan wilayah konservasi dan rehabilitasi	Konservasi dan rehabilitasi pesisir dan kawasan yang rawan bencana dengan memperkuat partisipasi masyarakat	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
			Terbangunnya sistem mitigasi bencana yang tangguh, responsif, dan berbasis partisipasi masyarakat	Meningkatkan ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana	Mitigasi dan peningkatan tanggap bencana serta perlindungan lingkungan hidup	Program penanggulangan bencana	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
						Program penanganan bencana	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Program prioritas selanjutnya dipertajam dengan beberapa kegiatan prioritas yang menjadi bagian dari strategi pencapaian visi dan misi Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2025-2029.

**Tabel 3.6. Program Prioritas dan Indikasi Kegiatan Prioritas
RPJMD Kabupaten Seram Bagian Barat 2025-2029**

No	Program Prioritas	Indikasi Kegiatan Prioritas
1	Pendidikan Gratis bagi Siswa SD dan SMP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penghapusan Biaya Operasional Sekolah 2. Penyediaan Seragam, Buku, dan Alat Tulis Gratis 3. Peningkatan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) 4. Program Beasiswa Daerah untuk Siswa Tidak Mampu 5. Pembangunan dan Rehabilitasi Sekolah 6. Penyediaan Transportasi Sekolah Gratis 7. Pengadaan dan Peningkatan Sarana Prasarana TIK 8. Pelatihan Guru dan Peningkatan Kompetensi 9. Monitoring dan Evaluasi Pendidikan Gratis 10. Kampanye dan Sosialisasi Program Pendidikan Gratis
2	Pengobatan dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Alokasi Anggaran untuk Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) 2. Pelayanan Kesehatan Keliling Gratis (Mobile Clinic) 3. Pemeriksaan Kesehatan Berkala di Sekolah dan Desa

No	Program Prioritas	Indikasi Kegiatan Prioritas
		<ol style="list-style-type: none"> 4. Penyediaan Obat-Obatan Gratis di Puskesmas dan Poskesdes 5. Pelayanan Kesehatan Gratis pada Hari Tertentu (Hari Bakti Kesehatan) 6. Peningkatan Kapasitas dan Jumlah Tenaga Medis di Daerah Terpencil 7. Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Kesehatan 8. Penguatan Sistem Rujukan Gratis untuk Pasien Tidak Mampu 9. Penyediaan Ambulan Gratis 24 Jam 10. Sosialisasi dan Edukasi Kesehatan Masyarakat
3	Pemberian Makanan Bergizi bagi Anak-anak, Ibu Hamil dan Menyusui	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk Balita 2. Program Makan Gratis 3. Pemberian Paket Gizi untuk Ibu Hamil dan Menyusui 4. Program Dapur Sehat di Desa (D'SeHat) 5. Kelas Edukasi Gizi untuk Ibu Hamil dan Keluarga Balita 6. Pemberdayaan Kader Posyandu dan KPM (Kader Pembangunan Manusia) 7. Pemberian Makanan Bergizi di Sekolah Dasar dan PAUD 8. Kampanye Gizi Seimbang dan Pencegahan Stunting 9. Monitoring Status Gizi Anak dan Ibu Hamil

No	Program Prioritas	Indikasi Kegiatan Prioritas
		10. Distribusi Multivitamin dan Suplemen Gizi 11. Kemitraan dengan Lembaga Non-Pemerintah dan Swasta Guna Mendukung Penyediaan Makanan Bergizi di Daerah Sulit Akses
4	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kesehatan	1. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) di Wilayah Terpencil 2. Program Sekolah Rakyat 3. Rehabilitasi dan Renovasi Gedung Sekolah Rusak 4. Pengadaan Meubelair dan Peralatan Belajar 5. Pembangunan dan Rehabilitasi Puskesmas, Pustu, dan Posyandu 6. Penyediaan Peralatan Medis dan Penunjang Layanan Kesehatan 7. Pembangunan Asrama atau Rumah Dinas untuk Guru dan Tenaga Kesehatan 8. Pembangunan Ruang UKS dan Ruang Kesehatan di Sekolah 9. Pembangunan Toilet dan Sanitasi Sehat di Sekolah dan Faskes 10. Pembangunan dan Pengadaan Sarana TIK Pendidikan dan Kesehatan 11. Pembangunan Gudang dan Instalasi Farmasi
5	Memperkuat Literasi	1. Pengembangan Program Literasi Sekolah 2. Penyediaan dan Pengadaan Buku Bacaan Bermutu

No	Program Prioritas	Indikasi Kegiatan Prioritas
		3. Revitalisasi dan Pendirian Perpustakaan Desa 4. Pelatihan Literasi bagi Guru dan Tenaga Kependidikan 5. Program Gerakan Membaca Keluarga (GMK) 6. Lomba dan Festival Literasi Tingkat Daerah 7. Peningkatan Akses Literasi Digital 8. Pelibatan Komunitas Literasi dan Tokoh Lokal 9. Penyusunan dan Penyebaran Bahan Bacaan Lokal 10. Monitoring dan Evaluasi Program Literasi
6	Pemberian Insentif bagi Guru, Tenaga Kependidikan, dan Tenaga Kesehatan di Daerah Terpencil	1. Penyusunan Skema Insentif Khusus Daerah Terpencil 2. Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) Daerah Khusus 3. Insentif Berbasis Kinerja dan Lama Bertugas 4. Penyediaan Rumah Dinas Layak Huni 5. Pemberian Bantuan Transportasi dan Akses Komunikasi 6. Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas Berkala 7. Pemberian Insentif Non-Finansial (Penghargaan Daerah) 8. Dukungan Psikososial dan Supervisi Berkala 9. Penyusunan Database ASN Penugasan Terpencil

No	Program Prioritas	Indikasi Kegiatan Prioritas
		10. Kerja Sama dengan Kementerian dan Lembaga Non-Daerah
7	Penguatan Kelembagaan dan Pranata Adat serta Hak-Hak Masyarakat Adat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemetaan dan Pendataan Wilayah Adat 2. Penyusunan dan Penetapan Peraturan Daerah (Perda) tentang Masyarakat Adat 3. Revitalisasi Kelembagaan Adat Negeri/Desa 4. Fasilitasi Penyusunan Hukum Adat dan Tata Kelola Adat 5. Pendidikan dan Pelatihan Kader Adat Muda 6. Pelestarian dan Promosi Budaya Adat 7. Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Komunitas Adat 8. Mediasi dan Penyelesaian Konflik Agraria dan Sosial Adat 9. Peningkatan Peran Perempuan Adat dalam Kelembagaan 10. Kemitraan dengan Lembaga Adat, Akademisi, dan LSM
8	Penerbitan Regulasi dan Program untuk Investasi yang Sehat bagi Sektor-Sektor Unggulan Daerah (Pertanian, Perikanan dan Pariwisata)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan Penetapan Peraturan Daerah (Perda) tentang Kemudahan Investasi 2. Penyederhanaan dan Digitalisasi Sistem Perizinan Berusaha 3. Penyusunan Peta Investasi Daerah (<i>Investment Mapping</i>) 4. Pendirian Forum Koordinasi Investasi Daerah 5. Fasilitasi Kemitraan antara Investor dan Pelaku Lokal

No	Program Prioritas	Indikasi Kegiatan Prioritas
		<ul style="list-style-type: none"> 6. Penyusunan Standar dan Panduan Investasi Berkelanjutan 7. Penyediaan Lahan Strategis dan Infrastruktur Pendukung 8. Pelaksanaan Promosi Investasi Daerah secara Terpadu 9. Monitoring dan Evaluasi Investasi Secara Berkala 10. Penyusunan Regulasi Perlindungan Hak Masyarakat Lokal dan Adat 11. Program Koperasi Desa Merah Putih 12. Penyusunan Satu Database Sektoral dan Indikator Pembangunan Daerah
9	Bantuan (Dukungan) Fasilitas Produksi bagi Petani, Nelayan, Pedagang dan UMKM	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) untuk Petani 2. Bantuan Perahu dan Alat Tangkap Ramah Lingkungan bagi Nelayan Kecil 3. Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana Produksi dan Pengolahan 4. Fasilitasi Akses Modal dan Kredit Produksi 5. Bantuan Sarana Produksi UMKM (peralatan dan bahan baku awal) 6. Pelatihan Produksi, Manajemen Usaha, dan Kualitas Produk 7. Pengembangan Sentra Produksi Komoditas Unggulan 8. Pembangunan Cold Storage dan Gudang Penyimpanan

No	Program Prioritas	Indikasi Kegiatan Prioritas
		9. Distribusi Sarana Dagang dan Peralatan Niaga 10. Kemitraan Pemasaran Hasil Produksi Lokal
10	Operasi Pasar Sembako Murah	1. Penyelenggaraan Operasi Pasar Sembako Murah Secara Berkala 2. Subsidi Harga untuk Komoditas Pokok 3. Kerja Sama dengan Distributor dan Petani/Nelayan Lokal 4. Pembentukan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Aktif 5. Penyediaan Mobil Layanan Pasar Keliling 6. Digitalisasi Informasi Harga dan Lokasi Pasar Murah 7. Penguatan Cadangan Pangan Daerah 8. Pemberian Kupon/Voucher Belanja untuk Keluarga Tidak Mampu 9. Monitoring dan Evaluasi Harga Bahan Pokok 10. Sosialisasi dan Edukasi Konsumen tentang Belanja Cerdas
11	Pemekaran Wilayah Kecamatan Sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang Berlaku	1. Kajian Kelayakan Pemekaran Wilayah Kecamatan dan Dusun Menjadi Desa 2. Penyusunan Naskah Akademik Pemekaran Kecamatan 3. Fasilitasi Musyawarah dan Konsultasi Publik 4. Pengusulan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pemekaran

No	Program Prioritas	Indikasi Kegiatan Prioritas
		<ol style="list-style-type: none"> 5. Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat 6. Penetapan Batas Wilayah dan Pemetaan Administratif 7. Penataan Organisasi dan Tata Kelola Kecamatan Baru 8. Penyediaan SDM dan Pelatihan Aparatur Kecamatan Baru 9. Sosialisasi dan Edukasi kepada Masyarakat 10. Monitoring dan Evaluasi Pasca Pemekaran
12	Perekrutan dan Promosi Jabatan PNS Sesuai dengan Norma yang Berlaku	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Kebijakan Rekrutmen PNS dan PPPK Berbasis Kompetensi 2. Pelaksanaan Seleksi Terbuka dan Transparan 3. Sosialisasi dan Pengumuman Lowongan PNS dan PPPK 4. Pelatihan dan Pembinaan Calon PNS dan PPPK 5. Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Terpadu 6. Pelaksanaan Promosi Jabatan Berdasarkan Merit Sistem 7. Evaluasi Kinerja dan Penilaian Kompetensi Berkala 8. Pembentukan Tim Seleksi dan Pengawas Rekrutmen 9. Penguatan Kapasitas SDM melalui Pelatihan Kepemimpinan 10. Penyusunan Laporan dan Monitoring Proses Rekrutmen dan Promosi

No	Program Prioritas	Indikasi Kegiatan Prioritas
13	Pelayanan KTP, KK, Akta Kelahiran dan Pelayanan Dasar Lainnya Secara Cepat dan Gratis melalui Sistem Terintegrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Terpadu 2. Pelaksanaan Layanan Keliling (<i>Mobile Service</i>) di Wilayah Terpencil 3. Pelayanan Online dan Pendaftaran Mandiri 4. Peningkatan Kapasitas SDM Petugas Pelayanan 5. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan 6. Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat tentang Layanan Digital 7. Integrasi Data Kependudukan dengan Instansi Terkait 8. Penerapan Sistem Antrian dan Pelayanan Prioritas 9. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Layanan 10. Penyediaan Layanan Gratis tanpa Biaya Administrasi
14	Mendukung Kepastian Hak atas Tanah bagi Masyarakat (Sertifikat)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendataan dan Pemetaan Bidang Tanah yang Belum Bersertifikat 2. Penyuluhan dan Sosialisasi tentang Pentingnya Sertifikat Tanah 3. Fasilitasi Pengajuan Pendaftaran Tanah untuk Sertifikat 4. Kerja Sama dengan BPN (Badan Pertanahan Nasional) 5. Penyediaan Layanan Pendaftaran Tanah Keliling

No	Program Prioritas	Indikasi Kegiatan Prioritas
		<ol style="list-style-type: none"> 6. Pendampingan Penyelesaian Sengketa Tanah 7. Pemberian Subsidi atau Pembebasan Biaya Pendaftaran Sertifikat 8. Penguatan Kapasitas Petugas dan Tenaga Pendamping Lapangan 9. Penerapan Sistem Informasi Pertanahan Terpadu 10. Monitoring dan Evaluasi Program Pendaftaran Tanah
15	Pembangunan, Peningkatan, dan Pemeliharaan Infrastruktur dasar, Jalan dan Jembatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inventarisasi dan Penilaian Kondisi Jalan dan Jembatan Eksisting 2. Pembangunan Jalan dan Jembatan Baru di Lokasi Strategis 3. Rehabilitasi dan Perbaikan Jalan dan Jembatan Rusak 4. Penguatan Struktur Jalan dan Jembatan dengan Material Berkualitas 5. Pemeliharaan Berkala dan Pembersihan Jalan dan Jembatan 6. Pemasangan Rambu dan Penerangan pada Jalan dan Jembatan 7. Pelatihan dan Pengembangan SDM Pengelola Infrastruktur Jalan dan Jembatan 8. Penyusunan Sistem Monitoring dan Pelaporan Kerusakan Jalan dan Jembatan 9. Koordinasi dengan Instansi Terkait dan Masyarakat

No	Program Prioritas	Indikasi Kegiatan Prioritas
		10. Penganggaran dan Pendanaan Berkelanjutan untuk Infrastruktur Jalan dan Jembatan 11. Program Perumahan Rakyat 12. Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Wilayah Transmigrasi Waihatu, Waimital dan Waitoso
16	Revitalisasi Sungai dan Drainase	1. Pembersihan dan Normalisasi Aliran Sungai 2. Perbaikan dan Pembangunan Drainase Perkotaan dan Perdesaan 3. Penguatan Tanggul dan Tebing Sungai 4. Penanaman Vegetasi Penyangga di Sepanjang Bantaran Sungai 5. Pembuatan Sumur Resapan dan Biopori 6. Penyuluhan dan Kampanye Kebersihan Sungai dan Lingkungan 7. Pembangunan Infrastruktur Pengendalian Banjir 8. Pengembangan Sistem Monitoring Kualitas Air Sungai 9. Kolaborasi dengan Masyarakat dan Lembaga Lingkungan 10. Penyusunan Rencana Pengelolaan Sungai dan Drainase Berkelanjutan
17	Konservasi dan Rehabilitasi Pesisir dan Kawasan Rawan Bencana dengan	1. Pendataan dan Pemetaan Kawasan Pesisir dan Rawan Bencana

No	Program Prioritas	Indikasi Kegiatan Prioritas
	Memperkuat Partisipasi Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 2. Penanaman Mangrove dan Vegetasi Pesisir 3. Rehabilitasi Terumbu Karang dan Ekosistem Laut 4. Pembuatan dan Peningkatan Infrastruktur Pengendalian Banjir dan Abrasi 5. Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Lokal dalam Pengelolaan Kawasan Pesisir 6. Pelatihan dan Edukasi Masyarakat tentang Mitigasi Bencana dan Konservasi 7. Pengembangan Sistem Peringatan Dini dan Evakuasi Bencana 8. Pengawasan dan Penegakan Aturan Perlindungan Pesisir 9. Pengelolaan Sampah dan Limbah di Kawasan Pesisir 10. Monitoring dan Evaluasi Berbasis Partisipatif 11. Pengembangan Pariwisata Berbasis Mangrove dan Potensi Pariwisata Lainnya
18	Mitigasi dan Peningkatan Tanggap Bencana serta Perlindungan Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan Pembaruan Rencana Kontinjensi dan Mitigasi Bencana 2. Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana 3. Pelatihan dan Simulasi Tanggap Darurat bagi Aparatur dan Masyarakat 4. Penguatan Kapasitas Tim Reaksi Cepat dan Relawan Kebencanaan

No	Program Prioritas	Indikasi Kegiatan Prioritas
		5. Rehabilitasi dan Konservasi Lingkungan untuk Mengurangi Risiko Bencana 6. Pengelolaan Sampah dan Limbah untuk Menjaga Kebersihan Lingkungan 7. Penyuluhan dan Edukasi Masyarakat tentang Mitigasi Bencana dan Pelestarian Lingkungan 8. Penguatan Infrastruktur Tahan Bencana 9. Monitoring dan Evaluasi Kondisi Lingkungan dan Risiko Bencana 10. Kolaborasi dengan Lembaga Pemerintah, Swasta, dan Komunitas

Program prioritas beserta indikasi kegiatan prioritas sebagaimana Tabel di atas selanjutnya dijabarkan dalam 5 (lima) tahapan pembangunan dari tahun 2026 hingga tahun 2030.

Tabel 3.7 Pentahapan RPJMD Kabupaten Seram Bagian Barat 2025-2029

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Tema Pembangunan: <i>Peningkatan Produktivitas dan Inklusifitas Layanan Dasar Untuk Penguatan Daya Saing Daerah</i>	Tema Pembangunan: <i>Penguatan Iklim Investasi Untuk Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat</i>	Tema Pembangunan: <i>Penguatan Tata Kelola Yang Responsif dan Modern Untuk Pelayanan Bersih dan Berkualitas</i>	Tema Pembangunan: <i>Infrastruktur Berkualitas untuk Mendukung Ekosistem Usaha Yang Kompetitif</i>	Tema Pembangunan: <i>Pemantapan Sosial, Budaya, Ekonomi dan Lingkungan Untuk SBB Maju, Harmonis dan Berkelanjutan</i>
Fokus pada pemerataan akses layanan dasar dan administrasi: <ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan Gratis bagi Siswa SD dan SMP • Pengobatan dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis 	Fokus pada penguatan sumber daya manusia dan peningkatan kualitas gizi: <ul style="list-style-type: none"> • Pemberian Makanan Bergizi bagi Anak-anak, Ibu Hamil dan Menyusui • Memperkuat Literasi 	Fokus pada pembangunan dan perbaikan infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan transportasi: <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kesehatan 	Fokus pada penguatan sektor ekonomi produktif dan UMKM: <ul style="list-style-type: none"> • Bantuan Fasilitas Produksi untuk Petani, Nelayan, Pedagang, dan UMKM • Operasi Pasar Sembako Murah 	Fokus pada pelestarian lingkungan dan perlindungan komunitas adat: <ul style="list-style-type: none"> • Konservasi dan Rehabilitasi Pesisir & Kawasan Rawan Bencana • Penguatan Kelembagaan dan Hak-Hak

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan KTP, KK, Akta Kelahiran, dan Layanan Dasar Lain Secara Cepat dan Gratis • Pemekaran Wilayah Kecamatan Sesuai Regulasi • Perekrutan dan Promosi Jabatan PNS Sesuai Norma 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian Insentif untuk Guru dan Tenaga Kesehatan di Daerah Terpencil • Penguatan Kelembagaan dan Pranata Adat • Pendidikan Gratis (lanjutan) 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan, Peninggkatan, dan Pemeliharaan Infrastruktur dasar, jalan dan Jembatan • Revitalisasi Sungai dan Drainase • Sistem Terintegrasi Pelayanan Publik (penyempurnaan dari tahun 2025) 	<ul style="list-style-type: none"> • Penerbitan Regulasi dan Program Investasi Sehat • Penguatan Hak Atas Tanah (Sertifikat) 	<p>Masyarakat Adat (lanjutan)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mitigasi dan Peningkatan Tanggap Bencana • Perlindungan Lingkungan Hidup

BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1 Program Perangkat Daerah

Dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025-2029, maka telah ditetapkan program-program berdasarkan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Seram Bagian Barat.

Tabel 4.1. Klasifikasi Urusan Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah Pelaksana dan Jumlah Program yang Dilaksanakan

NO		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	OPD PELAKSANA	JUMLAH PROGRAM
A		Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar		
	1	Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5
	2	Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan	5
	3	Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11
	4	Urusan Pemerintah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	5
	5	Urusan Pemerintah Bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	2
			Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1
	6	Urusan Pemerintah Bidang Sosial	Dinas Sosial	5
B		Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar		

NO		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	OPD PELAKSANA	JUMLAH PROGRAM
	1	Urusan Pemerintah Bidang Tenaga Kerja	Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja	2
	2	Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4
	3	Urusan Pemerintah Bidang Pangan	Dinas Ketahanan Pangan	4
	4	Urusan Pemerintah Bidang Pertanahan	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	2
	5	Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	6
	6	Urusan Pemerintah Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4
	7	Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3
	8	Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2
	9	Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan	Dinas Perhubungan	2
	10	Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	2

NO		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	OPD PELAKSANA	JUMLAH PROGRAM
	11	Urusan Pemerintah Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	6
	12	Urusan Pemerintah Bidang Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	3
	13	Urusan Pemerintah Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	Dinas Pemuda dan Olahraga	3
	14	Urusan Pemerintah Bidang Statistik	Dinas Komunikasi dan Informatika	1
	15	Urusan Pemerintah Bidang Persandian	Dinas Komunikasi dan Informatika	1
	16	Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4
	17	Urusan Pemerintah Bidang Perpustakaan	Dinas Kearsipan	2
	18	Urusan Pemerintah Bidang Kearsipan	Dinas Kearsipan	2
C		Urusan Pemerintahan Pilihan		
	1	Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan	3
	2	Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata	Dinas Pariwisata	4
	3	Urusan Pemerintah Bidang Partanian	Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja	4
	4	Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan	Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja	4
	5	Urusan Pemerintah Bidang Perindustrian	Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja	1
	6	Urusan Pemerintah Bidang Transmigrasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	OPD PELAKSANA	JUMLAH PROGRAM
D	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan		
	1 Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	2
	2 Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD	1
E	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan		
	1 Perencanaan	Badan Perencanaan	2
	2 Keuangan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2
		Badan Pendapatan Daerah	1
	3 Kepegawaian	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1
	4 Pendidikan dan Pelatihan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1
	5 Penelitian dan Pengembangan Daerah	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	1
F	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan		
	1 Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah	2
G	Unsur Kewilayahan		
	1 Kecamatan	11 Kecamatan	5
H	Unsur Pemerintahan Umum		
	1 Kesatuan Bangsa dan Politik		4
I	Non Urusan	Semua OPD	1

Selanjutnya seluruh program dari setiap Perangkat Daerah disusun dengan menetapkan target beserta pagu indikatif.

Tabel 4.2. Program Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					78.955.249.229,000		81.116.354.730,000		82.127.560.230,000		83.138.765.731,000		84.149.971.232,000	
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					73.632.008.014,000		75.611.976.471,000		76.442.044.928,000		77.272.113.384,000		78.102.181.841,000	
Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Persentase anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (APS) (Persentase)	98,88	98,97	99,12	73.632.008.014,000	99,26	75.611.976.471,000	99,37	76.442.044.928,000	99,45	77.272.113.384,000	99,65	78.102.181.841,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS) (Persentase)	63,12	64,22	65,77		66,89		67,45		68,95		69,12		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					480.808.884,000		497.169.649,000		513.530.414,000		529.891.180,000		546.251.945,000	
Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase)	13,87	14,37	15,75	480.808.884,000	17,2	497.169.649,000	25,65	513.530.414,000	35,77	529.891.180,000	45,12	546.251.945,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					4.121.219.005,000		4.261.454.136,000		4.401.689.266,000		4.541.924.397,000		4.682.159.528,000	
Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Indeks Pemerataan Guru (Rasio)	0,19	0,22	0,27	4.121.219.005,000	0,28	4.261.454.136,000	0,29	4.401.689.266,000	0,3	4.541.924.397,000	0,31	4.682.159.528,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (Persentase)	63,44	64,55	65,77		69,55		70,12		71,75		72,86		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN					377.778.409,000		390.633.296,000		403.488.183,000		416.343.070,000		429.197.957,000	
Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui (Persentase)	100	100	100	377.778.409,000	100	390.633.296,000	100	403.488.183,000	100	416.343.070,000	100	429.197.957,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.06 - PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA					343.434.917,000		355.121.178,000		366.807.439,000		378.493.700,000		390.179.961,000	
Terlestarikannya Bahasa dan sastra daerah	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra (Persentase)	0	0	0	343.434.917,000	5,6	355.121.178,000	7,12	366.807.439,000	9,55	378.493.700,000	10,55	390.179.961,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					90.919.686.956,000		93.446.754.264,000		94.580.321.571,000		96.713.888.879,000		97.847.456.185,000	
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					76.495.420.439,000		78.531.664.789,000		79.174.409.138,000		80.817.153.488,000		81.459.897.837,000	
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	294	267	120	76.495.420.439,000	115	78.531.664.789,000	95	79.174.409.138,000	85	80.817.153.488,000	65	81.459.897.837,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita ((%))	33,8	26,31	23,78		22,86		21,94		21,02		18,8		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					10.303.047.512,000		10.653.635.339,000		11.004.223.166,000		11.354.810.993,000		11.705.398.820,000	
Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase)	65,58	66,22	67,22	10.303.047.512,000	69,55	10.653.635.339,000	70,34	11.004.223.166,000	71,69	11.354.810.993,000	72,96	11.705.398.820,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					686.869.834,000		710.242.356,000		733.614.878,000		756.987.400,000		780.359.921,000	
Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehtan dan Makanan Minuman (Persentase)	63,98	64,22	65,7	686.869.834,000	70,16	710.242.356,000	75,57	733.614.878,000	80,43	756.987.400,000	85,95	780.359.921,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					3.434.349.171,000		3.551.211.780,000		3.668.074.389,000		3.784.936.998,000		3.901.799.607,000	
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	75,78	76,12	77,84	3.434.349.171,000	79,12	3.551.211.780,000	80,48	3.668.074.389,000	82,31	3.784.936.998,000	83,71	3.901.799.607,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					75.373.966.829,000		80.048.471.191,000		84.722.975.548,000		90.397.479.910,000		96.071.984.268,000	
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					7.171.745.854,000		7.756.058.899,000		8.340.371.944,000		8.924.684.989,000		9.508.998.034,000	
Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Tingkat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air secara terpadu (0-100). (Persentase)	50	60	65	7.171.745.854,000	70	7.756.058.899,000	80	8.340.371.944,000	90	8.924.684.989,000	100	9.508.998.034,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas (Persentase)	12,99	12,55	13,77		15,89		16,81		17,90		19,75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Persentase peningkatan Perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob (Persentase)	30,97	33,35	34,17		37,44		40,79		43,75		50,76		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir (Persentase)	32,98	33,35	34,17		37,44		40,79		43,75		50,76		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					6.868.698.342,000		7.102.423.560,000		7.336.148.777,000		7.569.873.995,000		7.803.599.213,000	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota (Persentase)	66,39	66,89	67,12	6.868.698.342,000	68,39	7.102.423.560,000	69,47	7.336.148.777,000	70,12	7.569.873.995,000	71,33	7.803.599.213,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					1.717.174.585,000		1.775.605.890,000		1.834.037.194,000		1.892.468.499,000		1.950.899.803,000	
Meningkatnya layanan persampahan regional	Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas	10,74	11,11	12,33	1.717.174.585,000	14,57	1.775.605.890,000	16,89	1.834.037.194,000	18,94	1.892.468.499,000	19,21	1.950.899.803,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Kabupaten/Kota (Persentase)													
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					1.717.174.585,000		1.775.605.890,000		1.834.037.194,000		1.892.468.499,000		1.950.899.803,000	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) (Persentase)	78,73	78,23	79,67	1.717.174.585,000	80,12	1.775.605.890,000	82,76	1.834.037.194,000	83,81	1.892.468.499,000	85,17	1.950.899.803,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					8.303.047.512,000		8.653.635.339,000		9.004.223.166,000		10.354.810.993,000		11.705.398.820,000	
Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase cakupan infrastruktur drainase dalam kondisi baik (%)	50,45	51,54	52,17	8.303.047.512,000	54,33	8.653.635.339,000	55,89	9.004.223.166,000	56,31	10.354.810.993,000	57,79	11.705.398.820,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN					1.717.174.585,000		1.775.605.890,000		1.834.037.194,000		1.892.468.499,000		1.950.899.803,000	
Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik (Persentase)	50,27	52,47	54,88	1.717.174.585,000	55,13	1.775.605.890,000	56,86	1.834.037.194,000	58,16	1.892.468.499,000	60,45	1.950.899.803,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					1.717.174.585,000		1.775.605.890,000		1.834.037.194,000		1.892.468.499,000		1.950.899.803,000	
Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (Persentase)	45,89	49,49	57,15	1.717.174.585,000	60,12	1.775.605.890,000	61,17	1.834.037.194,000	62,56	1.892.468.499,000	64,76	1.950.899.803,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					3.303.047.512,000		3.653.635.339,000		4.004.223.166,000		4.354.810.993,000		4.705.398.820,000	
Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan (Persentase)	20,78	21,78	23,89	3.303.047.512,000	24,13	3.653.635.339,000	26,99	4.004.223.166,000	27,65	4.354.810.993,000	30,26	4.705.398.820,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					42.080.945.181,000		44.873.961.536,000		47.666.977.891,000		50.459.994.246,000		53.253.010.601,000	
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan (Persentase)	47,93	48,93	49,12	42.080.945.181,000	51,46	44.873.961.536,000	53,77	47.666.977.891,000	55,18	50.459.994.246,000	56,89	53.253.010.601,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					343.434.917,000		355.121.178,000		366.807.439,000		378.493.700,000		390.179.961,000	
Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli (Persentase)	55,13	55,75	56,17	343.434.917,000	57,77	355.121.178,000	58,99	366.807.439,000	59,21	378.493.700,000	60,12	390.179.961,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					434.349.171,000		551.211.780,000		668.074.389,000		784.936.998,000		901.799.607,000	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran pemanfaatan ruang (Persentase)	21,78	22,02	22,17	434.349.171,000	23,71	551.211.780,000	24,89	668.074.389,000	25,78	784.936.998,000	26,98	901.799.607,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					1.167.678.717,000		1.207.412.006,000		1.247.145.292,000		1.286.878.580,000		1.326.611.866,000	
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					240.404.442,000		248.584.825,000		256.765.207,000		264.945.590,000		273.125.972,000	
Terpenuhinya rumah layakhuni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	54,18	54,78	55,17	240.404.442,000	56,81	248.584.825,000	57,35	256.765.207,000	58,96	264.945.590,000	59,31	273.125.972,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					206.060.950,000		213.072.707,000		220.084.463,000		227.096.220,000		234.107.976,000	
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase luas kawasan pemukiman yang ditangani (%)	22,44	23,44	23,78	206.060.950,000	24,59	213.072.707,000	25,87	220.084.463,000	26,65	227.096.220,000	27,31	234.107.976,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					343.434.917,000		355.121.178,000		366.807.439,000		378.493.700,000		390.179.961,000	
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman kumuh	Persentase luas kawasan kumuh yang ditangani (%)	10,64	11,64	12,33	343.434.917,000	13,78	355.121.178,000	14,69	366.807.439,000	15,78	378.493.700,000	16,89	390.179.961,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					309.091.425,000		319.609.060,000		330.126.695,000		340.644.330,000		351.161.965,000	
Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilepokapi PSU	40,97	41,97	43,17	309.091.425,000	44,65	319.609.060,000	45,12	330.126.695,000	46,71	340.644.330,000	47,31	351.161.965,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	(Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) (Persentase)													Kawasan Permukiman
1.04.06 - PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					68.686.983,000		71.024.236,000		73.361.488,000		75.698.740,000		78.035.992,000	
Meningkatnya sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utulitas umum PSU tingkat kemampuan menengah	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU (Persentase)	11,85	12,05	12,77	68.686.983,000	13,65	71.024.236,000	14,81	73.361.488,000	15,81	75.698.740,000	16,77	78.035.992,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					5.628.293.899,990		5.853.838.734,980		6.079.383.571,000		6.304.928.405,990		6.530.473.240,990	
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					1.030.304.751,000		1.065.363.534,000		1.100.422.317,000		1.135.481.099,000		1.170.539.882,000	
Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	0	1,49	1,49	257.576.187,750	2,99	266.340.883,500	2,99	275.105.579,250	4,48	283.870.274,750	4,48	292.634.970,500	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (Persentase)	100	100	100	257.576.187,750	100	266.340.883,500	100	275.105.579,250	100	283.870.274,750	100	292.634.970,500	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masvarakat

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (Persentase)	100	100	100	257.576.187,750	100	266.340.883,500	100	275.105.579,250	100	283.870.274,750	100	292.634.970,500	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	1,2	2,0	2,5	257.576.187,750	3,5	266.340.883,500	4,5	275.105.579,250	5,5	283.870.274,750	6,5	292.634.970,500	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					2.777.784.087,990		2.906.332.957,980		3.034.881.828,000		3.163.430.697,990		3.291.979.566,990	
Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Persentase)	89,78	98,87	100	925.928.029,330	100	968.777.652,660	100	1.011.627.276,000	100	1.054.476.899,330	100	1.097.326.522,330	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase Penanganan Pasca Bencana (Persentase)	98,12	100	100	925.928.029,330	100	968.777.652,660	100	1.011.627.276,000	100	1.054.476.899,330	100	1.097.326.522,330	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana (Persentase)	98,12	100	100	925.928.029,330	100	968.777.652,660	100	1.011.627.276,000	100	1.054.476.899,330	100	1.097.326.522,330	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					1.820.205.061,000		1.882.142.243,000		1.944.079.426,000		2.006.016.609,000		2.067.953.792,000	
Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan kebakaran (%)	100	100	100	910.102.530,500	100	941.071.121,500	100	972.039.713,000	100	1.003.008.304,500	100	1.033.976.896,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (%)	100	100	100	910.102.530,500	100	941.071.121,500	100	972.039.713,000	100	1.003.008.304,500	100	1.033.976.896,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					2.060.609.503,000		2.130.727.068,000		2.200.844.633,000		2.270.962.199,000		2.341.079.764,000	
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					137.373.967,000		142.048.471,000		146.722.976,000		151.397.480,000		156.071.984,000	
Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase lembaga di bidang	86,92	87,92	88,22	137.373.967,000	88,56	142.048.471,000	89,49	146.722.976,000	89,97	151.397.480,000	90,34	156.071.984,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial (Persentase)													
	Persentase pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar (Persentase)	89,75	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial (Persentase)	23,67	24,67	25,5		30		35		40		45		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di dalam panti rehabilitasi sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA (Persentase)	20,99	21,78	22,35		25,57		27,13		29,87		31,77		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase SDM kesejahteraan sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial (Persentase)	75,66	76,77	77,14		79,84		80,81		80,89		81,34		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					858.587.293,000		887.802.945,000		917.018.597,000		946.234.249,000		975.449.902,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya rehabilitasi sosial	Indeks kesejahteraan sosial lanjut usia (Indeks)	0,49	0,50	0,51	858.587.293,000	0,52	887.802.945,000	0,53	917.018.597,000	0,54	946.234.249,000	0,55	975.449.902,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Indeks kesejahteraan sosial penyandang disabilitas (Indeks)	0,39	0,41	0,43		0,49		0,51		0,56		0,59		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Indeks peranan sosial (Indeks)	0,51	0,52	0,54		0,55		0,56		0,57		0,58		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)	74,49	75,89	77,12		79,45		80,71		81,87		82,48		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	97,33	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)	97,33	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)	95,45	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)	78,46	79,46	80,34		82,77		83,54		84,9		85,75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					515.152.376,000		532.681.767,000		550.211.158,000		567.740.550,000		585.269.941,000	
Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Peningkatan indeks keberdayaan sosial (%)	0,01	0,01	0,01	515.152.376,000	0,02	532.681.767,000	0,03	550.211.158,000	0,04	567.740.550,000	0,05	585.269.941,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Peningkatan indeks	0,01	0,01	0,01		0,02		0,03		0,04		0,05		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	kebutuhan dasar (%)													
	Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan (%)	1,11	1,12	1,14		1,15		1,16		1,16		1,17		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi (Persentase)	40,79	41,79	42,17		43,77		44,83		45,39		46,92		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)	60,71	61,71	62,71		63,35		64,12		65,77		66,92		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase pengelolaan dan pendataan data fakir miskin (%)	75,66	76,66	77,12		80,52		95,67		96,16		97,75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA					480.808.884,000		497.169.649,000		513.530.414,000		529.891.180,000		546.251.945,000	
Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelan tanggap darurat bencana (%)	100	100	100	480.808.884,000	100	497.169.649,000	100	513.530.414,000	100	529.891.180,000	100	546.251.945,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya (%)	39,87	43,87	45,42		46,37		47,85		48,77		49,34		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					68.686.983,000		71.024.236,000		73.361.488,000		75.698.740,000		78.035.992,000	
Meningkatnya tata kelola taman makam pahlawan	Persentase taman makam pahlawan	100	100	100	68.686.983,000	100	71.024.236,000	100	73.361.488,000	100	75.698.740,000	100	78.035.992,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	nasional yang terkelola dengan baik (%)													
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					3.022.227.270,000		3.125.066.367,000		3.227.905.462,000		3.330.744.558,000		3.433.583.654,000	
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					2.953.540.287,000		3.054.042.131,000		3.154.543.974,000		3.255.045.818,000		3.355.547.662,000	
Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya (%)	55,79	56,79	57,12	2.953.540.287,000	58,75	3.054.042.131,000	59,71	3.154.543.974,000	60,44	3.255.045.818,000	61,34	3.355.547.662,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					68.686.983,000		71.024.236,000		73.361.488,000		75.698.740,000		78.035.992,000	
Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi	Jumlah pekerja pada perusahaan yang mendapatkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial (Orang)	217	235	250	68.686.983,000	300	71.024.236,000	350	73.361.488,000	400	75.698.740,000	450	78.035.992,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					391.515.805,000		404.838.143,000		418.160.480,000		431.482.818,000		444.805.155,000	
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					188.889.204,000		195.316.648,000		201.744.091,000		208.171.535,000		214.598.978,000	
Meningkatnya kualitas dan efektivitas pentelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	9,56	9,96	10,33	188.889.204,000	12,45	195.316.648,000	14,87	201.744.091,000	15,9	208.171.535,000	16,74	214.598.978,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	42,39	43,39	44,71		44,98		45,21		45,39		45,78		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					65.252.634,000		67.473.024,000		69.693.413,000		71.913.803,000		74.134.193,000	
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan	83,76	84,76	85,77	65.252.634,000	86,91	67.473.024,000	87,34	69.693.413,000	88,37	71.913.803,000	88,98	74.134.193,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Layanan Komprehensif (%)													
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					51.515.238,000		53.268.177,000		55.021.116,000		56.774.055,000		58.526.994,000	
Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	62,39	63,39	64,73	51.515.238,000	65,37	53.268.177,000	65,41	55.021.116,000	65,79	56.774.055,000	65,88	58.526.994,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					85.858.729,000		88.780.294,000		91.701.860,000		94.623.425,000		97.544.990,000	
Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	69,83	70,83	72,87	85.858.729,000	73,99	88.780.294,000	74,31	91.701.860,000	75,56	94.623.425,000	76,44	97.544.990,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Persentase anak melakukan perlindungan khusus yang menempatkan layanan komprehensif (%)	84,57	86,57	88,7		89,7		90,12		91,78		92,65		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					3.121.219.005,000		3.261.454.135,000		3.401.689.266,000		3.541.924.398,000		3.682.159.527,000	
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN					1.785.861.569,000		1.846.630.125,000		1.907.398.682,000		1.968.167.239,000		2.028.935.795,000	
Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan (Persentase)	5,12	5,32	5,5	1.785.861.569,000	6,2	1.846.630.125,000	7,5	1.907.398.682,000	8,9	1.968.167.239,000	10,75	2.028.935.795,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					1.060.609.502,000		1.130.727.068,000		1.200.844.633,000		1.270.962.199,000		1.341.079.764,000	
Meningkatnya diversifikasi dan ketahan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	76,9	77,0	77,12	1.060.609.502,000	78,95	1.130.727.068,000	79,33	1.200.844.633,000	79,45	1.270.962.199,000	79,79	1.341.079.764,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					171.717.459,000		177.560.589,000		183.403.719,000		189.246.850,000		195.089.980,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Persentase)	49,79	52,79	55,71	171.717.459,000	56,12	177.560.589,000	57,98	183.403.719,000	59,77	189.246.850,000	60,88	195.089.980,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					103.030.475,000		106.536.353,000		110.042.232,000		113.548.110,000		117.053.988,000	
Terjaminnya keamanan pangan pada wilayah kerawanan pangan	Persentase daerah rawan pangan yang tertangani (%)	61,49	65,49	67,88	103.030.475,000	69,78	106.536.353,000	73,67	110.042.232,000	75,12	113.548.110,000	79,81	117.053.988,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					206.060.951,000		213.072.707,000		220.084.463,000		227.096.220,000		234.107.976,000	
2.10.07 - PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT					171.717.459,000		177.560.589,000		183.403.719,000		189.246.850,000		195.089.980,000	
Meningkatnya tata kelola tanah ukayat	Persentase Tanah Ulayat yang Ditetapkan (Persentase)	5,1	5,3	5,5	171.717.459,000	5,9	177.560.589,000	6,5	183.403.719,000	7	189.246.850,000	7,5	195.089.980,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.10.08 - PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG					34.343.492,000		35.512.118,000		36.680.744,000		37.849.370,000		39.017.996,000	
Meningkatnya pengelolaan tanah kosong	Persentase Tanah Kosong yang Dikelola (Persentase)	7,65	8,65	10,17	34.343.492,000	15,2	35.512.118,000	20,33	36.680.744,000	25,19	37.849.370,000	27,69	39.017.996,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					1.717.174.584,000		1.775.605.890,000		1.834.037.195,000		1.892.468.499,000		1.950.899.804,000	
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					412.121.900,000		426.145.414,000		440.168.927,000		454.192.440,000		468.215.953,000	
Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase kajian lingkungan hidup yang disusun (%)	47,55	49	50	412.121.900,000	55	426.145.414,000	60	440.168.927,000	65	454.192.440,000	70	468.215.953,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					85.858.729,000		88.780.294,000		91.701.860,000		94.623.425,000		97.544.990,000	
Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (Indeks)	52,22	53,02	53,74	85.858.729,000	54,22	88.780.294,000	55,22	91.701.860,000	56,74	94.623.425,000	57,89	97.544.990,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
	Indeks Kualitas Udara (Indeks)	83,72	84,72	85,77		87,65		89,36		90,71		91,77		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					72.121.333,000		74.575.447,000		77.029.562,000		79.483.677,000		81.937.792,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH (Persentase)	19,87	20,07	20,15	72.121.333,000	22,78	74.575.447,000	28,99	77.029.562,000	29,31	79.483.677,000	30,15	81.937.792,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					68.686.983,000		71.024.236,000		73.361.488,000		75.698.740,000		78.035.992,000	
Meningkatkan penanganan bahan berbahaya dan beracun (B3) Limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)	22,49	23,49	25,35	68.686.983,000	40,21	71.024.236,000	45,75	73.361.488,000	65,85	75.698.740,000	80,92	78.035.992,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					65.252.634,000		67.473.024,000		69.693.413,000		71.913.803,000		74.134.193,000	
Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Persentase ketaatan pelaku usaha dan atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH (%)	60,00	65,00	70,00	65.252.634,000	75,00	67.473.024,000	80,00	69.693.413,000	85,00	71.913.803,000	90,00	74.134.193,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					1.013.133.005,000		1.047.607.475,000		1.082.081.945,000		1.116.556.414,000		1.151.030.884,000	
Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	28,75	29,75	30,76	1.013.133.005,000	32,11	1.047.607.475,000	33,69	1.082.081.945,000	34,72	1.116.556.414,000	35,65	1.151.030.884,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					2.734.349.170,000		2.825.211.779,000		2.916.074.389,000		3.006.936.997,000		3.097.799.607,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
DAN PENCATATAN SIPIIL														
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					1.511.113.635,0 00		1.562.533.183,0 00		1.613.952.731,0 00		1.665.372.279,0 00		1.716.791.827,0 00	
Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)	53,39	54,39	55,17	1.511.113.635,0 00	56,7	1.562.533.183,0 00	59,72	1.613.952.731,0 00	63,99	1.665.372.279,0 00	65,85	1.716.791.827,0 00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase)	29,87	31,87	33,18		38,97		39,71		40,75		45,87		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIIL					1.030.304.751,0 00		1.065.363.534,0 00		1.100.422.317,0 00		1.135.481.099,0 00		1.170.539.882,0 00	
Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100	100	100	1.030.304.751,0 00	100	1.065.363.534,0 00	100	1.100.422.317,0 00	100	1.135.481.099,0 00	100	1.170.539.882,0 00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					103.030.475,000		106.536.353,000		110.042.232,000		113.548.110,000		117.053.988,000	
Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase informasi kependudukan yang dimafaatkan (%)	100	100	100	103.030.475,000	100	106.536.353,000	100	110.042.232,000	100	113.548.110,000	100	117.053.988,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					89.900.309,000		90.778.709,000		91.657.109,000		92.535.509,000		93.413.910,000	
Meningkatkan kualitas profil kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil	67,79	67,79	65,75	89.900.309,000	69,77	90.778.709,000	72,76	91.657.109,000	77,85	92.535.509,000	80,55	93.413.910,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kenendudukan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Kependudukan (Persentase)													Dan Pencatatan Sipil
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					3.434.349.171,0 00		3.551.211.780,0 00		3.668.074.389,0 00		3.784.936.998,0 00		3.901.799.607,0 00	
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA					377.778.409,000		390.633.296,000		403.488.183,000		416.343.070,000		429.197.957,000	
Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa (Persentase)	19,76	19,96	20,33	377.778.409,000	22,98	390.633.296,000	23,77	403.488.183,000	24,95	416.343.070,000	25,75	429.197.957,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					1.030.304.751,0 00		1.065.363.534,0 00		1.100.422.317,0 00		1.135.481.099,0 00		1.170.539.882,0 00	
Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase aparatur desa dan anggota BPD yang ditingkatkan kapasitasnya (%)	87,95	97,95	100	1.030.304.751,0 00	100	1.065.363.534,0 00	100	1.100.422.317,0 00	100	1.135.481.099,0 00	100	1.170.539.882,0 00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa (Persentase)	62,39	63,39	65,77		67,31		68,75		69,54		70		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					2.026.266.011,0 00		2.095.214.950,0 00		2.164.163.889,0 00		2.233.112.829,0 00		2.302.061.768,0 00	
Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (Persentase)	39,12	49,12	55	2.026.266.011,0 00	75	2.095.214.950,0 00	100	2.164.163.889,0 00	100	2.233.112.829,0 00	100	2.302.061.768,0 00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Persentase)	29,18	29,68	30,75		32,17		33,85		34,85		35,71		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					2.081.215.597,0 00		2.152.034.339,0 00		2.222.853.080,0 00		2.293.671.821,0 00		2.364.490.562,0 00	
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					343.434.917,000		355.121.178,000		366.807.439,000		378.493.700,000		390.179.961,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (%)	22,75	22,50	22	343.434.917,000	20	355.121.178,000	19	366.807.439,000	17	378.493.700,000	15	390.179.961,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	TFR (Angka Kelahiran Total) (Jiwa)	2,91	2,90	2,89		2,85		2,83		2,7		2,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					1.737.780.680,000		1.796.913.161,000		1.856.045.641,000		1.915.178.121,000		1.974.310.601,000	
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan keluarga berencana (KB)	Angka prevalensi kontrasepsi modern/ Modern contraceptive (mCPR) (%)	24,98	25,25	25,75	1.737.780.680,000	27,39	1.796.913.161,000	29,88	1.856.045.641,000	32,77	1.915.178.121,000	35,05	1.974.310.601,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	9,76	9,96	10,11		10,21		10,32		10,45		10,59		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					2.129.296.486,000		2.201.751.303,000		2.274.206.121,000		2.346.660.938,000		2.419.115.757,000	
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					1.305.052.685,000		1.349.460.476,000		1.393.868.268,000		1.438.276.059,000		1.482.683.851,000	
Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Konektivitas Darat (Persentase)	31,89	32,89	35,66	1.305.052.685,000	36,87	1.349.460.476,000	37,5	1.393.868.268,000	38,9	1.438.276.059,000	39,75	1.482.683.851,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (Persentase)	13,79	14,79	15,75		16,2		17,58		19,22		20,55		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					824.243.801,000		852.290.827,000		880.337.853,000		908.384.879,000		936.431.906,000	
Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut	Konektivitas laut (%)	53,29	54,29	55,7	824.243.801,000	56,2	852.290.827,000	58,9	880.337.853,000	60,55	908.384.879,000	62,73	936.431.906,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					721.213.326,000		745.754.473,000		770.295.622,000		794.836.770,000		819.377.917,000	
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN					618.182.851,000		639.218.120,000		660.253.390,000		681.288.660,000		702.323.929,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
KOMUNIKASI PUBLIK														
Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) (%)	20	30	40	618.182.851,000	50	639.218.120,000	60	660.253.390,000	70	681.288.660,000	80	702.323.929,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%)	47,59	48,59	50,7		55,25		60,75		65,4		70,71		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					103.030.475,000		106.536.353,000		110.042.232,000		113.548.110,000		117.053.988,000	
Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Indeks SPBE (Indeks)	1,9	2,1	2,6	103.030.475,000	2,9	106.536.353,000	3,2	110.042.232,000	3,6	113.548.110,000	3,8	117.053.988,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					2.557.985.741,000		2.679.055.404,000		2.800.125.067,000		2.921.194.730,000		3.042.264.392,000	
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN Pemeriksaan KOPERASI					68.686.983,000		71.024.236,000		73.361.488,000		75.698.740,000		78.035.992,000	
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)	53,21	100	100	68.686.983,000	100	71.024.236,000	100	73.361.488,000	100	75.698.740,000	100	78.035.992,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					54.949.587,000		56.819.388,000		58.689.190,000		60.558.992,000		62.428.794,000	
Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase Koperasi Aktif (Persentase)	15,67	40	50	54.949.587,000	70	56.819.388,000	80	58.689.190,000	90	60.558.992,000	100	62.428.794,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					137.373.967,000		142.048.471,000		146.722.976,000		151.397.480,000		156.071.984,000	
Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan (Persentase)	50,35	100	100	137.373.967,000	100	142.048.471,000	100	146.722.976,000	100	151.397.480,000	100	156.071.984,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN					206.060.950,000		213.072.707,000		220.084.463,000		227.096.220,000		234.107.976,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PERLINDUNGAN KOPERASI														
Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persentase)	10,33	30	55	206.060.950,000	65	213.072.707,000	70	220.084.463,000	75	227.096.220,000	85	234.107.976,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					686.869.834,000		710.242.356,000		733.614.878,000		756.987.400,000		780.359.921,000	
Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (Persentase)	1,25	3,25	5,57	686.869.834,000	6,21	710.242.356,000	7,44	733.614.878,000	8,95	756.987.400,000	10	780.359.921,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
	Pertumbuhan Wirausaha (Persentase)	12,98	24,7	34,7		36,82		40,21		42,99		44,95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					1.404.044.420,000		1.485.848.246,000		1.567.652.072,000		1.649.455.898,000		1.731.259.725,000	
Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM menjalin kemitraan den ekspor (%)	0,28	0,82	1,2	1.404.044.420,000	1,5	1.485.848.246,000	1,7	1.567.652.072,000	1,9	1.649.455.898,000	2	1.731.259.725,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					1.305.052.685,000		1.349.460.476,000		1.393.868.268,000		1.438.276.060,000		1.482.683.851,000	
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					686.869.834,000		710.242.356,000		733.614.878,000		756.987.400,000		780.359.921,000	
Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	98,79	100	100	686.869.834,000	100	710.242.356,000	100	733.614.878,000	100	756.987.400,000	100	780.359.921,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					274.747.934,000		284.096.942,000		293.445.951,000		302.794.960,000		312.143.969,000	
Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	85,43	86,43	88	274.747.934,000	90	284.096.942,000	92,5	293.445.951,000	93,5	302.794.960,000	95	312.143.969,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					343.434.917,000		355.121.178,000		366.807.439,000		378.493.700,000		390.179.961,000	
Terkendalnya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi	98,65	100	100	343.434.917,000	100	355.121.178,000	100	366.807.439,000	100	378.493.700,000	100	390.179.961,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase)													
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					2.026.266.011,000		2.095.214.949,000		2.164.163.890,000		2.233.112.829,000		2.302.061.768,000	
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					274.747.934,000		284.096.942,000		293.445.951,000		302.794.960,000		312.143.969,000	
Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda (Persentase)	29,87	30,87	35,77	274.747.934,000	36,75	284.096.942,000	37,55	293.445.951,000	38,9	302.794.960,000	39,55	312.143.969,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					1.648.487.602,000		1.704.581.654,000		1.760.675.707,000		1.816.769.759,000		1.872.863.811,000	
Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas (Persentase)	1,5	3,5	5,2	1.648.487.602,000	7,5	1.704.581.654,000	8,5	1.760.675.707,000	10	1.816.769.759,000	12,5	1.872.863.811,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					103.030.475,000		106.536.353,000		110.042.232,000		113.548.110,000		117.053.988,000	
Meningkatnya kualitas kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (Persentase)	12,45	20,45	35,5	103.030.475,000	40,7	106.536.353,000	41,5	110.042.232,000	42,55	113.548.110,000	45,5	117.053.988,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					412.121.900,000		426.145.414,000		440.168.927,000		454.192.440,000		468.215.953,000	
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					412.121.900,000		426.145.414,000		440.168.927,000		454.192.440,000		468.215.953,000	
Tercapainya kolaborasi, integrasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan sistem statistik nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	1,79	2,19	2,9	412.121.900,000	3	426.145.414,000	3,2	440.168.927,000	3,5	454.192.440,000	3,7	468.215.953,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Statistik
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					68.686.983,000		71.024.236,000		73.361.488,000		75.698.740,000		78.035.992,000	
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					68.686.983,000		71.024.236,000		73.361.488,000		75.698.740,000		78.035.992,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (Angka)	0,56	96	1,2	68.686.983,000	2,5	71.024.236,000	3,5	73.361.488,000	4,5	75.698.740,000	5,5	78.035.992,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Persandian
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					2.048.493.280,000		2.220.281.317,000		2.392.069.350,000		2.563.857.387,000		2.735.645.422,000	
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					1.060.609.502,000		1.130.727.068,000		1.200.844.633,000		1.270.962.199,000		1.341.079.764,000	
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase)	62,55	63,55	65,5	1.060.609.502,000	69,5	1.130.727.068,000	72,5	1.200.844.633,000	75,5	1.270.962.199,000	80,5	1.341.079.764,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					373.739.668,000		420.484.712,000		467.229.755,000		513.974.799,000		560.719.843,000	
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan (%)	63,67	64,76	65,5	373.739.668,000	70,2	420.484.712,000	73,5	467.229.755,000	77,23	513.974.799,000	82,85	560.719.843,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					408.083.160,000		455.996.830,000		503.910.499,000		551.824.169,000		599.737.839,000	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal (Persentase)	58,39	59,39	60,6	408.083.160,000	62,73	455.996.830,000	65,9	503.910.499,000	67,5	551.824.169,000	68,95	599.737.839,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					206.060.950,000		213.072.707,000		220.084.463,000		227.096.220,000		234.107.976,000	
Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan (Persentase)	45,67	48,67	60	206.060.950,000	62	213.072.707,000	64	220.084.463,000	65	227.096.220,000	67	234.107.976,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (Persentase)	31,87	33,87	35,6		36,7		39,48		40,21		45		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					346.465.392,000		361.657.532,000		376.849.671,000		392.041.810,000		407.233.949,000	
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					277.778.409,000		290.633.296,000		303.488.183,000		316.343.070,000		329.197.957,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Nilai)	10,25	11,25	12,5	277.778.409,000	13,5	290.633.296,000	14,5	303.488.183,000	15,5	316.343.070,000	16,5	329.197.957,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					68.686.983,000		71.024.236,000		73.361.488,000		75.698.740,000		78.035.992,000	
Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki (Persentase)	1,9	2,1	2,5	68.686.983,000	3,5	71.024.236,000	3,5	73.361.488,000	4,5	75.698.740,000	5	78.035.992,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					309.091.426,000		319.609.060,000		330.126.695,000		340.644.330,000		351.161.965,000	
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					274.747.934,000		284.096.942,000		293.445.951,000		302.794.960,000		312.143.969,000	
Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Tingkat Ketersediaan Arsip (Persentase)	68,75	70,83	75,5	274.747.934,000	78,5	284.096.942,000	79,5	293.445.951,000	80,22	302.794.960,000	82,5	312.143.969,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
2.24.04 - PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP					34.343.492,000		35.512.118,000		36.680.744,000		37.849.370,000		39.017.996,000	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup (Persentase)	0,96	1,2	1,5	34.343.492,000	1,6	35.512.118,000	1,7	36.680.744,000	1,8	37.849.370,000	1,9	39.017.996,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					10.303.047.512,000		10.653.635.340,000		11.004.223.167,000		11.354.810.994,000		11.705.398.820,000	
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					9.135.368.794,000		9.446.223.334,000		9.757.077.874,000		10.067.932.414,000		10.378.786.954,000	
Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	60.001,26	63.500	65.700	9.135.368.794,000	67.500	9.446.223.334,000	69.500	9.757.077.874,000	70.000	10.067.932.414,000	72.000	10.378.786.954,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					755.556.818,000		781.266.592,000		806.976.366,000		832.686.140,000		858.395.913,000	
Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	20.896	30.000	35.500	755.556.818,000	45.500	781.266.592,000	55.000	806.976.366,000	65.000	832.686.140,000	70.000	858.395.913,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					412.121.900,000		426.145.414,000		440.168.927,000		454.192.440,000		468.215.953,000	
Meningkatnya konsumsi ikan oleh masvarakat	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	71,29	75,29	78,9	412.121.900,000	79,12	426.145.414,000	79,33	440.168.927,000	79,43	454.192.440,000	79,53	468.215.953,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Kelautan Dan Perikanan
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					4.121.219.005,000		4.261.454.137,000		4.401.689.267,000		4.541.924.398,000		4.682.159.527,000	
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					2.232.326.961,000		2.308.287.657,000		2.384.248.353,000		2.460.209.049,000		2.536.169.744,000	
Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persentase)	13,79	18,79	20,5	2.232.326.961,000	21,22	2.308.287.657,000	24,57	2.384.248.353,000	26,87	2.460.209.049,000	30,5	2.536.169.744,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					892.930.784,000		923.315.063,000		953.699.341,000		984.083.619,000		1.014.467.898,000	
Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase)	30,67	33,67	35,6	892.930.784,000	50,5	923.315.063,000	75,5	953.699.341,000	80,75	984.083.619,000	90,42	1.014.467.898,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					240.404.442,000		248.584.825,000		256.765.207,000		264.945.590,000		273.125.972,000	
Meningkatnya kualitas ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (Persentase)	0,95	1,2	1,2	240.404.442,000	1,7	248.584.825,000	1,9	256.765.207,000	2,1	264.945.590,000	2,5	273.125.972,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					755.556.818,000		781.266.592,000		806.976.366,000		832.686.140,000		858.395.913,000	
Meningkatnya Kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase)	45,67	50,67	57,84	755.556.818,000	59,65	781.266.592,000	62,9	806.976.366,000	63,21	832.686.140,000	64,21	858.395.913,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					6.010.111.049,000		6.214.620.615,000		6.419.130.180,000		6.623.639.747,000		6.828.149.312,000	
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					4.464.653.922,000		4.616.575.314,000		4.768.496.705,000		4.920.418.097,000		5.072.339.489,000	
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Tingkat Kemiskinan ((%))	2	3	4	4.464.653.922,000	5	4.616.575.314,000	6	4.768.496.705,000	7	4.920.418.097,000	8	5.072.339.489,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Peningkatan produksi hortikultura (Ton)	6.847,82	6.970	7.100		7.500		7.900		8.000		8.500		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Peningkatan produksi komoditas peternakan (Ton)	452,1	470	500		550		570		600		650		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					343.434.917,000		355.121.178,000		366.807.439,000		378.493.700,000		390.179.961,000	
Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan luas lahan pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B (KmA²)	7,45	10	12	343.434.917,000	15	355.121.178,000	19	366.807.439,000	25	378.493.700,000	35	390.179.961,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					686.869.834,000		710.242.356,000		733.614.878,000		756.987.400,000		780.359.921,000	
Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase unit usaha pangan asal hewan yang memiliki sertifikat pra NKF atau NKV (non control veteriner) (%)	1,78	1,89	2	686.869.834,000	3,5	710.242.356,000	4,5	733.614.878,000	6,5	756.987.400,000	7,5	780.359.921,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Tingkat pengendalian penyakit hewan menular strategis (PHMS) (%)	12,55	13,95	15,5		22,67		25,87		27,13		30,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					515.152.376,000		532.681.767,000		550.211.158,000		567.740.550,000		585.269.941,000	
Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi (Persentase)	5,55	9,95	15,21	515.152.376,000	15,88	532.681.767,000	16,74	550.211.158,000	17,2	567.740.550,000	18,9	585.269.941,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					1.167.678.718,000		1.207.412.006,000		1.247.145.293,000		1.286.878.580,000		1.326.611.865,000	
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					68.686.983,000		71.024.236,000		73.361.488,000		75.698.740,000		78.035.992,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (Persentase)	97,88	100	100	68.686.983,000	100	71.024.236,000	100	73.361.488,000	100	75.698.740,000	100	78.035.992,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					206.060.950,000		213.072.707,000		220.084.463,000		227.096.220,000		234.107.976,000	
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase ketersediaan sarana perdagangan dan arus distribusi barang (%)	55,12	61,2	69,79	206.060.950,000	70,72	213.072.707,000	73,45	220.084.463,000	80,99	227.096.220,000	85,12	234.107.976,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					755.556.818,000		781.266.592,000		806.976.366,000		832.686.140,000		858.395.913,000	
Terjaganya stabilitas harga kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting (%)	90,55	93,45	95,5	755.556.818,000	96,7	781.266.592,000	97,8	806.976.366,000	98,5	832.686.140,000	99	858.395.913,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					137.373.967,000		142.048.471,000		146.722.976,000		151.397.480,000		156.071.984,000	
Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase penanganan pengaduan konsumen (%)	100	100	100	137.373.967,000	100	142.048.471,000	100	146.722.976,000	100	151.397.480,000	100	156.071.984,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					618.182.851,000		639.218.120,000		660.253.390,000		681.288.660,000		702.323.929,000	
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					618.182.851,000		639.218.120,000		660.253.390,000		681.288.660,000		702.323.929,000	
Meningkatnya relasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (Persentase)	22,47	23,45	25,7	618.182.851,000	26,9	639.218.120,000	27,8	660.253.390,000	28,8	681.288.660,000	30,5	702.323.929,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					593.538.015,000		647.762.266,000		701.986.516,000		756.210.767,000		810.435.018,000	
3.32.02 - PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI					51.515.238,000		53.268.177,000		55.021.116,000		56.774.055,000		58.526.994,000	
Meningkatnya pelaksanaan transmigrasi	Persentase Program Transmigrasi	5,4	7,8	10,5	51.515.238,000	11,2	53.268.177,000	12,8	55.021.116,000	13,76	56.774.055,000	14,9	58.526.994,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Transmigrasi

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	yang Dilaksanakan (Persentase)													
3.32.03 - PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI					373.739.668,000		420.484.712,000		467.229.755,000		513.974.799,000		560.719.843,000	
Meningkatnya kualitas pembangunan kawasan transmigrasi	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang (Persentase)	55,76	60,98	65,33	373.739.668,000	69,7	420.484.712,000	73,8	467.229.755,000	75,76	513.974.799,000	78,9	560.719.843,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Transmigrasi
3.32.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI					168.283.109,000		174.009.377,000		179.735.645,000		185.461.913,000		191.188.181,000	
Meningkatnya pemebrdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan kawasan transmigrasi	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan (Persentase)	56,77	75,67	77,3	168.283.109,000	79,65	174.009.377,000	82,4	179.735.645,000	84,76	185.461.913,000	85,35	191.188.181,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Transmigrasi
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					19.606.095.024,000		20.307.270.679,000		21.008.446.333,000		21.709.621.986,000		22.410.797.640,000	
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					13.424.266.517,000		13.915.089.475,000		14.405.912.433,000		14.896.735.390,000		15.387.558.348,000	
Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintah, otonomi daerah, dan kesejahteraan rakyat	Efektivitas Kerja Sama Daerah (Persentase)	81,22	83,54	85,13	13.424.266.517,000	86,77	13.915.089.475,000	88,89	14.405.912.433,000	90,45	14.896.735.390,000	93,12	15.387.558.348,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Persentase)	85,78	86,78	88,76		88,97		89,12		89,45		89,97		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Efektivitas Kerja Sama Daerah (Persentase)	81,22	83,54	85,13		86,77		88,89		90,45		93,12		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					6.181.828.507,000		6.392.181.204,000		6.602.533.900,000		6.812.886.596,000		7.023.239.292,000	
Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (Persentase)	75,64	75,94	76,74	6.181.828.507,000	76,99	6.392.181.204,000	78,73	6.602.533.900,000	78,99	6.812.886.596,000	79,69	7.023.239.292,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.02 - SEKRETARIAT DPRD					10.470.726.230,000		10.861.047.344,000		11.251.368.458,000		11.641.689.572,000		12.032.010.686,000	
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN					10.470.726.230,000		10.861.047.344,000		11.251.368.458,000		11.641.689.572,000		12.032.010.686,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
TUGAS DAN FUNGSI DPRD														
Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	Ketetapan Penetapan Perda APBD Tahun N (Predikat)	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	5.235.363.115,000	Tepat Waktu	5.430.523.672,000	Tepat Waktu	5.625.684.229,000	Tepat Waktu	5.820.844.786,000	Tepat Waktu	6.016.005.343,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	100	100	100	5.235.363.115,000	100	5.430.523.672,000	100	5.625.684.229,000	100	5.820.844.786,000	100	6.016.005.343,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
5.01 - PERENCANAAN					4.121.219.004,980		4.261.454.136,000		4.401.689.266,000		4.541.924.396,990		4.682.159.527,980	
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					2.747.479.337,000		2.840.969.424,000		2.934.459.511,000		3.027.949.598,000		3.121.439.685,000	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Persentase)	85,67	100	100	2.747.479.337,000	100	2.840.969.424,000	100	2.934.459.511,000	100	3.027.949.598,000	100	3.121.439.685,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase)	95,33	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					1.373.739.667,980		1.420.484.712,000		1.467.229.755,000		1.513.974.798,990		1.560.719.842,980	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase)	88,75	100	100	457.913.222,660	100	473.494.904,000	100	489.076.585,000	100	504.658.266,330	100	520.239.947,660	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada bidang infrastruktur dan kewilayahan (%)	89,45	100	100	457.913.222,660	100	473.494.904,000	100	489.076.585,000	100	504.658.266,330	100	520.239.947,660	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada	90,45	100	100	457.913.222,660	100	473.494.904,000	100	489.076.585,000	100	504.658.266,330	100	520.239.947,660	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
bidang perekonomian dan SDA	Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase)													
5.02 - KEUANGAN					167.089.196.794,990		168.018.530.011,980		169.117.863.231,980		170.217.196.449,000		171.316.529.665,990	
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					165.554.647.107,000		166.397.735.719,000		167.410.824.332,000		168.423.912.944,000		169.437.001.556,000	
Meningkatnya tata kelola anggaran	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (Persentase)	38,12	39,12	40,12	165.554.647.107,000	40,22	166.397.735.719,000	40,15	167.410.824.332,000	40,17	168.423.912.944,000	40,18	169.437.001.556,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (Persentase)	35,63	35,83	35,92		36,24		36,79		37,12		37,89		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					192.323.554,000		198.867.860,000		205.412.166,000		211.956.472,000		218.500.778,000	
Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase)	3,47	4,47	5,6	192.323.554,000	6,7	198.867.860,000	6,9	205.412.166,000	7,3	211.956.472,000	8,9	218.500.778,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					1.342.226.133,990		1.421.926.432,980		1.501.626.733,980		1.581.327.033,000		1.661.027.331,990	
Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)	2,64	2,85	2,99	447.408.711,330	3,12	473.975.477,660	3,27	500.542.244,660	3,39	527.109.011,000	4,2	553.675.777,330	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan (Persentase)	35,22	36,22	37,88	447.408.711,330	39,4	473.975.477,660	42,79	500.542.244,660	52,99	527.109.011,000	58,17	553.675.777,330	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Meningkatnya Penerapan System Informasi Keuangan Berbasis Digital	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital (Persentase)	56,83	70,83	77,13	447.408.711,330	79,83	473.975.477,660	80,45	500.542.244,660	81,79	527.109.011,000	82,46	553.675.777,330	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.03 - KEPEGAWAIAN					1.256.971.797,000		1.299.743.511,000		1.342.515.226,000		1.385.286.941,000		1.428.058.656,000	
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					1.256.971.797,000		1.299.743.511,000		1.342.515.226,000		1.385.286.941,000		1.428.058.656,000	
Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi (Persentase)	65,76	67,76	69,12	314.242.949,250	70,34	324.935.877,750	70,67	335.628.806,500	71,78	346.321.735,250	72,98	357.014.664,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	6,57	8,57	10,77	314.242.949,250	10,98	324.935.877,750	11,65	335.628.806,500	12,78	346.321.735,250	13,56	357.014.664,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya (Persentase)	55,76	55,96	56,12	314.242.949,250	57,19	324.935.877,750	65,7	335.628.806,500	70,95	346.321.735,250	80,56	357.014.664,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (Persentase)	90,12	91,12	92,78	314.242.949,250	93,49	324.935.877,750	94,77	335.628.806,500	95,39	346.321.735,250	96,45	357.014.664,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					837.981.198,000		866.495.674,000		895.010.151,000		923.524.627,000		952.039.104,000	
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					837.981.198,000		866.495.674,000		895.010.151,000		923.524.627,000		952.039.104,000	
Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, manajerial dan fungsional (%)	7,55	8,55	9,45	209.495.299,500	10,37	216.623.918,500	12,29	223.752.537,750	15,67	230.881.156,750	16,45	238.009.776,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan
Meningkatnya kualitas analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan dan evaluasi	Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan (Persentase)	100	100	100	209.495.299,500	100	216.623.918,500	100	223.752.537,750	100	230.881.156,750	100	238.009.776,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan
Meningkatnya layanan penjaminan mutu, pengelolaan tugas belajar serta sertifikasi kompetensi	Persentase ASN yang memiliki sertifikat kompetensi (%)	3,57	4,57	5,7	209.495.299,500	5,9	216.623.918,500	6,12	223.752.537,750	6,88	230.881.156,750	7,3	238.009.776,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan
Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis (%)	20,19	22,09	23,77	209.495.299,500	24,96	216.623.918,500	25,37	223.752.537,750	26,69	230.881.156,750	27,41	238.009.776,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					1.090.914.254,000		1.196.090.602,000		1.301.266.950,000		1.406.443.298,000		1.511.619.646,000	
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					1.090.914.254,000		1.196.090.602,000		1.301.266.950,000		1.406.443.298,000		1.511.619.646,000	
Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam	45,56	45,96	46,78	272.728.563,500	49,88	299.022.650,500	53,67	325.316.737,500	59,18	351.610.824,500	62,44	377.904.911,500	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Implementasi Pembangunan (Persentase)													
Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (Persentase)	53,25	55,25	57,21	272.728.563,500	59,78	299.022.650,500	60,49	325.316.737,500	62,18	351.610.824,500	63,92	377.904.911,500	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (Persentase)	10,75	11,75	12,98	272.728.563,500	13,44	299.022.650,500	14,71	325.316.737,500	15,63	351.610.824,500	16,93	377.904.911,500	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah	Persentase fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah (%)	20,75	21,75	22,88	272.728.563,500	23,48	299.022.650,500	24,59	325.316.737,500	25,58	351.610.824,500	26,77	377.904.911,500	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH					9.037.915.135,000		9.174.595.485,000		9.291.446.350,000		9.432.353.251,000		9.554.944.384,000	
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					7.742.862.450,000		7.859.957.724,000		7.960.064.902,000		8.080.781.100,000		8.185.806.016,000	
Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	TindakanJut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (Persentase)	85,65	88,56	89,77	3.871.431.225,000	89,91	3.929.978.862,000	90,18	3.980.032.451,000	91,35	4.040.390.550,000	92,55	4.092.903.008,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	TindakanJut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (Persentase)	67	70	71	3.871.431.225,000	72	3.929.978.862,000	72,5	3.980.032.451,000	73	4.040.390.550,000	73,5	4.092.903.008,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal (%)	50	53	56		59		61		64		67		Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase pengawasan penyelenggaraan pemerintah (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					1.295.052.685,000		1.314.637.761,000		1.331.381.448,000		1.351.572.151,000		1.369.138.368,000	
Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Level)	Berkembang	Berkembang	Berkembang	1.295.052.685,000	Berkembang	1.314.637.761,000	Terdefinisi	1.331.381.448,000	Terdefinisi	1.351.572.151,000	Terdefinisi	1.369.138.368,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
7.01 - KECAMATAN					3.027.481.501,000		3.109.170.388,000		3.219.699.278,000		3.301.168.163,000		3.359.007.054,000	
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					933.035.870,000		946.451.032,000		959.866.195,000		973.281.356,000		986.696.518,000	
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilimpahkan	Indeks Kepuasan Masyarakat Urusan Kewilayahan (survei) (%)	85,12	85,47	85,99	933.035.870,000	87,39	946.451.032,000	88,9	959.866.195,000	89,5	973.281.356,000	89,65	986.696.518,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					706.470.504,000		725.787.226,000		745.103.951,000		764.420.676,000		783.737.401,000	
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa	Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat desa aktif (%)	43,22	44,71	45,67	706.470.504,000	49,45	725.787.226,000	65,77	745.103.951,000	69,65	764.420.676,000	79,45	783.737.401,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					250.700.000,000		260.750.000,000		279.640.000,000		289.470.000,000		295.670.000,000	
Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum yang dikoordinasikan	Persentase ketenteraman dan ketertiban umum yang dikoordinasikan (%)	100	100	100	250.700.000,000	100	260.750.000,000	100	279.640.000,000	100	289.470.000,000	100	295.670.000,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					313.839.076,000		327.921.019,000		342.002.964,000		356.084.906,000		370.166.852,000	
Meningkatnya pembinaan wawasan kebangsaan dan penanganan konflik di tingkat desa	Persentase konflik sosial yang diselesaikan (%)	100	100	100	313.839.076,000	100	327.921.019,000	100	342.002.964,000	100	356.084.906,000	100	370.166.852,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					823.436.051,000		848.261.111,000		893.086.168,000		917.911.225,000		922.736.283,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase desa tertib administrasi pemerintahan desa (%)	87,89	88,12	88,95	823.436.051,000	89,85	848.261.111,000	90,56	893.086.168,000	92,55	917.911.225,000	100	922.736.283,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					2.040.736.954,000		2.111.348.265,000		2.192.757.460,000		2.270.604.350,000		2.344.588.721,000	
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					755.556.818,000		781.266.592,000		806.976.366,000		832.686.140,000		858.395.913,000	
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase)	75,44	76,99	78,92	755.556.818,000	79,17	781.266.592,000	80,34	806.976.366,000	81,73	832.686.140,000	82,99	858.395.913,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					377.778.409,000		390.633.296,000		403.488.183,000		416.343.070,000		429.197.957,000	
Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase)	31,75	33,35	34,12	377.778.409,000	36,88	390.633.296,000	38,92	403.488.183,000	40,35	416.343.070,000	49,83	429.197.957,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					566.667.613,000		585.949.944,000		605.232.274,000		624.514.605,000		643.796.935,000	
Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Persentase)	75,25	76,25	77,12	566.667.613,000	79,45	585.949.944,000	82,93	605.232.274,000	85,38	624.514.605,000	87,39	643.796.935,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					151.844.910,000		158.181.785,000		175.316.546,000		188.889.000,000		198.598.938,000	
Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat	Persentase kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi penecnanahan	100	100	100	151.844.910,000	100	158.181.785,000	100	175.316.546,000	100	188.889.000,000	100	198.598.938,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah yang dilaksanakan													
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					188.889.204,000		195.316.648,000		201.744.091,000		208.171.535,000		214.598.978,000	
Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase konflik sosial yang diselesaikan (%)	100	100	100	188.889.204,000	100	195.316.648,000	100	201.744.091,000	100	208.171.535,000	100	214.598.978,000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
x.x.x - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					508.950.060.000		510.215.658.000		511.569.945.000		513.689.990.000		514.750.000.000	
Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah	Nilai SAKIP (Predikat)	CC	CC	B	508.950.060.000	B	510.215.658.000	B	511.569.945.000	BB	513.689.990.000	BB	514.750.000.000	Semua OPD
	Persentase kebijakan layanan administrasi pimpinan daerah (%)	95,66	96,22	96,77		97,56		98,65		99,6		100		Semua OPD
	Persentase kebijakan layanan umum daerah (%)	98,55	98,59	98,65		98,75		98,95		99,12		99,5		Semua OPD
TOTAL KESELURUHAN					1.033.081.344.959,96		1.048.627.513.877,96		1.061.908.780.184,98		1.077.947.238.227,98		1.091.879.852.969,96	Semua OPD

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan tolok ukur utama untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025–2029. Pengukuran kinerja ini dilakukan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mencerminkan hasil akhir atau ultimate outcome dari pelaksanaan pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahun. IKU dirancang agar relevan dengan misi pembangunan daerah, dapat diukur secara kuantitatif dan kualitatif, serta mencakup berbagai aspek strategis seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi berbasis potensi lokal, tata kelola pemerintahan yang baik, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, serta pelestarian lingkungan hidup dan ketahanan bencana.

Selain itu, kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah juga dinilai melalui Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD) yang mengacu pada standar nasional evaluasi kinerja pemerintah daerah. IKD berfungsi untuk mengukur keberhasilan tata kelola pemerintahan, efektivitas pelayanan publik, pemenuhan hak-hak masyarakat, serta optimalisasi sumber daya yang dimiliki daerah. Dengan pemantauan yang konsisten dan berbasis data, IKU dan IKD akan menjadi instrumen evaluasi yang penting untuk memastikan seluruh perangkat daerah bergerak secara terarah dan sinergis dalam mencapai target RPJMD. Hasil pengukuran ini juga akan menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan penyesuaian, perbaikan program, dan penyusunan perencanaan pembangunan pada periode berikutnya.

A. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025-2029 merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran pembangunan selama periode RPJMD, namun guna menjaga konsistensi perencanaan pembangunan daerah untuk periode selanjutnya sebagai satu kesatuan dalam perencanaan pembangunan jangka panjang, maka penentuan target IKU dilakukan sampai dengan tahun 2030.

Tabel 4.3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	73,16	74,31	74,86	75,91	76,56	75,96
2.	Prevalensi stunting	Persen	24,7	23,78	22,86	21,94	21,02	18,8

NO	INDIKATOR	SATUAN	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
	(pendek dan sangat pendek) pada balita							
3.	Indeks Ketahanan Sosial	Angka	0,763	0,765	0,766	0,768	0,769	0,77
4.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,21	5,92	6,80	7,09	7,75	7,88
5.	Tingkat Kemiskinan	Persen	16,51	15,12	14,19	12,97	12,08	12
6.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,29	4,23	4,07	3,95	3,85	3,77
7.	Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Persen	5,8	6,12	6,73	7,57	7,87	8
8.	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Persen	5,5	5,72	5,82	5,92	6,31	6,55
9.	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	62,51	62,73	63,48	65,77	67,34	67,75
10.	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	61,2	62,18	64,89	68,75	71,13	73,48
11.	Indeks Reformasi Hukum	Angka	70	70,55	70,65	70,85	71,05	71,5
12.	Persentase Desa Mandiri	Persen	15,22	16,3	17,39	18,48	19,57	21,74
13.	Indeks Infrastruktur	Angka	64,33	65,17	66,21	67,88	68,75	69,12
14.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	82,87	83,04	83,21	83,39	83,56	83,62
15.	Indeks Risiko Bencana	Angka	161,63	158,19	156,75	154,31	152,87	150,22

B. Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Indikator Kinerja Daerah (IKD) merupakan suatu alat untuk mengukur keberhasilan kinerja pemerintah daerah dalam mengelola dan menyelenggarakan pembangunan daerah yang efektif. IKD dikelompokkan dalam beberapa aspek baik dari aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, aspek pelayanan umum, serta terdapat Indikator Kinerja Kunci yang dijabarkan berdasarkan setiap urusan pemerintahan daerah.

Tabel 4.4. Indikator Kinerja Daerah (IKD) Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA PER TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI							
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Angka	82,87	83,04	83,21	83,39	83,56	83,62
2	Indeks Risiko Bencana	Angka	161,63	158,19	156,75	154,31	152,87	150,22
3	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	Persen	40,39	43,37	46,35	49,33	52,31	52,68
4	Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	Persen RT	10	12,77	18,75	21,52	23,17	23,85
5	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman	Persen	10	12	13	14	15	16
6	Persentase Penurunan Emisi GRK Kumulatif	Persen	97,39	97,52	97,65	97,78	97,91	98,5

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA PER TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
7	Persentase Penurunan Emisi GRK Tahunan	Persen	85,84	87,12	89,49	92,73	95,02	97,99
8	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Angka	0,542	0,546	0,558	0,561	0,568	0,579
9	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment)	Persen	28,97	27,78	26,59	25,4	24,21	24,53
10	Kapasitas Tampung Air	M3/ Kapita	0,1	0,23	0,36	0,49	0,62	0,68
11	Intensitas energi primer	SBM/ Rp milyar	233324	223596	213869	204143	194416	194417
12	Konsumsi Listrik Per Kapita	kWh	350	380	420	470	500	533
13	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Persen	10	13	19	22	24	25
II	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	80,84	80,99	81,47	81,89	82,05	82,36
2	Tingkat Kemiskinan	Persen	16,51	15,12	14,19	12,97	12,08	12
3	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka	60,55	61,22	61,81	62,4	62,99	63,11
4	Indeks Demokrasi Indonesia	Angka	76,69	77,15	78,96	79,16	80,92	81,88

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA PER TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,29	4,23	4,07	3,95	3,85	3,77
6	Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0,525	0,512	0,506	0,495	0,487	0,479
7	Usia Harapan Hidup	Tahun	71,16	71,57	71,99	72,4	72,54	72,81
8	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Tahun	10,59	10,79	10,99	11,03	11,07	11,12
9	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,77	13,83	13,9	13,96	14,03	14,19
10	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca	Persen	9,09 - 9,09	10 - 12	13,26 - 14,5	15,16 - 16,28	17,22 - 18	18,18 - 27,27
11	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi	Persen	9,09	10,87	12,77	14,21	16,74	18,18
12	Persentase satuan pendidikan	Persen	18,97	21,6	22,53	25,87	26,13	27,41

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA PER TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
	yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca							
13	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi	Persen	15,55	18,37	20,98	22,59	21,32	22,05
14	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Angka	65,49	65,75	65,94	66,39	66,97	67,86
15	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	Persen	14,94	15	15,07	15,13	15,19	15,57
16	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian	Persen	73,81	74,51	75,21	75,91	76,61	77,28

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA PER TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
	menengah tinggi							
17	Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (treatment coverage)	Persen	85	85	85	85	85	85
18	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkolusis (treatment success rate)	Persen	90	90	90	90	90	90
19	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan	Persen	32,29	40,23	42,03	44,83	46,13	47,09
20	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitas dari Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan dan/atau dari Dinas yang menangani bidang ketenagakerjaan	Orang	0	25	65	85	115	150
21	Cakupan kepesertaan jaminan	Persen	98,6	98,09	98,19	98,28	98,38	99

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA PER TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
	kesehatan nasional							
22	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	Persen	35	36,75	38,5	40,25	41,77	42
23	Jumlah Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan di tingkat kabupaten	Unit	0	0	0	0	1	1
24	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Persen	24,7	23,78	22,86	21,94	21,02	18,8
25	Angka kematian ibu	per 100.000 kelahiran hidup	187	177	143	137	128	121
26	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Persen	56,2	56,71	57,22	57,73	58,24	59,76
27	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,26	3,47	3,79	3,89	4,11	4,12
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH							
1	Indeks Ekonomi Hijau Daerah	Angka	60,7	62,19	63,89	65,62	66,83	67,4
2	Indeks Akses Keuangan Daerah	Angka	3,14	3,19	3,23	3,27	3,32	3,34
3	Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah	Persen	8,53	8,36	8,19	8,03	7,97	7,86

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA PER TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Tingkat Kabupaten							
4	Persentase Desa Mandiri	Persen	15,22	16,3	17,39	18,48	19,57	21,74
5	Indeks Reformasi Hukum	Angka	70	70,55	70,65	70,85	71,05	71,5
6	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Persen	67,45	69,07	70,69	72,31	73,93	74,59
7	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Persen	5,5	5,72	5,82	5,92	6,31	6,55
8	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Persen	1,7	1,72	1,74	1,75	1,76	1,77
9	Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Persen	5,8	6,12	6,73	7,57	7,87	8
10	Tingkat Inflasi	Persen	1,7 - 2	1,7 - 2	1,7 - 2	1,7 - 2	1,7 - 2	1,7 - 2
11	Rasio Kewirausahaan Daerah	Persen	2,03	2,28	2,33	2,54	2,68	2,87
12	Rasio Pajak Terhadap PDB	Persen	1,51	1,59	1,62	0,65	0,67	1,68
13	Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB	Persen	0,75	0,89	1,04	1,18	1,32	0,8
14	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	Persen	27,3	29,07	30,84	32,61	33,37	34,38
15	Indeks Pembangunan Teknologi	Angka	5,8	5,98	6,06	6,12	6,2	6,8

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA PER TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Informasi dan Komunikasi							
16	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Persen PDRB	29,53	29,89	30,25	31,61	32,97	33,28
17	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Ribu Orang	0,025	0,035	0,045	0,055	0,065	0,075
18	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Ekraf Nasional	Persen	0,14	0,15	0,16	0,16	0,17	0,18
19	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah	Persen	1,79	1,79	1,8	1,81	1,82	1,83
20	Total Kredit/PDRB	Persen	26,17	28,75	29,48	30,22	31,37	32,14
21	Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Provinsi	Rupiah	822.214 , 73	835.7 20,55	912.7 32,86	1.139. 731,12	1.561. 420,7 0	1.613. 285,1 6
22	Aset Dana Pensiun/ PDRB	Persen	0,23	0,25	0,29	0,32	0,33	0,35
23	Ekspor Barang dan Jasa	Persen PDRB	3,08	3,14	3,27	3,39	3,41	3,43
24	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB	Persen	20,47	20,59	21,34	21,76	22,57	23,71
25	Return on Asset (ROA) BUMD	Persen	2,49	2,63	2,78	2,93	3,08	3,17
III ASPEK PELAYANAN UMUM								
1	Indeks Pelayanan Publik	Angka	3,5	3,7	3,8	3,9	4,2	4,4
2	Persentase Penegakan Hukum	Persen	70	71,12	72,47	73,63	74,58	75,7

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA PER TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Peraturan Daerah							
3	Indeks Integritas Nasional	Angka	67,43	68,12	68,81	69,5	69,88	70,19
4	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Angka	2,53	2,65	2,77	2,89	2,91	2,98
5	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	Persen	70	71	72	73	74	75
6	Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	Persen	60	63	66	68	69	70
	INDIKATOR KINERJA KUNCI							
A	PENDIDIKAN							
1	Angka Partisipasi Murni Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persen	97,88	98,12	98,87	99,34	99,57	99,78
2	Angka Partisipasi Kasar SD/MI	Persen	107,62	107,33	106,25	105,46	104,72	104,12
3	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs	Persen	90,12	91,22	91,58	92,03	93,67	94,55
4	Angka Partisipasi Murni SD/MI	Persen	96,77	96,98	97,12	98,31	98,79	99,22
5	Angka Partisipasi	Persen	77,56	77,98	78,47	78,96	79,57	80,45

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA PER TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Murni SMP/MTs							
6	Angka Putus Sekolah SD/MI	Persen	0,12	0,09	0,05	0,01	0	0
7	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	Persen	0,15	0,12	0,11	0,09	0,05	0
8	Angka Kelulusan SD/MI	Persen	99,88	99,91	99,95	99,99	100	100
9	Angka Kelulusan SMP/MTs	Persen	99,85	99,88	99,89	99,91	99,95	100
10	Rasio Guru/ Murid SD/MI	Rasio	18:1	18:1	18:1	17:1	17:1	16:1
11	Rasio Guru/ Murid SMP/MTs	Rasio	17:1	17:1	17:1	16:1	16:1	15:1
12	Guru Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	Persen	97,22	98,31	98,46	98,79	99,12	99,45
B	KESEHATAN							
1	Angka Kematian Bayi Dibawah 1 tahun	Per 1000	0,05	0,03	0,01	0	0	0
2	Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup	Per 1000	1,55	1,35	1,12	0,95	0,55	0,12
3	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 Kelahiran Hidup	125	120	115	95	85	65
4	Rasio Puskesmas, Pustu,	Rasio	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012	0,0012

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA PER TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Poliklinik per Satuan Penduduk							
5	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	Persen	99,44	99,65	99,95	100	100	100
6	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Persen	95,21	96,77	97,88	98,45	99,55	100
7	Cakupan desa Universal Child Immunization (UCI)	Persen	100	100	100	100	100	100
8	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	Persen	100	100	100	100	100	100
9	Cakupan penemuan dan penanganan-penderita penyakit TBC BTA	Persen	85,77	87,93	88,96	91,22	93,58	95,67
10	Cakupan penemuan dan penanganan-penderita penyakit DBD	Persen	79	80	81	82	83	83
11	Cakupan kunjungan bayi	Persen	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA PER TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
12	Kunjungan Ibu Hamil yang Memperoleh Pelayanan Antenatal K4	Persen	100	100	100	100	100	100
13	Cakupan Pelayanan Nifas	Persen	95,44	96,87	96,81	97,22	98,45	99,55
14	Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Puskesmas) Telah Memenuhi Standart Akreditasi	Jumlah puskesmas	67,78	69,22	72,45	75,44	84,31	85,67
15	Angka Kesakitan Malaria (Annual Parasite Incidence)	Per 1000	0,67	0,57	0,53	0,47	0,44	0,39
16	Prevelensi Stunting	Persen	24,7	23,78	22,86	21,94	21,02	18,8
C PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
1	Proporsi panjang jalan kondisi baik	Persen	47,22	49,12	51,46	53,77	55,18	56,89
2	Persentase drainase dalam kondisi baik	Persen	51,55	52,17	54,33	55,89	56,31	57,79
3	Persentase penduduk mendapat akses air minum yang aman	Persen	66,56	67,12	68,39	69,47	70,12	71,33
4	Persentase penduduk mendapat	Persen	78,33	79,67	80,12	82,76	83,81	85,17

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA PER TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
	pelayanan pengelolaan air limbah							
5	Ketaatan kepada RTRW	Persen	21,98	22,17	23,71	24,89	25,78	26,98
D	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN							
1	Luas Kawasan kumuh yang tertangani menjadi Non Kumuh	Persen	11,87	12,33	13,78	14,69	15,78	16,89
2	Rumah Layak Huni	Persen	78,55	79,21	80,22	81,99	82,21	83,22
E	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT							
1	Cakupan petugas Linmas	Persen	0,014	0,016	0,017	0,017	0,019	0,021
2	Persentase kejadian kebakaran yang memenuhi Response Time Rate (15 Menit)	Persen	100	100	100	100	100	100
3	Persentase penegakan Perda	Persen	100	100	100	100	100	100
4	Cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan kebakaran	Persen	100	100	100	100	100	100
5	Cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	100	100	100	100	100	100
6	Persentase cakupan	Persen	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA PER TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
	penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana							
7	Persentase penanganan pasca bencana	Persen	100	100	100	100	100	100
8	Persentase penanganan pasca bencana	Persen	100	100	100	100	100	100
F	SOSIAL							
1	Persentase PMKS yang memperoleh pelayanan/bantuan sosial	Persen	22,71	25,44	28,99	36,77	42,16	48,99
2	Persentase Anak Terlantar Yang Dibina	Persen	88,71	89,91	90,56	92,33	95,77	96,72
3	Persentase Penyandang Cacat dan Trauma Yang Dibina	Persen	85,71	86,95	87,67	88,51	89,91	90,72
4	Persentase Eks Penyandang Penyakit Sosial Yang Dibina	Persen	83,47	84,92	85,33	86,79	87,74	88,31
G	TENAGA KERJA							
1	Perusahaan Menerapkan Keselamatan dan Perlindungan Kerja (K3)	Persen	44,31	46,93	47,81	48,75	49,21	51,44
2	Besaran pekerja/buruh menjadi Peserta BPJS-	Persen	32,29	40,23	42,03	44,83	46,13	47,09

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA PER TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Ketenagakerjaan							
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	4,29	4,19	3,98	3,94	3,85	3,77
H	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	98,85	98,89	98,97	99,01	99,05	99,05
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Angka	56,6	56,99	57,38	57,77	58,17	58,17
3	Prelevensi Kekerasan Terhadap Anak Laki-Laki	Persen	0,17	0,14	0,13	0,11	0,09	0,05
4	Prelevensi Kekerasan Terhadap Anak Perempuan	Persen	0,18	0,17	0,15	0,13	0,11	0,09
5	Prelevensi Kekerasan Terhadap Perempuan	Persen	0,95	0,85	0,83	0,74	0,65	0,55
6	Nilai Kota Layak Anak	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
7	Partisipasi Perempuan di lembaga pemerintah	Persen	6,87	7,21	7,45	7,98	8,21	9,5
8	Angka Melek Huruf Perempuan Usia 15 tahun ke atas	Persen	94,31	95,12	96,22	96,31	96,47	96,77
9	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Persen	56,2	56,71	57,22	57,73	58,24	58,24
I	LINGKUNGAN HIDUP							

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA PER TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Persentase tanah ulayat yang ditetapkan	Persen	5,1	5,5	5,9	6,5	7	7,5
2	Persentase tanah kosong yang dikelola	Persen	7,65	10,17	15,2	20,33	25,19	27,69
J	LINGKUNGAN HIDUP							
1	Persentase kajian lingkungan hidup yang disusun	Persen	49	50	55	60	65	70
2	Indeks kualitas air	Angka	52,88	53,74	54,22	55,22	56,74	57,89
3	Indeks kualitas udara	Angka	84,57	85,77	87,65	89,36	90,71	91,77
4	Persentase RTH	Persen	19,89	20,15	22,78	28,99	29,31	30,15
5	Persentase limbah B3 yang terkelola	Persen	78,31	25,35	40,21	45,75	65,85	80,92
6	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH	Persen	100	100	100	100	100	100
7	Indeks kinerja pengelolaan sampah	Angka	29,73	30,76	32,11	33,69	34,72	35,65
K	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							
1	Penduduk yang memiliki KTP per Penduduk Wajib KTP	Persen	89,99	92,44	94,31	95,22	95,77	96,98

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA PER TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
2	Kepala Keluarga yang Memiliki Kartu Keluarga	Persen	89,99	92,44	94,31	95,22	95,77	96,98
3	Penduduk yang memiliki Akta Kelahiran	Persen	75,31	76,45	77,12	78,95	79,45	80,22
4	Penduduk yang memiliki KIA per Penduduk Wajib KIA	Persen	35,76	38,12	40,12	43,66	44,38	45,75
L PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA								
1	Cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan negeri/desa yang baik	Persen	85,65	87,16	88,79	89,91	92,56	93,11
2	Persentase PKK aktif	Persen	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Posyandu aktif	Persen	100	100	100	100	100	100
4	Persentase BUMDES aktif	Persen	45,76	49,29	55,77	57,81	59,45	65,33
5	Persentase Negeri/Desa ketaatan menyampaikan laporan DD ADD tepat waktu	Persen	100	100	100	100	100	100
6	Persentase Negeri/Desa yang memiliki batas desa defenitif	Persen	1,09	2,17	3,26	5,43	6,52	9,78
7	Persentase Dusun	Persen	8,59	9,38	10,16	10,16	10,94	11,72

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA PER TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
	menjadi Desa Persiapan							
M	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB							
1	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	0,016	0,015	0,015	0,015	0,014	0,014
2	Total Fertility Rate (TFR)/angka kelahiran	Persen	2,89	2,89	2,85	2,83	2,7	2,5
3	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Jumlah	4	4	3	3	2	2
4	Prevelensi peserta KB aktif	Persen	67,88	68,92	69,71	70,22	70,65	71,22
5	Angka prevalensi kontrasepsi modern/ Modern contraceptive (mCPR)	Persen	25,12	25,75	27,39	29,88	32,77	35,05
N	PERHUBUNGAN							
1	Persentase kawasan tertib lalulintas	Persen	35,21	37,22	38,99	39,42	40,22	41,77
2	Jumlah ijin trayek	Buah	125	130	135	140	145	150
3	Jumlah kendaraan yang laik uji	Unit	220	250	300	320	350	450
O	PANGAN							
1	Persentase jumlah cadangan pangan	Persen	4,5	5,5	6,2	7,5	8,9	10,75
2	Skor pola pangan harapan	Angka	76,56	77,12	78,95	79,33	79,45	79,79

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA PER TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
3	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan	Persen	54,21	55,71	56,12	57,98	59,77	60,88
4	Persentase daerah rawan pangan yang tertangani	Persen	65,33	67,88	69,78	73,67	75,12	79,81
P KOMUNIKASI DAN INFORMASI								
1	Persentase Pengembangan Aplikasi Sistem dan Jaringan Berbasis IT	Persen	35,2	38,34	41,77	43,96	45,92	47,88
2	Cakupan Layanan Telekomunikasi pada Desa/Negeri	Jumlah	70,11	72,55	74,83	76,89	79,8	82,38
3	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Angka	59,14	60,17	62,33	63,28	64,73	65,17
4	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Angka	2,53	2,65	2,77	2,89	2,91	2,98
Q KOPERASI DAN USAHA MIKRO								
1	Persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Persen	100	100	100	100	100	100
2	Persentase koperasi aktif	Persen	49,2	50	70	80	90	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA PER TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
3	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	Persen	55,25	100	100	100	100	100
4	Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas	Persen	35,67	55	65	70	75	85
5	Persentase usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke formal	Persen	4,87	5,57	6,21	7,44	8,95	10
6	Pertumbuhan wirausaha	Persen	33,25	34,7	36,82	40,21	42,99	44,95
7	Proporsi UKM menjalin kemitraan den ekspor	Persen	0,95	1,2	1,5	1,7	1,9	2
R	PENANAMAN MODAL							
1	Realisasi total terhadap target investasi	Persen	100	100	100	100	100	100
2	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	Persen	85	88	90	92,5	93,5	95
3	Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam	Persen	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA PER TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
	membuka usaha							
S	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							
1	Rasio wirausaha pemuda	Persen	30,86	35,77	36,75	37,55	38,9	39,55
2	Persentase atlet yang masuk pelatnas	Persen	2,74	5,2	7,5	8,5	10	12,5
3	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kepramukaan	Persen	22,35	35,5	40,77	41,5	42,55	45,5
T	STATISTIK							
1	Indeks pembangunan statistik (IPS)	Angka	1,89	2,9	3	3,2	3,5	3,7
U	KEBUDAYAAN							
1	Tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan	Persen	63,65	65,5	69,5	72,5	75,5	80,5
2	Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan	Persen	64,27	65,5	70,2	73,5	77,23	82,95
3	Tingkat partisipasi masyarakat terhadap tinjauan sejarah lokal	Persen	59,35	60,5	62,73	65,9	67,5	68,95
4	Persentase warisan	Persen	32,19	35,6	36,7	39,48	40,21	45

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA PER TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
	budaya yang dilestarikan							
5	Persentase cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang ditetapkan	Persen	55,12	60	62	64	65	67
V	PERPUSTAKAAN							
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Persen	11,46	12,5	13,5	14,5	15,5	16,5
2	Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dimiliki	Persen	2,1	2,5	3,5	3,5	4,5	5
W	KEARSIPAN							
1	Tingkat Pengelolaan Arsip secara Digital	Persen	25,17	32,79	38,95	41,28	55,79	68,97
2	Perangkat Daerah mengelola Arsip Secara Baku	Persen	100	100	100	100	100	100
X	PARIWISATA							
1	Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	Persen	13,79	20,5	21,22	24,57	26,87	30,5
2	Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata	Persen	30,67	35,6	50,5	75,5	80,75	90,42
3	Persentase pelaku ekonomi	Persen	0,95	1,2	1,7	1,9	2,1	2,5

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA PER TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
	kreatif yang memiliki kekayaan intelektual							
4	Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi	Persen	45,67	57,84	59,65	62,9	63,21	65,77
Y	PERTANIAN							
1	Peningkatan produksi tanaman pangan	Ton	27022	29500	30100	32500	33500	35500
2	Peningkatan produksi hortikultura	Ton	6847,82	7100	7500	7900	8000	8500
3	Peningkatan produksi komoditas peternakan	Ton	452,1	500	550	570	600	650
4	Cakupan luas lahan pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B (Kilometer persegi))	Km2	7,45	12	15	19	25	35
5	Tingkat pengendalian penyakit hewan menular strategis (PHMS)	Persen	12,55	15,5	22,67	25,87	27,13	30,5
6	Persentase unit usaha pangan asal	Persen	1,78	2	3,5	4,5	6,5	7,5

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA PER TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
	hewan yang memiliki sertifikat pra NKF atau NKV (non control veteriner)							
7	Persentase SDM penyuluh pertanian yang ditingkatkan	Persen	100	100	100	100	100	100
8	Persentase kelembagaan koperasi tani yang dibentuk dan beroperasi	Persen	5,55	15,21	15,88	16,74	17,2	18,9
Z	PERDAGANGAN							
1	Persentase izin usaha perdagangan yang difasilitasi	Persen	97,88	100	100	100	100	100
2	Persentase ketersediaan sarana perdagangan dan arus distribusi barang	Persen	55,12	69,79	70,72	73,45	80,99	85,12
3	Persentase stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persen	90,55	95,5	96,7	97,8	98,5	99
4	Persentase penanganan pengaduan konsumen	Persen	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA PER TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
AA	PERINDUSTRIAN							
1	Jumlah sentra Industri	Jumlah	45	65	75	95	120	135
2	Kontribusi lapangan usaha industri terhadap PDRB	Persen	5,62	5,71	5,85	5,95	5,97	6,2
AB	PERIKANAN							
1	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Angka	111,05	112,05	113,12	113,68	114,29	114,59
2	Jumlah produksi perikanan tangkap	Ton	60.001,26	65700	67500	69500	70000	72000
3	Jumlah produksi perikanan budidaya	Ton	20,896	35500	45500	55000	65000	70000
4	Angka konsumsi ikan	Angka	71,29	78,9	79,12	79,33	79,45	80,01
AC	SEKTERTARIAT DAERAH							
1	Efektivitas kerja sama daerah	Persen	81,22	85,13	86,77	88,89	90,45	93,12
2	Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Angka	2,6996	2,7221	2,7889	2,9256	2,9778	3,1178
3	Efektivitas pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	Persen	85,78	88,76	88,97	89,12	89,45	89,97
4	Efektivitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan perekonomian	Persen	75,64	76,74	76,99	78,73	78,99	79,69

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA PER TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
	dan pembangunan							
AD	SEKTERTARIAT DPRD							
1	Tersedia Rencana Kerja Tahunan pada Setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD	Persen						
2	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Persen						
3	Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti DPRD	Persen						
AE	PERENCANAAN							
1	Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD	Persen	100	100	100	100	100	100
2	Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	Persen	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA PER TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
3	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persen	100	100	100	100	100	100
4	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persen	100	100	100	100	100	100
5	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada bidang perekonomian dan SDA	Persen	100	100	100	100	100	100
AF	KEUANGAN DAERAH							
1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Penetapan APBD	Tepat Waktu/ Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
3	Konsistensi penjabaran KUA-PPAS ke dalam APBD	Persen	100	100	100	100	100	100
4	Persentase belanja pegawai di	Persen	35,63	35,92	36,24	36,79	37,12	37,89

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA PER TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
	luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD							
5	Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	Persen	38,12	40,12	40,22	40,15	40,17	40,18
6	Persentase penambahan nilai aset tetap	Persen	3,47	5,6	6,7	6,9	7,3	8,9
7	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	Persen	2,64	2,99	3,12	3,27	3,39	4,2
8	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	Persen	35,22	37,88	39,4	42,79	52,99	58,17
9	Persentase penerapan system informasi keuangan berbasis digital	Persen	56,83	77,13	79,83	80,45	81,79	82,46
AG	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							
1	Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi	Persen	65,76	69,12	70,34	70,67	71,78	72,98
2	Persentase ASN yang ditingkatkan	Persen	6,57	10,77	10,98	11,65	12,78	13,56

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA PER TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
	kompetensinya							
3	Persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya	Persen	55,76	56,12	57,19	65,7	70,95	80,56
4	Persentase pegawai dengan SKP bernilai baik	Persen	90,12	92,78	93,49	94,77	95,39	96,45
AH	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							
1	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, manajerial dan fungsional	Persen	7,55	9,45	10,37	12,99	15,67	16,45
2	Persentase realisasi pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan	Persen	100	100	100	100	100	100
3	Persentase ASN yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	3,57	5,7	5,9	6,12	6,88	7,3
4	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis	Persen	20,19	23,77	24,96	25,37	26,69	27,41
AI	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							
1	Persentase rekomendasi	Persen	45,56	46,78	49,88	53,67	59,18	62,44

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA PER TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
	kebijakan pembangunan daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implemenrasi pembangunan							
2	Persentase kajian berbasis bukti dalam pengembangan potensi unggulan yang termanfaatkan dalam kebijakan pembangunan daerah	Persen	53,25	57,21	59,78	60,49	62,18	63,92
3	Persentase kajian berbasis bukti dalam penyelesaian permasalahan daerah yang termanfaatkan dalam kebijakan pembangunan daerah	Persen	10,75	12,98	13,44	14,71	15,63	16,93
4	Persentase fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait penelitian,	Persen	20,75	22,88	23,48	24,59	25,58	26,77

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA PER TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
	pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah							
AJ	PENGAWASAN							
1	Tindaklanjut rekomendasi BPK tahun anggaran N-1	Level	85,65	89,77	89,91	90,18	91,35	92,55
2	Maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Level	2,15	2,77	2,89	3	3,11	3,21
3	Kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah (APIP)	Persen	85,67	87,65	88,92	89,01	89,35	89,65
AK	KEWILAYAHAN							
1	Indeks Kepuasan Masyarakat urusan kewilayahan (survei)	Persen	85,12	85,99	87,39	88,9	89,5	89,65
2	Persentasi lembaga pemberdayaan masyarakat desa aktif	Persen	43,22	45,67	49,45	65,77	69,65	79,45
3	Persentase konflik sosial yang diselesaikan	Persen	100	100	100	100	100	100
4	Persentase ketenteraman	Persen	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA PER TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
	dan ketertiban umum yang dikoordinasikan							
5	Persentase desa tertib administrasi pemerintahan desa	Persen	87,89	88,95	89,85	90,56	92,55	100
AL	PEMERINTAHAN UMUM							
1	Cakupan penguatan ideology Pancasila dan karakter kebangsaan	Persen	75,44	78,92	79,17	80,34	81,73	82,99
2	Persentase pendidikan politik pada kader partai politik	Persen	31,75	34,12	36,88	38,92	40,35	49,83
3	Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	Persen	75,25	77,12	79,45	82,93	85,38	87,39
4	Persentase konflik sosial yang diselesaikan	Persen	100	100	100	100	100	100

BAB V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan Substansial

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seram Bagian Barat 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan strategis yang berfungsi sebagai acuan arah pembangunan lima tahunan. Dengan mengacu pada visi "*SBB Maju, Harmonis, dan Berkelanjutan Berbasis Agro-Marine*", seluruh strategi, program, dan kebijakan pembangunan telah dirumuskan untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.

Pembangunan daerah diarahkan pada penguatan nilai-nilai budaya lokal, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan infrastruktur, dan pemanfaatan potensi unggulan daerah terutama di sektor perikanan dan kelautan, pertanian, perkebunan, kehutanan, pariwisata dan industri pengolahan. Keseluruhan substansi RPJMD menjadi dasar pijakan dalam merancang pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan RPJMD harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan, dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), partisipatif, transparan, dan akuntabel. Pelaksanaan setiap program dan kegiatan harus dilakukan sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan dan diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran strategis daerah.

Kaidah pelaksanaan pembangunan daerah mengacu pada keterpaduan antar sektor, antar wilayah, dan sinkronisasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat maupun pemerintah desa. Selain itu, pendekatan pembangunan juga harus responsif terhadap dinamika dan tantangan eksternal, termasuk perubahan iklim, kondisi geopolitik, dan perkembangan teknologi.

5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD dilakukan secara berkala melalui sistem monitoring dan evaluasi pembangunan daerah. Evaluasi dilakukan dalam bentuk Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD), Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), serta evaluasi internal oleh Inspektorat Daerah dan evaluasi eksternal oleh instansi vertikal dan lembaga legislatif.

Pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan tetap berada pada jalur perencanaan, sedangkan evaluasi dimaksudkan untuk menilai efektivitas, efisiensi, serta dampak dari kebijakan dan program yang dilaksanakan. Hasil evaluasi dijadikan dasar perbaikan kebijakan dan penyesuaian strategi di tahun-tahun berikutnya.

5.4 Penutup

Dokumen RPJMD ini diharapkan menjadi panduan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam merencanakan, melaksanakan, serta mengawasi proses pembangunan di Kabupaten Seram Bagian Barat. Dengan komitmen yang kuat, sinergi antar pemangku kepentingan, serta keterlibatan aktif masyarakat, maka visi "*SBB Maju, Harmonis, dan Berkelanjutan Berbasis Agro-Marine*" dapat diwujudkan secara bertahap dan berkesinambungan demi kesejahteraan seluruh masyarakat di daerah ini.